KLIPING MEDIA
tentang
KASUS PENCULIKAN

Kontras
1998

Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Saksi Tanyakan Kaitan Terdakwa dengan Prabowo

akarta, Kompas

Sidang kasus penculikan sembilan aktivis dengan terdakwa 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) Jakarta, Selasa (12/1), kembali diwarnai penolakan saksi untuk memberikan keterangan. Saksi Desmond J Mahesa sebenarnya menyatakan bersedia diperiksa, namun harus ada penjelasan dulu tentang kaitan sebelas terdakwa tersebut dengan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

"Saya bersedia bersaksi. Tetapi saya tidak mengenal seorang pun di antara terdakwa. Padahal, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyebut keterlibatan Prabowo, Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan dalam perkara penculikan yang menimpa saya serta teman-teman lain. Saya ingin tahu hubungan mereka (terdakwa) dengan Prabowo dkk," ujar Desmond.

Majelis yang dipimpin Kolonel (CHK) Susanto menilai, Desmond tidak bersedia memberikan keterangan. Tetapi penilaian itu disangkal Desmond. Ia berkata, "Saya bersedia memberikan kesaksian. Namun saya tak yakin terdakwa ini melakukan penculikan tersebut. Bagaimana saya dapat memberikan kesaksian."

Oditur Militer Kolonel (CHK) Harom Wijaya mengajukan sebelas anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar sebagai terdakwa. Tim itu diketuai Mayor (Inf) Bambang Kristiono dituduh menculik sejumlah aktivis politik.

Aan menolak

Ketua majelis hakim maupun Oditur Militer mencoba meyakinkan bahwa keterangan saksi diperlukan untuk menjawab apakah ke-11 terdakwa itu memang benar-benar menculik atau tidak. Tanpa ada keterangan saksi, dakwaan penculikan tidak dapat dibuktikan.

"Saya belum yakin, apakah mereka (terdakwa) yang menculik saya. Kalau saya tetap bersaksi dan disumpah, saya mesti menyebutkan nama-nama terdakwa. Padahal, saya tidak yakin mereka yang menculik saya, karena belum pernah bertemu. Apakah saya bisa menanyakan, mereka itu yang menculik saya," papar Desmond lagi.

Desmond mengatakan pula, sampai saat ini masih prihatin, karena tiga orang yang dikenalnya—Sonny, Herman Hendrawan, dan Yani Afri yang menjadi korban penculikan pun belum diketemukan. Ia menuntut

Sari Dokumentasi (INDOK)

DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Miskin Kota	

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:

Subyek:	Sumber: [illegible]	Tanggal: 17/6 98

Saksi — —

(Sambungan dari halaman 1)

agar nasib 13 korban penculikan yang hilang dijelaskan. "Apakah terdakwa itu bukan pelaku penculikan yang dibawa ke Polda. Sebab ada korban penculikan, seperti Aan Rusdianto, Nezar Patria, dan Mugiyanto yang dibawa ke Polda," paparnya lagi.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan tidak mendengarkan kesaksian Desmond. "Silakan saksi pikir-pikir. Kalau nanti ingin memberikan keterangan, silakan menghubungi Oditur," papar Susanto.

Selain Desmond, korban penculikan lainnya Aan Rusdianto pun tak bersedia memberikan keterangan. Sikap penolakan itu sebagai ungkapan solidaritas dan keprihatinan terhadap persoalan di Aceh, yang adalah korban militerisme pula.

Mobil dibeli

— Sementara Wakil Sekjen PDI Perjuangan Haryanto Taslam bersedia memberikan kesaksian. "Saya tidak mengenal terdakwa. Karena itu, apa yang saya sampaikan di persidangan ini cuma menyangkut apa yang saya alami, dan tidak terkait dengan terdakwa," tandasnya. Pernyataan itu diterima majelis hakim, walau saat bersumpah sebagai saksi, Haryanto tetap menyebut nama terdakwa.

Menurut Haryanto, penculikan yang menimpanya terjadi 8 Maret 1998, sekitar pukul 19.00 WIB. Mobil sedan yang dikendarainya ditabrak dari belakang oleh mobil Toyota Kijang warna gelap di dekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pengendara mobil Kijang tersebut menawari ke bengkel. Tetapi karena kerusakan mobilnya tidak terlalu parah, Haryanto menolak. Saat itu dua penumpang mobil Toyota Kijang memaksanya masuk ke dalam mobil penabrak tersebut.

Di dalam mobil, Haryanto mengaku dibogol dan ditutup matanya dengan kain hitam. "Selama dalam mobil, saya tidak disiksa. Bahkan, saat saya bilang kesakitan, sebab bogolnya sempit, mereka bersedia melepas dan memindahkan bogol itu di depan. Saat saya mengeluh tak bisa bernapas, sebab kain hitam penutup mata menutup hidung, mereka pun memperbaiki penutup tersebut," jelasnya.

Selama dibawa dan dimasukkan ke dalam sel di suatu tempat yang tidak diketahuinya, Haryanto mengaku sangat tertekan. Ia tak ingat lagi mobil yang dikendarainya saat diculik. Tetapi oleh pelaku mobil itu akhirnya dibeli seharga Rp 7 juta, karena di bawah tangan, dan tanpa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun waktu dirinya akan dilepaskan, uang pembelian mobil itu ditambah menjadi Rp 16 juta.

Selama disekap sampai tanggal 14 April 1998 — sekitar 40 hari Haryanto mengemukakan, tidak diperlakukan kasar oleh penculiknya. Bahkan, ia cuma dua kali ditanyai mengenai aktivitas politiknya dan diminta membuat semacam laporan tentang aktivitasnya tersebut. Saat disekap, selain diberi pakaian, ia pun mengaku diberikan makan yang cukup tiga kali sehari.

Walaupun berbicara dengan penculiknya, Haryanto menyatakan, tak mengenal suara mereka. "Apakah, ada suara yang saksi kenal, misalnya suara Jenderal Prabowo?" tanya Oditur. Saksi menjawab, "Saya tidak mengetahuinya. Apalagi, saya tidak mengenal suara Prabowo."

Berkomunikasi

Di sel, Haryanto mengakui sempat berkomunikasi dengan korban penculikan yang lain, seperti Desmond, Pius, Andi Arief, Rahardjo Waluyojati, dan Faisol Reza. Mereka tak sempat bertemu langsung. Percakapan antarkorban itu dilakukan subuh, pukul 02.00 WIB, setelah siaran radio yang memenuhi ruangan sel habis, dan mereka hanya saling berbicara dari selnya masing-masing.

Haryanto menuturkan, ia dilepaskan di Bandung, 14 April 1998. "Saya sudah dibekali tiket ke Surabaya maupun uang Rp 4 juta. Saya diminta tidak segera pulang dan bersantai dulu. Namun saya tak bisa mengingat siapa pelaku penculikan itu," paparnya.

Setelah "di alam bebas", Haryanto mengutarakan, sempat dihubungi pelaku penculikan itu melalui telepon. Dalam menghubunginya, pelaku tak menyebutkan jati dirinya, kecuali menyebut inisialnya "BM". "Saya tidak tahu siapa "BM" itu. Tetapi mereka menyebutnya sebagai "Burung Malam". Sampai sekarang saya tidak pernah dihubungi lagi," katanya. (tra)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Munir (Koordinator Kontras):

Mencari 13 Korban Penculikan

"SAYA akan berjuang terus. Paling tidak, 13 orang korban penculikan yang sampai kini belum jelas nasibnya, bisa kembali ke keluarganya. Atau setidaknya ada kejelasan dari pemerintah dan ABRI mengenai kondisi mereka," kata Munir, Koordinator Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menjelaskan tentang agenda politiknya di tahun 1999 ini.

Menurutnya, selama ini pemerintah maupun pihak ABRI sepertinya menutup mata terhadap ke-13 korban penculikan tersebut. "ABRI hanya mengakui 9 korban penculikan yang sudah ditemukan. Lalu bagaimana dengan yang 13 orang ini dimana tanggung jawab pemerintah terhadap mereka ini. Untuk itu pihak Kontras akan terus mendesak agar pemerintah terhadap dan ABRI menjelaskan keberadaan mereka saat ini," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, pihak Kontras juga menanti kejujuran dari pemerintah dan ABRI dalam proses pengadilan kasus penculikan para aktivis yang saat ini sedang berjalan dan sudah memasuki persidangan lanjutan kedua.

"Sebenarnya saya pribadi sudah putus harapan terhadap persidangan kasus penculikan ini. Saya lihat ini hanya persidangan dagelan saja. Banyak hal yang seharusnya diajukan sebagai dakwaan oleh Oditur Militer tetapi tidak dilakukan, seperti tindakan penyiksaan oleh para penculik terhadap para aktivis ketika mereka ditangkap," papanya.

Menurut Munir, kalau pemerintah tidak jujur terhadap peradilan tersebut maka akan semakin membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun ABRI.

"Itu akan jadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Masyarakat akan main hakim sendiri kalau sudah begitu kondisi *chaos* sudah tidak bisa dihindari lagi sehingga menimbulkan kerusuhan sosial yang semakin besar," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Kontras berusaha sebisa mungkin memperkecil tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh negara atau pihak-pihak lain yang 'bermain' di dalam situasi 'kacau' saat ini.

"Hal itu tidak hanya kasus penculikan aktivis tetapi juga kasus-kasus lain seperti kasus Semanggi yang sampai saat ini sepertinya dilupakan saja. Padahal sudah jelas kasus tersebut memakan korban 15 orang baik dari mahasiswa maupun warga masyarakat," katanya.

Munir mengambil contoh kasus-kasus lain yang menjadi perhatian Kontras untuk diselesaikan, seperti kasus Aceh, Ketapang, Kupang, Dukun Santet Banyuwangi, Trisakti dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya.(WR)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145518,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: M. I | Tanggal: 8/, 97

Pengadilan Kopassus Terus Dilanjutkan

JAKARTA (Media): Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) ABRI Mayjen TNI Timor P Manurung mengatakan, tidak ada kekuatan apa pun, termasuk presiden yang bisa menghentikan proses pengadilan terhadap sebelas anggota Kopassus, karena berkas perkaranya sudah diajukan ke Mahmilti untuk segera disidangkan.

"Berkas perkaranya sudah disampaikan ke pengadilan dan perintah UU adalah kasus itu segera disidangkan. Oleh karenanya, tidak ada di Republik ini yang bisa menghentikan proses peradilan itu, kecuali jika sudah ada keputusan pengadilannya," kata Manurung menanggapi pertanyaan wartawan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan, sebelum mengeluarkan pernyataan, sebaiknya dikaji dulu peraturannya agar tidak berkembang pendapat yang simpang siur. Komnas HAM dalam evaluasi akhir tahunnya menyarankan pengadilan militer terhadap 11 anggota Kopassus, yang diduga terlibat penculikan, dibatalkan, karena proses pengadilan itu dinilai tidak adil.

Jika proses tetap diteruskan, pengadilan itu hanya menyelesaikan sebagin kecil dari seluruh persoalan keterlibatan unsur ABRI dalam kasus penculikan, kata Sekjen Komnas HAM Clementino Dos Reis Amaral.

Saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan pengadilan itu dibatalkan demi tuntutan hukum dan keadilan, ia mengatakan bahwa proses pengadilan tetap diteruskan, kecuali ada keputusan pengadilan untuk menghentikannya.

Ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto juga diajukan ke pengadilan militer, ia mengatakan bahwa pihaknya hanya menerima 11 berkas perkara dari penyidik (Puspom ABRI) untuk segera disidangkan.

"Kalau ada berkas lain diajukan tentu segera disidangkan, namun sampai saat ini, hanya sebelas berkas perkara yang diterima," katanya.

Ketika ditanyakan tentang ada-tidaknya nama Prabowo Subianto dicantumkan sebagai saksi dalam pengadilan militer itu, ia mengatakan bahwa tidak ada nama Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk dijadikan saksi dalam persidangan itu.

Seperti diberitakan, peradilan terhadap 11 anggota Kopassus yang tergabung dalam 'Tim Mawar' ini akan dilanjutkan tanggal 9 Januari untuk mendengarkan kepusan sela dari Majelis Hakim Mahmil, apakah proses persidangan itu dilanjutkan atau tidak.

Pengadilan terhadap 'Tim Mawar' ini menjadi perhatian publik, karena hal tersebut merupakan fenomena baru bahwa aparat keamanan bisa saja diadili jika ternyata melakukan pelanggaran hukum. "Kita sangat senang sekali dengan perkembangan ini," ujar Mukidjan, seorang warga dari Kebayoran Lama. (Wdh/P-3)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: [illegible] | Tanggal: 21.7.92

▲ Mahmilti Hadirkan Desmon dan Haryanto Hari Ini

Korban Penculikan Berharap Penculiknya Dibebaskan

Jakarta, Sebsa, Merdeka

Setelah dua saksi korban penculikan Pius Lustrilanang dan Andi Arief menolak menjadi saksi dalam persidangan lanjutan ketiga kasus penculikan aktivis pro-demokrasi Jumat pekan lalu, bagaimana dengan saksi korban lain?

Rencananya hari ini selain Pius dan Andi Arief yang dipanggil kedua kalinya untuk bersaksi di hadapan persidangan, saksi korban lain Desmon J Mahesa dan Haryanto Taslam akan mendapat giliran dipanggil Oditur Militer sebagai bersaksi di Mahkamah Militer Tinggi II (Mahmilti II), Jakarta.

Ketika dihubungi *Merdeka* tadi malam, kedunya menyatakan akan hadir. Tindakan tersebut bagi mereka merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

"Nanti dipersidangan sebelum bersumpah saya akan bertanya, kesaksian saya ini untuk siapa? Apakah untuk ke-11 orang terdakwa itu? Kalau iya, buat apa saya bersaksi karena saya tak kenal mereka sebagai penculik saya," aku Desmon.

Diakui dia, dari ke-11 terdakwa pelaku penculikan tak ada satupun yang dikenali dan diyakininya sebagai pelaku penculikan atas dirinya.

Karena ketika terjadi penculikan dia tak bisa mengenali salah satu pelaku, pada saat itu kacamata minus 5 dan silinder 1,600 yang dikenakannya jatuh dan pecah sehingga sama sekali dirinya tak bisa melihat siapa yang melakukan penculikan terhadap dirinya.

"Apa betul mereka yang menculik saya? Saya tak yakin. Kalau saya yakin tentu saya akan bersaksi. Dan yang penting, kalau benar mereka yang menculik mereka harus menjelaskan paling tidak 3 dari 13 orang korban penculikan lainnya yaitu Yani Afri, Suyat dan Herman Hendrawan yang berada dalam satu paket penculikan dengan saya. Hal ini yang harus dijelaskan mereka sebelum saya bersaksi," kata aktivis Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) ini.

Menurut dia, tindakan tersebut sudah menjadi sikapnya sejak semula ketika dia memutuskan memberikan kesaksian di LBH beberapa waktu lalu.

"Sejak mula sikap saya memutuskan untuk menyampaikan *testimony* sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu saya juga punya kewajiban untuk mengetahui nasib tiga dari 13 orang korban penculikan yang belum jelas nasibnya. Dan sebagai anak bangsa saya tak ingin kasus penculikan ini berlanjut dan ini yang terakhir," tegasnya.

Desmon mengaku sangat berharap jika ke-11 terdakwa tersebut dibebaskan dari hukuman. Karena kalau mereka dihukum akan menambah beban baru, khususnya bagi keluarga mereka. Sebagai orang yang pernah diculik, dia tahu bagaimana rasanya keluarga yang ditinggal dalam suasana ketidakpastian.

"Saya yakin mereka ini hanya dikorbankan. Bagaimana mungkin seorang mayor memiliki dana sekian besar untuk membelikan tiket pesawat dan mengganti kacamata saya seharga Rp 800 ribu. Dan kalau saya bersaksi untuk mereka, besok (hari ini-*red*) saya takut berdosa, karena terdakwa ini hanya orang-orang bayaran yang disuruh mengaku untuk menutup-nutupi pelaku sesungguhnya," katanya.

Oleh karena itu, dia menuntut jika persidangan ini memang dilakukan dengan itikad baik seharusnya para petinggi ABRI seperti bekas Pangab Feisal Tanjung turut diajukan sebagai saksi.

"Kalau Prabowo, Muchdi dan Chairawan sudah jelas seharusnya mereka diajukan sebagai saksi berdasarkan proses DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang menyatakan pengakuannya melculik 9 aktivis. Tapi kelihatannya hal itu tak dilakukan," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Haryanto Taslam. Menurut dia, sebagai seorang warga negara yang baik, dia berkewajiban menjadi saksi dalam persidangan itu.

"Kalau tak menjadi saksi berarti saya bukan warga negara yang baik. Tetapi lain lagi nantinya kalau saya punya tuntutan dan harapan atas persidangan tersebut, karena itu hak saya," katanya.

Tetapi ketika ditanya apa tuntutan dan harapannya dalam persidangan tersebut, dia menolak menjawabnya. "Ya nanti anda lihat sendiri di persidangan bagaiman akting saya. Kalau anda bertanya apakah saya mengenal para terdakwa saya jawab tidak," lanjutnya.(WR)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: [illegible] Fax: [illegible] Telex: [illegible]
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
| Subyek: | Sumber: M/ | Tanggal: 12/2 99 |

Oknum Kopassus Akui Menculik

12 Aktivis 'Dijemput' Tim Mawa

JAKARTA (Media): Tim Mawar beranggotakan 11 orang Kopassus, dalam sidang lanjutan kasus penculikan, mengaku telah "menjemput" 12 aktivis untuk diinterogasi di Posko Cijantung.

Terdakwa XI, Sertu Sukadi, diperiksa pertama kali dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang ke-11 di Mahmilti II Jakarta, kemarin. "Saya terlibat dalam penjemputan Haryanto Taslam, Mugiyanto, dan Feisol Reza," katanya.

Sukadi mengatakan, pada tanggal 8 Maret 1998, dia bersama-sama terdakwa II (Kapten Inf Multhazar) serta rekan-rekan lainnya yaitu,terdakwa III (Kapten Inf Nugroho SB), terdakwa IV (Kapten Inf Yulius Selvanus) terdakwa V (Kapten Inf Untung Budi H), dan terdakwa VIII (Kapten Inf Fauka NF), menjemput Haryanto Taslam di rumahnya di Pondok Gede, Jakarta Timur.

"Pukul 17.00 WIB, saya bersama terdakwa III, IV, dan V, berangkat dengan menggunakan kendaraan kijang cokelat, sedangkan terdakwa II dan VIII menggunakan Kijang biru," jelasnya.

Dia mengatakan, karena berpapasan di jalan, mereka berbalik arah untuk mengikuti kendaraan sedan biru milik Haryanto Taslam, hingga sampai di sekitar Taman Mini kendaraan yang dikemudikan terdakwa III menyenggol mobil Haryanto Taslam.

"Setelah berhenti dan terdakwa III bercakap-cakap sebentar dengan Haryanto Taslam, dia diajak masuk ke mobil yang kami naiki, kemudian matanya ditutup dan tangannya diborgol. Setelah itu kami kembali ke Posko," ujarnya.

Pada "penjemputan" Feisol Reza, Sukadi mengaku bersama-sama terdakwa V dan VI (Kapten Inf Dadang Hendra Yudha) pada tanggal 12 Maret 1998 berangkat ke YLBHI tempat Reza mengadakan kepintan, dengan mengendarai mobil Katana biru.

Dia mengatakan, karena Feisol Reza terlihat keluar dari YLBHI bersama temannya ke arah RSCM, maka mereka mengikutinya, lalu menangkapnya di tempat itu kemudian dibawa ke Posko. "Pada waktu itu dia tidak diborgol dan tidak ditutup matanya, hanya saya tidurkan di pangkuan saya sambil ditutupi dengan jaket miliknya." katanya.

Sementara dalam pengambilan Mugiyanto pada 13 Maret 1998 di Kodim Jakarta Timur, dia mengaku diajak oleh terdakwa II untuk menjemput terdakwa VII (Kapten Inf Djaka Budi Utama) yang ditangkap oleh seorang anggota Komando Daerah Sawit di Rumah Susun (Rusun) Klender.

"Sesampai di Kodim, ternyata terdakwa VII bersama-sama satu orang lagi masuk ke dalam mobil yang mengaku bernama Mugiyanto," jelasnya.

Dibawa ke posko

Dalam keterangannya di hadapan Hakim Ketua, Kol CHK Susanto dan Penasihat Hukum yang diketuai oleh Kol CHK R Abdullah itu, Sukadi mengatakan ketiga orang yang dijemputnya tersebut seluruhnya dibawa ke posko di Cijantung untuk diinterogasi.

Dia mengatakan, mereka ditempatkan di dua gudang di posko tersebut yang masing-masing memiliki dua dan tiga kamar terpisah, termasuk juga korban lain yang dibawa oleh anggota tim yang terdiri dari 10 orang – termasuk dirinya— yang dipimpin oleh terdakwa I, Mayor Inf Bambang Kristiyono tersebut.

Dia juga mengatakan selain tiga orang tersebut, tim yang terdiri sebelas orang yang dinamai Tim Mawar itu telah melakukan pengambilan sembilan orang aktivis yang diduga membahayakan negara.

Terdakwa yang diajukan berikutnya adalah terdakwa X, Serka Sigit Sugianto, yang mengaku turut melakukan penjemputan Pius Lustrilanang, Raharjo Waluyo Djati, serta Nezar Patria, dan Aan Rusdianto.

Penjemputan Pius dilakukan di RSCM pada pertengahan Maret 1998, sedangkan Waluyo Djati yang juga ditangkap di RSCM serta Nezar dan Aan di Rusun Klender, masing-masing pada 12 Maret dan 13 Maret 1998.

Sigit mengatakan, Pius berada di posko tersebut selama sekitar dua bulan, Waluyo Djati satu bulan, sedang Aan dan Nezar serta Mugianto hanya dua hari kemudian dikembalikan ke Kodim Jakarta Timur.

Sedang terdakwa IX, Serka Sunaryo, mengaku telah menjemput Raharjo Waluyo Djati, Aan Rusdianto, Nezar Patria, dan Andi Arief.

Para terdakwa mengatakan, selama korban ditempatkan di Posko Cijantung, mereka tidak pernah melihat korban disiksa. (Ant/P-2)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Telp. 3145512, 3901226, 3912713 Fax. 390180
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: SURYA | Tanggal: 12/2 98

Tim Mawar akui culik Hartas

Jakarta, Surya

Terdakwa XI, Serka Sukadi, yang diperiksa pertama kali dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang ke 11 kasus penculikan mengaku bertugas 'menjemput' Haryanto Taslam, Feisol Reza, dan Mugiyanto.

"Saya terlibat dalam penjemputan Haryanto Taslam, Mugiyanto, dan Feisol Reza," katanya di hadapan majelis hakim yang memeriksanya di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta, Kamis (11/2).

Dalam keterangannya, Sukadi mengatakan, pada tanggal 8 Maret 1998, dia bersama-sama terdakwa II (Kapten Inf Multhazar) serta rekan-rekan lainnya yaitu terdakwa III (Kapten Inf Nugroho SH), terdakwa IV (Kapten Inf Yulius Selvanus) terdakwa V (Kapten Inf Untung Budi H), dan terdakwa VIII (Kapten Inf Fauka NF), menjemput Haryanto Taslam (Hartas) di rumahnya di Pondok Gede, Jakarta Timur.

"Pukul 17.00 wib, saya bersama terdakwa III, IV, dan V, berangkat dengan menggunakan kendaraan hijang coklat, sedangkan terdakwa II dan VIII menggunakan hijang biru," jelasnya.

Dia mengatakan, karena berpapasan di jalan, mereka berbalik arah untuk mengikuti kendaraan hijang biru milik Haryanto Taslam hingga sampai di sekitar Taman Mini kendaraan yang dikemudikan terdakwa III menabrak mobil Hartas.

"Setelah berhenti dan terdakwa III bercakap-cakap sebentar dengan Haryanto Taslam, dia diajak masuk ke mobil yang kami naiki, kemudian matanya ditutup dan tangannya diborgol. Setelah itu kami kembali ke Posko," ujarnya.

Pada 'penjemputan' Feisol Reza, Sukadi mengaku bersama-sama terdakwa V dan VI (Kapten Inf Dadang Hendra Yudha) pada tanggal 12 Maret 1998 berangkat ke YLBHI tempat Reza mengadakan kegiatan, dengan mengendarai mobil Katana biru.

Dia mengatakan, karena Feisol Reza terlihat keluar dari YLBHI bersama temannya ke arah RSCM, maka mereka mengikutinya, lalu menangkapnya di tempat itu kemudian dibawa ke Posko.

"Pada waktu itu dia tidak diborgol dan tidak ditutup matanya, hanya saya letakkan di pangkuan saya sambil ditutupi dengan jaket miliknya," ujar anggota Kopassus tersebut menjawab Oditur Militer yang dikotuni Kol CHK Hasan Widjaya.

Sementara dalam pengambilan Mugiyanto pada 13 Maret 1998 di Kodim Jakarta Timur, dia mengaku diajak oleh terdakwa II untuk menjemput terdakwa VII (Kapten Inf Djaka Budi Utama) yang ditangkap oleh seorang anggota Kerasul Duren Sawit di Rumah Susun (Rusun) Klender.

"Sesampai di Kodim, ternyata terdakwa VII bersama-sama satu orang lagi masuk ke dalam mobil yang mengaku bernama Mugiyanto," jelasnya.

Dua Gudang

Dalam keterangannya di hadapan Hakim Ketua, Kol CHK Sosanto dan Penasihat Hukum yang dikotuni oleh Kol CHK R Abdullah itu, Sukadi mengatakan ketiga orang yang dijemputnya tersebut seluruhnya dibawa ke Posko di Cijantung untuk diinterogasi.

Dia mengatakan, mereka di tempatkan di dua gudang di Posko tersebut yang masing-masing memiliki dua dan tiga kamar terpisah, termasuk juga korban lain yang dibawa oleh anggota tim yang terdiri dari 10 orang —termasuk dirinya— yang dipimpin oleh terdakwa I, Mayor Inf Bambang Kristiyono.

Dia juga mengatakan selain tiga orang tersebut, tim yang terdiri sebelas orang yang dinamai Tim Mawar itu telah melakukan penculikan sembilan orang aktivis yang diduga membahayakan negara.

Terdakwa yang diajukan berikutnya adalah terdakwa X, Serka Sigit Sugianto, yang mengaku turut melakukan penjemputan Pius Lustrilanang, Raharjo Waluyo Djati, serta Nezar Patria dan Aan Rudianto.

Penjemputan Pius dilakukan di RSCM pada pertengahan Maret 1998, selangkan Waluyo Djati yang juga ditangkap di RSCM serta Nezar dan Aan di Rumah Klender, masing-masing pada 12 Maret dan 13 Maret 1998.

Sigit mengatakan, Pius berada di Posko tersebut selama sekitar dua bulan, Waluyo Djati satu bulan, sedang Aan dan Nezar serta Mugianto hanya dua hari kemudian di kembalikan ke Kodim Jakarta Timur.

Dalam persidangan tersebut hakim sempat mempersalahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya yang menyebutkan bahwa ia ikut menculik Andi Arief namun dalam sidang tersebut dibantahnya.

Dia mengatakan bahwa pengakuannya dalam BAP di Puspom ABRI tersebut adalah untuk memperlancar pemeriksaan saja.

Sedang terdakwa IX, Serka Sunaryo, yang juga dimintai keterangannya mengaku telah menjemput Raharjo Waluyo Djati, Aan Rudianto, Nezar Patria dan Andi Arief. Dalam keterangannya dia mengatakan terdakwa X tidak ikut menculik Andi Arief.

Para terdakwa tersebut menyatakan bahwa selama korban di tempatkan di Posko Cijantung, mereka tidak pernah melihat korban diiksa seperti pengakuan beberapa korban.

Sidang pemeriksaan tiga terdakwa yang sempat dihentikan selama satu jam untuk melaksanakan salat Dhuhur itu sekitar pukul 16.15 wib, dan akan dilanjutkan pada hari selasa (16/2) dengan pemeriksaan terdakwa lainnya. (ant)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 17/2 '991

TIM *

diajak begitu saja oleh orang yang tidak dikenalnya, dan juga tidak bertanya mengapa dirinya harus diborgol dan ditutup mata. Sementara terdakwa mengatakan korban yang "dijemputnya" tidak mempertanyakan ke mana mereka akan dibawa, juga tidak mempertanyakan kenapa mata mereka ditutup selama dalam perjalanan.

"Bapak mungkin berpendapat seperti itu, kenyataannya dia mau saja saya ajak. Saya melakukannya dengan persuasif," ungkap terdakwa Kapten Dadang berapi-api.

Terdakwa VI yang menegang jabatan sebagai Komandan Detasemen III Batalyon 42 Kopassus itu pun menegaskan bahwa pengumpulan data dan "penjemputan" yang dilakukannya tidak bertentangan dengan tugas Batalyon Sandi Yudha.

Perintah lisan

Dalam pemeriksaan, keterangan para terdakwa umumnya serupa. Mereka mendapat perintah secara lisan dari terdakwa I Komandan Batalyon 42, Mayor (Inf) Bambang Kristiono, untuk bergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa perwira Kopassus itu juga tidak mempertanyakan surat perintah tertulis dari komandan mereka. Mereka juga menyatakan tidak tahu mengenai adanya pimpinan lain di atas terdakwa I. Dalam dakwaan, Bambang Kristiono membentuk Tim Mawar dan melakukan penculikan aktivis atas panggilan nuraninya.

Perintah penculikan disampaikan Bambang Kristiono melalui komandan unit I Tim Mawar yaitu terdakwa V Kapten (Inf) Untung Budi Harto, dan Komandan unit II yaitu terdakwa IV Kapten (Inf) Yulius Selvanus. Untuk kebutuhan operasi, Tim Mawar dilengkapi dengan satu mobil Great Corolla, dua mobil Kijang, dan dua mobil Katana. Para anggota tim ini pun selama tergabung dalam Tim Mawar hanya melakukan tugas-tugas di tim khusus tersebut, dan bermarkas di markas Tim Mawar. Mengenai siapa yang membiayai kegiatan tim, termasuk membelikan tiket pesawat dan tiket kereta api untuk para korban, para terdakwa menyatakan tidak tahu.

Mengenai barang bukti mobil Haryanto Taslam, terdakwa V Kapten Untung Budi Harto mengakui telah menjual mobil tersebut meski tanpa disertai surat semestinya. Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Haryanto Taslam. Mobil Lancer warna biru milik Haryanto itu hanya laku Rp 5 juta, sementara terdakwa sendiri harus mengganti kepada Haryanto Rp 16 juta. "Dijualnya pun tanpa tanda bukti Pak, dasarnya hanya kepercayaan," ungkap terdakwa Kapten Untung yang lulusan Akademi Militer tahun 1988 itu. (uki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No.74 Tel:3145183.3904226.3942247 .Fak..330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 17/2 991

& TIM *

diajak begitu saja oleh orang yang tidak dikenalnya, dan juga tidak bertanya mengapa dirinya harus dibongol dan ditutup mata. Sementara terdakwa mengatakan korban yang "dijemputnya" tidak mempertanyakan ke mana mereka akan dibawa, juga tidak mempertanyakan kenapa mata mereka ditutup selama dalam perjalanan.

"Bapak mungkin berpendapat seperti itu, kenyataannya dia mau saja saya ajak. Saya melakukannya dengan persuasif," ungkap terdakwa Kapten Dadang berapi-api.

Terdakwa VI yang memegang jabatan sebagai Komandan Detasemen III Batalyon 42 Kopassus itu pun menegaskan bahwa pengumpulan data dan "penjemputan" yang dilakukannya tidak bertentangan dengan tugas Batalyon Sandi Yudha.

Perintah lisan

Dalam pemeriksaan, keterangan para terdakwa umumnya serupa. Mereka mendapat perintah secara lisan dari terdakwa I Komandan Batalyon 42, Mayor (Inf) Bambang Kristiono, untuk bergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa perwira Kopassus itu juga tidak mempertanyakan surat perintah tertulis dari komandan mereka. Mereka juga menyatakan tidak tahu mengenai adanya pimpinan lain di atas terdakwa I. Dalam dakwaan, Bambang Kristiono membentuk Tim Mawar dan melakukan penculikan aktivis atas panggilan nuraninya.

Perintah penculikan disampaikan Bambang Kristiono melalui komandan unit I Tim Mawar yaitu terdakwa V Kapten (Inf) Untung Budi Harto, dan Komandan unit II yaitu terdakwa IV Kapten (Inf) Yulius Selvanus. Untuk kebutuhan operasi, Tim Mawar dilengkapi dengan satu mobil Great Corolla, dua mobil Kijang, dan dua mobil Katana. Para anggota tim ini pun selama tergabung dalam Tim Mawar hanya melakukan tugas-tugas di tim khusus tersebut, dan bermarkas di markas Tim Mawar. Mengenai siapa yang membiayai kegiatan tim, termasuk membelikan tiket pesawat dan tiket kereta api untuk para korban, para terdakwa menyatakan tidak tahu.

Mengenai barang bukti mobil Haryanto Taslam, terdakwa V Kapten Untung Budi Harto mengakui telah menjual mobil tersebut meski tanpa disertai surat semestinya. Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Haryanto Taslam. Mobil Lancer warna biru milik Haryanto itu hanya laku Rp 5 juta, sementara terdakwa sendiri harus mengganti kepada Haryanto Rp 16 juta. "Dijualnya pun tanpa tanda bukti Pak, dasarnya hanya kepercayaan," ungkap terdakwa Kapten Untung yang lulusan Akademi Militer tahun 1989 itu. (oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 17/2 99

Tim Mawar Akui Culik 9 Korban

Jakarta, Kompas

Terdakwa kasus penculikan aktivis politik yang tergabung dalam Tim Mawar menyatakan tidak mengetahui adanya korban penculikan lain selain sembilan korban yang sudah dipulangkan. Mereka juga menyangkal telah menyiksa korban dan memaksa korban saat melakukan operasi penculikan yang diistilahkan mereka sebagai "penjemputan". Adanya pengakuan korban bahwa mereka disiksa, menurut terdakwa, hanya cerita korban.

Pengakuan itu disampaikan terdakwa VIII Kapten (Inf) Fauka Noor Farid, terdakwa VII Kapten (Inf) Djaka Budi Utama, terdakwa VI Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha, dan terdakwa V Kapten (Inf) Untung Budi Harto, ketika diperiksa pada sidang lanjutan kasus penculikan, di Mahkamah Militer Tinggi II, Jakarta, Selasa (16/2). Pengakuan serupa juga pernah disampaikan terdakwa IX Serka Sunaryo, terdakwa X Serka Sigit Sugianto, dan terdakwa XI Sertu Sukadi pada persidangan sebelumnya. Sidang akan dilanjutkan Kamis (18/2).

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang hadir di persidangan, makin jelas bahwa persidangan tidak punya upaya keras untuk membuktikan adanya korban penculikan lain dan juga penyiksaan terhadap korban.

"Siapa pun kalau hanya ditanya apakah tahu ada korban lain, ya akan menjawab tidak tahu. Itu gampang saja. Proses pembuktiannya ya bukan seperti itu, tetapi harus dicari saksi-saksi yang menguatkan. Untuk soal penyiksaan pun, sejak awal kami maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah meminta agar Pusat Polisi Militer ABRI melakukan visum atas luka yang dialami para korban, tetapi itu tidak dilakukan," ungkap Munir.

Cerita korban

Keempat terdakwa yang diperiksa pada persidangan kemarin menyatakan, apa yang disampaikan korban mengenai adanya korban penculikan lain hanyalah cerita korban. Namun, para terdakwa yang tergabung dalam Tim Mawar yang beroperasi mulai pertengahan Juli 1997 sampai April 1998, menyatakan tidak tahu apakah ada tim serupa selain Tim Mawar.

Suasana sidang yang dipimpin Hakim Ketua Kol (CHK) Susanto, sempat "hangat" ketika persidangan memeriksa terdakwa VI Kapten Dadang Hendra Yudha. Hakim ketua sempat berdebat dengan terdakwa berkaitan dengan istilah "penjemputan" yang digunakan para terdakwa termasuk terdakwa VI Dadang Hendra Yudha, dan penegasan berulang-ulang dari terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah benar.

Kepada terdakwa VI Dadang, hakim ketua menjelaskan panjang lebar bahwa istilah penjemputan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tersendiri. "Penjemputan" yang dilakukan terdakwa terhadap para korban tanpa kesepakatan sebelumnya dengan korban, yang kemudian disertai dengan penutupan mata para korban selama dalam perjalanan menuju posko taktis Tim Mawar di Cijantung, serta penyekapan korban selama berhari-hari, bukanlah suatu penjemputan.

"Apa kamu kalau disuruh menjemput mertuamu akan melakukan hal yang sama?" tanya hakim ketua, yang kemudian dijawab terdakwa dengan jawaban, "Itu lain permasalahannya, Pak."

Persuasif

Ketua majelis hakim Susanto berkali-kali mempertanyakan kebenaran jawaban terdakwa mengenai kesukarelaan korban atas ajakan terdakwa masuk ke mobil tim terdakwa. Susanto tidak yakin para korban mau

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel:3145183,3904226,3942247 Fax.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: M. I | Tanggal: 1/2 99

Terdakwa Kasus Penculikan Akui Jalankan Perintah

JAKARTA (Media): Anggota Kopassus yang menjadi terdakwa kasus penculikan sejumlah aktivis mengakui, mereka hanya melaksanakan perintah.

Sidang lanjutan kasus penculikan di Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, kemarin, memeriksa tiga terdakwa. "Kami hanya melaksanakan perintah dengan iktikad baik," kata Kapten Inf Fauka Noor Farid, terdakwa VIII, mengenai tindakan penculikan yang dilakukannya.

Dua terdakwa lain dalam sidang ke-12 itu adalah terdakwa VII (Kapten Inf Djaka Budi Utama) dan terdakwa VI (Kapten Inf Dadang Hendra Yudha). Sidang dipimpin hakim Kol CHK Susanto.

Ketika ditanya apakah perintah tersebut berupa perintah tertulis dengan nota dinas atau tidak, masing-masing terdakwa mengaku hanya diberi perintah secara lisan oleh Komandan Tim-nya, Mayor Inf Bambang Kristiono.

Mengenai perintah tidak tertulis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Kol CHK Rettob Abdullah, menanyakan apakah perintah tersebut dapat dikategorikan sebagai perintah dinas, terdakwa mengatakan bahwa perintah dinas bisa tertulis maupun lisan.

Ada 11 anggota Kopassus yang menjadi terdakwa dalam kasus penculikan tersebut. Mereka tergabung dalam Tim Mawar. Mantan Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto, sudah diperiksa Dewan Kehormatan Perwira dan diberikan sanksi diberhentikan dari dinas militer.

Sampai saat ini masih ada sejumlah aktivis yang dinyatakan hilang. Dalam persidangan tersebut, para terdakwa mengungkapkan kronologis penjemputan yang dilakukannya terhadap sembilan orang korban yang semua sudah dibebaskan, sedang mengenai korban lain yang belum ditemukan mereka mengaku tidak pernah melihat dan melakukan penjemputan terhadap mereka.

"Apakah Anda pernah melihat di antara korban itu yang bernama Rian (salah satu korban yang belum ditemukan)," tanya hakim kepada terdakwa VIII yang mengaku sempat menjaga para korban di Posko Cijantung, yang dijawab tidak oleh terdakwa.

Ketika didesak oleh hakim bahwa ada korban yang memberi kesaksian sempat berbicara dengan Yuni Afri (salah satu korban yang belum ditemukan) ketika disekap, terdakwa VIII mengatakan bahwa di tempat tersebut tidak mungkin korban dapat saling berkomunikasi.

"Di tempat itu *tape* dihidupkan 1x24 jam sehingga mereka tidak mungkin berkomunikasi satu sama lain, jika ada yang bilang begitu bohong itu," tegasnya.

Para terdakwa yang diperiksa secara bergantian tersebut juga menolak dikatakan telah melakukan penculikan. Mereka mengaku diperintah untuk menjemput masing-masing korban di tempat yang telah ditentukan.

"Bukan menculik, melainkan menjemput," kata terdakwa VII meralat pernyataan Oditur Militer, Kol CHK Harom Widjaya, yang mengatakan bahwa mengambil seseorang tanpa persetujuan orang tersebut sama dengan menculik.

Penolakan istilah itu juga dilakukan terdakwa VI. Berkali-kali ia mengatakan, yang dilakukannya bukan penculikan melainkan penjemputan.

"Kami bukan musuh negara, melainkan kami mengabdi kepada negara," kata perwira yang bertugas sebagai Komandan Detasemen III/ Yon 42 Grup IV Kopassus yang disambut pernyataan hakim ketua bahwa yang benar tidak hanya dirinya saja. (HA/P-2)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Telp. 330530, 336547 Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi
Sudyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 19-2-99

Operasi Tim Mawar Bukan Kegiatan Khusus

Jakarta, Kompas

Terdakwa II Kapten (Inf) FS Multhazar yang juga Wakil Komandan Tim Mawar mengatakan, semua warga negara bisa melakukan penangkapan bila mengetahui adanya kejahatan atau rencana kejahatan. Hal itu dikemukakan Multhazar menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kolonel CH Susanto, dalam persidangan di Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (18/2). Susanto menanyakan apakah ada faktor pembenar atas perbuatan terdakwa menculik aktivis politik.

"Mendengar jawaban anggota ABRI dari kesatuan Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) ini, hakim ketua Susanto langsung mengatakan, "Wah, rusak negara kita kalau seperti itu. Kalau setiap orang bisa main hakim sendiri, lantas apa tugas pejabat kepolisian?"

Susanto pun kemudian menjelaskan bahwa dalam undang-undang tidak ada pembenaran atas perbuatan terdakwa tersebut. Dijelaskan, polisi boleh melakukan penembakan dan penangkapan karena memang dipersenjatai oleh undang-undang.

"Kamu pernah ngerti tidak aturan undang-undang?" tanya hakim ketua FS Multhazar menjawab, "Siap, belum tahu. Saya yakini kebenaran perintah itu!"

Dalam persidangan kemarin didengar keterangan terdakwa II Kapten (Inf) FS Multhazar, terdakwa III Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi, dan terdakwa IV Kapten (Inf) Yulius Selvanus.

Kegiatan operasional

Dalam persidangan terungkap, kegiatan yang dilakukan Tim Mawar bukanlah suatu kegiatan khusus, melainkan kegiatan operasional biasa dalam Batalyon 42 Sandi Yudha. Kegiatan yang dilakukan para personel Tim Mawar itu termasuk dalam lingkup tugas penyelidikan, oleh karena itu komandan batalyon berwenang membentuk tim seperti Tim Mawar.

Semua perintah "penjemputan", penetapan objek sasaran, maupun pemutusan laporan korban boleh dipulangkan atau diserahkan kepada instansi lain, berasal dari Komandan Tim Mawar yang juga Komandan Batalyon 42, Grup IV Kopassus Mayor (Inf) Bambang Kristiono.

Menurut FS Multhazar yang menjabat Wakil Komandan Batalyon 42, fungsi Batalyon Sandi Yudha adalah melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam rangka menjalankan fungsi itulah Komandan Batalyon kemudian membentuk Tim Mawar, setelah mendapatkan dokumen mengenai akan adanya kegiatan yang mengancam keamanan negara.

Tugas Tim Mawar, ungkap Kapten FS Multhazar, mengumpulkan dan mencari data untuk menunjang tugas batalyon. "Tugasnya menyampaikan informasi yang akurat untuk dilaporkan kepada kesatuan atas," jelasnya.

Siapa yang dimaksud "kesatuan atas", dipertanyakan hakim anggota Kol (CHK) Yamini. "Siapa kesatuan atas itu, apakah Komandan Grup IV Kopassus?" tanya Yamini yang segera dijawab Multhazar, "Saya tidak tahu itu. Itu wewenang komandan!"

Ketika ditanya dari mana dokumen diperoleh, Multhazar mengatakan, itu wewenang terdakwa Mayor (Inf) Bambang Kristiono selaku komandan tim. Terdakwa Multhazar menjelaskan bahwa tidak semua nama dalam dokumen itu kemudian dijadikan sasaran "penjemputan", dan juga tidak semua yang "dijemput" nama-namanya ada dalam dokumen itu. Dia menyebutkan, nama Andi Arief dan Feisol Reza tidak ada dalam dokumen, tetapi nama-nama itu muncul dari pengembangan lebih lanjut di lapangan.

"Orang-orang yang akan diklarifikasi semuanya masukan dari komandan. Dokumen ada di komandan, banyak pertimbangan komandan untuk menentukan siapa yang akan diklarifikasi, dan bukan kewenangan saya untuk menjawab," ujarnya. (oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 11-3-99

ra Tim Mawar dituntut dengan dasar Pasal 333 KUHP yang ancaman hukumannya delapan tahun.

"Penilaian oditur yang menyebutkan dakwaan primer pasal 328 tidak terbukti tidak masuk akal, karena tangan diborgol dan kepala ditutup selama berjam-jam adalah perbuatan yang menyengsarakan, sehingga dakwaan primer harusnya terbukti. Di sisi lain, tuntutan oditur yang sangat jauh dari hukuman maksimal dalam KUHP juga mencerminkan keberpihakan oditur," ungkap Munir.

Hendardi menambahkan, tuntutan oditur terhadap para terdakwa itu semakin mencerminkan pandangan politik persidangan dalam kasus ini. "Sejak awal memang sudah bisa diduga mereka akan dihukum rendah, karena dari awal penyadilan itu juga tidak berusaha mengungkapkan aktor politik dan motif politik di balik penculikan. Padahal itu yang terpenting," tegasnya.

Pembelaan

Bambang dan Ori dari Divisi Legal Kontras yang selalu hadir di persidangan menuturkan, persidangan penculikan telah mengabaikan keinginan masyarakat. Pemeriksaan tambahan yang seharusnya diperintahkan hakim kepada oditur, ternyata hanya sebatas ditawarkan. Oditur pun kemudian tidak menggunakan kesempatan itu, dan hanya menanyakan apakah ada tim lain selain Tim Mawar.

"Pertanyaan tersebut jelas sangat naif karena sebelumnya juga pernah ditanyakan kepada semua terdakwa dan tentu saja dijawab tidak ada. Padahal kesempatan pemeriksaan tambahan yang diberikan hakim dapat digunakan oditur untuk memanggil Kol Chairawan sebagai saksi di persidangan," ungkap Bambang.

Lebih lanjut Ori menambahkan, surat tuntutan oditur militer lebih merupakan pembelaan bagi para terdakwa, di mana hal itu terlihat dari isi tuntutan yang menyebutkan bahwa selama korban ditahan diberikan makan cukup, tiga kali sehari. Demikian juga ketika dipulangkan para korban diberi ongkos cukup.

"Oditur telah mencampuradukkan fungsinya sebagai penuntut umum dengan fungsi pembela. Ini semakin membuktikan bahwa peradilan ini hanya sebuah sandiwara murahan, untuk mengelabui publik yang menuntut keadilan," ungkap Bambang.

Kontras tetap merekomendasikan penyelidikan ulang terhadap kasus penculikan sejumlah aktivis, sehingga keberadaan 13 korban yang masih hilang, orang yang paling bertanggung jawab, dan motif penculikan yang sebenarnya, bisa diungkapkan secara terbuka. (bb/oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183.3904226.3942247 .Pak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 11-3-77

Persidangan Tim Mawar

Tuntutan Oditur Kesampingkan Rasa Keadilan

Jakarta, Kompas

Tuntutan yang disampaikan Oditur Militer Kol (CHK) Harom Widjaja terhadap anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar terlalu ringan. Dalam menyampaikan tuntutan, Oditur terkesan bertindak sebagai pembela daripada sebagai penuntut umum, sehingga tuntutan yang disampaikan mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat. Kenyataan itu makin menguatkan bukti bahwa pengadilan kasus penculikan hanyalah pengadilan rekayasa.

Hal itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Bambang Sugianto dan Ori Rahman, Rabu (10/3), di Jakarta. Pandangan yang sama juga disampaikan Hendardi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan mantan korban penculikan Nezar Patria.

Sementara anggota Komnas HAM Benjamin Mangkoedilaga, yang pernah menyarankan agar hukum memanggil mantan Komandan Grup IV Kopassus Kol (Inf) Chairawan sebagai atasan terdakwa, ketika diminta pendapatnya, menyatakan, "Saya belum bisa memberikan komentar mengenai tuntutan oditur karena tidak etis. Saya akan memberikan komentar setelah sidang selesai."

Hanya alat

Kontras, Nezar, maupun Hendardi sependapat, pengadilan kasus penculikan itu memang hanya menjadi alat hukum untuk menutupi aktor dan motif politik sesungguhnya dari kasus penculikan sejumlah aktivis. "Pengadilan itu seharusnya tidak diselenggarakan dulu sebelum pengadilan terhadap Prabowo, Muchdi dan Chairawan sebagai orang-orang yang lebih mempunyai tanggung jawab. Baru setelah pengadilan terhadap Prabowo dan kawan-kawan itulah, pengadilan terhadap pelaksana di lapangan bisa dilakukan," ujar Hendardi.

Munir, Nezar dan Hendardi menyatakan hal yang sama, tuntutan oditur militer itu tidak imbang dibandingkan dengan dakwaan yang diajukan terhadap aktivis mahasiswa Edward Karo Karo, yang didakwa menculik seorang anggota polisi. Edward didakwa dengan Pasal 328 KUHP dengan ancaman hukum paling lama 12 tahun, sementa-

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 17-3-99

Tim Pembela: "Penjemputan" Aktivis untuk Kepentingan Bangsa

Jakarta, Kompas

"Penjemputan" aktivis Partai Rakyat Demokrasi (PRD) dilakukan para terdakwa yang tergabung dalam Tim Mawar adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan merampas kemerdekaan, harus dilihat pula keseimbangan kepentingan yang dilindungi, yaitu bangsa dan negara.

Demikian pembelaan penasihat hukum sebelas terdakwa dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam kasus penculikan aktivis politik dalam sidang di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta, Selasa (16/3). Pledoi setebal 138 halaman dibacakan secara bergantian dari pukul 09.45 sampai pukul 15.00 oleh Kol (CHK) Rettob Abdullah, Letkol (CHK) Tomo Marchadam, Letkol (CHK) Muchtar Zein, dan Mayor (CHK) Cholid Ashari.

Sebelumnya, Oditur Militer Kol (CHK) Harom Widjaya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan secara bersama-sama. Oditur menuntut hukuman penjara kepada Komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristiono, Kapten FS Multhazar, Kapten Yulius Selvanus, Kapten Untung Budi Harto selama 26 bulan dan dipecat dari TNI AD. Sedang Kapten Nugroho Sulistyo, Kapten Dadang Hendra, Kapten Djaka Budi Utama, dan Kapten Fauka Noor Farid dituntut selama 22 bulan dan dipecat dari TNI AD. Sementara itu, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi dituntut hukuman 15 bulan penjara.

Perjuangan poliitk

Dikatakan Rettob, Partai Rakyat Demokratik yang didirikan, 15 April 1996 memiliki program ideologi mempropagandakan teori progresif, gerakan massa demokratik kerakyatan dan menerbitkan selebaran, pamflet, poster, dan agitasi propaganda dalam kampanye dari organisasi. Program politik yang merupakan perjuangan politik massa rakyat harus diupayakan agar dapat mendirikan negara koalisi demokratik kerakyatan.

"Program organisasi merupakan partai radikal militan yang sanggup terus menerus menohok kekuasaan dalam kesatuan pemahaman, aksi, dan komando," kata Rettob. Selain itu, terlihat adanya rencana untuk menggerakkan massa yang bertujuan menggagalkan Sidang Umum (SU) MPR 1998.

Menurut catatan *Kompas* setelah HM Soeharto turun, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi salah satu partai politik peserta pemilu yang akan digelar tanggal 7 Juni 1999. Sementara, pengurus teras partai masih berada di penjara.

Ditegaskan Rettob, apabila diperhatikan latar belakang penjemputan tersebut tidak ada maksud atau kehendak para terdakwa untuk melakukan tindakan melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa. "Jadi, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," katanya.

Menurut penasihat hukum terdakwa, apa yang dilakukan para terdakwa harus dipandang secara umum menurut kesadaran hukum masyarakat dan menurut asas keadilan yang tidak tertulis dan bersifat umum. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah untuk melindungi kepentingan dan hak subyektif yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan negara.

"Oleh karena itu, meskipun secara formal, masyarakat memandang sebagai suatu perbuatan merampas kemerdekaan, tetapi juga harus dilihat keseimbangan kepentingan yang dilindungi," demikian penasihat hukum terdakwa. Tindakan terdakwa tidak pernah dilandasi kepentingan pribadi dan dilandasi niat jahat. Sewajarnya, apabila perbuatan tersebut dihilangkan sifat melawan hukumnya berdasarkan asas-asas keadilan yang tidak tertulis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penasihat hukum terdakwa minta kepada majelis hakim memutuskan, dakwaan oditur tidak terbukti secara sah menurut hukum. Penasihat hukum juga minta agar para terdakwa dibebaskan dari segara tuntutan hukum. Sidang dilanjutkan 23 Maret 1999. **(bb)**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: 31455183, 3908226, 3912217 Fax. 3901440
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: Sumber: K.T Tanggal: 25-2-99

Penculikan Dilakukan atas Inisiatif Danyon 42 Kopassus

Atasan tidak Tahu soal Tim Mawar

JAKARTA (Media): Mayor Bambang Kristiono, Komandan Batalyon (Danyon) 42 Kopassus mengatakan bertanggung jawab kepada Komandan (Dan) Grup, namun sebagai Komandan Tim Mawar tidak bertanggung jawab kepada Dan Grup karena pembentukan Tim Mawar atas inisiatif sendiri.

Hal tersebut dia kemukakan kemarin di Mahkamah Militer dalam sidang lanjutan kasus penculikan para aktivis prodemokrasi oleh sejumlah oknum Kopassus beberapa waktu lalu. Kasus penculikan yang menghebohkan itu mengaitkan pula mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi. Prabowo sendiri sudah dibebastugaskan dari dinas militer.

Menurut Bambang Kristiono, satuan atas tidak mengetahui keberadaan Tim Mawar. "Bahkan di Kopassus sendiri, saya yakin tidak ada yang mengetahui selain 11 anggota tim tersebut," jelas terdakwa.

Terdakwa juga mengatakan inisiatif pembentukan Tim Mawar merupakan penjabaran salah satu fungsi batalyon yang dipimpinnya yaitu fungsi penyelidikan. Diakuinya, sebelum menjalat Danyon 42 pada bulan Mei 1997, dirinya sudah memiliki data awal tentang keberadaan kelompok-kelompok radikal yang ingin menggagalkan SU MPR.

Bambang menjelaskan, data-data yang diperoleh dari hasil klarifikasi dengan para korban kemudian di-*cross check* ke lapangan. Hasilnya dilaporkan dalam laporan rutin kepada Dan Grup 4 yang waktu itu dijabat Kolonel Chairuwan. "Namun atasan saya tidak mengetahui bagaimana data itu saya dapatkan, karena secara teknis hal itu tidak saya laporkan, itu adalah tanggung jawab saya," jelasnya.

Menjawab pertanyaan Oditur Militer Kol CHK Harom Wijaya, terdakwa membantah jika dalam 'penjemputan' dan klarifikasi para korban disiksa. Menurutnya, operasi dilaksanakan secara persuasif dengan penekanan pada aspek kemanusiaan. "Dengan begitu diharapkan informasi yang didapat aktual dan benar, bukan jawaban hasil tekanan," katanya.

Sidang juga dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi korban, namun berhubung tidak seorang pun saksi yang hadir, maka hanya dibacakan kesaksian tertulis saksi Aan Rusdianto di depan Puspom beberapa waktu. Hal ini dimungkinkan karena hingga saat ini Aan belum menyatakan tidak bersedia memberikan kesaksian.

Menurut Oditur Militer, Aan sudah dua kali dipanggil bahkan pihaknya sudah mengecek keberadaan Aan. Namun menurut keterangan lurah setempat, yang bersangkutan sudah pindah bersama keluarganya ke alamat yang tidak diketahui.

Atas ketidakhadiran para saksi, terdakwa menyatakan penyesalannya. "Padahal saya sudah siap dengan alibi dan alasan bahwa pernyataan mereka sama sekali tidak benar," tukasnya.

Penasihat hukum terdakwa, Kolonel CKH Rettob Abdullah keberatan dibacakan keterangan tertulis para saksi, namun hakim ketua hanya menerima keberatan itu dicatat dalam berita acara persidangan.

Setelah pemeriksaan terdakwa, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti yang terdiri dari dua mobil Kijang warna cokelat dan biru, dua Suzuki Katana merah dan biru, dan satu sedan corolla. Barang bukti lain adalah lima penutup kepala, tiga bergol, dua potong penutup mata warna hitam, dan topi warna hitam, satu buah tas abu-abu, dan satu buah kacamata hitam. Semua barang bukti dibenarkan para terdakwa.

Selesai sidang, keluarga korban membacakan pernyataan sikap di halaman pengadilan. Pernyataan itu menyebutkan peradilan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan terkesan tidak sungguh-sungguh.(HA/F-1)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Dipunegoro No. 74 Tel: 3145183, 3901226, 3912247 Fax. 330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: MERDEKA | Tanggal: 24/2 99 |

▲ Pengakuan Terdakwa di Sidang Penculikan

Chairawan Tahu Ada Aktivis Diculik

Jakarta, Rabu, Merdeka

Bekas Komandan Group (Dangroup) IV Kopassus Kol Chairawan sebenarnya sudah mengetahui kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan oleh Tim Mawar dibawah pimpinan terdakwa I Mayor Bambang Kristono.

Karena hasil dari operasi tim tersebut selalu disampaikan Bambang melalui laporan rutin dalam kapasitasnya sebagai Komandan Batalyon (Danyon) 42 kepada Komandan Group (Dangroup) IV Kopassus saat itu Kol Chairawan.

"Tetapi saya tidak melaporkan kondisi di lapangan secara rinci, seperti penyambilan para aktivis atau kasus penculikan. Yang saya laporkan hanya hasil dari operasi penyambilan," aku terdakwa I Mayor Bambang Kristiono dihadapan persidangan lanjutan kasus penculikan aktivis pro-demokrasi di Mahkamah Militer Tinggi II (Mahmilti II) Jakarta, kemarin.

Dalam persidangan yang sudah pada tahap mendengarkan keterangan terdakwa ini dipimpin ketua majelis hakim Kol CHK Sunarto, wakil ketua Kol CHK Zainuddin dan anggota Kol CHK Yamini. Sementara itu yang bertindak sebagai oditur militer Kol CHK Harom Wijaya dan sebagai penasehat hukum terdakwa Kol CHK Retob Abdullah.

Diakui Bambang, selain Kol Chairawan, dia tak punya akses langsung dengan pimpinan atas lainnya di Kopassus karena sudah ada aturan-aturan yang membatasi hal itu.

"Jadi secara hirarki sebagai Danyon 42 saya hanya bertanggungjawab kepada Dangroup IV Kopassus. Dan saya tegaskan saya tak punya akses langsung pada Danjen Kopasuss saat itu Letjen Prabowo Subianto," kata Bambang.

Chairawan — bersama-sama bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi — sempat diperiksa intensif oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto. Salah satu keputusan penting DKP adalah pembebastugasan Chairawan dari jabatan sebagai Dangroup IV Kopassus.

Selanjutnya dalam persidangan tersebut Bambang juga menyatakan merasa dikhianati oleh para korban penculikan karena dia merasa memperlakukan mereka dengan dengan baik. Bahkan setelah membebaskan para korban penculikan dia berniat memberikan pekerjaan kepada sebagian dari mereka.

"Perlu saya sampaikan pada awalnya tidak ada masalah apa-apa. Pada saat dipulangkan kita masih komunikasi, kami telepon mereka untuk menanyakan kondisi dan apakah sudah bertemu dengan keluarga. Masalah muncul ketika mereka sudah berada di tangan orang-orang tertentu yang mungkin punya kepentingan," tegasnya.

Jadi, lanjutnya, tidak benar jika para korban penculikan tersebut mendapat perlakukan kasar atau mendapat penyiksaan selama disekap. "Saya mendngar hal itu hanya dari BAP korban dan berita-berita di media massa, sedangkan dari anak buah saya tidak ada," tegasnya.

Dalam keterangannya, Bambang juga mengungkapkan asal dana yang digunakan untuk menjalankan operasi penculikan. Menurutnya, dana yang digunakan untuk operasi penculikan tersebut dari dana Batalyon 42 Kopassus. Seperti dana rutin, dana latihan dan dana yang diambil dari bunga dana abadi batalyon yang disimpan di bank.

Seperti halnya ke-10 terdakwa lainnya, Bambang juga menjelaskan tentang terbentuknya Tim Mawar yang merupakan inisiatifnya pribadi berdasarkan hati nurani untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional dari ancaman kelompok-kelompok radikal yang berada di balik aksi kerusuhan.

Selain itu juga ada kelompok yang ingin membuat kondisi kacau dalam rangka menggagalkan Sidang Umum 1998 lalu.

Alasan mengapa sasaran Tim Mawar diarahkan kepada anggota Partai Rakyat Demokratis Bawah Tanah (PRD-BT) lantaran pihaknya menemukan dokumen draft Dewan Nasional yang termuat suatu rencana dan konsep operasi bagaimana anak-anak PRD-BT secara sukarela memilih kutub kiri untuk memperjuangkan demokratisasi di Indonesia.(WR)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145518,3903226,3912247 Fak.3,901-80
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 25-2-99

Hakim Harus Panggil Kolonel (Inf) Chairawan

Jakarta, Kompas

Mantan Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kolonel (Inf) Chairawan harus dipanggil ke Mahkamah Militer (Mahmil), guna mempertanggungjawabkan keberadaan dan operasi Tim Mawar yang melakukan penculikan terhadap para aktivis politik. Pemanggilan Chairawan hendaknya dilakukan sebelum penuntutan disampaikan oleh oditur militer.

Demikian anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Benjamin Mangkoedilaga, Bambang Sugiyanto, dan Ori Rahman dari Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Poltak Iriando dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), di Jakarta, Rabu (24/2).

Saat diperiksa, Komandan Tim Mawar Mayor (Inf) Bambang Kristiono mengungkapkan, hasil operasi Tim Mawar dilaporkan kepada Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan. Meski demikian, Bambang mengatakan, pembentukan dan operasional Tim Mawar merupakan tanggung jawab dirinya.

Mereka yang dihubungi Kompas itu sependapat, terdapat kejanggalan dalam persidangan kasus penculikan aktivis. Kejanggalan itu misalnya soal diputusnya hirarki pertanggungjawaban ke atas. "Itu merupakan kebijakan dari perwira penyerah perkara. Bukan salah oditur," kata Benjamin.

Menurut Benjamin, berdasarkan hukum acara pidana, hakim berhak memerintahkan oditur untuk memanggil atasan terdakwa. Sebelum tuntutan dibacakan, hakim seharusnya menunda dulu penuntutan tersebut untuk memberi kesempatan kepada oditur menghadirkan para pimpinan Kopassus pada saat peristiwa itu terjadi, yakni Komandan Grup IV Kolonel (Inf) Chairawan dan mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi Pr.

"Meskipun hakim sudah menyatakan pada persidangan berikutnya akan diisi dengan pembacaan tuntutan, itu masih bisa diubah," jelas mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu. Ia mengharapkan Ketua Majelis Hakim Susanto akan melakukan hal itu sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa ditegakkan.

Reknyasa

Pendapat senada disampaikan Ori dan Bambang. Menurut keduanya, penerilosan terhadap terdakwa Mayor (Inf) Bambang Kristiono semakin menguatkan indikasi bahwa proses peradilan terhadap para terdakwa hanyalah sandiwara atau rekayasa belaka, untuk melokalisir kesalahan dengan memutus mata rantai pertanggungjawaban dari para pimpinan Kopassus.

"Dari keterangan yang diberikan terdakwa Bambang Kristiono di depan persidangan, seharusnya hakim ketua segera memanggil saksi-saksi yang terkait langsung dengan kasus tersebut, yaitu Kolonel Chairawan sebagai atasan langsung terdakwa 1 sebagaimana yang disebutkan terdakwa 1 di persidangan. Hal itu juga telah terungkap pada pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP)," jelasnya.

Pendapat yang sama disampaikan Poltak. Menurut dia, adalah sesuatu hal yang aneh bila terdakwa I sebagai Komandan Batalyon 42 melakukan operasi dan membentuk Tim Mawar atas inisiatif sendiri. "Semakin jelas bila proses di Mahmil hanya sekadar *lip-service* untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, tetapi tidak menyentuh persoalannya sama sekali," ujar kuasa hukum Pius Lustrilanang, salah satu korban penculikan yang sudah kembali itu.

Institu

Penggunaan dana dan sar
na-prasarana operasional Gru
IV Kopassus oleh Tim Mawa
lanjut Ori, membuktikan bal
wa operasi Tim Mawar memar
telah dilakukan Grup IV K
passus secara institusiona
Oleh sebab itu, jelas bahwa op
rasi penculikan itu merupaka
operasi militer resmi sehing
ABRI secara institusional tid
bisa lepas tanggung jawab at
skandal yang memalukan itu

Bambang menambahkan, d
proses persidangan yang tel
berjalan terlihat bahwa ba
hakim maupun oditur milit
telah tidak menjalankan fung
nya sebagai aparat penegak h
kum. Hal itu terlihat deng
adanya beberapa fakta yang t
ungkap di persidangan, tetapi
dak ditanggapi lebih jauh oleh h
kim maupun oditur militer. D
pertanyaan yang diajukan ol
hakim dan oditur militer, terli
pertanyaan yang diajukan han
meneguskan apa yang disamp
kan terdakwa, dan bukann
menggali pernyataan yang t
ungkap di persidangan.

Meskipun demikian, Be
jamin Mangkoedilaga menyat
kan, dia masih bisa percaya k
pada hakim yang memimp
persidangan tersebut. "Saya k
nal Pak Susanto, dia hakim ya
baik. Dia murid saya," uc
Benjamin. (edi)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: 3145183, 3904226, 3942247 Fax. 330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 2/2 99

Hasil Tim Mawar Dilaporkan kepada Komandan Grup IV

Jakarta, Kompas

Hasil-hasil kerja Tim Mawar dilaporkan Komandan Tim Mawar sekaligus Komandan Batalyon 42 Komando Pasukan Khusus (Kopassus), terdakwa I Mayor (Inf) Bambang Kristiono, kepada Komandan Grup IV Kopassus Kol (Inf) Chairawan. Meskipun demikian, terdakwa menyatakan pembentukan dan operasional Tim Mawar sepenuhnya menjadi tanggung jawab dirinya. Dana untuk kegiatan Tim Mawar diambil antara lain dari dana operasional Batalyon 42 dan hasil dari tabungan anak Batalyon 42.

Hal tersebut disampaikan terdakwa Mayor (Inf) Bambang Kristiono dalam persidangan lanjutan perkara penculikan, Selasa (23/2), di Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Pemeriksaan terhadap terdakwa I berlangsung sekitar dua jam, kemudian dilanjutkan pembacaan keterangan saksi korban Aan Rusdianto saat diperiksa di Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, dan pemutaran barang bukti. Sidang perkara ini akan dilanjutkan 9 Maret depan dengan acara hadirnya pelitur militer.

Usai sidang, Ny Titi Kota selaku pengacara salah seorang korban penculikan yang belum kembali, menyampaikan pernyataan sikap Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di halaman lobi Mahkamah II Jakarta. "Selama mengikuti jalannya persidangan, kami melihat justru lembaga peradilan digunakan untuk membahas sikap ABRI yang tidak mau bertanggung jawab atas nasib anggota keluarga kami yang hilang," ungkapnya.

Tim tertutup

Menjawab pertanyaan pelitur militer dan majelis hakim, terdakwa Bambang menjelaskan, gagasan membentuk Tim Mawar sekitar bulan Juli 1997 atau dua bulan setelah pengangkatan dia sebagai Komandan Batalyon (Dan Yon) 42 Kopassus, dilakukan karena keinginannya turut berperan sebagai komandan batalyon. Ketika tim itu dibentuk atasan langsung terdakwa adalah Komandan Grup IV Kol (Inf) Chairawan, sedangkan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ketika itu adalah Mayjen TNI Prabowo Subianto.

Ditanya apakah terdakwa punya akses langsung kepada Danjen Kopassus, terdakwa menyatakan tidak. "Dan Yon, Dan Grup, baru Danjen. Di militer ini sudah ada aturan-aturan yang membatasi sampai sejauh mana saya berwenang," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, tim yang dibentuknya itu sangat rahasia dan tertutup, sehingga dia meyakini tak ada orang lain di luar anggota Tim Mawar yang mengetahui adanya tim tersebut.

Mengenai kejanggalan tertahan saksi korban selama beberapa hari atau lebih dari sebulan, terdakwa menjelaskan, hal itu didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan pencocokan silang atas keterangan-keterangan para saksi korban dengan pihak-pihak lainnya. Lamanya waktu pemeriksaan para korban itu juga didasari "kesepakatan" anggota tim "penjemput" dengan para korban yang dijemput.

"Saya minta kepada mereka kerelaannya, karena saya secara pribadi lewat terdakwa III menyampaikan maaf saya kepada mereka. Kemudian saya minta juga pengertian mereka, kalau saya masih memerlukan cukup waktu untuk meng *cross-check* ke lapangan semua informasi yang mereka berikan, apakah jawaban-jawaban mereka sesuai atau tidak," tuturnya. (oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183,3904226,3912247 .Fax.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Komandan Tim Mawar Dituntut 26 Bulan

Jakarta, Kompas

Komandan Tim Mawar, Mayor (Inf) Bambang Kristiono (terdakwa I), Wakil Komandan Tim Mawar Kapten (Inf) FS Multhazar (terdakwa II) bersama dua pemimpin unit tim, Kapten (Inf) Yulus Selvanus (terdakwa IV), dan Kapten (Inf) Untung Budi Harto (terdakwa V) dituntut hukuman 26 bulan penjara dan dipecat dari dinas keprajuritan TNI Angkatan Darat (TNI AD). Anggota tim lainnya, dituntut hukuman 22 bulan penjara dan dipecat dari dinas keprajuritan TNI AD serta 15 bulan penjara tanpa dipecat.

Tuntutan dibacakan Oditur Militer Kolonel (CHK) Haron Widjaya di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta, Selasa (9/3) selama empat jam, dan dibacakan secara bergantian oleh Kolonel (CHK) Suratman dan Kolonel (CHK) S Pangtruk.

Oditur menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain: perbuatan terdakwa menimbulkan sorotan negatif kepada ABRI, khususnya kesatuan Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) karena dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM), para terdakwa sebagai prajurit ABRI tidak melaporkan tindakannya kepada atasan, melakukan penangkapan terhadap masyarakat umum dan tidak pernah mengkoordinasikannya dengan instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI. Tindakan terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ABRI dan mencemarkan nama baik ABRI, khususnya Kopassus di mata masyarakat, serta menggunakan fasilitas dinas, keuangan, mobil, dan tempat dinas.

TUNTUTAN UNTUK TERDAKWA KASUS PENCULIKAN AKTIVIS

Nama Terdakwa	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
Mayor (Inf) Bambang Kristiono	26 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) FS Multhazar	26 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Yulus Selvanus	26 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Untung Budi Harto	26 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo B	22 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Dadang Hendra Y	22 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Djaka Budi Utama	22 bulan	dipecat dari TNI AD
Kapten (Inf) Fauka Noor Farid	22 bulan	dipecat dari TNI AD
Serka Sunaryo	15 bulan	-
Serka Sigit Sugianto	15 bulan	-
Serka Sukadi	15 bulan	-

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa selama persidangan terdakwa bersikap tenang, mengakui, menyesali, dan menyesali perbuatan mereka. Selain itu, terdakwa bersikap sopan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan. Walaupun menangkap dan menahan saksi korban, pada akhirnya para saksi korban dilepaskan dalam keadaan sehat.

Selama persidangan tak terungkap adanya penyiksaan terhadap korban penculikan. Padahal, dalam kesaksiannya di

LAPORAN PENDAMPINGAN ANDI ARIEF DI MABES POLRI

Kamis, 23 April 1998 pukul 08.30 Wib Tim KONTRAS bersama kakak kandung Andi Arief (Edi Irawan), berangkat ke Mabes Polri. Sebelum ke Mabes Polri, Tim KONTRAS singgah dahulu di Polda Metro Jaya untuk bersama-sama berangkat dengan Polisi Polda (Kapten Aris Munandar, Letkol. Mujiono, Letkol. Haryono) Ke Mabes Polri sebagaimana telah disepakati sehari sebelumnya, turut juga berangkat bersama-sama 2 orang aparat yang diperkirakan anggota BIA.

Keberadaan Andi Arief di Mabes Polri diketahui setelah Tim Kontras beberapa kali menanyakan ke Polda Metro Jaya. Di Mabes Polri Tim KONTRAS bertemu dengan Wadir Ser.um Letkol. Kamaluddin Lubis, SH. selaku penanggung jawab Andi Arief di Mabes Polri, setelah beberapa lama menunggu, Tim KONTRAS dipertemukan dengan Andi Arief yang kelihatan sehat-sehat saja. Letkol Lubis kemudian menjelaskan bahwa Andi Arief berada di Mabes Polri sejak tanggal 17 April 1998 dan pihak Mabes Polri telah mengirimkan surat perintah penahanan kepada keluarga Andi di Lampung.

Beberapa saat setelah bertemu, kemudian Andi diminta kesediannya oleh Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi atas nama Terdakwa Agus Priyono alias Agus Jabo dalam kasus peledakan di Rusun Tanah Tinggi. Adapun pertanyaan pihak penyidik sekitar perkenalan Andi dengan Agus Jabo baik perkenalan di Jogjakarta maupun perkenalan di Jakarta, kegiatan Agus Jabo dan pertanyaan seputar SMID.

Berikut ini berapa penjelasan Andi Arief seputar penculikannya kepada Tim KONTRAS :
Andi Arief diculik di rumah kakaknya di lampung oleh orang-orang berbadan tegap dan berambut cepak yang kemudian memasukkannya ke mobil dengan tangan diborgol dan mata ditutup kain kemudian membawanya pergi. Penutup mata dibuka di Pelabuhan Bakeuhuni - Merak mobil kemudian meluncur ke daerah kebon jeruk setelah itu mata Andi Arief ditutup kembali dan dibawa kesuatu tempat kira-kira memakan waktu 1 jam perjalanan. Setelah sampai kemudian Andi dimasukkan disebuah sel berukuran kira-kira 2x21/2 meter dengan kedua tangan dan kaki diborgol, dimana ada suara radio Kiss FM yang on air selama hampir 24 jam. Ketika diinterogasi mata selalu ditutup kain hitam, kalau mata penutup mata dibuka penculik selalu menggunakan topeng (yang kelihatan hanya mata).

Andi Arief berpesan kepada Tim KONTRAS agar teman-teman yang sudah dipulangkan oleh penculik, antara lain Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa dan Haryanto Taslam menceritakan semua pengalamannya selama diculik.

Tim KONTRAS pulang kembali ke kantor Diponegoro setelah diantar oleh Bapak Letkol. Kamaluddin Lubis, SH. melalui "pintu rahasia" Mabes Polri karena untuk menghindari beberapa wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang telah lama menunggu.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Sebuah Kontroversi Peradilan Nurani

"KOMANDO!" Pekikan khas [illegible] Pasukan Khusus TNI [illegible] (Kopassus) terdengar dari [illegible] orang anggota Kopas[illegible] yang sedang berjalan menu[illegible] tahanan. Mereka ber[illegible] "dikawal" rekan-rekan [illegible] yang juga hadir di si[illegible] Tangan dikepal dan di[illegible] ke atas. Para terdak[illegible] [illegible] menjawab, "Siap!", juga [illegible] tangan mengepal.

Entah paham bagaimana jika [illegible] pasukan khusus yang [illegible] dalam Tim Mawar itu [illegible] duduk di kursi terdakwa [illegible] persidangan di Mahkamah [illegible] Tinggi II-Jakarta, Kamis [illegible]. Mereka ditahan sebagai [illegible] yang harus bertanggung [illegible] atas penculikan aktivis [illegible].

Mayor (Inf) Bambang Kristio[illegible] perwira menengah yang di[illegible] pada Komando [illegible] Kopassus—sebagai [illegible] bahwa lainnya Tim Ma[illegible] berjumlah 10 anggotanya—[illegible] berpangkat kapten. Tiga [illegible]—dihadapkan pada per[illegible] yang dikepalai Kol [illegible].

Pada awalnya, peradilan ka[illegible] penculikan aktivis dinanti banyak kalangan. Baik itu [illegible] penculikan, Komisi un[illegible] Orang Hilang dan Korban [illegible] Kekerasan (Kontras), [illegible] Tim Gabungan Pencari [illegible] (TGPF) Kemudian 13-15 [illegible]. Mereka menggantungkan pe[illegible] aktivis politik bisa [illegible] diadili.

Peradilan akhirnya memang [illegible] Kamis (22/12) di Mah[illegible] Militer Tinggi. Peradilan [illegible] mereka dihadiri rekan-[illegible] Kopassus dari Grup 4. [illegible] Feri Manurung mem[illegible], saat ke-11 tersangka [illegible] aktivis itu meninggal[illegible] Mahkamah Militer II, [illegible] dibuat baik pihak-[illegible]. Berpakaian dinas harian [illegible], lengkap dengan baret [illegible] kesatuan, pihak-pihak rekan [illegible] membuat pagar betis [illegible] sikap sempurna guna [illegible] jalan kepada mereka [illegible] masuk mobil tahanan.

***

HARAPAN masyarakat bahwa [illegible] penculikan akan [illegible] tabir misalah pen[illegible] lebih luas, ternyata berku[illegible] mengecewakan. Sehari sete[illegible]lah persidangan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Marzuki Darusman meminta Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk meluruskan persidangan kasus penculikan aktivis.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Rudini menyatakan, tersentuh hati nuraninya menyaksikan proses persidangan 11 anggota Kopassus tersebut. Menurut Rudini, seharusnya ada komandan yang berani bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis, dan tidak perlu anak buah di lapangan dikorbankan dengan tingkat kesalahan yang sama.

Kekecewaan masyarakat itu bisa dipahami kalau melihat rangkaian dakwaan yang disusun Oditur Militer Tinggi Kol (CHK) Harum Wijaya. Dalam dakwaan itu Harum menyebutkan, inisiatif penculikan itu ternyata datang dari Mayor (Inf) Bambang Kristiono, perwira menengah yang diperbantukan pada Danjen Kopassus. Mayor Bambang Kristiono, demikian dakwaan Oditur, berinisiatif menculik aktivis politik karena hati nuraninya terpanggil melihat kelakukan para aktivis yang menurut penilaiannya bisa membahayakan kepentingan nasional.

Dakwaan oditur juga sama sekali tidak menyinggung terjadinya penyiksaan dan penganiayaan yang dialami korban penculikan. Dakwaan hanya menceritakan bagaimana proses penangkapan, penahanan untuk interogasi, dan pelepasan. Tak ada sama sekali penganiayaan. Padahal, menurut pengakuan korban kepada publik, Pius Lustrilanang sempat dibenamkan ke dalam bak berisi air, disetrum; Raharjo Waluyo Djati diborgol di balok es.

Kabut soal 13 orang yang masih hilang juga tetap gelap. Hingga persidangan ketiga, misteri 13 korban penculikan yang masih hilang tak berjawab. Majalah Tajuk No 23, 5 Januari 1998, melansir isu bahwa delapan dari 13 korban telah meninggal dunia. Menurut majalah itu, empat telah ditembak di darat, empat lainnya dibuang ke laut.

***

KEGELAPAN dalam kasus penculikan itu mungkin yang kembali mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kembali mengeluarkan pernyataan keras. Komnas HAM meminta, proses peradilan ke-11 anggota Tim Mawar ini dibatalkan demi kesdilan dan kebenaran, serta penegakan hak asasi manusia.

Bagi Komnas HAM, dalam pernyataan yang disampaikan Rabu (6/1), peradilan kasus penculikan jelas tidak merupakan peradilan yang *fair* dan tidak berpihak bagi para terdakwa dan korban penculikan serta melanggar HAM.

Peradilan itu jika akan diteruskan sebagaimana adanya, hanya akan menyelesaikan sebagian kecil dari seluruh persoalan keterlibatan unsur ABRI dalam penculikan. "Sebagai langkah awal memulihkan kepercayaan masyarakat kepada kesungguhan dan kejujuran ABRI, proses peradilan tersebut perlu dibatalkan," kata Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral, yang membacakan pernyataan Komnas HAM itu.

Amaral selanjutnya mengatakan, apabila tidak dapat segera dijernihkan, terdapat kesan kuat adanya upaya menutup-nutupi dan melindungi penanggung jawab tindakan penculikan, sebagaimana ditemukan berdasarkan temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Hasil dan proses peradilan ini akan menggambarkan dan dinilai masyarakat apakah ABRI benar-benar ingin atau tidak ingin menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, sebagaimana selalu diungkapkan dalam pembacaan Sapta Marga.

Bagi sementara pihak, pernyataan Komnas HAM bisa ditafsirkan sebagai intervensi terhadap peradilan, meski hal itu ditepis Wakil Ketua II Komnas HAM Djoko Soegianto. "Komnas HAM sama sekali tidak mencampuri urusan peradilan," kata Djoko yang juga mantan hakim agung.

***

KESAN dakwaan yang disusun oditur dirancang untuk melindungi kepentingan seseorang memang sulit dibantah. Temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyebutkan keterkaitan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kol (Inf) Chairawan, sama sekali hilang dari dakwaan oditur.

Meski temuan DKP tidak juga menjelaskan seberapa jauh keterkaitan Prabowo dalam kasus penculikan, namun kenyataannya Prabowo diberhentikan. Prabowo juga pernah dinyatakan telah salah menganalisis perintah BKO (Bawah Kendali Operasi).

Inisiatif membentuk Tim Mawar dan menculik aktivis datang karena panggilan nurani Mayor (Inf) Bambang Kristiono. Tak dijelaskan siapa yang memberi perintah awal. Perintah awal itu—yang belum jelas siapa yang memerintah—tampak-



DIADILI — *Sebelas anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar diadili di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta, karena diduga menculik beberapa aktivis. Jumat ini, majelis hakim akan menyampaikan putusan sela atas kasus itu.*

· YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183.3904226.3942247 .Tlx.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: F. FIKR | Tanggal: 8-1-92

Selesai

nya berbunyi untuk mendata aktivis radikal. Lalu, mengapa terjadi penculikan. "Itu cara saya, mengumpulkan informasi," kata Komandan Puspom ABRI Mayjen Djasri Marin, menirukan pengakuan Bambang saat diperiksa Puspom ABRI. (*Tajuk*, No 23)

Dalam konteks itu, pengakuan Bambang bahwa penculikan itu adalah atas penggilan nuraninya, merupakan upaya untuk melindungi sang pemberi perintah. Dan kalau memang benar penculikan itu prakarsa murni Bambang, betapa berbahayanya negara Indonesia kalau setiap mayor—apalagi mayor pasukan khusus—bisa mengambil inisiatif sendiri berdasarkan nuraninya.

Memang yang juga menjadi pertanyaan adalah mengapa untuk menangkap para aktivis politik—yang dianggap kelompok radikal—harus dilakukan oleh sebuah pasukan elite yang menurut KUHAP sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menangkap orang. Menangkap orang adalah tugas Polri.

Sejumlah pertanyaan menggantung pada persidangan kasus penculikan ini yang akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi, Jumat ini atau pekan depan. Persidangan hendaknya bisa berkembang dan mampu memberi jawaban atas segudang pertanyaan masyarakat. Proses persidangan selanjutnya akan sangat menentukan bagaimana upaya pemulihan citra ABRI. Citra ABRI akan makin terpuruk jika peradilan kali ini berlangsung dengan pola "komando" untuk membatasi keterkaitan pihak-pihak lain. Jika memang itu yang bakal terjadi, usulan Komnas HAM agar peradilan dibatalkan barangkali menjadi relevan, sebagai sebuah bentuk pengawasan masyarakat terhadap perilaku peradilan.

Apakah peradilan akan menjawab keberatan, termasuk untuk mengoreksikan peradilan, akan dijawab dalam putusan sela majelis hakim yang akan dibacakan hari Jumat ini. Meski yang dipersoalkan penasihat hukum terdakwa bukanlah soal yang dipertanyakan masyarakat, melainkan soal kompetensi peradilan dan kekaburan dakwaan.

(Budiman Tanuredjo)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 8-1-73

Menkeh Soal Sidang Penculikan

Prabowo, Muchdi, dan Hartono Harus Didengar Keterangannya

Jakarta, Kompas

Menteri Kehakiman Muladi mengatakan, terlalu dini kalau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta supaya persidangan perkara penculikan aktivis dengan terdakwa sebelas anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dihentikan. Akan tetapi untuk menunjukkan peradilan itu *fair*, saksi strategis harus didengar pada sidang itu, yakni mantan Komandan Jenderal Kopassus/mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR, dan mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI (Purn) R Hartono.

"Prabowo dan Muchdi harus dijadikan saksi. Juga Hartono perlu didengarkan keterangannya, karena dia dianggap tahu persoalan itu. Ini akan mengclear-kan, apakah tindakan terdakwa benar-benar atas perintah atau salah tafsir perintah. Kesaksian mereka akan membantu menghilangkan kesan *unfair trial* (peradilan yang tidak *fair*)," ujar Muladi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1).

Seperti diberitakan, Komnas HAM merekomendasikan supaya sidang atas sebelas anggota Tim Mawar Kopassus yang didakwa terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Jakarta dihentikan saja. Karena persidangan itu mengarah tidak *fair* dan tidak berpihak kepada korban. Bahkan, persidangan itu terkesan melindungi dan menutupi penanggung jawab penculikan. (*Kompas*, 7/1)

Menkeh sependapat, kesan persidangan yang tak *fair* dalam kasus penculikan aktivis perlu dihilangkan. Oleh karena itu saksi-saksi yang strategis, seperti Prabowo, Muchdi, dan Hartono harus didengar keterangannya dalam sidang. Apabila jaksa tidak menghadirkan mereka bertiga, penasihat hukum terdakwa bisa meminta untuk meringankan terdakwa.

"Ketiganya (Prabowo, Muchdi, dan Hartono) dapat diminta-kan oleh pengacara terdakwa agar dihadirkan di sidang sebagai saksi tambahan. Ini harus dikembangkan. Jangan sampai pengadilan itu dituduh *unfair*. Namun kalau kini persidangan kasus penculikan itu sudah dinilai tak *fair*, masih terlalu dini dan prematur," kata Muladi.

Menkeh menyatakan, sidang terhadap sebelas anggota Kopassus itu baru tahap permula-an. "Saya percaya, anggota Komnas HAM mengetahui prinsip *the freedom of judiciary*. Karena bila dianalisis, dalam kasus Kopassus dan penculikan tersebut harus dilihat, sampai sebarapa jauh kemungkinan salah penafsiran, misalnya dalam kata perintah. Dengan begitu, bisa dipahami kemungkinan salah tafsir perintah. Jangan cuma tindakan penculikan itu dilakukan menurut hati nurani, lalu dianggap direkayasa. Jangan begitu. Harus dilihat kata per kata perintah itu, dan dicocokkan dengan keterangan saksi," lanjutnya.

Salah tafsir

Ia mengakui, mungkin saja tindakan penculikan dilakukan berdasarkan perintah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pula, tindakan itu terjadi karena pelaku salah menafsirkan perintah atau dilakukan sendiri. Ini semata-mata memenuhi perintah supaya mengumpulkan data gerakan radikal.

"Menurut keterangan, seluruh terdakwa 'kan diperintahkan mengumpulkan data yang berkaitan dengan gerakan radikal. Metodenya bagaimana? Apakah diperintahkan sekaligus atau kebijakan mereka di lapangan. Ini harus jelas betul. Karena itu, saksi strategis perlu didengarkan keterangannya," tandas mantan anggota Komnas HAM itu.

Muladi tidak bisa menyatakan, apakah rekomendasi itu merupakan bentuk campur tangan eksternal dalam kebebasan peradilan. Tetapi ia meminta, Komnas HAM menahan diri dan membiarkan dahulu persidang-an atas sebelas anggota Kopassus itu berlangsung. Apalagi, persidangan itu belum sampai memanggil saksi untuk didengar keterangannya.

"Peradilan itu harus bebas. *The freedom of judiciary* itu adalah prinsip yang [illegible] boleh

(Bersambung ke hlm 11 kol 8-9)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Prabowo, — —

dipengaruhi oleh pemerintah maupun kekuatan yang lain. Pengaruh itu bisa macam-macam. Bisa dari internal seperti dari pengadilan yang lebih tinggi, tetapi bisa pula eksternal, misal suap kepada hakim oleh masyarakat. Semua bentuk intervensi ini harus dicegah," katanya.

Unsur memberatkan

Di tempat terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengemukakan, penyiksaan yang dialami korban penculikan yang tidak dimasukkan dalam dakwaan dan hanya ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan merupakan upaya menghindari penilaian bahwa penyiksaan itu dapat menghilangkan nyawa orang. Hal itu juga merupakan upaya menghindari pertanggungjawaban jika terdapat korban lain yang mengalami nasib lebih parah dari nasib korban yang sudah kembali.

"Kita mencurigai, tidak masuknya penganiayaan dalam dakwaan bukan sekadar untuk ditempatkan sebagai unsur pemberatan. Hal itu juga untuk menghindari terjadinya penilaian bahwa kekerasan yang dialami para korban dapat menghilangkan nyawa orang," kata Munir. (bh/ira)

Keluarga Korban Penculikan Gugat Panglima TNI

Jakarta,Pembaruan

Kontras Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mewakili orang tua dan keluarga para korban penculikan, akhirnya memutuskan menggugat Panglima TNI ke meja hijau. Gugatan dajukan karena rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tidak ditindaklanjuti secara hukum maupun administrasi oleh pemerintah cq Panglima TNI.

Koordinator Kontras Munir kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (13/8) mengungkapkan, gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/8) pukul 15.00 WIB dan diterima panitera Didi Manthe dengan nomor registrasi 185/Pdt 6/1999/PN.Jkt-Tim. Diharapkan dalam waktu dekat perkara tersebut bisa digelar.

Orang tua dan keluarga korban penculikan yang menggugat Panglima TNI memberi kuasa kepada beberapa pengacara dari Kontras. Mereka yang mengajukan gugatan adalah Tuti (ibu kandung Yani Afri yang hilang diculik sejak 26 April 1997 lalu), Nurhasanah ibu kandung Yadin Muhidin (14 Mei 1998), Ridwan Nefo S kakak kandung Herman Hendrawan (12 Maret 1998) dan Said Alkatiri ayah kandung Noval Alkatiri (29 Mei 1997).

Para pengacara yang tergabung dalam Kontras sebagai kuasa hukum masing-masing Munir, Bambang Widjojanto, Irianto Subiakto, Firman Wijaya, Ori Rahman, Ahmad Yani, Chairulsyah, Daniel Panjaitan, Badaruzaman, Aulia Hidayat, Erizal Chaniago, Mujahidin dan Lukmanul Hakim.

Menurut Koordinator Kontras, substansi gugatan terhadap Panglima TNI tersebut adalah sikap Panglima TNI yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DKP tentang para pelaku penculikan. Karena itu, tuntutannya adalah Panglima TNI dihukum untuk menjelaskan secara transparan mengenai kasus penculikan itu.

Karena dalam rekomendasi DKP, tuturnya, sudah disebutkan supaya ada sanksi hukum maupun administratif, tetapi ternyata rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Proses hukum lewat Mahkamah Militer juga tidak menyentuh implikasi rekomendasi sanksi hukum dan administrasi dari DKP.

Terpaksa Menggugat

Panglima TNI sebagai tergugat, menurut Kontras, pada 24 Agustus 1998 di depan wartawan dalam dan luar negeri telah membacakan keputusan DKP tentang kasus penculikan di mana disebutkan bahwa alasan dijatuhkannya sanksi kepada para perwira masing-masing Letjen TNI Prabowo Subiakto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan, karena terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan terbukti melakukan pelanggaran HAM.

Ketika itu dijelaskan pula, perwira yang diproses DKP ternyata memenuhi unsur pidana maka tidak seorang pun lolos dari jeratan hukum. Penjelasan itu mestinya ditindaklanjuti secara hukum seperti rekomendasi DKP, tetapi nyatanya tidak sehingga Kontras yang diberi kuasa para orang tua dan keluarga korban penculikan terpaksa menggugat Panglima TNI.

Menurut data Kontras, berdasarkan laporan dari masyarakat diketahui bahwa sejak April 1997 telah terjadi serangkaian penculikan yang menimpa 22 orang. (131)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31155183, 3901226, 391 7512 ,Tlx.:33011HD
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 26/8 98

Mahmil

Dikatakan, kemungkinan untuk mengajukan Prabowo, Muchdi dan Chairawan ke Mahmil tidak tertutup selama kasus ini masih terus disidik oleh Puspom ABRI. "Adanya sanksi administratif bagi mereka bertiga oleh Menhankam/Pangab dapat dijadikan indikasi bahwa ada tindakan pidana yang dilakukan, entah itu berupa penculikan, penyekapan, atau penyiksaan. Tapi penyidikan terhadap itu 'kan perlu dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Menurut Syamsu, sekarang ini Puspom sedang melakukan pemeriksaan lebih cermat terhadap 11 orang tersangka dari Kopassus, yang hingga kini diduga kuat sebagai pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap sejumlah aktivis. "Untuk itu saya minta semua pihak yang terlibat dalam masalah ini, baik itu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) maupun para korban penculikan untuk memberikan masukan yang terperinci kepada Puspom. Ini akan sangat membantu Puspom untuk segera melengkapkan berkas pemeriksaan untuk selanjutnya diajukan ke Mahmil," katanya.

Saat ini, kata Syamsu, yang masih dikategorikan sebagai orang hilang ada 12 orang, dengan rincian tiga orang yang hilang karena kasus kerusuhan dan sembilan lainnya hingga kini masih diduga sebagai korban penculikan. "Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka masih ada atau bagaimana. Sampai sekarang kita masih mengusut dan menyelidikinya. Yang pasti, di tempat kejadian perkara (TKP), terutama di Cijantung (Markas Kopassus Red) sudah kosong. Ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi kami," katanya.

Informasi baru

Menurut Syamsu, pengakuan Prabowo bahwa jumlah orang yang telah diculik sebanyak sembilan orang, merupakan informasi baru bagi Puspom ABRI karena sebelumnya ke-11 perwira Kopassus yang diperiksa dan ditahan Puspom ABRI hanya mengakui penculikan terhadap empat orang. Puspom akan terus mengembangkan hasil DKP dan mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam keterlibatan Prabowo pada kasus penculikan sejumlah aktivis tersebut.

"Sekarang 'kan Prabowo mengakui sembilan, maknanya kita perlu menelaah lagi. Kita minta kalau ada masukan lain segeralah berikan, misalnya dari saksi-saksi korban," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir meminta, agar Puspom ABRI mengumumkan hasil penyelidikannya sendiri, dengan tidak berpegang pada hasil keterangan dari para tersangka semata, tetapi juga mendalami keterangan saksi-saksi.

"Sampai saat ini terkesan Puspom hanya mengungkapkan apa-apa yang diperoleh dari tersangka, misalnya pengakuan bahwa telah menculik empat orang saja atau pengakuan Prabowo yang menculik sembilan orang. Padahal, saksi-saksi korban jelas-jelas mengatakan bertemu dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, dan lainnya. Artinya, jumlah yang diculik itu bukan hanya sembilan orang yang sudah dilepas itu," tegas Munir.

Menurut Munir, Puspom sebagai lembaga penyidik tidak boleh mengambil posisi tidak mempercayai keterangan saksi-saksi korban, padahal jelas keterangan saksi-saksi korban itu bisa menjelaskan banyak hal dalam kasus penculikan yang kemungkinan juga tidak "dibuka" oleh para tersangka penculikan.

Disidik polisi

Sementara itu pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman mengatakan, karena Prabowo sekarang sudah berstatus sipil, dengan sendirinya aparat penyidik Kepolisian RI dapat melakukan tindakan lanjutan, yaitu dengan melakukan penyidikan terhadap Prabowo untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan.

"Yang ditunggu masyarakat 'kan memang terwujudnya penegakan hukum. Jadi, dalam kasus penculikan sejumlah aktivis yang diduga melibatkan Prabowo, ada baiknya aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan mengambil tindakan konkret. Yakni menangkap dan memeriksa Prabowo serta mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Selanjutnya, kalau memang mungkin ajukan segera Prabowo ke pengadilan," tandasnya.

Loebby menilai, bukan mustahil kebijakan Menhankam/Pangab memberhentikan Prabowo, yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut, dalam rangka memberi kelebihan kepada pengadilan nonmiliter membuktikan keterlibatan jenderal berbintang tiga itu dalam kasus penculikan aktivis. "Sebab itu, aparat kepolisian sepatutnya proaktif menanggapi harapan masyarakat," tegasnya

(ama/oki/fan)

PERNYATAAN SIKAP
PARA KORBAN DAN KELUARGA KORBAN PENCULIKAN
(ORANG HILANG)
TERHADAP RENCANA VONIS SIDANG PENCULIKAN

Enam April 1999,
bagi rakyat Indonesia akan mencatat bahwa hukum, kebenaran
dan keadilan masih harus diperjuangkan dengan mengucurkan
air mata dan darah yang masih tersisa

Setelah mengikuti dengan seksama proses persidangan kasus penculikan sembilan aktivis, maka sesuai dengan jadwal persidangan Mahkamah Militer Tinggi pada tanggal 6 April 1999 akan dijatuhkan vonis terhadap 11 orang tersangka anggota grup Mawar Kopassus. Tidak akan ada hal yang luar biasa pada hari tersebut. Karena sejak awal proses pengungkapan kasus penculikan tersebut kami, para korban dan keluarga korban yang belum kembali, tidak mendapati adanya itikad yang jujur dan transparan dalam kesinambungan prosesnya.

Banyak fakta dan kejadian yang kami peroleh selama memperjuangkan kebenaran, keadilan dan nasib anggota keluarga kami, justru nampak semakin menjauhkan harapan akan adanya pertanggungjawaban dari pihak ABRI dan Pemerintah. Tak pernah sekalipun ABRI atau Pemerintah dalam hal ini menunjukkan ketulusan dalam mengungkap kasus ini, dengan misalnya menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan proses perkembangan penyelidikan. Atau yang lebih nyata adalah tidak transparannya pengumuman hasil investigasi oleh ABRI serta tidak adanya tanggapan terhadap tuntutan para korban yang telah dibebaskan untuk dilakukan rekonstruksi untuk membuktikan kebenaran lokasi penyekapan dan penelusuran jejak keberadaan mereka yang masih belum kembali. Karena sebagian besar korban yang belum kembali, pernah berada pada lokasi yang sama. Juga dalam tindak lanjut terhadap pengakuan Prabowo yang menculik ke 9 aktivis yang telah dibebaskan. Adalah tidak masuk akal bila dia kemudian bebas dari tanggungjawab terhadap nasib korban lainnya yang notabene pernah disekap dalam ruang yang sama. Pendeknya tak ada upaya yang serius dari ABRI dan Pemerintah untuk mengungkap kasus penculikan dan orang hilang adalah karena pertimbangan kepentingan politik.

Meskipun telah digelar sidang perkara penculikan tersebut namun, mata dan kesadaran kami tak bisa ditipu oleh praktek pendidan yang tak lebih lucu dari komidi berdarah yang dipertontonkan di hadapan rakyat untuk melindungi kepentingan dan membenarkan tindakan penguasa selama ini. Kami mengerti hal tersebut secara sadar, karena sebagai rakyat yang hidup di masa pemerintahan Orde Baru, kami telah kenyang melihat kebohongan dan manipulasi yang menggunakan stempel hukum dan pengadilan.

Materi dakwaan dan tuntutan Oditur Militer sama sekali jauh dari rasa keadilan rakyat. Kesaksian korban dikesampingkan dalam usaha menelusuri nasib korban lainnya yang sampai detik ini belum kembali. Meskipun tak pernah ada argumentasi atau alasan yang cukup waras yang diberikan ABRI dan Pemerintah untuk menjawab pemaparan kesaksian para korban penculikan yang telah dibebaskan, terhadap keberadaan kawan lainnya. Fakta penyiksaan dan perampasan secara sewenang hak hidup manusia mendapatkan pembenarannya secara "bermoral" atas nama kepentingan negara dan panggilan hati nurani. Negara siapa dan hati nurani seperti apa? Negara Penguasa dan nurani pelayan sang penguasa, mungkin itu predikat yang tepat untuk menggambarkan sosok sebelas pahlawan tersebut (tokoh protagonis dalam lakon pendidan "Abdi Negara—militer").

Apa kabar Mayjen. Prabowo? Anda terlihat sangat berani dengan mengakui kelakuan Anda yang suka menculik rakyat yang membiayai belanja anak istrimu dan membelikan pelum serta seragammu yang gagah itu. Selain tampak berani, ternyata Anda juga sangat berhasil menanamkan watak budak pada jajaran Anda, untuk berkorban melindungi tuannya, yaitu Tuan Mayjen. Prabowo dan Jenderal Besar Soharto. Apakah begitu pentingnya bisnis Anda, sampai nyawa manusia Anda pikir tak perlu dipertanggungjawabkan. Apa mata saya yang salah melihat Anda, waktu memberikan Kesbah dan berbadah dengan khusuk di layar TV? Atau Anda takut pada kami? Tidak pada tempatnya hal itu, kami tidak mempunyai pistol, alat setrum, atau pasukan yang akan balik menculik keluarga Anda. Kami hanya punya keyakinan bahwa tak ada salahnya menuntut keadilan; apa yang menjadi hak kami. Dan kami cuma

mata pala Anda untuk bertanggungjawab terhadap tindakan Anda atau berterus terang siapa dan lembaga apyang memerintahkan Anda untuk memisahkan kami dengan anak-anak kami, kakak kami, ayah kami dan Ibuan-Lawan kami. Kalau dalam agama dikatakan sejak manusia masuk akil baliq, maka dia bertanggungjawab sendiri atas semua tindakannya. Saya yakin Anda telah lama akil baliq.

Dari kami, para korban dan keluarga korban yang tidak jelas nasibnya hingga kini, xenis yang akan dipilkan adalah ketukan palu tekad dan janji kami pada ABRI dan Pemerintah, untuk tak sejengkal pun beranjak mundur dalam menentang kebohongan dan praktek kekerasan ABRI dan Pemerintah yang tidak bertanggungjawab (rakyat biasa menyebutnya: licik dan berjiwa rendah)

Detik ini, di sini para korban dan keluarga para korban yang belum kembali menegaskan kembali sikap kami, yaitu:

1. Tidak menganggap proses peradilan terhadap 11 tersangka pelaku penculikan sebagai proses peradilan yang jujur, adil dan sama sekali jauh dari kebenaran fakta yang terjadi.
2. Tetap menuntut pertanggungjawaban ABRI dan Pemerintah secara politik untuk mengungkapkan semua tuntas kasus penculikan dan nasib serta keberadaan korban orang hilang yang sampai detik ini tidak jelas.
3. Sebagai pihak yang dirugikan secara materiil dan spirituil, dimana telah mengalami pelanggaran hak-hak asasi oleh ABRI dan Pemerintah, maka kami akan segera menyusun materi gugatan untuk pihak-pihak yang terlibat (Nama instansi dan individu menyusul, setelah semua persyaratan terpenuhi).
4. Menyerukan kepada semua partai politik sebagai perwujudan dari kekuatan rakyat untuk bersama-sama memperjuangkan pengungkapan semua kasus pelanggaran hukum dan hak-hak rakyat, khususnya dalam kasus orang hilang. Karena kami sadar bahwa pengungkapan kasus orang hilang (penculikan) tidak terlepas dari proses perkembangan politik di Indonesia. Dan salah satu ukuran keberhasilan dari proses reformasi, adalah terungkapnya secara tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum dan hak rakyat, serta pertanggungjawabannya.

Demikian pernyataan sikap kami, atas dukungan semua pihak yang dengan tulus membantu penyelesaian kasus ini kami atas nama semua korban dan keluarga orang hilang mengucapkan terima kasih dan terus berjuang bersama.

Jakarta, 6 April 1999

Hormat kami,

Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Library & Documentation
Sabyah
| Nomor: Kompas | Tanggal: 25 - 1 - 98 |

Ketua DPA: Pangab Penentu Nasib Penculik

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), AA Baramuli, menyatakan, Panglima ABRI menjadi penentu apakah oknum ABRI yang terlibat penculikan para aktivis diajukan kepada Dewan Kehormatan Militer (DKM) atau ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Ketentuan Undang-Undang Hukum Militer memang menyebutkan bahwa Pangab yang akan menetapkan siapa yang diajukan ke DKM dan siapa yang diajukan ke Mahmil," ujar Baramuli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/7) menanggapi silang pendapat tentang jalur hukum terhadap pelaku penculikan, Mahmil atau DKM.

Dijelaskan, di kalangan angkatan bersenjata ada ketentuan pembentukan DKM untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh perwira tinggi.

Yang menetapkan siapa yang diajukan ke DKM atau ke Mahmil adalah Pangab. "Panglima yang menentukan. Di daerah Pangdam yang menentukan, tentu atas persetujuan Pangab. Tapi kalau untuk kasus penghilangan orang, Pangab yang menentukan," tegas mantan anggota DPR/MPR dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas, menilai, pembentukan DKM untuk mengusut kasus penculikan yang melibatkan oknum Kopassus, hanyalah merupakan cara ABRI untuk menghindarkan anggotanya dari hukuman pidana.

Penilaian itu dikemukakan Bintang ketika tampil sebagai pembicara dalam acara diskusi tentang "Kerusuhan Mei dan Indonesia Saat ini" di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya, Selasa lalu.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh LBH Yogyakarta. LBH Yogyakarta menyatakan rencana pembentukan DKM dikhawatirkan akan bersifat subyektif, dan untuk menghindari Mahkamah Militer (Mahmil).

Karenanya, LBH Yogyakarta memohon Pangab segera memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI untuk segera melakukan pemeriksaan dalam kasus penculikan yang dilakukan sejumlah oknum Kopassus sehingga semuanya dapat diproses di peradilan militer maupun Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti). Demikian pernyataan LBH Yogyakarta, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang (Kabid) Operasional LBH Yogyakarta, Budi Hartono, Rabu.

Diusut tuntas

Baramuli meminta agar kasus penghilangan orang diusut hingga tuntas. "Siapa saja yang terlibat harus diperiksa," katanya.

Hal ini, menurut Baramuli, untuk menegakkan hukum serta memberi kepastian hukum kepada masyarakat. "Selain itu, ABRI sebagai modal dasar bangsa satu-satunya yang saat ini belum terpecah, yang lain 'kan sudah retak. Jadi kita harus pertahankan modal dasar ini," ujarnya.

Ketua DPA mengimbau, agar 12 orang yang hilang dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, harus tetap dicari. Pemerintah bertanggung jawab dan wajib menemukan mereka. "Apalagi ada bukti bahwa mereka pernah ditahan, jadi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikannya. Kalau memang masih ada, saya kira tentu sudah lama dilepas, sebab masalahnya sekarang sudah terbuka," katanya. (ely/ody/hrd)

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, Telp. 021 - 3145518; [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 20-10-98

KSAD: Pengusutan Penculikan Tetap Berjalan

Jakarta, Kompas

Pemeriksaan dan pengusutan terhadap tersangka pelaku penculikan aktivis akan tetap berjalan, meskipun terjadi pergantian Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI dari Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin (kini Jaksa Agung Muda Intelijen) kepada Mayjen TNI Djasri Marin yang sebelumnya Wakil Komandan Puspom ABRI. Demikian diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI [illegible]

kasus itu akan diselesaikan secepatnya, tetapi tidak berarti terburu-buru supaya fakta dan bahan yang digunakan lengkap. Dengan demikian, keputusan penindakan tidak mengecewakan dan dapat setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan," kata Subagyo menjawab pertanyaan pers usai serah terima jabatan Komandan Puspom ABRI.

Sebelumnya, Syamsu menegaskan, berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penculikan akan dilimpahkan ke Oditur Militer tanggal 20 Oktober 1998. Ketika masalah itu ditanyakan kepada Djasri Marin, Komandan Puspom ABRI yang baru enggan berkomentar. "Saya akan pelajari dulu," kata Djasri ketika ditanya apakah BAP akan diserahkan Rabu (21/10).

Soal orang hilang

Menanggapi nasib 12 orang yang masih hilang, Subagyo mengatakan, pada prinsipnya masukan dari semua pihak akan diterima. Fakta-fakta yang diperoleh dari siapa pun, kata KSAD, dapat disampaikan kepada Komandan Puspom ABRI sebagai ketua tim pencari fakta untuk ditampung dan diproses sebaik-baiknya.

Sementara Syamsu mengatakan, sembilan saksi korban dan 11 tersangka kasus penculikan sudah menandatangani BAP untuk diserahkan kepada oditur militer. Secara tidak langsung Syamsu juga membantah sinyalemen Ketua Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang menyebutkan para penculik itu masih berkeliaran. "Mereka masih ada di sini (Puspom ABRI)," kata Syamsu.

Mengomentari perlunya hasil



Djasri Marin

visum et repertum korban penculikan seperti yang dikatakan Munir, Syamsu mengatakan, hasil itu tidak dapat dilampirkan dalam BAP —yang dibuat sesuai keterangan korban waktu pemeriksaan. "Visum tidak dilampirkan karena tidak ada lagi bekas-bekasnya. Bagaimana memvisumnya lagi," tandas Syamsu.

Unjuk rasa

Sekitar pukul 11.00 WIB, keluarga korban penculikan mendatangi markas Puspom ABRI untuk minta kejelasan nasib 12 korban penculikan yang belum kembali. Keluarga korban tersebut tidak diperbolehkan menemui Komandan Puspom dan diterima staf pribadi Dan Puspom Kolonel (CPM) I Ginting S di depan pagar Puspom.

"Kasus penculikan selama ini ditangani Bapak Syamsu. Bagaimana nanti kalau dialihkan. Kami mau minta kejelas[illegible]" kata Elisabeth Wahyu salah satu korban yang mengaku pernah diculik aparat. Sebelum meninggalkan tempat, keluarga korban juga menyerahkan foto korban penculikan yang belum kembali kepada Dan Puspom melalui Ginting.

Penyelesaian kasus penculikan, sejauh ini belum jelas dan transparan. Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hanyalah pemberhentian Letjen Prabowo Subianto, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Sedang kesalahan Prabowo sendiri tidak jelas. Prabowo dikatakan salah menganalisis bawah kendali operasi (BKO) tanpa ada penjelasan lebih jauh soal kesalahan analisis itu. Sementara 13 korban penculikan, sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya. (bh)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: MERDEKA | Tanggal: 25/11 98

▲ Pertemuan Bekas "Intel Swasta" Wiwid-Praka BL

Dan Puspom: Batal Tanpa Alasan Munir: Ngawur, Sok Tahu!

Jakarta, Rabu, Merdeka

Pertemuan "intel swasta" Wiwid Prasiwo dengan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka BL yang direncanakan hari ini (Rabu, 25/11) di Mako puspom, menurut Danpuspom ABRI Mayjen Djasri batal tanpa alasan yang jelas.

"Saya tidak tahu kenapa. Tapi yang jelas saya sudah menerima pemberitahuan dari Kontras mengenai pembatalan itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya diberitakan Danpuspom ABRI akan mempertemukan Wiwid dengan Praka BL, prajurit yang diakuinya telah memaksa melakukan aksi sebagai intel swasta (*Merdeka*, 24/11)

Upaya mempertemukan keduanya itu menurut Djasri dilakukan Puspom untuk mengklarifikasi kebenaran cerita Wiwid mengenai aksi penyusupan yang dilakukannya atas instruksi Praka BL.

Menurut dia, dalam surat pemberitahuan yang ditujukan kepadanya, Wiwid menyanggupi undangan pertemuan itu dilaksanakan hari ini. Namun, tiba-tiba saja kemarin diberitahu bahwa mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) itu tak bersedia memberikan keterangan, apalgi bertemu dengan Praka BL. "Saya terima pembatalannya hari ini (Selasa, 24/11) tapi tak dijelaskan alasannya," katanya.

Kepada wartawan, Dia juga menyesalkan pembatalan tersebut. "Saya minta Wiwid untuk menepati janji. Wiwid ini saya harap datang kapan saja, sampai malam pun kita ada terus. Dia kan korban dan harusnya dia *dong* yang datang kepada kita. Tetapi ya, nggak apa-apa kalau ini dianggap sebagai tindak pidana segera akan kita usut," ujarnya.

Mengenai Praka BL, Djasri mengaku sudah mencarinya. Kepada wartawan dia mengatakan pihaknya sudah mencek seseorang yang berinisial BL itu.

"Memang ditemukan prajurit yang namanya BL. Tapi kepada atasannya dia mengaku tak pernah kenal dengan Wiwid. Dan yang sekarang kita mau tanyai itu Wiwid, karena yang jelas tahu tentang Praka BL itu," ujar Djasri.

Benarkah Wiwid membatalkan rencana kedatangannya ke Puspom ABRI? Ketika dikonfirmasikan kepada koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Munir, dia menganggap pernyataan Djasril itu *ngawur*.

"Wah belum tentu, itu ngawur. Kok ya Puspom tahu-tahunya kita tidak akan hadir. Padahal Kontras belum memastikan hal itu. Sok tahu itu. Untuk pastinya kami datang atau tidak, cek saja ke Kontras jam 10.00 WIB," kata Munir ketika dihubungi *Merdeka* tadi malam.

Menurut dia, Kontras baru menerima surat undangan untuk hadir ke Markas Puspom ABRI dari Danpuspom kemarin pagi. "Jadi kami belum punya keputusan apakah memenuhi undangan tersebut atau tidak," katanya.

Sementara itu ketika diminta untuk berkomentar tentang undangan tersebut dengan nada pesimis Munir menyatakan percuma, karena akan menambah daftar orang yang patah hati atas harapan terselesaikannya beberapa kasus.(NAN/WR)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145518,3903226,3912247 Fax.3301140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: M-1 | Tanggal: 25/8-'90

Karier Militer Prabowo Tamat

■ Dia Menculik Sembilan Aktivis

ANTA (Media): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari jajaran ABRI menyusul keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto yang mengakhiri masa dinas jenderal berbintang tiga itu. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural dalam ABRI.

Keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto itu dibacakan kemarin dalam sebuah konferensi pers setelah Pangab mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sebelumnya DKP telah memeriksa ketiga perwira pasukan elite TNI-AD Kopassus masing-masing mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Dan Grup IV Kol Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Ketika membacakan keputusan tersebut Jenderal Wiranto didampingi Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo yang juga KSAD serta semua anggota DKP lainnya yakni Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Laksdya TNI Soeratmin (Irjen ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Komandan Jenderal/Danjen Akabri, serta Letjen TNI Sugiono (Wakasad)

Menurut Pangab, alasan dijatuhkannya sanksi tersebut karena ketiga perwira itu terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, Letjen TNI Prabowo yang terakhir menjabat sebagai Dan Sesko ABRI itu mengaku telah memberikan perintah menculik sembilan aktivis dan semuanya sudah dibebaskan.

Mengenai nasib 12 aktivis lagi yang sampai sekarang belum ditemukan dan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, Subagyo mengakui tidak tahu. "Yang 12 itu kita tidak tahu siapa yang menculik. Kasusnya sedang diselidiki Puspom ABRI," tegas Subagyo.

Jenderal Wiranto menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan kepada tiga perwira Kopassus itu adalah sanksi administratif. Namun, lanjut jenderal berbintang empat itu, kendati ketiga perwira terperiksa telah mendapatkan sanksi administratif, tidak tertutup kemungkinan dibawa ke Mahkamah Militer.

Menurut Wiranto, sanksi administratif itu merupakan keputusan optimal yang bisa diambil dalam kapasitas sebagai Pangab. Sebab menurut dia, DKP tidak berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat pidana.

Wiranto menjelaskan pihaknya melihat dua sisi yakni kesalahan yang dibuat dan sumbangsih mereka selama aktif berdinas pada bangsa dan negara. "Perlu juga saya tegaskan bahwa keputusan yang diambil ini tidak berada dalam tekanan siapa pun. Ini perlu saya tegaskan untuk mencegah timbulnya spekulasi yang macam-macam," ujarnya.

"Jadi kapan Prabowo es dimahmilkan," kejar wartawan.

Menjawab pertanyaan ini, Wiranto mengatakan ketiganya akan dimahmilkan jika 10 anggota terperiksa oleh Mahmil memberikan penguatan bahwa ketiganya melakukan pelanggaran pidana.

"Jadi nanti dalam proses persidangan ke-10 anggota terperiksa di Mahmil itu kan terungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang bertanggung jawab. Nah, dari keterangan-keterangan itu bisa dikembangkan apakah Prabowo, Muchdi, dan Chairawan melakukan kesalahan pidana militer atau tidak," katanya.

Usai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim DKP bergegas meninggalkan tempat, namun pers terus memburu. "Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan.

"Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," kata Wiranto.

"Lalu bagaimana dengan hak pensiunnya," kejar wartawan.

Menurut Wiranto, Prabowo akan mendapatkan hak pensiun penuh.

"Kalau Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan?" tanya wartawan lagi.

"Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinas di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto.

Subagyo mengatakan, diakhirinya dinas aktif Prabowo berarti pensiunnya dipercepat dengan hormat dan tinggal menunggu SK dari Pangab. (Edi/Wdh/D-12)

KontraS Pelayanan Klipping Divisi Informasi Dan Dokumentasi (INDOK)

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for Dissappearances and Victims of Violence

Perburuhan	Konsumen	Pertanahan	Demiliterisasi
Eko-Global	Perempuan	Lingkungan	Mafia Peradl.
DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Miskin Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	2000	2001	2002	2003	2004														
Kompas	Med In	Republika	Suara Pb	War Kot	Pos Kota	Sr Karya	Ry Mer	Bisnis In	Jkt Post	Pkr Ry																				

Keluarga Korban Penculikan Gugat Panglima TNI

Jakarta, Kompas

Empat orang yang mewakili para korban penculikan yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998, dan sampai kini belum diketahui keberadaannya, mendaftarkan gugatan perdata atas Panglima TNI (Panglima ABRI) Jenderal Wiranto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Para penggugat itu adalah Tuti (ibu kandung Yani Afri), Nurhasanah (ibu kandung Yadin Muhidin), Riwan Nefo S (kakak kandung Herman Hendrawan), dan Said Alkatiri (ayah kandung Noval Alkatiri).

Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Legal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ori Rahman kepada Kompas di Jakarta, Senin (13/8) lalu. Perkara [illegible] diterima dan didaftar dalam register PN Jaktim bernomor 183/Pdt.G/1999/PN Jkt-Tim tanggal 13 Agustus 1999.

Empat keluarga yang mewakili para aktivis yang masih belum diketahui keberadaannya selama lebih dari dua tahun itu memberikan kuasa kepada Kontras untuk bertindak atas nama mereka di depan pengadilan, menggugat Pemerintah cq Panglima TNI. Mereka yang menandatangani gugatan itu antara lain adalah Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir, Sekjen Wilfojanto, Irianto Subakir, Ori Rahman, Daniel Pogotar, Ahmad Yani, Firman Widjaja, dan Erizal Chaniago.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, paruh pertama 1997 telah terjadi penculikan terhadap 22 aktivis prodemokrasi. Mereka adalah Yani Afri, Sonny, M Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Desmond Junaidi Mahesa, Pius Lustrilanang, Suyat, Haryanto Taslam, Aan Rusdianto, Faisol Reza, Herman Hendrawan, Mugianto, Nezar Patria, Rahardjo Walujo Djati, Bimo Petrus Anugerah, Andi Arief, Abdun Nasir, Herdin Hamhalin, Ucok M Siahaan dan Yadin Muhidin.

Dari ke-22 aktivis yang diculik, sembilan di antaranya telah kembali, dan sisanya sampai saat ini masih tidak diketahui keberadaannya. Mereka yang telah kembali itu adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisal Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Kasus penculikan aktivis yang membawa nama pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pertama kali terungkap ketika korban penculikan, Pius Lustrilanang, memberikan kesaksian terbuka di hadapan anggota Komnas HAM Albert Hasibuan dan Samsuddin serta puluhan wartawan. Kesaksian Pius itu kemudian memancing korban-korban penculikan lainnya untuk memberikan kesaksian dengan cara mereka sendiri-sendiri.

Laksanakan putusan DKP

Dalam gugatannya, keluarga korban penculikan meminta pengadilan agar memerintahkan Panglima TNI memberikan penjelasan soal korban-korban penculikan yang masih belum kembali. Penjelasan ini harus dibuka oleh Panglima TNI kepada keluarga korban penculikan, media massa dan masyarakat luas pada umumnya.

Selain itu, keluarga korban penculikan juga meminta kepada majelis hakim agar menyatakan Panglima TNI sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. "Keluarga korban penculikan juga meminta agar Panglima TNI meminta maaf dan diwajibkan membayar ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp 2 milyar," pagar Ori.

Dalam gugatan itu, keluarga korban penculikan meminta pengadilan mengeluarkan perintah kepada Panglima TNI untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Isi keputusan DKP juga tidak diketahui publik. Selain itu, keluarga korban penculikan juga ke pengadilan agar merekomendasikan peradilan militer bagi ketiga perwira menengah dan tinggi yang telah terbukti terlibat dalam aksi penculikan itu.

Peradilan nurani

Peradilan terhadap para pelaku penculikan sebenarnya telah dilangsungkan di Mahkamah Militer Jakarta. Namun, proses persidangan itu, sama sekali tak mengungkap adanya penyiksaan, penyekapan terhadap korban penculikan, apalagi mengungkap keberadaan korban yang belum diketahui keberadaannya.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto hanya menerima saja pengakuan Komandan Tim Mawar Mayor (Inf) Bambang Kristiono bahwa penculikan dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Penculikan itu juga dianggapnya sebagai panggilan nurani setelah melihat adanya aktivis radikal. Persidangan pun tidak berupaya mencari tahu keterangan lebih lanjut dari atasan-atasan terlakwa yang sempat terungkap di persidangan.

Kendati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) meminta agar persidangan itu ditangguhkan—karena tidak mengungkapkan tersangka yang sebenarnya—persidangan tetap dilangsungkan. Dan vonis pun dijatuhkan. Mayor Bambang Kristiono dihukum 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI. Mereka menyatakan banding atas putusan tersebut. (hw/bdr)

VONIS TERHADAP PELAKU PENCULIKAN

Terdakwa	Vonis
1. Mayor (Inf) Bambang Kristiono	22 bulan/dipecat
2. Kapten (Inf) FS Multhazar	20 bulan/dipecat
3. Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo	20 bulan/dipecat
4. Kapten (Inf) Yulius Selvanus	20 bulan/dipecat
5. Kapten (Inf) Untung Budi	20 bulan/dipecat
6. Kapten (Inf) Dadang Hendra	16 bulan
7. Kapten (Inf) Djaka Budi Utama	16 bulan
8. Kapten (Inf) Fauka Noor Farid	12 bulan
9. Serka Sunarto	12 bulan
10. Serka Sigit Sugianto	12 bulan
11. Serka Sukadi	12 bulan

Sumber: Pusat Informasi Kompas

KontraS

Pelayanan Klipping Divisi Informasi Dan Dokumentasi (INDOK)

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for Dissappearances and Victims of Violence

Perburuhan	Konsumen	Pertanahan	Demiliterisasi
Eko-Global	Perempuan	Lingkungan	Mafia Perad.
DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Miskin Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	2000	2001	2002	2003	2004														
Kompas	Med In	Republika	Suara Pb	War Kot	Pos Kota	Sr Karya	Ry Mer	Bisnis In	Jkt Post	Pkr Ry																				

Keluarga Korban Penculikan Gugat Panglima TNI

Jakarta,*Pembaruan*

Kontras (Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan /Komisi) yang mewakili orang tua dan keluarga para korban penculikan, akhirnya memutuskan menggugat Panglima TNI ke meja hijau. Gugatan diajukan karena rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tidak ditindaklanjuti secara hukum maupun administrasi oleh pemerintah cq Panglima TNI.

Koordinator Kontras Munir kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/9) mengungkapkan, gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (1/9) pukul 15.00 WIB dan diterima panitera Deli Manthe dengan nomor registrasi 185/Pdt-6/1999/PN.Jkt-Tim. Diharapkan dalam waktu dekat perkara tersebut bisa digelar.

Orang tua dan keluarga korban penculikan yang menggugat Panglima TNI memberi kuasa kepada beberapa pengacara dari Kontras. Mereka yang mengajukan gugatan adalah Tuti (ibu kandung Yani Afri yang hilang diculik sejak 26 April 1997 lalu), Nurhasanah ibu kandung Yadin Muhidin (14 Mei 1998), Ridwan Nefo S kakak kandung Herman Hendrawan (12 Maret 1998) dan Said Alkatiri ayah kandung Noval Alkatiri (29 Mei 1997).

Para pengacara yang tergabung dalam Kontras sebagai kuasa hukum masing-masing Munir, Bambang Widjojanto, Trianto Subiakto, Firman Wijaya, Ori Rahman, Ahmad Yani, Chairulsyah, Daniel Panjaitan, Badaruzaman, Aulia Hidayat, Erizal Chaniago, Mujahidin dan Lukmanul Hakim.

Menurut Koordinator Kontras, substansi gugatan terhadap Panglima TNI tersebut adalah sikap Panglima TNI yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DKP tentang para pelaku penculikan. Karena itu, tuntutannya adalah Panglima TNI dihukum untuk menjelaskan secara transparan mengenai kasus penculikan itu.

Karena dalam rekomendasi DKP, tuturnya, sudah disebutkan supaya ada sanksi hukum misalnya administratif, tetapi ternyata rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Proses hukum lewat Mahkamah Militer juga tidak menyentuh implikasi rekomendasi sanksi hukum dan administrasi dari DKP.

Terpaksa Menggugat

Panglima TNI sebagai tergugat, menurut Kontras, pada 24 Agustus 1998 di depan wartawan dalam dan luar negeri telah membacakan keputusan DKP tentang kasus penculikan di mana disebutkan bahwa alasan dijatuhkannya sanksi kepada para perwira masing-masing Letjen TNI Prabowo Subiakto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan, karena terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan terbukti melakukan pelanggaran HAM.

Ketika itu dijelaskan pula, perwira yang dipensiunkan DKP ternyata memenuhi unsur pidana maka tidak seorang pun lolos dari jeratan hukum. Penjelasan itu mestinya ditindaklanjuti secara hukum seperti rekomendasi DKP, tetapi nyatanya tidak sehingga Kontras yang diberi kuasa para orang tua dan keluarga korban penculikan terpaksa menggugat Panglima TNI.

Menurut data Kontras, berdasarkan laporan dari masyarakat diketahui bahwa sejak April 1997 telah terjadi serangkaian penculikan yang menimpa 22 orang. (131)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Library & Documentation
Subyek: | Sumber: Republika | Tanggal: Kamis, 8-8-98

Koordinator Kontras, Munir SH

'DKP Melegalkan Lembaga Ekstra Yudisial'

Selama ini Kontras dikenal sebagai pihak yang paling getol memperjuangkan agar para tersangka pelaku penculikan dibawa ke pengadilan. Menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi latar belakangnya?

Di luar penolakan DKP, kami menganggap persoalan pemeriksaan terhadap para perwira memang harus berakhir di pengadilan. Sebab, ini juga akan dapat memberikan dampak positip kepada masyarakat luas, bahwa hukum dikenakan untuk memutuskan setiap persoalan. Jadi motif kami adalah membangun kepercayaan masyarakat kepada hukum. Dan di sini pula diharapkan, untuk masa ke depan, masyarakat akan melihat penberlakuan hukum secara tidak diskriminatif. Siapa pun yang bersalah maka harus dihukum. Itu saja.

Apakah Anda tidak takut dituduh punya motif politik?

Sama sekali tidak. Bagi kami interest politik memang ada. Tapi maksudnya itu bukan interst kelompok, perorangan, atau golongan. Bagaimana kami bercita-cita untuk membangun negara hukum. Bagaiamana membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan yang ada. Nah, itu jelas hanya bisa dicapai melalui kepentingan politik ala kami. Sekali bila ada kepentingan politik, kepentingan tersebut adalah bukan untuk golongan, maupun perorangan. Tapi untuk semua orang tanpa terkecuali.

Bagaimana bila hasil DKP nanti hanya sekedar memberhentikan para perwira dari karir militernya, apa yang akan Kontras lakukan?

Sebetulnya, bagi saya bukan pertanyaan apa yang akan Kontras lakukan. Tapi, apa dampaknya bila dengan DKP maka proses peradilan tidak dilakukan. Nah, bagi saya menyikapi hal ini ada beberapa pemikiran. Pertama, bila peradilan tidak dilakukan maka akan timbul keraguan di kalangan masyarakat bahwa perubahan yang kini tengah terjadi ternyata tidak bisa menjamin terbentuknya iklim negara yang demokratik. Alhasil optimisme hukum akan menjadi dikalahkan dengan kepentingan yang lain.

Kedua, bila tidak dilaksanakan maka masyarakat dipastikan akan terjebak lagi kepada problem ketidakpercayaan kepada prosesi hukum. Dan ini dalam jangka panjang berbahaya, yakni masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri, yakni melalui berbagi aksi tindak pidana kekerasan, misalnya kerusuhan, penculikan dan pembakaran.

Pekan lalu, pihak Kontras menyebutkan bahwa pembentukan DKP adalah cacat hukum. Apa alasan Anda terhadap pernyataan ini?

Bagi kami DKP catat hukum, baik itu secara substansial maupun secara prosedural. Yang prosedural adalah berdasarkan keputusan Pangab tahun 1995 nomor 438, yang itu mengatur tentang dibentuknya DKP. Di situ terlihat, prasyarat pembentukan atau orang yang bisa diajukan ke DKP adalah mereka yang telah dijatuhkan hukuman minimal 3 bulan ke atas. Atau pula telah dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan atau skorsing oleh Mahkamah Militer. Nah, dengan melihat ini maka seharusnya orang yang diajukan DKP adalah mereka yang sudah terlebih dahulu mendapat putusan oleh mahkamah militer.

Yang substansial?

Cacat yang substansial itu ada tiga hal. Pertama, bila DKP menjadi lembaga administratif ABRI yang keputusannya itu nanti bisa mengabaikan keputusan pengadilan, maka

CUKUP KAH
REKOMENDASI DKP
TANPA MAHMIL ?

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3904226; 3904227 Fax. 021 - 3301 10
email: ylbhi@indo.net.id

DKP jelas sudah menjadi sebuah lembaga yang mempraktekan diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. Kedua, bagi kami dengan diberlakukannya DKP adalah juga merupakan cerminan dari adanya intervensi terhadap lembaga peradilan. Alhasil, keputusan DKP kami anggap tetap bukan keputusan peradilan, melainkan hanya sebatas keputusan politik intern ABRI saja.

Ketiga, DKP terlihat akan menjadi sarana untuk melakukan pelegalan terhadap badan-badan ekstra yudisial. Dan ini jelas, bila DKP terus dipaksakan, maka rencana kita untuk membentuk negara hukum dipastikan akan gagal kita wujudkan.



Untuk konteks makro, kasus orang hilang sudah terjadi semenjak tahun 70-an.

Kalau demikian, apakah pembentukan DKP itu dilatar belakangi adanya rekayasa politik?

Saya kira bukan sekedar rekayasa politik. DKP adalah sebuah keputusan yang sangat berbahaya bagi kepentingan penegakan hukum.

Selain Kopassus, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa instansi lain juga terlibat dalam aksi penculikan. Kenapa instansi lain belum diusut?

Sejak awal memang kami sudah mengatakan, penculikan tidak hanya dilakukan oleh Kopassus saja. Instansi lain, termasuk Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, beberapa Koramil, Kodim, atau juga —seperti yang dikatakan Kapuspom bahwa BIA— juga ikut melibatkan diri. Nah, bila dilihat dengan cara pandang ini, saya khawatir bila hanya menunjuk Kopassus maka itu adalah sebuah usaha pihak ABRI untuk melokalisir keterlibatan oknum pelaku penculikan. Sehingga dengan demikian, kami sampai hari ini melihat pihak ABRI masih belum terbuka total terhadap kasus penculikan. Mereka terlihat masih melakukan pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu.

Apa yang Anda harapkan dari pengungkapan kasus orang hilang?

Kalau kita melihat dari konteks sempit, yakni hanya mengkaitkan pada 24 orang, maka akan terjadi tiga hal. Pertama, akan terjadi pertanggungjawaban hukum, yakni siapa pun yang terlibat akan dipidanakan. Kedua, akan ada pula pertanggungjawaban politik, artinya ABRI akan meminta maaf akan terjadinya kasus tersebut. Ketiga, adanya pertanggungjawaban dari pemerintah, yakni melakukan rehabilitasi terhadap hak-hak keluarga korban serta menghilangkan rasa takut yang kini berada di dalam benak masyarakat.

Tapi untuk konteks makro, kasus orang hilang sudah terjadi semenjak tahun 70-an itu mempunyai konsekuensi dua hal. Pertama, ABRI akan mengakui kesalahannya dengan secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat. Yang kedua, akan terjadi komitmen bahwa tidak akan terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap hak-hak masyarakat sipil. ■ uba

KOMPAS 27 OCT 1998

Keluarga Korban Penculikan:

Kami akan Berkemah di Puspom ABRI

Jakarta, Kompas

Keluarga orang hilang dan korban penculikan yang tergabung dalam Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi), Senin (26/10), menggelar tikar, poster, dan spanduk, di ruang tunggu tamu Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, Jakarta, setelah gagal bertemu dengan Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Djasri Marin. Mereka bertekad berkemah di Puspom ABRI sampai ada jawaban tenteng keberadaan 13 aktivis korban penculikan yang belum jelas.

"Saya ingin berterus terang, kalau tidak ada jawaban yang pasti (soal keberadaan 13 aktivis), belum tahu apakah dia meninggal atau hidup, kami akan berkemah di sini sampai ada jawaban. Kami ini sudah pusing, sudah bertahun-tahun. Sudah kayak orang gila saya ini. Sudah tersiksa batin orang-orang tua ini," ungkap Ny Tuty, ibunda Yani Afri kepada pers di Puspom ABRI usai bertemu dengan Wakil Komandan Puspom ABRI Brigjen Iding Alidin.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, kedatangan keluarga orang hilang ke Puspom ABRI tersebut merupakan hasil pembicaraan Kontras dengan Wakil Komandan Puspom ABRI Brigjen Iding Alidin. Aksi unjuk keprihatinan itu berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Aksi berakhir setelah ada kepastian keluarga korban bisa bertemu Mayjen Djasri Marin, Selasa (27/10) malam ini.

Ruang tunggu tamu Puspom ABRI yang biasanya sepi, berubah menjadi ramai dengan ibu-ibu yang duduk di tikar bersama anak dan cucu mereka. Kursi yang biasanya tersusun rapi, dipinggirkan dan digantikan dengan dua lembar tikar yang sudah disiapkan sebelumnya. Di depan para ibu itu, terpampang foto-foto orang hilang yang hingga kini nasibnya belum jelas, dan di dinding menempel spanduk berwarna dasar hijau dengan tulisan "ABRI Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kasus Penculikan".

Ny Tuty yang datang bersama anak dan cucunya menegaskan, dirinya hanya ingin kepastian apakah anaknya sudah meninggal atau masih hidup.

Ny Tuty dan keluarga orang hilang bertekad untuk mengulang lagi aksi unjuk keprihatinan mereka dengan berkemah di Puspom ABRI, jika Komandan Puspom ABRI pun tidak bisa menjelaskan nasib 13 korban orang yang masih hilang. "Kalau tidak boleh di dalam, kami akan berkemah di luar. Asal tega saja Bapak-bapak kita di sini lihat orangtuanya kayak begini. Untuk apa lagi tidak diselesaikan, tidak ada gunanya," tandasnya.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Clementino dos Reis Amaral, mengatakan, pihak Komnas HAM merasa malu terhadap penanganan kasus orang hilang yang berlarut-larut. "Kami sudah didatangi pihak keluarga korban dan menghubungi pemerintah, tetapi tidak ada perkembangan," katanya.

Amaral mempertanyakan, pihak ABRI tidak dapat mengatakan, tidak mengetahui keberadaan korban yang masih hilang karena pelaku sudah tertangkap dan instansi militer yang menyekap para korban sudah diketahui.

Kasus Trisakti

Sementara itu, sekitar pukul 09.00 WIB, wakil empat keluarga korban penembakan mahasiswa Trisakti bersama Senat Mahasiswa dan wakil rektorat Universitas Trisakti (Usakti), bertemu dengan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto di Departemen Pertahanan Keamanan, Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, menurut Pembantu Rektor III Usakti I Komang Sukaarsana, pihak keluarga dan keluarga besar Trisakti ingin memperoleh ketegasan dan penjelasan secara langsung dari Pangab mengenai pengusutan tuntas terhadap peristiwa 12 Mei di kampus Usakti. Menhankam secara tegas mengatakan selaku pimpinan ABRI akan mengusut kasus tersebut secara tuntas dan secepatnya, serta tidak ada maksud dari pimpinan ABRI untuk merekayasa dan menutup-nutupi pengungkapan kasus itu. (oki/bb)

KOMPAS 28 OCT 1998

Trauma Masih Bayangi Korban Penculikan ..

KEDATANGAN korban penculikan Feisol Reza ke Markas Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, Jakarta, Senin (26/10), bukanlah yang pertama. Sebelumnya ia pernah diperiksa, beberapa lama setelah dibebaskan penculiknya. Meskipun demikian, Reza tak bisa menahan takut ketika mendengar suara terompet tanda apel di Markas Puspom ABRI pukul 15.00 WIB.

"Begitu terompet berbunyi, Reza langsung melompat dan lari ke saya. Jangan-jangan dulu saya disekap di sini, kata dia. Bunyi terompet itu ternyata menghukum dia. Setelah itu ke kamar mandi pun dia minta dikawal. Trauma semacam itu adalah hal yang akan muncul di waktu-waktu tertentu, entah sampai kapan," ungkap Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, ketika berbicara pada kegiatan "Sosialisasi Hak Asasi Manusia", Selasa (27/10) di Universitas Borobudur, Jakarta.

Sekilas, tanda-tanda trauma akibat penculikan itu memang tidak akan terlihat pada korban penculikan. Sembilan korban penculikan yang sudah bebas, menjalani kehidupan mereka kembali seperti biasa, seolah tak ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Padahal, trauma akibat penculikan dan siksaan para penculik itu masih membekas.

Aan Rusdianto menceritakan, suatu ketika saat berkumpul bersama beberapa teman, tanpa sengaja tangannya tersundut rokok yang masih menyala. "Saat itu saya berteriak keras sehingga semua orang kaget. Saya sendiri juga kaget, reaksi spontan yang mengingatkan pengalaman waktu diculik itu bisa muncul sedemikian cepat," ungkapnya.

Aan yang diculik bersamaan dengan Nezar Patria dan Mugiyanto itu yang disiksa dua hari dua malam, menuturkan, sejak dilepas penculiknya, korban berusaha sendiri untuk bangkit kembali secara psikologis. Korban belum mendapatkan bimbingan psikologis.

Munir menambahkan, ketika beberapa orang dari korban penculikan sempat tinggal di kediamannya, Munir beberapa kali harus bangun tengah malam untuk membangunkan korban penculikan itu karena mereka bermimpi masih berada di tempat penyekapan. "Padahal itu hampir dua bulan setelah mereka dilepas. Itu adalah satu siksaan psikologis luar biasa yang belum bisa diobati," ucap Munir.

***

BAGI para korban penculikan adalah sebuah "perang batin" untuk terus memperjuangkan terungkapnya kasus penculikan, karena dalam upaya untuk mengungkap kasus ini mereka kembali harus berhadapan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan kembali kenangan pahit yang pernah mereka alami. Terlebih lagi persoalan penculikan masih menyisakan sejumlah orang hilang yang nasibnya belum jelas. Ungkapan perasaan para orangtua korban itu menjadi elemen tersendiri yang melengkapi pengalaman traumatis Reza dan kawan-kawan serasibnya.

Tekad korban penculikan dan keluarga korban sudah bulat. Mereka ingin membangun sebuah masyarakat baru yang benar-benar menghormati kemanusiaan, dengan menuntaskan kasus pelanggaran berat atas kemanusiaan itu dan menuntut pertanggungjawaban. Mereka rela berletih-letih mendatangi kampus untuk menebarkan benih peduli kemanusiaan. **(oki)**

Merdeka

- 4 SEP 1998

Ada Kemah Keprihatinan

Keluarga 14 Korban Penculikan

"Bagaimana Kalau Prabowo Juga Diundang..."

Jakarta, Jumat, Merdeka

Setelah mengunjungi Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertengahan Agustus lalu, keluarga 14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya hingga kini akan bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Pertemuan tersebut rencananya akan dilaksanakan minggu depan sebelum mereka menggelar "Kemah Keprihatinan" di halaman Gedung YLBHI Jakarta tanggal 14-16 September mendatang.

"Kami mengunjungi Ibu Mega dan Pak Amien selain untuk mengutarakan perasaan juga berkaitan dengan belum jelasnya nasib anak-anak kami. Kami juga bermaksud mengundang mereka berpartisipasi dalam acara ini," kata Said Alkatiri orang tua dari salah seorang korban penculikan Noval Alkatiri kepada wartawan di kantor YLBHI, kemarin.

Selain itu, mereka juga mengundang kehadiran serta partisipasi Gus Dur, tokoh masyarakat lainnya serta seluruh masyarakat. Bahkan secara spontan Tuty, ibu dari Yanny Afri, menyatakan kalau mereka juga mengundang bekas Dan Kopassus Letjen TNI Prabowo untuk hadir dalam acara tersebut.

"Bagaimana kalau kita undang juga Prabowo untuk datang, supaya dia tahu bagaimana perasaan kita, keluarga korban saat ini," kata Tuti spontan. Tapi setelah itu dia terlihat tersipu-sipu.

Selanjutnya, menurut Said Alkatiri, "Kemah Keprihatinan" itu merupakan perwujudan dari sikap keprihatinan mereka akan nasib anggota keluarga yang belum kembali serta mengajak masyarakat bersikap peduli.

"Belum jelasnya nasib anggota keluarga membuat kami merasa prihatin dan kecewa. Bagi kami, keputusan DKP sama sekali tidak berarti apa-apa. Yang penting, bagaimana anggota keluarga kami dibebaskan dan bisa kembali," ujar Said yang saat itu didampingi oleh ibu dari Yanny Afri, Ibu dari Ucok Munandar, salah seorang korban penculikan Aan Rusdianto dan koordinator Kontras Munir.

Selain itu, mereka juga mengaku sangat kecewa dengan ketidakseriusan ABRI dalam mengungkap secara tuntas kasus penculikan ini. Oleh karenanya mereka tetap menuntut anggota keluarga mereka yang diduga masih disekap segera dibebaskan. Dan itu merupakan tanggung jawab ABRI.

"Tidak ada kata putus asa bagi kami untuk terus berjuang agar anak-anak kami segera kembali. bahkan kalau perlu kami akan mengadukan hal itu ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pertengahan Oktober mendatang. Untuk biayanya, kami akan mengusahakannya sendiri," tegas Said.

Sementara itu Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir membenarkan bahwa keluarga 14 korban penculikan tersebut ingin mengadukan nasib mereka ke komisi HAM PBB. Menurut Munir, keluarga korban telah memperoleh undangan berkaitan dengan masalah mereka.

Mereka, antara lain, sudah diundang oleh komisi khusus untuk orang hilang yang merupakan suatu organisasi keluarga untuk penghilangan orang secara paksa. Juga dari organisasi orang-orang hilang di negara-negara Amerika Latin serta organisasi orang hilang Asia Pasifik.(WR)

Suara Karya - 3 SEP 1998

Kasus 14 Korban Penculikan Mungkin Dibawa Ke Komisi HAM PBB

JAKARTA (Suara Karya): Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Munir SH kembali mendesak agar 14 korban penculikan yang hingga kini belum ditemukan segera dibebaskan. Ia juga menghimbau agar kasus penculikan dan orang hilang segera diselesaikan secara hukum demi citra baik Indonesia di dunia internasional.

"Saya masih optimis bahwa kasus ini akan bisa diselesaikan. Saya melihat belum mentok. Proses penyidikan di Polisi Militer tampaknya mengalami hambatan politis. Dalam bergerak POM masih dalam bayang-bayang politik ABRI," kata Munir ketika dihubungi *Suara Karya*, Selasa (1/9) lalu.

Menurut Munir, sebaiknya kasus penculikan yang melibatkan tiga Perwira ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol TNI Chairawan dapat segera dituntaskan di dalam negeri. Sebab, kalau tidak selesai-selesai dan terkesan berlarut-larut bisa saja kasusnya akan dibawa ke dunia internasional yang berdampak, dapat membawa citra buruk Indonesia di mata dunia.

Munir menjelaskan, paling tidak ada tiga lembaga internasional yang bisa menangani kasus penculikan dan orang hilang tersebut apabila di dalam negeri tidak terselesaikan.

Ketiga lembaga internasional tersebut adalah, pertama, Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Denhaag, Belanda. Tuntutan bisa dilakukan apabila ada salah satu negara yang mengajukan Indonesia sebagai tergugat dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kedua, pengadilan di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Kendati Indonesia belum termasuk negara penandatangan konvensi ini (usulan untuk ikut menandatangani konvensi ini masih dipelajari DPR), namun Indonesia tetap bisa diseret ke peradilan ini.

Sanksi hukuman yang dijatuhkan di peradilan ini sifatnya individual. Pelaku kejahatan bisa dipersonagratakan. Seperti dalam kasus Sintong Panjaitan pada peristiwa di Timtim beberapa tahun lalu, yang mengakibatkan ia dipersonagratakan di beberapa negara Eropa.

Ketiga, Persidangan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss. Akibat paling berat dalam persidangan ini, Indonesia bisa terkena resolusi berupa sanksi ekonomi. Sebagai contoh telah diterapkan di beberapa negara Amerika Latin, seperti Kuba, Cili, Venezuela, dan Nikaragua. Sanksi serupa pernah pula diberlakukan terhadap Cina dalam kasus Tianemen.

Hingga kini, Kontras belum mengaraikan untuk menyelesaikan kasus penculikan dan orang hilang di Indonesia ke dunia internasional. Namun beberapa kemungkinan telah dijajagi, yakni dengan mengirimkan dua wakilnya sejak awal Juli lalu ke Komisi HAM PBB di Jenewa. "Salah satunya adalah Mugiyanto, korban penculikan lainnya," kata Munir.

Terus Mendesak

Tiga terdakwa utama kasus penculikan para aktivis sudah diketahui. Mereka yang tercatat sebagai anggota Kopassus telah dikenai tindakan administrasi oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ketiganya pun terancam kemungkinan dimahmilkan atau diseret ke pengadilan.

Dalam pengakuannya, Prabowo dan kawan-kawan telah mengaku menculik 9 aktivis. Namun siapakah mereka hingga kini belum dijelaskan secara rinci. Apakah di antara mereka adalah aktivis-aktivis korban penculikan yang telah dibebaskan, seperti Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, Faisol Reza, dan Raharjo Waluyo Jati. Atau mereka termasuk di antara 14 korban yang kini masih belum ditemukan. Hal ini masih menjadi tanda tanya besar.

Tak ayal, kalau Kontras terus mempersoalkannya dengan mendesak berbagai pihak agar membantu pembebasan 14 korban penculikan lainnya yang belum ditemukan. Desakan ini di antaranya ditujukan kepada Menhankam/Pangab dan Kapuspom ABRI yang menangani langsung kasus penculikan tersebut. Kontras juga telah meminta dukungan dari Ketua Umum NU Abdulrachman Wahid agar ikut mengupayakan pembebasan mereka.

"Kita sedang menggalang aksi bersama keluarga korban untuk mengupayakan pembebasan mereka," kata Raharjo Waluyo Jati, aktivis korban penculikan yang kini bergabung ke Kontras. "Saya pernah bertemu beberapa korban saat dalam penyekapan. Saya bisa merasakan penderitaan mereka," tandas mahasiswa FKSS UGM yang terpaksa cuti kuliah ini.

Para korban yang kini sedang diupayakan pembebasannya adalah M Yusuf, Yani Afri, Sonny, Noval Alkatiri, Deddy Hamdun, Ismail, Suyat, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Yadin Muhidin, Hendra Hambalie, Ucok M Siahaan, dan Adun Nasir.

Dalam upaya mencari mereka, Kontras juga telah mencocokkan berbagai temuan mayat di Lampung, Cirebon, dan Kepulauan Seribu; namun hasilnya nihil. "Semuanya masih belum jelas. Yang kita harapkan, nasib mereka perlu dijelaskan entah masih hidup atau sudah meninggal. Ini penting agar keluarganya tak penasaran," kata Happy Hermawan, Staf Investigasi Kontras.

Tercatat beberapa keluarga korban aktif mendatangi Kontras untuk menanyakan nasib keluarga masing-masing. Mereka juga ikut mengidentifikasi penemuan beberapa mayat di Cirebon dan Kepulauan Seribu.

"Kalau dia Noval, saya tahu persis. Dia punya ciri di bagian telinganya. Dari sekian mayat yang saya identifikasikan, saya belum menemukan anak saya," kata Ibu Noval. "Kami keluarga sudah rindu sama Deddy Hamdun. Yang saya inginkan adalah kejelasan nasib anak saya," kata ayah Deddy.

Berbagai spekulasi sempat muncul berkaitan dengan nasib para korban penculikan. Happy Hermawan, misalnya, masih optimis sebagian besar korban masih hidup. Tapi Desmond J Mahesa justru pesimis dan memperkirakan para korban sudah meninggal. Alasannya? "Saya pernah di dalam. Saya tahu persis; semakin gencar pemberitaan pers, semakin keras bentuk penyikasaan yang saya alami," kata Desmond. (P-4)

MEDIA INDONESIA

- 8 SEP 1998

Pius Berencana Kunjungi Cijantung

JAKARTA (Media): Hendardi, pengacara Pius Lustrilanang, merencanakan agenda klarifikasi kliennya untuk melihat lokasi penyekapan di Markas Komando Kopassus Cijantung bersama Komandan Puspom ABRI, Mayjen TNI Sjamsu D. Jalal.

"Kami sudah merencanakan bersama Pak Sjamsu untuk meninjau lokasi penyekapan Pius Rabu mendatang. Rencana ini sudah saya bicarakan bersama Pak Sjamsu sepekan sebelumnya. Tentu saja, sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pius pada akhir Agustus 1998. Saya tinggal menunggu koordinasi dari Pius dan Puspom ABRI untuk meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP)," kata Hendardi kemarin. Sebelumnya, Sjamsu menyatakan dari para korban penculikan yang dilakukan oknum Kopassus itu, tinggal Pius yang belum bersedia memberikan keterangan kepada Puspom. Sedangkan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), Andi Arif, sudah memberikan keterangan tambahan.

Penculikan sejumlah aktivis meruyak ke permukaan berkaitan dengan makin derasnya gelombang reformasi yang dimotori para mahasiswa. Peristiwa itu menjadi lebih jelas setelah Pius, aktivis Aliansi Demokratik Rakyat (Aldera), berani memberikan penjelasan di hadapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebetulnya, selain Pius, ada sejumlah akitivis lain yang dilepas para penculik. Namun waktu itu hanya dialah yang berani memberikan kesaksian terbuka.

Dalam penjelasannya, Pius mengaku menjalani siksaan berat. Setelah memberikan keterangan Pius langsung melarikan diri ke Belanda selama lebih dari tiga bulan. Di sana dia aktif memberikan pengalamannya di sejumlah negara Eropa.

Kesaksian Pius kemudian diiringi penuturan pengalaman sejumlah aktivis prodemokrasi lain yang juga diculik. Mereka di antaranya Desmon J. Mahesa, Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezar Patria, Mugianto, dan Andi Arif. Haryanto Taslam masih menyimpan kisah penculikannya.

Dalam pengakuannya kepada Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto, menyatakan hanya menculik sembilan aktivis prodemokrasi. Namun jenderal yang dikenal cemerlang itu tidak menyebutkan identitas aktivis yang diculiknya. Yang pasti, waktu itu Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo HS, menjelaskan Prabowo telah melakukan kesalahan dalam menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO). Meski begitu, Pangab telah menjatuhkan sanksi adminstratif berupa pemberhentian Prabowo dari tugas kemiliteran.

Sejauh ini, Puspom ABRI yang kini masih menahan 10 anggota Kopassus yang terlibat penculikan, belum memberikan keterangan tambahan. Mereka juga tidak menjelaskan perkembangan tahapan selama penyidikan anggota Kopassus itu berlangsung. (Was/U-4)

pernyataan pak prabowo Sby penculikanya. (10 org)

KOMPAS 11 SEP 1998

Pius Lustrilanang Beri Kesaksian di Puspom ABRI

Jakarta, Kompas

Pius Lustrilanang, Kamis (10/9), memenuhi undangan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI untuk memberikan kesaksian atas penculikan yang telah dialaminya. Pius berharap melalui kesaksiannya itu, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto bisa segera memberikan penjelasan tentang nasib korban penculikan yang belum kembali. Pengadilan militer adalah satu-satunya jalan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.

Kedatangan Pius ke Puspom ABRI didampingi Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi dan sejumlah pengacara PBHI, dan diterima langsung oleh Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin.

"Pada prinsipnya kedatangan saya ini adalah untuk membantu percepatan proses penyelesaian penyidikan kasus penculikan yang sampai saat ini belum sampai pada penyelesaian yang signifikan. Saya berharap agar kedatangan saya di sini dapat membantu banyak dalam proses menyelesaikan kasus ini secara tuntas," ungkap Pius, korban penculikan yang pertama kali memberikan kisah penculikannya kepada masyarakat.

Pengadilan militer

Aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) itu menekankan lagi bahwa pengadilan militer adalah satu-satunya alat untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Penyelesaian dalam DKP (Dewan Kehormatan Perwira) tidak menyelesaikan persoalan sama sekali dan hanya penyelesaian administratif belaka.

Menurut Hendardi, undangan Puspom kepada Pius disampaikan Rabu lalu dan semula dijadwalkan untuk minggu depan. Namun karena kesibukan Pius, maka jadwal itu dipercepat menjadi hari Kamis. Kesaksian Pius di Puspom ini hanya merupakan salah satu usaha di samping usaha untuk mendesakkan pengusutan atas kasus orang hilang ini, khususnya menyangkut motif politik di belakang ini.

Hendardi menegaskan, tentu masih banyak harapan dari semua pihak agar ada penjelasan dari ABRI tentang 13 orang yang masih hilang. "Kami menginginkan agar ada tahap demi tahap yang bisa memberikan informasi, sejauh mana langkah yang sudah ditempuh untuk mencari orang hilang ini, karena ini sudah menjadi pengetahuan publik," ungkapnya.

Belum diketahui

Sementara itu, Syamsu menjelaskan, Puspom ABRI, para korban dan keluarga korban berada dalam pihak yang sama, yaitu pihak yang menginginkan kasus ini cepat selesai secara tuntas. "Sampai saat ini permasalahan tentang keberadaan orang yang hilang belum jelas," ujarnya.

Akan tetapi, Syamsu melanjutkan, Puspom terus bekerja untuk menjawab pertanyaan mengenai nasib mereka itu, dengan mengerahkan penyelidik Puspom ke berbagai tempat. Namun sampai saat ini hasil penyelidikan itu belum bisa disampaikan, agar tidak menggangu tahap penyelidikan yang tengah dilakukan. "Jika dalam proses penyidikan didapatkan temuan baru dan titik terang penuntasan masalah, saya akan segera mengadakan jumpa pers," janji Syamsu.

Ia menekankan, ABRI tetap bertekad menegakkan disiplin dan tata tertib di tubuh ABRI. Diakui, DKP memang belum menyelesaikan soal penculikan karena itu hanya tindakan administratif. "Insan pers dan masyarakat tidak perlu ragu mengenai kinerja Puspom. Puspom telah dan akan terus bekerja ekstra keras agar kasus ini bisa selesai dengan baik dan benar. Yang salah harus dihukum dan yang benar dinyatakan benar," tegasnya. (oki)

SUARA PEMBARUAN 11 SEP 1998

Pius Minta Pangab Saksikan Rekonstruksi

Jakarta, *Pembaruan*

Mantan korban penculikan, Pius Lustrilanang, meminta Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk menyaksikan langsung acara rekonstruksi di tempat kejadian perkara sehingga detail kasus diketahui pimpinan tertinggi ABRI itu.

Dalam acara rekonstruksi itu nantinya Pius akan mengungkapkan detail pengalamannya saat disekap selama hampir 2 bulan di tempat tersebut.

Rekonstruksi diperlukan untuk mempercepat upaya pengungkapan motif politik di balik penculikan sejumlah aktivis.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang kuasa hukum Pius dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Dwi Ria Latifa, kepada *Pembaruan* di Jakarta Kamis malam.

Desakan Pius disampaikan kepada pemeriksa dari Puspom ABRI yang menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (A-14)

Suara Karya 19 SEP 1998

Pius Penuhi Undangan Dan Puspom ABRI

JAKARTA (Suara Karya): Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI, Mayjen TNI Syamsu D SH menegaskan, permasalahan tentang keberadaan dan kondisi 14 orang yang diduga hilang sampai saat ini belum jelas, masih disidik dan diusut. "Kepada siapa saja yang memiliki kepedulian, agar tidak segan-segan dan tidak takut memberikan masukan," kata Syamsu, ketika menerima Pius Lustrilanang, di Markas Besar POM ABRI, Jakarta, Kamis.

Pius Lustrilanang, Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi rakyat (Aldera)- korban penculikan, akhirnya memenuhi panggilan Puspom ABRI. Ia datang ke Markas Besar POM ABRI didampingi Direktur PBHI Hendardi. Pertemuan Dan Puspom ABRI dengan Pius ini diliput oleh puluhan wartawan media cetak dan elektronik.

Menurut Syamsu, sesuai arahan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, ABRI akan berupaya maksimal menuntaskan kasus penculikan para aktivis dan orang hilang lainnya. ABRI tetap pada komitmennya dan akan selalu komit terhadap pemeliharaan serta penegakkan disiplin dan tata tertib di tubuh ABRI. "Apalagi menyangkut masalah penculikan aktivis yang begitu merebak," kata Jenderal berbintang dua itu.

Berdasarkan komitmen tersebut, menurut Dan Puspom ABRI, masyarakat dan pers tidak perlu ragu terhadap kinerja Puspom ABRI sebagai institusi penyidik. "Puspom ABRI telah dan akan terus bekerja ekstra keras agar kasus ini cepat selesai dengan baik dan benar. Moto terbaik bagi rakyat, terbaik bagi ABRI adalah acuan kerja Puspom ABRI," kata Syamsu.

Kedatangan Pius Lustrilanang sebagai saksi korban ke Puspom ABRI, sangat dihargai oleh Dan Puspom ABRI karena diharapkan dapat membantu proses penuntasan masalah. "Saya perlu katakan, saat ini Pius dan korban serta keluarganya maupun Puspom ABRI, berada dalam pihak yang sama, yaitu sama-sama pihak yang menginginkan kasus ini cepat selesai secara tuntas," katanya.

Syamsu juga mengungkapkan, dengan kesediaan Pius untuk membantu Puspom ABRI, maka diharapkan ada temuan baru yang bisa dikembangkan, sehingga berkas perkara 11 oknum anggota Kopassus yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, bisa segara diajukan ke mahkamah militer. Sekarang ini belum bisa ditargetkan kapan berkas perkara itu selesai untuk diajukan ke mahkamah militer, karena masih perlu dicari bukti baru. "Kalau BAP dinilai sudah lengkap dengan bukti, maka baru diajukan ke mahkamah militer," kata Syamsu, seraya menambahkan, jika dalam proses penyidikan didapatkan temuan-temuan baru dan merupakan titik terang penuntasan masalah, segera akan diadakan jumpa pers.

Di tempat yang sama, Pius Lustrilanang kepada wartawan mengemukakan, sejak awal ia yakin bahwa orang yang menculiknya adalah dari kesatuan Kopassus. Ia juga menduga bahwa pelaku penculikan tidak berasal dari hanya satu kesatuan. "Operasi intelejen itu tidak pernah dari satu instansi. Apalagi di Jakarta, paling tidak Kodam juga harus tahu. Tapi biarkan penyidikan yang akan membuktikan di pengadilan," katanya.

Pius juga menduga ada beberapa rekannya yang kemungkinan sudah meninggal dunia. Ketika ditanya, bagaimana ia bisa berkesimpulan demikian, Pius mengemukakan, ketika ia diculik 4 Februari 1998, Sony dan Rian sudah 9 bulan berada di sana (tahanan-red), dan menurut keterangan Sony, demikian, Pius, Deddy Hamdun, Noval, dan Ismail, ditahan beberapa hari setelah mereka. Tiga setengah bulan kemudian, mereka (kelimanya- Red) sudah dilepas, tetapi sampai saat ini tidak ketahuan di mana mereka. "Jika logikanya sama dengan pengembalian saya, kalaupun mereka masih hidup, tentunya mereka akan kontak dengan keluarganya," kata Pius.

Dikirim Ke Australia

Wakil Ketua Penyidik Puspom ABRI, Kolonel CPM Sudirman Panigoro mengatakan, tiga mayat yang ditemukan di Kepulauan Seribu awal Agustus lalu, DNA-nya sudah dikirim ke Australia guna mempercepat proses identifikasi korban. "Mudah-mudahan tiga mayat yang ditemukan di Kepulauan Seribu ini bisa secepatnya terungkap," Kata Sudirman Panigoro.

Pius merupakan salah satu saksi utama kasus penculikan aktivis. Delapan saksi utama yang lain, yakni aktivis yang juga sudah dibebaskan penculik, diharapkan segera memberi masukan ke Puspom ABRI. **(S-12)**

Merdeka

17 SEP 1998

"Hanya Karena Ketidakjelasan"



Petrus Selestinus



Munir

PENOLAKAN tiga aktivis pro demokrasi, Desmon J Mahesa, Andi Arief, dan Haryanto Taslam dianggap logis (masuk akal). Karena sebelumnya mereka telah memberikan keterangan yang jelas kepada Puspom ABRI.

"Saya merasa kecewa dengan pengusutan kasus penculikan ini. Maksud dari pemanggilan itu apa? Dengan pemanggilan itu, Puspom ABRI mau apalagi? Jadi kalau mereka menolak itu wajar-wajar saja," jelas pakar hukum pidana, Prof Dr JE Sahetapy kepada *Merdeka*, kemarin.

Seharusnya, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, setelah memberikan keterangan, ketiga aktivis itu diberikan kebebasan. Kecuali, kata Sahetapy, dalam pemeriksaan pertama tidak disepakati hasil pemeriksaan itu. Karena dengan tidak sepakat itu, akhirnya mereka mengadakan perjanjian lagi untuk mengadakan pemeriksaan kedua.

Dikatakan Sahetapy, kalaupun para aktivis itu menolak pemanggilan walaupun telah dilakukan kesepakatan, mereka tidak bisa dijadikan tersangka.

"Mereka berbuat kesalahan seperti apa dan mereka jadi tersangka alasannya apa? Jauh-jauh mereka diseksa oleh ABRI. Kecuali jika ketiga aktivis tersebut melakukan kejahatan, itu bisa dijadikan tersangka," ungkapnya. Kalau Puspom ABRI memberikan perencanaan yang jelas, tambah Sahetapy, maka tiga aktivis tersebut tidak akan menolak pemanggilan berikutnya.

"Jadi ini hanya karena ketidakjelasan saja. Kalau jelas, orang akan ngomongnya jelas juga," tambahnya sambil tertawa panjang.

Sementara itu Koordinator Kontras, Munir menjelaskan, bahwa secara hukum orang (sebagai saksi) yang menolak pemanggilan memang akan diancam hukuman.

Namun ini, kata Munir, ketiga aktivis pro demokrasi, Desmon J Mahesa, Andi Arief dan Haryanto Taslam telah kesekian kali memberikan keterangannya. Namun, beberapa kali pemanggilan itu tidak ada sedikitpun kejelasan sama sekali. Dalam hal ini, dikatakan Munir, Puspom ABRI harus menghormati sikap penolakan mereka.

"Soal nasib 14 aktivis lainnya yang hingga sekarang belum diketemukan, seharusnya beri kejelasan. Disini saya melihat sikap ABRI tidak jelas," tandasnya. Namun dengan penolakan para aktivis itu, Munir menambahkan, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengusut kasus penculikan itu.

"Jangan karena mereka menolak, ABRI lantas mengulur-ulur waktu, sehingga pada akhirnya tidak ada kejelasan sama sekali, hingga kasus ini lenyap dari permukaan bumi," tambahnya.

Melanggar KUHP

Sedangkan pengacara Petrus Selestinus menyatakan sangat menyayangkan sikap tiga aktivis Haryanto Taslam, Desmon J Mahesa dan Andi Arief yang tidak memenuhi panggilan Puspom ABRI. Sebab penolakan ini mengundang sanksi hukum bagi yang bersangkutan.

Komentar ini dikemukakan pengacara Selestinus menjawab *Merdeka* di ruang kerjanya, kemarin. "Kita sesalkan sikap mereka. Karena kegiatan Puspom ABRI tersebut untuk kepentingan masyarakat umum. Mengapa mereka menolak," tutur praktisi ini sesal.

Berpijak pada alasan di atas maka Petrus menilai, adalah kesalahan yang sangat besar jika menolak panggilan itu. Sebab selain mereka wajib memberikan kesaksian yang diminta Puspom ABRI, itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri.

"Menjadi saksi di penyidik itu wajib seperti kewajiban kita membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), atau wajib membela negara dan lain sebagainya," kata Petrus.

Menurut Petrus yang dikenal sebagai salah satu anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tersebut, penolakan itu dipastikannya akan membawa konsekuensi hukum bagi Taslam, Desmon dan Arief.

Sebab menolak panggilan sebagai saksi melanggar Pasal 216 KUHP. Pasal ini ancaman maksimalnya berupa kurungan badan selama empat setengah bulan dan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. (WIN/MUN)

Merdeka 17 SEP 1998

Syamsu Djalaluddin:

Tidak Bermaksud Mengulur-ulur Waktu

KOMANDAN Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin menyayangkan keputusan Andi Arief, Desmon J Mahesa dan Haryanto Taslam yang menolak memenuhi panggilan Puspom ABRI pada Jumat besok.

"Kami sangat menyayangkan keputusan tiga dari 11 korban penculikan yang telah kembali, yang menolak memenuhi panggilan kami. Seharusnya mereka tidak mengatakan pertemuan itu bersifat mubazir atau tidak ada artinya," ujar Danpuspom saat ditemui *Merdeka* di Jakarta.

Padahal kali ini, menurut Syamsu, pemanggilan para korban penculikan ini dimaksudkan untuk menambah keterangan dan informasi yang telah dikumpulkan tim penyidik Puspom ABRI. Lebih penting lagi, keterangan ulang itu juga akan digunakan untuk mengklarifikasi informasi yang baru diperoleh dari Pius Lustrilanang.

"Apalagi sekarang ini, Pius Lustrilanang baru memberikan keterangan kasusnya kepada kami. Mungkin mereka akan lebih menambah dan melengkapi keterangan Pius," tegas jenderal berbintang dua ini.

Maksudnya, pemanggilan atau pertemuan ulang itu akan sangat berguna untuk menambah informasi lain yang dibutuhkan Puspom ABRI.

"Bukan maksud Puspom ABRI untuk mengulur-ulur waktu dalam menuntaskan kasus ini, tapi keterangan mereka memang sangat dibutuhkan kembali saat ini. Terlebih lagi untuk melengkapi keterangan korban yang baru saja kami periksa," ujar Syamsu.

Sementara itu ketika ditanya mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pius Lustrilanang, Danpuspom menolak menjelaskan secara rinci. Selain hasilnya masih diolah tim penyidik Puspom ABRI, dibutuhkan pula informasi tambahan lain.

Tiga dari 11 korban penculikan yang telah kembali itu memang telah dipanggil Puspom ABRI. Namun mereka menolak untuk memenuhi panggilan itu. Alasan mereka, sudah pernah memberikan keterangan kepada Puspom mengenai kasus penculikan aktivis.

Selain itu, pemanggilan dianggap tidak jelas tujuannya. Terlebih lagi, kalau hanya untuk menjadi saksi dari 11 tersangka oknum Kopassus yang dinyatakan terlibat, pemanggilan itu juga mereka anggap mubazir. Menurut penuturan para korban penculikan itu, mereka sudah pernah memberikan kesaksian dan penjelasan kepada penyidik Puspom ABRI. Bahkan Haryanto Taslam juga telah menandatangani berita acara pemeriksaannya (BAP).(EKA)



Syamsu Djalaluddin

REPUBLIKA

Pius Bersaksi ke Puspom, untuk Lengkapi Berkas

JAKARTA — Aktivis korban penculikan Pius Lustrilanang akhirnya datang ke Puspom ABRI untuk memberikan kesaksian. Menurut Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayjen TNI Syamsu Djalil, kesaksian Pius Kamis kemarin ini penting untuk melengkapi berkas perkara 11 oknum Kopassus yang diduga menculik aktivis.

"Insya Allah berkas 11 oknum Kopassus ini akan bisa diajukan bulan ini. Namun kami harus memeriksa saksi-saksi lain untuk melengkapi berkas itu," ujar Syamsu usai menerima Pius yang didampingi Hendardi dari PBHI.

Ini pertama kalinya Pius memberikan kesaksian di Puspom. Sebelumnya Pius sudah bersaksi di depan Komnas HAM dan kemudian langsung meninggalkan tanah air.

Syamsu menyebutkan, kesediaan Pius memberikan kesaksian di depan Puspom ABRI itu diharapkan bisa membantu menemukan temuan baru yang bisa dikembangkan. Sehingga, katanya, berkas perkara 11 oknum ABRI yang diduga terlibat dalam penculikan bisa segera diajukan ke Mahkamah Militer.

Menurut Syamsu, Puspom juga akan kembali meminta keterangan aktivis korban penculikan lainnya seperti Aan Rusdiyanto, Mugiyanto, Nezar Patria, Raharjo Waluyo Djati, Haryanto Taslam, dan Andi Arief. Meski sebelumnya sudah memberikan kesaksian, katanya, mereka belum diproses pro-yustisia. "Pemeriksaan dulu hanya untuk penelitian kriminal yang digunakan untuk mencari tersangka lainnya," jelas Syamsu.

Menyinggung keberadaan 14 aktivis yang hingga kini belum diketahui nasibnya, Syamsu mengaku belum mengetahui. "Makanya, tolonglah masyarakat memberikan informasi kepada Puspom ABRI. Dan kami juga sudah memeriksa berbagai kemungkinan seperti adanya mayat di Kepulauan Seribu itu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Penyidik Puspom ABRI Kolonel CPM Sudirman Panigoro mengatakan, Pius merupakan salah satu saksi utama kasus penculikan aktivis.

Dengan demikian, katanya, delapan saksi utama yang lain juga diharapkan segera memberikan masukan kepada Puspom ABRI.

Pius sendiri mengatakan, pertemuannya dengan Puspom ABRI sebenarnya hanya memberikan kesaksian formalitas. "Apa yang telah saya utarakan selama ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Saya tidak ingin pengungkapan kasus penculikan aktivis ini berlangsung berlarut-larut, sehingga saya membantu Puspom ABRI," katanya.

■ bsa

Merdeka 22 SEP 1999

Pius: Kasus Ini "Fifty-fifty"



Bambang Soeharto menepuk dagu Pius.

AKTIVIS pro demokrasi Pius Lustrilanang yang kini aktif dalam Departemen Kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN) memprediksikan *fifty-fifty* atas kasus penghinaan terhadap Presiden BJ Habibie, apakah berlanjut sampai ke pengadilan atau tidak.

"Kalau melihat kasus-kasus terdahulu (di rezim Soeharto, red) yang benar bisa berubah menjadi salah. Dan sebaliknya salah menjadi benar," kata Pius.

Dulu, katanya, untuk menjerat seseorang yang dianggap kritis dalam kapasitasnya sebagai pembela rakyat, diada-ada walaupun tidak ada bukti-bukti.

Dengan nada bertanya Pius berkata, jika benturnya penghinaan, buktikan dulu bentuk penghinaan itu seperti apa? Siapa yang melakukan penghinaan?

"Ini *kan* tidak jelas siapa yang melakukan penghinaan. Sedangkan Ratna, dijadikan saksi. Padahal, dia tidak tahu siapa yang jadi tersangka dalam penghinaan Habibie," kata Pius yang pernah menjadi korban penculikan.

Namun, kalau memang ada indikasi menghina Habibie, Pius mengatakan ada kemungkinan kasus ini berlanjut ke pengadilan. Tapi, paparnya, pihak penegak hukum dalam hal ini menyelidik perlu mempunyai bukti konkret. "Mereka harus menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam penghinaan ini. Kalau tidak ada jangan mengada-ada," katanya.

Tapi setidaknya, kata Pius, tidak seharusnya menghina Presiden. Karena setelah lengsernya Soeharto, banyak tuntutan Tapol/Napol agar dibebaskan.

"Kalau ini dilakukan lagi, sama saja bohong, percuma saja tuntutan pembebasan tahanan politik/narapidana politik," kata Pius.

Dia berpendapat, dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Habibie ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat secara transparan agar rakyat dapat menilai apakah penghinaan itu betul-betul dilakukan atau tidak.

Bisa saja, kata Pius, dalam acara "Dialog Nasional untuk Demokrasi" di Hotel Indonesia, 15-17 Agustus, tidak ada unsur penghinaan. "Rakyat perlu kejelasan," ujarnya.

Dia menilai bahwa kepemimpinan Habibie sekarang masih mengunakan pola rezim Soeharto. "Baik Soeharto maupun Habibie, sama-sama enggan menerima kritikan atas kepemimpinannya. Negara kita akan negara demokrasi," lanjutnya.

Bagaimana Anda melihat posisi Ratna sebagai saksi, apakah bisa dijadikan nanti sebagai tersangka? Menurut Pius, ini merupakan ujian. Kelompok-kelompok yang dianggap kritis dikhawatirkan akan disingkirkan dengan segala cara.

"Dalam kasus ini, Ratna bisa saja dijadikan tersangka karena dianggap kritis. Hal seperti ini sudah biasa dialami oleh kelompok-kelompok kritis," jelasnya.

Walapun situasi yang berbeda, tapi polanya sama yakni menggunakan pola Orde Baru. "Jelasnya, pemerintahan sekarang sangat merasakuti adanya koalisi besar untuk demokrasi," tambah Pius. (WIN)

Merdeka 27 OCT 1998

Keluarga Korban Penculikan Gelar Lesehan di Mapuspom

Jakarta, Selasa, Merdeka

Keluarga korban penculikan mengancam akan menggelar kemah keprihatinan di Markas Puspom ABRI, kemarin. Karena belum ada titik terang mengenai kasus penculikan yang dialami anggota keluarga mereka.

Keluarga korban yang terdiri dari ibu Yani Afri, keluarga Noval Alkatiri, Yadin Muhidin, Ucok Munandar dan Dedy Hamdun, tiba di Mapuspom sekitar pukul 9.30 WIB. Mereka hanya diterima Wadan Puspom ABRI Brigjen Iding Alidin, karena Danpuspom Mayjen Djasri Marin sedang mengikuti pendidikan di Lemnahas.

Karena tidak puas, akhirnya keluarga korban yang didampingi Munir dan tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memutuskan untuk menunggu Danpuspom sampai datang. Begitu juga dua orang korban penculikan, Feisol Reza dan Nezar Patria yang ikut mendampingi keluarga korban.

"Kami tidak peduli. Pokoknya kami ingin bertemu dengan Danpuspom sampai beliau datang. Kalau perlu, kami akan menggelar kemah di depan Markas Puspom ini," ujar Ny Tuty, ibu kandung Yani Afri yang datang bersama salah seorang cucunya.

Karena keluarga korban bersikeras, akhirnya pihak Puspom mempersilahkan mereka menunggu di ruang tamu gedung baru Mapuspom ABRI. Para keluarga yang telah mempersiapkan beberapa helai tikar itu akhirnya *lesehan* di ruang tamu Mapuspom hingga sore hari.

Mereka juga memajang poster dan foto 10 korban penculikan yang belum kembali. Lalu ada spanduk besar berwarna hijau yang bertuliskan "ABRI Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kasus Penculikan".

Setelah lebih dari tujuh jam menunggu kedatangan Danpuspom, akhirnya keluarga korban meninggalkan Mapuspom sekitar pukul 16.30 WIB. Itu setelah mereka mendapat janji dari pihak Puspom bahwa Danpuspom Mayjen Djasri Marin bersedia menerima mereka hari ini (Selasa, 27/10), sekitar pukul 19.00 WIB.

"Tapi kami akan mempersiapkan tenda. Kalau jawaban Puspom masih begitu-begitu saja, kami akan berkemah di sini," ancam Ny Tuty lagi.

Menurut Koordinator Kontras Munir, kedatangan keluarga korban ke Mapuspom ABRI untuk mempertanyakan kembali nasib 13 korban yang masih hilang. Karena sampai saat ini, Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI tidak pernah memberi penjelasan mengenai nasib ke-10 orang tersebut. Padahal oknum Kopassus yang menjadi tersangka sudah ditangkap sejak beberapa bulan lalu.

Selain itu, mereka juga ingin mempertanyakan pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang masih simpang siur. Sebab pihak Puspom pernah mengatakan bersedia mempertemukan keluarga korban dengan tersangka setelah bertemu pengacara tersangka.

"Tapi setelah itu mengatakan akan mengajukan BAP ke pengadilan tanpa ditandatangani para korban, bahkan terdengar kabar BAP akan diserahkan ke oditur 20 Oktober lalu," ujarnya.

Padahal sebelum BAP diserahkan kepada oditur, keluarga ingin bertemu dulu dengan tersangka. Maksudnya, untuk memperoleh kejelasan mengenai nasib anggota keluarga mereka yang belum jelas hingga saat ini.(EKA)

MEDIA INDONESIA

Kasus Penculikan tidak Dipetieskan

JAKARTA (Media): Danpuspom ABRI Mayjen TNI Jasri Marin menegaskan Puspom ABRI tidak akan mempetieskan kasus penculikan. Kini hanya menunggu waktu pelimpahan berkas perkara tersebut ke Oditur Militer.

Danspuspom ABRI mengemukakan hal tersebut tadi malam ketika menerima rombongan Kontras yang dipimpin Ketuanya Munir serta keluarga 12 orang hilang yang sampai sekarang belum ditemukan. Kedatangan mereka untuk menanyakan nasib 12 korban penculikan yang hingga sampai sekarang belum diketahui nasibnya hidup atau mati.

Pertemuan tadi malam merupakan yang pertama kalinya antara Kontras dengan Danpuspom yang baru. Kepada Kontras dan keluarga korban penculikan Danpuspom menjelaskan soal keterlambatan pelimpahan berkas 11 oknum Kopassus yang melakukan penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi.

Menurut Danpuspom ABRI itu keterlambatan tersebut disebabkan pihaknya sedang menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer. "Penyusunan kembali BAP ini agar isi berkas oknum Kopassus sempurna sehingga dapat disidangkan di Mahkamah Militer," ujar Jasri.

Dia berharap agar para keluarga korban penculikan bersabar menunggu penyelesaian berkas perkara 11 oknum Kopassus tersebut. Sedangkan terhadap 12 orang yang masih hilang itu hingga kini dalam pencarian.

Sementara itu orangtua Yanni Apri, salah satu korban orang hilang, mengatakan akan membuat kemah di depan Puspom ABRI bila 12 korban yang hilang itu tidak ditemukan. Mereka juga mempertanyakan janji mantan Danpuspom Mayjen TNI Syamsu yang akan melimpahkan berkas 11 oknum Kopassus itu pada tanggal 21 Oktober lalu dan akan menemukan 12 orang hilang lainnya.

Periksa

Pada kesempatan terpisah pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengatakan, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto harus memeriksa dan meminta keterangan dari mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang pada saat terjadinya penembakan mahasiswa Trisakti memimpin operasi Mantap Jaya.

"Sjafrie harus diperiksa dan kalau perlu dituntut sebagai penanggung jawab tertinggi operasi tersebut, selain itu juga wakilnya Hamami Nata (mantan Kapolda—red), lalu Komandan Kodim, dan Kapolres, dari situ baru diperiksa ke 'bawah'," kata Buyung menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, kemarin.

Ketika menerima keluarga korban peristiwa 12 Mei 1998, Senin (26/10), Wiranto berjanji dalam waktu tidak terlalu lama seluruh pelaku kasus itu bisa terungkap dengan tuntas.

(Wdh/Ant/M-3)

KOMPAS

28 OCT 1998

Keberadaan Korban Penculikan

Masih Tetap Gelap

Jakarta, Kompas

Upaya keluarga korban untuk mencari tahu nasib 13 korban penculikan tetap masih gelap, kendati mereka telah bertemu dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayjen TNI Djasri Marin, Selasa (27/10) malam. Dalam pertemuan selama sekitar 10 menit, Djasri menyatakan, belum mengetahui keberadaan 13 korban penculikan yang masih hilang.

Pertemuan singkat itu berubah menjadi ajang debat setelah Djasri mengatakan, Puspom ABRI sampai saat ini belum tahu keberadaan 13 orang hilang dan masih terus mencari. Ia mengatakan kasus 11 tersangka yang akan diserahkan ke oditur militer tidak berkaitan dengan kasus 13 orang yang masih hilang.

Tidak seperti biasanya pertemuan dengan para keluarga korban dilakukan di ruang tunggu dan bukan di ruang pertemuan. Djasri memberi penjelasan sambil berdiri di depan para tamunya yang duduk di kursi. Keluarga korban pun kemudian berdiri untuk bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Komandan Puspom.

Pembicaraan pun berkembang menjadi debat. Djasri tetap berpendirian, 11 tersangka yang perkaranya akan disampaikan ke Oditur Militer tidak berkaitan dengan hilangnya 13 orang yang hingga kini nasibnya belum jelas. Djasri juga hanya menyatakan akan mempertimbangkan ketika para keluarga korban yang diwakili Paian Siahaan, ayah Ucok Munandar Siahaan, dan ibunda Yani Afri, Ny Tuty, menuntut dipertemukannya para tersangka dengan korban penculikan yang sudah dibebaskan.

Tuntut dipertemukan

"Kalau Bapak hanya *ngomong* begitu saja, itu sama saja dengan dulu, tidak ada kemajuan. Kalau Bapak mau, itu tidak ada masalah, tidak susah. Paling tidak dengan Bapak berbuat ada pertemuan antara yang 11 tersangka dengan sembilan yang dilepas, itu akan cepat terbukanya kasus ini. Sekarang masalahnya apa, kenapa tidak bisa dipertemukan?" tuntut Paian Siahaan.

Djasri menjelaskan, kasus 11 tersangka itu tidak ada relevansinya dengan 13 korban yang masih hilang.

Penjelasan Djasri dibantah keluarga korban, karena pada kenyataannya beberapa korban penculikan bebas sempat bertemu beberapa korban yang masih hilang.

"Kita tidak bisa menuduh orang itu pencurinya, belum tentu mereka pencurinya. Barang yang sembilan itu yang sudah kita usut," tambah Djasri ketika Said Alkatiri, orang tua Noval Alkatiri, mengumpamakan korban penculikan sebagai barang yang dicuri.

Meski keluarga korban menyatakan tidak mungkin kalau Puspom ABRI tidak tahu karena kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan, Djasri tetap menyatakan Puspom benar-benar belum tahu. Hasil pelacakan yang dilakukan Puspom sampai saat ini belum memuaskan. Dari 11 tersangka yang sudah diperiksa, Puspom masih belum menemukan keterangan mengenai keberadaan 13 korban lainnya.

Djasri membantah pihaknya menunda pengusutan kasus ini. "Kami mempunyai prinsip perkara ini dijalankan terus. Kami juga tidak menutup-nutupi," ungkapnya sambil mengulang permintaan yang sering disampaikan Komandan Puspom, Syamsu Djalaluddin, yaitu meminta segenap pihak yang mempunyai informasi untuk menyampaikannya ke Puspom. **(oki)**

Merdeka 28 OCT 1998

Hujan Tangis di Mapuspom ABRI

Jakarta, Rabu, Merdeka

Hujan tangis mewarnai pertemuan keluarga korban penculikan dengan Komandan Puspom ABRI Mayjen Djasri Marin di Mapuspom, sekitar pukul 19.30 tadi malam. Selain menyesali belum adanya kejelasan mengenai nasib korban yang masih hilang, mereka juga kecewa dengan sikap Danpuspom saat menerima mereka.

Keluarga korban yang hadir di Mapuspom tadi malam adalah keluarga Yani Afri, Yadin Muhidin, Ucok Munandar Siahaan, Deddy Hamdun, Said Alkatiri dan Herman Hendrawan. Mereka didampingi Tim Kontras dan salah seorang korban, yaitu Fefsol Reza.

Menurut mereka, pernyataan yang diberikan Djasri adalah pengulangan dari pernyataan-pernyataan sumir yang pernah diungkapkan Danpuspom terdahulu, Mayjen Syamsu Djalal. Padahal, kasus ini telah diselidiki Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI lebih dari setengah tahun.

Misalnya saja mengenai nasib 13 korban yang belum kembali. Djasri mengatakan masih terus mencari fakta mengenai keberadaan mereka. "Kami masih terus mencari, kalau ada data baru silahkan berikan pada penyidik. Pada prinsipnya, kami tidak pernah menunda atau menutup-nutupi penyidikan kasus ini," ujar Danpuspom.

Apalagi saat keluarga korban menagih janji untuk bertemu dengan para tersangka, Danpuspom menegaskan hal itu tidak dapat dilakukan. Alasannya, kesalahan para tersangka tak mempunyai relevansi dengan para korban yang masih hilang. Selain itu, menurut Djasri cara itu bukan satu-satunya jalan untuk menemukan para korban.

Pernyataan Danpuspom itu langsung membuat keluarga korban menjadi bertambah bingung. Karena menurut mereka, dari para tersangka yang sudah tertangkaplah dapat dikorek keterangan tentang keberadaan korban sekarang.

"Kami tidak menuntut apa-apa, hanya ingin kejelasan. Kalau memang anak kami sudah tidak ada, katakan saja sudah tidak ada. Musibah itu akan kami terima sebagai takdir," ujar Ny Tuty, ibu kandung Yani Afri dengan mata berkaca-kaca.

Menurut dia, para keluarga tidak mungkin bertanya pada instansi militer lain misalnya kepolisian, Mapomdam Jaya atau instansi lainnya. Karena Puspom ABRI telah berhasil menangkap, bahkan tengah menyiapkan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk para tersangka.

Apalagi ayah Noval Alkatiri, Said Alkatiri, mengaku telah memberikan data mengenai kendaraan yang dikemudikan Said, Deddy Hamdun dan Ismail saat mereka hilang. Yaitu BMW berwarna putih keluaran tahun 1991, bernomor polisi B 326 HJ. Namun mobil tersebut menurutnya masih atas nama pemilik lama, dr Sujudi.

"Data itu sudah saya berikan pada penyidik Puspom. Mobilnya saja masih ada di tangan Kopassus, sebenarnya dari mobil tersebut bisa diusut. Kenapa sampai sekarang masih mengatakan belum ada kejelasan," ujar Said.

Mendengar pernyataan Danpuspom, keluarga korban yakin pengusutan kasus orang hilang ini sengaja diperlambat. Apalagi keinginan para keluarga untuk bertemu dengan para tersangka tidak dikabulkan dengan alasan yang tidak jelas.

Tangis mereka meledak saat Danpuspom yang terus didesak mengenai target penuntasan kasus ini, meninggalkan ruang tamu gedung baru Mapuspom ABRI. Padahal, masih banyak keluh kesah yang ingin diungkapkan keluarga korban. Apalagi tak pernah ada kejelasan yang diberikan pihak Puspom.

Usai pertemuan yang hanya berlangsung satu jam itu, akhirnya keluarga korban meninggalkan Mapuspom. Mereka urung mendirikan kemah keprihatinan di Mapuspom ABRI seperti rencana semula.

Sebelum Danpuspom bertemu dengan keluarga korban, Koordinator Kontras Munir yang mendampingi mereka mengadakan pertemuan tertutup dengan Danpuspom, Wadan Puspom Brigjen Iding Alidin dan sejumlah tim penyidik Puspom ABRI.

Dalam pembicaraan itu, menurut Munir, terjadi perbedaan pandangan antara Puspom dan Kontras sebagai wakil keluarga. Karena menurut Danpuspom, BAP tetap akan dilimpahkan ke pengadilan tanpa menunggu kejelasan nasib 13 korban yang masih hilang.

"Kami ingin ada kejelasan dulu tentang ke-13 korban yang masih hilang, tapi pihak Puspom mengatakan tetap bisa mengajukan kasus ini ke pengadilan tanpa ada kejelasan lebih dulu mengenai hal itu," ujar Munir.

Akhir pertemuan itu, ujar Munir, Kontras mengatakan delipan korban yang telah kembali bersedia menandatangani BAP kalau keinginan untuk melakukan konfrontir antara keluarga dengan tersangka dikabulkan. (EKA)

Suara Karya 01 OCT 1998

Meningkat, Dana Peduli Orang Hilang

JAKARTA (Suara Karya): Kepedulian warga masyarakat terhadap kasus orang hilang semakin meningkat. Paling tidak, ini bisa dibuktikan dari hasil dana perolehan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) yang terus mengalir, sejak badan ini dibentuk medio September lalu lewat acara 'Kemah Keprihatinan' di halaman Kantor YLBHI, Jakarta.

"Sampai hari ini, rekening Bank yang dibuka Ikohi terus bertambah. Dana tersebut diperoleh dari simpatisan masyarakat yang peduli terhadap kasus orang hilang di Indonesia," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir SH di Jakarta, kemarin. "Tanpa diduga, hasilnya melebihi target," ujarnya pula.

Tidak dijelaskan, berapa jumlah uang yang masuk ke kantong Ikohi hingga kini. Namun, Rp 30 juta di antaranya telah digunakan untuk biaya keberangkatan Ketua Ikohi Utomo Rahardjo ke Jenewa. Kemudian Rp 5 juta lainnya digunakan untuk pembuatan 50.000 poster "Kembalikan Mereka" bergambar foto para korban penculikan yang hingga kini masih dinanti-nantikan keluarga mereka. Poster-poster tersebut sejak Rabu kemarin telah disebarkan dan dipasang ke berbagai tempat strategis di Jakarta.

Utomo berangkat ke Ibukota Swiss bersama anggota Badan Penasehat Kontras Bambang Widjajanto, SH dan aktivis korban penculikan Mugiyanto, Selasa (29/9'98) lalu untuk mengikuti Sidang ke-55 Kelompok Kerja Penghilangan Paksa PBB (UNWGEID/United Nations Working Group for Enforced or Involuntary Disappearances) serta menghadiri Konferensi Afad/Asian Federation for Victims Disappearances dengan Federam (Federasi Orang Hilang Amerika Latin), 29 September - 9 Oktober 1998.

Agenda yang dibicarakan berkaitan dengan aksi keprihatinan internasional terhadap kasus-kasus penghilangan orang secara paksa di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain memaparkan situasi penghilangan paksa di masing-masing negara, pertemuan juga akan mengajukan usulan Forum Antar Benua untuk Situasi Global Pengilangan Paksa di Dunia. Forum tersebut akan berlangsung bersamaan dengan Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, April 1999.

Kontras dengan dukungan Afad dan Federam berencana akan melaporkan situasi penghilangan paksa di Indonesia dalam persidangan UNWGEID, 5-9 Oktober '98. Dalam kesempatan itu, Kontras akan mendesak UNWGEID agar mengambil tindakan yang dipandang perlu bagi pengungkapan kasus-kasus orang hilang di Indonesia. "Misalnya, melakukan penyelidikan langsung terhadap kasus-kasus yang dilaporkan dengan mengirim utusan dan Komisi HAM PBB sebagai penyelidik independen atas kasus penghilangan paksa di Indonesia," kata Munir.

Federam sendiri akan berbagi pengalaman dalam mengurus orang hilang selama puluhan tahun di Amerika Latin. Jaringan kerja internasional ini akan mendorong peran yang lebih luas Kelompok Kerja UNWGEID dan Komisi HAM PBB agar memberi perhatian dan melakukan fungsi pengawasan internasional.

Menindaklanjuti kasus 14 orang hilang, Kontras, hari ini kembali akan menghadap Puspom ABRI. Agenda yang akan dibicarakan menyangkut rencana Puspom ABRI menggelar sidang pengadilan tersangka penculik, tanpa mengungkap terlebih dahulu 14 korban yang hingga kini belum ditemukan. Alasannya dalam sidang pengadilan nanti diharapkan akan diketahui nasib 14 orang hilang yang kini belum ditemukan.

"Kontras tak sependapat dengan langkah tersebut," kata Munir. "Satu hal yang perlu dilakukan, seharusnya Puspom mengkonfrontir tersangka terlebih dahulu dengan korban yang pernah melihat rekan-rekannya disekap bersama-sama," tambahnya. (P-4)

REPUBLIKA 15 SEP 1998

Kemah Kontras Menertawakan Kasus Penculikan

Tak seperti hari-hari biasanya, hingga Rabu (16/9), kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta, akan dipenuhi hiruk-pikuk. Orang-orang merubungi sebuah tenda, menyimak pidato yang mengutuk penculikan, lalu disambut tepuk tangan.

"Hari ini saya berdiri di panggung *Kemah Kepedulian* untuk peduli bahwa tindakan penculikan adalah perbuatan sangat terkutuk. Rejim militer telah bertindak apa saja untuk melanggengkan kekuasaan, dan inilah yang harus terus kita lawan!" Andi Arief, aktivis asal Lampung yang menjadi korban penculikan, menegaskan itu dalam pidatonya.

"Ya, harus kita lawan itu," teriak orang-orang di sekitarnya. Yang lainnya menyambut dengan suara gemuruh dan tepuk tangan panjang.

Acara Kemah Kepedulian, dirancang Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) bersama keluarga dan korban penculikan, cukup berhasil memancing perhatian kepedulian khalayak akan berbagai persoalan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sejak pagi ratusan orang memadati halaman rumah berasitektur limasan yang dahulu pernah menjadi Kantor Kedutaan Besar Jerman itu.

Sejumlah aktivis HAM kondang, seperti HJ Princen dan Sabam Sirait, terlihat hadir. Mereka berbaur bersama aktivis partai, seniman, penyanyi jalanan, yang secara bergantian naik ke panggung memberikan pidatonya.

"Amien Rais dan Iwan Fals menyatakan siap datang. Sedangkan Megawati belum jelas, harus mendapat ijin dari rapat pleno PDI Perjuangan," kata kordinator Kontras, Munir SH.

Tak hanya pidato, acara juga diwarnai berbagai nyanyian dan pertunjukan teater. Para penyanyi jalanan silih berganti naik ke panggung, menghibur orang-orang dengan lagu-lagu kocak, bertema menghujat aksi penculikan.

Agus Nur Amal, seniman dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), tampil dengan teater monolog PMToH. Pertunjukan kocak ala teater rakyat Aceh ini mampu mendinginkan suasana, dan orang-orang seperti tak lagi menghiraukan terik matahari di ubun-ubunnya.

Kejenakaan mengalir deras dari atas panggung. Agus melengking, mengolok-olok nurani penonton dengan permainan asosiasinya. Botol air mineral diubah menjadi tentara. Rajutan kawat yang biasa dipakai membakar roti diubah seperti penjara, dan gayung mandi dimainkan menjadi helikopter.

Orang-orang tertawa. Terus, sepanjang Agus berada di panggung.

"Inilah kisah seorang emak yang mencari anaknya yang diculik tentara," rajuk Agus Nur Amal sembari melilitkan selendang merah di kepalanya. Mengubah kegetiran peristiwa penculikan, pelanggaran HAM paling populer di akhir rejim Orde Baru, menjadi fenomena hiburan menyenangkan. Agus menghujat dengan gayanya, orang-orang mentertawai kegetiran yang menyayat.

Inilah bintang hari pertama Kemah Kepedulian terhadap keluarga dan korban penculikan. "Ya inilah cara saya untuk mengajak masyarakat sedikit merenung tentang kasus penculikan. Derita agar tidak terlalu berat memang cukup tepat bila dibagi dengan tawa," kata Agus Nur Amal. ■ uba

D. Dukungan Menyanlat

KOMPAS

Korban dan Keluarga Korban Penculikan Bertekad ke Geneva

Respon ke Pemerintah / Dukungan

Jakarta, Kompas

Para korban dan keluarga korban penculikan bertekad untuk menyampaikan kasus penculikan yang menimpa mereka dan anggota keluarganya pada Sidang Komisi HAM (Hak Asasi Manusia) PBB di Geneva, Swiss, bulan Oktober. Sebelumnya mereka akan mengadakan Kemah Keprihatinan di Yayasan LBH Indonesia, tanggal 14-16 September sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana.

Tekad itu disampaikan wakil korban penculikan Aan Rusdianto dan wakil keluarga korban penculikan Ny Tutty (ibunda Yani Afri) dan Said Alkatiri (ayahanda Noval), Kamis (3/9), di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta.

Mereka menyatakan prihatin terhadap nasib ke-13 rekan mereka yang sampai kini tidak jelas. "Bagi kami, keputusan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) sama sekali tidak berarti apa-apa. Yang amat penting bagi kami adalah bagaimana anggota keluarga kami yang masih hilang itu segera dibebaskan dan bisa kembali ke tengah-tengah kami," jelasnya.

Membacakan pernyataan bersama keluarga dan korban penculikan, Aan menegaskan, penculikan adalah tindak pidana sehingga pelakunya harus diseret ke pengadilan lalu dijatuhi sanksi pidana. Oleh karenanya, Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI seharusnya segera menjelaskan nasib dan keberadaan anggota keluarga mereka yang masih tidak jelas itu.

Ke Komisi HAM PBB

Aan, Ny Tutty maupun Said menandaskan, wakil korban dan keluarga korban penculikan akan mengadukan persoalan penculikan yang belum juga diselesaikan ini ke Komisi HAM PBB di Geneva.

Menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, korban dan keluarga korban telah menerima undangan dari tiga komite internasional di bidang orang hilang, yaitu FIND (Filipina Victims on Involuntary Disappearance), Federam dari Amerika Selatan, dan Fifada dari Amerika Latin. Ketiga komite itu akan berkumpul di Geneva untuk memberi dukungan terhadap kasus orang hilang di Indonesia.

Pertemuan di Geneva itu akan berlangsung selama dua minggu, yaitu minggu keempat September dan minggu pertama Oktober. Menurut Munir, untuk pergi ke Geneva dibutuhkan biaya antara Rp 6 juta sampai Rp 8 juta per orang. Penginapan ditanggung panitia. Yang dibutuhkan sekarang adalah biaya transpor dan kehidupan selama di sana. Sebetulnya ini kewajiban Kontras, tetapi Kontras tidak punya kemampuan. **(oki)**

16 SEP 1998

MEDIA INDONESIA

'Tenda Keprihatinan' semakin Ramai Dikunjungi Massa

JAKARTA (Media): Sejumlah tokoh masyarakat dijadwalkan mengunjungi dan memberikan orasi di 'Tenda Keprihatinan' yang digelar di halaman Kantor YLBHI Jakarta. Pada hari kedua kemarin mahasiswa dan masyarakat dari berbagai lapisan secara berkelompok mendatangi dan berdialog dengan Amien Rais mengenai masalah aktual yang terjadi hari-hari ini.

Kemarin 'Tenda Keprihatinan' mendapat tamu istimewa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dalam orasinya Amien Rais berjanji akan mendesak lagi pemerintah agar memahmilkan Letjen TNI Prabowo Subianto yang mengaku menculik sembilan aktivis.

Seperti diketahui sejak Senin lalu para keluarga orang hilang mendirikan 'Tenda Keprihatinan' untuk memperingati ke-14 aktivis yang sampai sekarang belum kembali. 'Tenda Keprihatinan' berakhir hari ini.

"Saya berjanji akan mendesak lagi pemerintah untuk membawa Prabowo ke Mahmil. Dia telah mengaku menculik sembilan aktivis tapi kenyataannya *kok* masih bebas saja," kata Amien.

Dia menambahkan penculikan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena itu nasib sesungguhnya dari ke-14 orang itu bisa ditelusuri melalui Prabowo. "Kalau Habibie tidak mau dibilang bagian dari rezim Soeharto dia harus berani membawa Prabowo ke pengadilan," katanya. Amien mengatakan Pius, Andi Arif, dan Desmond J Mahesa juga menyatakan telah bertemu ke-14 aktivis tersebut dan nyatanya mereka ditahan di Kopassus. Karena itu Prabowo selaku Danjen Kopassus saat itu harus bertanggung jawab secara hukum.

Amien mengatakan dia akan menyurati Presiden Habibie, Pangab, dan Kapolri untuk mengungkap jaringan penculikan tersebut. Pangab juga harus menjelaskan nasib ke-14 orang yang telah hilang. Jika nyawa mereka telah dihilangkan harus ada yang bertanggung jawab. "Siapa yang melenyapkan nyawanya dan menjadi dalangnya harus dijelaskan sejelas-jelasnya pada masyarakat," ujar Amien.

Selain Amien direncanakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Adi Andojo Soetjipto akan melakukan orasi. Acara kemarin berlangsung meriah dan dihadiri keluarga aktivis yang hilang termasuk artis Eva Arnaz yang juga kehilangan suaminya Deddy Hamdun.

'Tenda Keprihatinan' juga diwarnai hiasan pakaian bekas, tas, kaus kaki serta barang-barang pribadi lain yang ditempelkan pada kain yang dibentangkan.

Sehari sebelumnya pada Senin lalu tokoh senior PDI Perjuangan Sabam Sirait juga telah memberikan orasi mewakili Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati.

Harus ada izin

Pada kesempatan terpisah Menteri Kehakiman Muladi mengatakan keterlibatan Amnesti Internasional dalam penyelidikan kasus orang hilang di Indonesia harus seizin pemerintah Indonesia.

"Sebagai lembaga asing, Amnesti Internasional harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah untuk melibatkan diri dalam penyidikan kasus orang hilang di Indonesia. Tidak bisa begitu saja," tegas Muladi di sela rapat dengar pendapat Menteri Kehakiman dengan Komisi I DPR RI, kemarin.

Namun, kata Muladi, jika kerja sama itu hanya sebatas ide, Amnesti Internasional boleh saja masuk tanpa izin terlebih dahulu kepada pemerintah. "Tetapi bila melakukan investigasi maka harus ada izin," katanya.(Was/SA/D-12)

MEDIA INDONESIA

04 SEP 1998

Soal 12 Korban Penculikan yang belum Kembali

Danpuspom: Polisi Wajib Cari

JAKARTA (Media): Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal menegaskan polisi wajib mencari 12 aktivis yang sampai sekarang masih hilang dan belum diketahui nasibnya.

"Puspom juga berusaha ikut mencari, tetapi itu *kan* kewajiban polisi untuk menemukannya," ujar Syamsu ketika dihubungi *Media* di kantornya, tadi malam.

Menurut jenderal berbintang dua itu, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menemukan 12 aktivis yang masih hilang. Bahkan kerangka-kerangka yang ditemukan baik di Lampung maupun di Pulau Seribu turut diperiksa oleh Puspom untuk memastikan apakah itu mayat para aktivis, ternyata bukan.

Seperti diketahui, dari berbagai laporan yang masuk ke Kontras maupun Puspom ABRI disebutkan bahwa masih terdapat sekitar 12 korban penculikan yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Padahal dalam pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), mantan Danjen Kopassus itu mengaku hanya menculik sembilan aktivis yang semuanya sudah dilepas.

Sementara itu mengenai berkas perkara 10 oknum Kopassus yang dituduh melakukan penculikan para aktivis prodemokrasi yang saat ini masih ditahan, Mayjen TNI Syamsu mengatakan berkas mereka belum dilimpahkan ke Oditur Militer.

"Berkasnya masih perlu dilengkapi dengan keterangan para-korban yang sudah dikembalikan misalnya Pius Lustrilanang," kata Syamsu.

Dijelaskan, sampai sekarang Pius belum memberikan keterangan kepada Puspom ABRI berkaitan dengan kasus penculikan terhadap dirinya.

Sementara itu Ketua Badan Pengurus PBHI Hendardi selaku kuasa hukum Pius ketika dihubungi *Media* tadi malam mengatakan Pius bisa saja membantu pemeriksaan konfirmasi atas TKP (tempat kejadian perkara) untuk melengkapi berkas Puspom ABRI dalam waktu dekat ini. Keterangan Pius ini akan dikoordinasikan lagi dengan Puspom.

"Namun, yang juga penting adalah pimpinan ABRI tidak harus menunggu pengadilan atas 10 oknum Kopassus yang masih ditahan itu untuk membawa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan ke pengadilan militer," kata Hendardi.

Mengenai nasib 12 aktivis yang masih hilang, menurut Hendardi, di lapangan bisa menjadi tanggung jawab polisi untuk mencari orang yang hilang, tetapi secara umum menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi aparat keamanan.

"Oleh karena itu PBHI mendesak perlu ada penjelasan kepada publik tentang kemajuan langkah-langkah di dalam pencarian orang hilang yang terkesan mulai dibiarkan," tandas Hendardi.

Tenda keprihatinan

Sementara itu keluarga para aktivis yang hilang berencana menggelar 'tenda keprihatinan' di halaman Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) 13-16 September sebagai tanda keprihatinan mereka karena telah berusaha mencari para keluarga mulai dari Puspom, Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sampai Pangab namun tidak membuahkan hasil.

Hal itu dipaparkan Aan Rusdianto, aktivis yang juga menjadi korban penculikan bersama keluarga orang hilang di YLBHI, kemarin.

"Kami ingin mendirikan tenda keprihatinan sebagai perwujudan rasa prihatin karena belum tentunya nasib kawan-kawan kami sampai sekarang," ujar Aan Rusdianto.

Para aktivis yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya adalah M Yusuf, Yani Avri, Sonny, Noval Alkatiri, Deddy Hamdun, Ismail, Suyat, Herman Hendrawan, Hendra Hambalie, Petrus Bimo, Yadi Muhidin, Ucok M Siahaan, dan Abdun Nasir.

Para keluarga korban penculikan juga berencana menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais untuk mendapat dukungan moral atas perjuangan mereka.

"Kami telah bertemu dengan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo dan bahkan Pangab Jenderal TNI Wiranto, tetapi usaha itu belum ada titik terang. Karena itu kami ingin membuat tenda keprihatinan. Namun, sebelumnya para keluarga akan bertemu dengan Amien Rais dan Megawati untuk mendapat dukungan moral," ujar seorang keluarga korban yang sebelumnya juga telah menemui Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid.

(Wdh/Was/D-12)

Daftar orang-orang hilang Januari-Mei 1998

No.	Nama	Status	Tempat/Tgl lahir	Alamat	Pelapor	Tanggal hilang	Lokasi dinyatakan hilang
1.	Herdis Herdiaan	Mahasiswa	Jakarta, 29-12-1979	Jl.Talas No. 252, Jakarta	Keluarga	14 Mei 1998	Jakarta, Glodok Plaza
2.	Yadin Muhyidin	Pelajar	Jakarta, 11-09-1976	Jl. Arcol Selatan RT. 012 RW. 006 Kel. Sunter Agung Jakarta Utara	Keluarga	14 Mei 1998	Sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara
3.	Andi Arief bin HM Arief Mahya	Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi	Bandar Lampung, 20-11-1970	Jl. Flamboyan III No. I Kelurahan Enggal, Bandar Lampung	Keluarga	28 Maret 1998	Lampung
4.	Hermawan Hendrawan	Mahasiswa Fisipol Univ. Airlangga '90	Pangkalpinang, Riau, 29 Mei 1970	Jakarta	Keluarga	12 Maret 1998	Jakarta
5.	Faisol Riza	Mahasiswa Fak. Filsafat UGM	Bangkalan, Jawa Timur 1 Januari 1973	Jakarta	Keluarga	12 Maret 1998	Jakarta
6.	Pranadjo Waluyo Djati	Mahasiswa Fak. Sastra UGM	Jepara, Jawa Tengah 24 Desember 1969	Jakarta	Keluarga	12 Maret 1998	Jakarta
7.	Nasir Petria	Mahasiswa Fak. Sastra UGM	-	-	Rekan-rekan korban	12 Maret 1998	Jakarta
8.	Mugianto	Mahasiswa	-	-	idem	12 Maret 1998	Jakarta
9.	Aan Rusdianto	Mahasiswa	-	-	idem	12 Maret 1998	Jakarta
10.	Pius Lustrilanang	Ketua Aldera dan Sekretaris SIAGA	-	-	-	4 Februari 1998	Jakarta
11.	Desmon J.Mahesa	Pengacara (Direktur LBH Nusantara, Jakarta)	-	-	Media Massa dan keluarga	4 Februari 1998	Jakarta
12.	Hanyanto Taslam	Pengurus DPP PDI, Jakarta	-	-	Pihak Keluarga	2 Maret 1998	Jakarta
13.	Bimo Petrus	FISIP Unair	Malang	Rumah Susun Klender, Jakarta Timur	-	Minggu III Maret 1998	Jakarta
14.	Suyat	Mhs. UNS	?	?	-	Minggu I Februari 1998	Solo
15.	Yani Avri	Supir	Jakarta	Rumah Susun Tanah Abang	Pihak Keluarga	26 April 1997	Jakarta
16.	Sonny	idem	Jakarta	idem	Rekan-rekan	idem	Jakarta
17.	Noval Alkatiri	Pengusaha	Jakarta	Jakarta	Keluarga	29 Mei 1997	Jakarta
18.	Dedy Hamdun	Pengusaha	Jakarta	Jakarta	Pihak Keluarga	29 Mei 1997	Jakarta
19.	Ismani	Buruh	Jakarta	Jakarta	Mejikan	29 Mei 1997	Jakarta
20.	Al Yusuf	Guru	Jakarta	Jakarta	Keluarga	7 Mei 1997	Jakarta

Sumber: *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*

Bagaimana kalau Puspom ABRI menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan ketujuh oknum tersebut dalam kasus penculikan?

Kalau memang nanti ternyata terbukti ada kesalahan dari anggota Kopassus, saya sebagai mantan Danjen Kopassus siap bertanggung jawab.

Saya ingin menegaskan bahwa semangat dan tekad anak buah saya dan saya sendiri adalah demi kepentingan bangsa dan negara.

Kita semua mengabdi pada kejayaan bangsa dan keselamatan rakyat. Jadi, kalau di dalam pelaksanaan tugas ternyata ada kesalahan, kita sebagai prajurit harus siap bertanggung jawab.

Bila Puspom ABRI atau Mabes ABRI memanggil Anda untuk diminta keterangannya sehubungan dengan kasus ini, apa Anda siap?

Sebagai prajurit saya harus selalu siap memberikan masukan.

Tapi seperti dikatakan Danpuspom ABRI, Mabes ABRI memang belum pernah memanggil Anda ke Jakarta untuk dimintai keterangan

Belum.

Apakah benar ada perintah penculikan terhadap aktivis?

[Tidak ada jawaban]

Ada sementara pihak yang mengatakan bahwa Anda salah menafsirkan perintah dari atas, benarkah begitu?

Ha...ha...., siapa yang bilang, yang bilang itu *kan* Anda *[Prabowo langsung bergegas masuk ke ruangannya dengan penjagaan yang sangat ketat]*. **(k11/e)**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: M I | Tanggal: 27/8 97

Gus Dur Jamin Prabowo tidak akan Lari

JAKARTA (Media): Prabowo tidak akan lari, karena itu tidak perlu terburu-buru diadili di Mahkamah Militer, kata KH Abdurrahman Wahid.

"Sebaiknya pengusutan kasus Prabowo itu diendapkan untuk sementara waktu, sampai selesai diperiksanya kasus 10 prajurit ABRI lainnya yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis," ujar Gus Dur, sapaan untuk Wahid, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta kemarin.

Dipensiunkannya Prabowo Subianto dari dinas ABRI dinilainya sebagai langkah bagus, namun tindakan itu berkesan ingin melindungi citra ABRI, termasuk atasan yang memerintah Prabowo.

"*Lo*, Prabowo bergerak *kan* ada yang memerintah, yakni orang di atasnya. Jadi dengan dipecatnya Prabowo dari militer kesannya ada yang dilindungi atau ditutup-tutupi."

Ketua Umum PBNU itu mengaku tidak puas dengan keputusan Pangab itu. Tapi dipecat dari keanggotaan ABRI bagi orang yang berpangkat jenderal itu dinilainya sudah cukup berat.

Di tempat terpisah Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengatakan jika nanti ABRI mengajukan Prabowo ke peradilan, maka dia harus diadili di Mahkamah Militer, bukan di pengadilan negeri. Karena ketika peristiwa itu terjadi Prabowo masih berstatus anggota militer.

"Peradilan militer untuk anggota militer sampai pangkat kapten, sedang untuk perwira menengah ke atas namanya adalah Mahkamah Militer Tinggi."

Sehari sebelumnya Menteri Kehakiman Muladi mengatakan bahwa Prabowo dapat diadili di peradilan umum (pengadilan negeri), karena saat ini Prabowo bukan lagi anggota militer. (*Media*, 26/8).

Tuntutan agar Prabowo diadili masih santer terdengar. Salah seorang korban penculikan, Pius Lustrilanang, melalui kuasa hukumnya, Hendardi, meminta agar Pangab Jenderal Wiranto memahmilkan Prabowo, karena sudah jelas menculik yang merupakan tindak pidana.

"Kendati Mahmil sangat sukar diharapkan dapat membongkar latar belakang politik dari penculikan ini, tetapi dengan Mahmil setidaknya dapat diketahui atas perintah siapa penculikan terhadap para aktivis ini," ujar Hendardi.

Pihaknya sedang memikirkan kemungkinan melakukan gugatan terhadap Letjen TNI Prabowo yang memerintah penculikan tersebut dan meminta agar unsur PBB dilibatkan dalam kasus penyidikan orang hilang.

Sementara itu Koordinator Kontras Munir mendesak Puspom ABRI agar memberikan penjelasan secara jujur mengenai penyelidikannya tentang sepuluh orang yang akan dimajukan ke Mahkamah Militer.

"Puspom perlu memberikan penjelasan secara jujur penyidikan sepuluh orang yang akan diajukan ke Mahkamah Militer. Ini perlu diungkap agar masyarakat lebih mengetahui keterlibatan ke-10 orang itu dalam penculikan aktivis," ujar Munir.

(Rid/Awi/Wdh/Was/N-1)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Jakarta Post | Tanggal: 24/8 98

Investigator says Prabowo could be court-martialled

JAKARTA (JP): National Military Police Corps Commander Maj. Gen. Syamsu Djalal said yesterday the Armed Forces' (ABRI) fact-finding team now had the evidence with which to grill Lt. Gen. Prabowo Subianto with criminal charges for his alleged involvement in the abduction of political activists.

"Prabowo's testimony before members of the Officers Honor Council that he was involved in the abductions of nine activists who have since resurfaced) could be used as an evidence to bring him before a military tribunal," Syamsu told reporters at his office in Central Jakarta.

He said the team had questioned Prabowo and the two other officers of the Army Special Force (Kopassus) a week before the establishment of the Honor Council on Aug. 3.

"We have questioned Prabowo, Muchdi and Chairawan, and completed the dossiers. The statements were used as material evidence for the investigation conducted by the Honor Council," he said.

ABRI commander Gen. Wiranto honorably discharged Prabowo and removed the two others from active duty for their suspected roles in the abduction and torture of political activists.

"We'll resummon them to complete the dossiers of 11 other Kopassus officers, who will be court-martialled," he said.

He then asked for more time, citing that hastily prepared or incomplete dossiers might lead to incorrect prosecutions.

He also said the investigation only covered the abductions which occurred between March and April of this year.

The abductions of political activists started in April last year, but those of the nine activists that Prabowo reportedly admitted to having been involved in occurred in March and April of this year.

Syamsu said Wiranto instructed him yesterday to immediately complete the investigation.

Syamsu also dismissed speculation that the abductions were part of an intelligence operation to safeguard national stability and order.

"Had the abductions been part of an intelligence operation, the Armed Forces Intelligence Agency (BIA) would have been informed about them.

"BIA chief Maj. Gen. Zacky Anwar Makarim has testified that he did not know anything about the abductions," he said.

However, he did not dismiss the possibility that the number of suspects to be court-martialled would increase on the completion of the investigation.

"We have questioned former chiefs of the North and East Jakarta Military Districts and also the chief of the Jakarta Intelligence Department regarding their involvement in the abductions of some of the activists," he said. The independent Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) has reported that at least 24 activists have gone missing since April last year. Nine resurfaced after being absent for months and spoke of being abducted, kept in detention and tortured.

Kontras says that one was found dead from a gunshot in a forest near Magetan, East Java, on May 23 after being missing for two days, and the rest are still unaccounted for.

The coordinator of the team, Munir, said yesterday some of the activists who had reappeared had reported meeting a number of those still missing in the detention site.

Munir also called for a transparent investigation into the abductions of the political activists. "Syamsu has asked the public to give the team of investigators any information, but in return he must announce any progress in the investigation."

The Armed Forces has persistently denied any knowledge of the whereabouts of the activists still missing. (imn/bys/hms)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
MERDEKA
Tanggal 29/8

Prabowo Agar Hadap Puspom ABRI untuk Diperiksa

Jakarta, Rabu, Merdeka

Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil dan memeriksa Prabowo Subianto berkaitan dengan penculikan sembilan orang aktivis. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan dijadikan bahan untuk disampaikan ke Mahkamah Militer.

Hal ini diungkapkan Syamsu yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI di ruang kerjanya, kemarin. Seluri sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal Subagyo HS mengatakan, dalam pemeriksaan Prabowo mengakui telah menculik sembilan orang aktivis.(*Merdeka*, 25/8)

Menanggapi pernyataan Kasad Jenderal Subagyo itu, Syamsu mengatakan, tentunya Puspom ABRI tidak akan tinggal diam. "Berarti *kan* dia (Prabowo-red)telah melakukan tindak pidana. Tentu dengan sendirinya kita akan memanggil dan memeriksa dia," ujar jenderal berbintang dua itu.

Kapan? "Sebentar lagi lah, saat ini kita kan tengah memeriksa anak buahnya dan itu masih terus berjalan. Nanti jika segera kita panggil. Sebelumnya Prabowo juga sudah kita panggil ke sini *kan*. Yang ini bukan kita panggil lagi, tapi sudah diperintahkan Menhankam/Pangab, agar Prabowo menghadap Danpuspom untuk diperiksa," jawab Syamsu.

Ketika ditanya apa Prabowo dalam pemeriksaan oleh Puspom ABRI sebelumnya sudah mengakui penculikan tersebut, dia hanya mengatakan, hal itu sudah pernah terungkap di sini. Tapi Syamsu tidak menyatakan siapa yang mengungkapkan hal tersebut.

"Namun demikian pengakuannya masih belum kita dapatkan. Makanya kita lengkapi dengan bukti-bukti. Kalau maling semua mengaku, gampang polisi menangkapnya. Di sini sama juga, apalagi ini yang sudah prajurit, yang sudah dididoktrin dan diperintahkan macam-macam, *kan* pengakuannya sangat susah," tuturnya.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa saat diperiksa di Puspom, hasil pemeriksaan terhadap Prabowo diberikan untuk kebutuhan DKP. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan terhadap Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. "Kalau sekarang, apabila nanti ada keterangan baru lagi,baru itu akan menjadi konsumsi pengadilan militer," tambahnya.

Ketika dikonfirmasi apa benar perkara kasus orang hilang belum diajukan ke Mahmil karena menunggu hasil pemeriksaan dari tiga orang terperiksa, Syamsu mengatakan, itu merupakan salah satu faktornya.

Apa ada permintaan cekal terhadap Prabowo? "Tidak perlu. Prabowo itu ksatria. Biarpun dia lepas dari prajurit, dia tetap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Saya kira bisa dipertanggungjawabkan itu," jawabnya



Prabowo Subianto

Disinggung tentang kemungkinan adanya perintah baru dari Pangab Jenderal Wiranto setelah mengumumkan sanksi untuk ketiga perwira tersebut, Syamsu mengatakan, perintah Pangab tidak diberikan secara berulang-ulang. "Perintahnya satu kali, yaitu usut tuntas, sudah!" katanya singkat.

Tadi bertemu Pangab, mungkin ada perintah baru? "Tidak. Beliau hanya mengatakan, eh selesaikan yang cepat. Saya jawab, siap!" jawabnya sambil tersenyum.

Prabowo Di Bandung

Sementara itu beberapa wartawan yang mencoba menemui Prabowo yang tinggal di Jalan Cendana, Jakarta Pusat tidak menghasilkan apa-apa. Pasalnya, bekas Pangkostrad dan Danjen Kopassus itu sudah meninggalkan rumahnya sejak pukul 10.00 WIB.

Menurut informasi salah seorang penjaga, menantu bekas Presiden Soeharto itu berangkat bersama seorang sopir dan ajudan. Namun dia tidak mengetahui kemana Prabowo pergi.

Suasana di Jalan Cendana sepi-sepi saja. Namun penjagaan tetap ketat. Setiap mobil yang ingin melintas di jalan tersebut ditanyai tujuannya. Bahkan di depan setiap jalan masuk itu ada tanda dilarang masuk dan para penjaga umumnya mengenakan baju batik.

Ketika para wartawan mencoba kembali menemui Prabowo pada sore hari, ternyata yang bersangkutan dikabarkan sudah meninggalkan Jakarta menuju ke Bandung. Menurut sumber, sekitar pukul 12.00 WIB, Prabowo dengan jip Mercy-nya sempat kembali. Tapi hanya beberapa saat dan kemudian dia pergi lagi, yaitu kemungkinan ke Bandung.(PN)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31155183,3901226, 391 0247 ,Fak.,3901 40
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 26/8 98

Mahmil

Dikatakan, kemungkinan untuk mengajukan Prabowo, Muchdi dan Chairawan ke Mahmil tidak tertutup selama kasus ini masih terus disidik oleh Puspom ABRI. "Adanya sanksi administratif bagi mereka bertiga oleh Menhankam/Pangab dapat dijadikan indikasi bahwa ada tindakan pidana yang dilakukan, entah itu berupa penculikan, penyekapan, atau penganiayaan. Tapi penyidikan terhadap itu 'kan perlu dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Menurut Syamsu, sekarang ini Puspom sedang melakukan pemeriksaan lebih cermat terhadap 11 orang tersangka dari Kopassus, yang hingga kini diduga kuat sebagai pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap sejumlah aktivis. "Untuk itu saya minta semua pihak yang terlibat dalam masalah ini, baik itu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) maupun para korban penculikan untuk memberikan masukan yang terperinci kepada Puspom. Ini akan sangat membantu Puspom untuk segera melengkapkan berkas pemeriksaan untuk selanjutnya diajukan ke Mahmil," katanya.

Saat ini, kata Syamsu, yang masih dikategorikan sebagai orang hilang ada 12 orang, dengan rincian tiga orang yang hilang karena kasus kerusuhan dan sembilan lainnya hingga kini masih diduga sebagai korban penculikan. "Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka masih ada atau bagaimana. Sampai sekarang kita masih mengusut dan menyelidikinya. Yang pasti, di tempat kejadian perkara (TKP), terutama di Cijantung (Markas Kopassus Red) sudah kosong. Ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi kami," katanya.

Informasi baru

Menurut Syamsu, pengakuan Prabowo bahwa jumlah orang yang telah diculik sebanyak sembilan orang, merupakan informasi baru bagi Puspom ABRI karena sebelumnya ke-11 prajurit Kopassus yang diperiksa dan ditahan Puspom ABRI hanya mengakui penculikan terhadap empat orang. Puspom akan terus mengembangkan hasil DKP dan mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam keterlibatan Prabowo pada kasus penculikan sejumlah aktivis tersebut.

"Sekarang 'kan Prabowo mengakui sembilan, makanya kita perlu mendalami lagi. Kita minta kalau ada masukan lain seyogianya berikan, misalnya dari saksi-saksi korban," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir meminta, agar Puspom ABRI mengumumkan hasil penyelidikannya sendiri, dengan tidak berpegang pada hasil keterangan dari para tersangka semata, tetapi juga mendalami keterangan saksi-saksi.

"Sampai saat ini terkesan Puspom hanya mengungkapkan apa-apa yang diperolehnya dari tersangka, misalnya pengakuan bahwa telah menculik empat orang saja atau pengakuan Prabowo yang menculik sembilan orang. Padahal, saksi-saksi korban jelas-jelas mengatakan bertemu dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny dan lainnya. Artinya, jumlah yang diculik itu bukan hanya sembilan orang yang sudah dilepas itu," tegas Munir.

Menurut Munir, Puspom sebagai lembaga penyidik tidak boleh mengambil posisi tidak mempercayai keterangan saksi-saksi korban, padahal jelas keterangan saksi-saksi korban itu bisa menjelaskan banyak hal dalam kasus penculikan yang kemungkinan juga tidak "diketahui" oleh para tersangka penculiknya.

Disidik polisi

Sementara itu pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman mengatakan, karena Prabowo sekarang sudah berstatus sipil, dengan sendirinya aparat penyidik Kepolisian RI dapat melakukan tindakan lanjutan, yaitu dengan melakukan penyidikan terhadap Prabowo untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan.

"Yang ditunggu masyarakat 'kan memang terwujudnya penegakan hukum. Jadi, dalam kasus penculikan sejumlah aktivis yang diduga melibatkan Prabowo, ada baiknya aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan mengambil tindakan konkret. Yakni memanggil dan memeriksa Prabowo serta mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Selanjutnya, kalau memang mungkin ajukan segera Prabowo ke pengadilan," tandasnya.

Loebby menilai, bukan mustahil kebijakan Menhankam/Pangab memberhentikan Prabowo, yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut, dalam rangka memberi keleluasaan kepada pengadilan nonmiliter membuktikan keterlibatan jenderal berbintang tiga itu dalam kasus penculikan aktivis. "Sebab itu, aparat kepolisian sepatutnya proaktif menanggapi harapan masyarakat," tegasnya.

(sma/oki/fan)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: 31155183, 3901376, 3913237 Fax. 3901810
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Sobyek: | Sumber: M. | Tanggal: 25/8/98

Ketua F-PP: Sanksi itu tak Cerminkan Rasa Keadilan

JAKARTA (Medin): Kalangan DPR, praktisi hukum maupun Kontras belum puas dengan keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang hanya memberi sanksi administratif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Muyjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan terkait dengan kasus penculikan sejumlah aktivis prademokrasi beberapa waktu lalu.

Mereka yang diwawancarai adalah Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur, Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, dan Koordinator Kontras Munir. Sedangkan Wakil ketua F-KP DPR bidang Umum Chaeruddin Hasibuan, Prof Sutandyo, dan Letjen TNI Soeyono menilai putusan tersebut sudah maksimal dan terbaik bagi ABRI.

Mereka mengemukakan pendapatnya secara terpisah kemarin menanggapi keputusan Pangab terhadap tiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus dalam kasus penculikan para aktivis. Kemarin, Pangab Jenderal TNI Wiranto memberi sanksi mengakhiri masa dinas Letjen TNI Prabowo dalam jajaran ABRI. Sementara Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

Ketua F-PP DPR RI Zarkasih Nur mengatakan putusan tersebut sama sekali tidak tuntas dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan baru dipandang adil jika kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Militer.

"Kalau sekadar seperti itu pasti masyarakat tidak puas. Karena itu putusan setiap kasus harus tuntas agar tidak menimbulkan tanda tanya baru lagi," kata Zarkasih Nur.

Menurut dia, jika kesalahan Prabowo tersebut secara militer tidak bisa dibawa ke mahkamah militer, maka para korban penculikan maupun keluarga korban dapat membawa Prabowo ke pengadilan negeri dan memperkarakannya baik secara pidana maupun perdata.

Sedangkan Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah menyatakan kaget terhadap keputusan Pangab tersebut. Terlepas dari berat ringannya hukuman itu, yang pasti, masyarakat tidak puas.

Menurut Bachtiar, sejak semula F-PP menginginkan agar kasus penculikan yang melibatkan satuan elite TNI AD ini digelar ke peradilan militer, atau Mahkamah Militer. Keinginan F-PP ini semata-mata agar masalahnya menjadi transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi. Sebab, selama ini yang beredar simpang siur di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam. Ada yang mengatakannya dengan Pangti ABRI, Pangab, dan pimpinan TNI AD.

Sudah tepat

Sebaliknya Wakil Ketua F-KP DPR bidang Umum Chaeruddin Harahap menilai keputusan Pangab itu sudah tepat. Dia tidak sependapat jika disebut sanksi itu terlalu ringan.

Dikatakan, bagi seorang perwira seperti Prabowo, secara moral sanksi hukuman administratif sudah berat, lebih-lebih harus mengakhiri tugas dan dinas aktif militer.

Pendapat senada dikemukakan anggota Komnas HAM Prof Dr Soetandyo Wignyosubroto. Menurut dia keputusan Pangab tersebut sudah maksimal.

"Untuk hasil DKP, saya kira, itu sudah maksimum sekali. Itu sudah berat sekali, apalagi bagi Jenderal Prabowo yang sejak kecil mencita-citakan hidup di lingkungan dan menjadi militer," katanya.

Sedangkan Sekjen Departemen Letjen TNI Soeyono mengatakan keputusan Pangab itu merupakan yang terbaik bagi ABRI.

"Sebenarnya bagi ABRI ini sangat disayangkan, karena ABRI kehilangan perwira-perwira terbaiknya. Namun, tindakan tegas sangat perlu bila sudah menyangkut nama baik ABRI," ujar mantan Kasum ABRI itu.

Keputusan ini, katanya, juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa ABRI serius menangani kesalahan intern. Sedangkan untuk dalam negeri menjadi indikator pemulihan kepercayaan kepada ABRI.

Sedangkan Koordinator Kontras Munir tidak puas dengan keputusan Pangab itu dan tetap menuntut tindakan pidana terhadap Prabowo Cs.

"Putusan ini membuat pesimis masyarakat. Tidak ada langkah maju dari ABRI dalam menangani tindakan keketasan. ABRI harus membuktikan itikad baiknya membawa mereka ke Mahmil," tandasnya. (Mun/Wns/Ant/D-12)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183,3901226,391 1217 Fak.3301-80
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 25/8 97

Seharusnya Langsung ke Mahmil

Jakarta, Kompas -

Desmond J Mahesa - salah seorang korban penculikan - merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Sebagai korban, saya melihat kok bisa begini? Kita sulit maju untuk maju karena kesalahan masa lalu ditutupi untuk kepentingan kelompok. Seharusnya, ketiga perwira tinggi itu langsung dibawa ke Mahmil bersama ABRI sempat tr-

juruk kan karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

"Kita mungkin terlalu banyak berharap selama ini akan adanya kejujuran. Makanya, ke depan jangan berharap terlalu banyak," ujar Desmond lagi dengan nada pesimis, ketika ditanya tanggapannya tentang keputusan Panglima ABRI.

Nada pesimis juga terlontar dari ayah kandung Petrus Bimo Anugerah, DT Utomo Rahardjo, yang sampai saat ini terus berharap ada kepastian mengenai nasib anaknya yang telah hilang sejak akhir Maret lalu. Ia mengaku tidak terlalu emosional mendengar putusan Panglima ABRI itu. Namun Utomo makin tidak terlalu percaya terhadap hukum.

"Kita mengharapkan kepastiannya. Yang penting buat kami bukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) atau apa pun. Yang penting, soal nasib anak saya dan yang senasib itu dijawab," tuturnya.

Sebab itu, Utomo menyatakan akan terus mempertanyakan hal itu kepada Panglima ABRI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. "Mohonlah juga kepada yang sepuluh (anggota Kopassus yang tengah diperiksa Puspom ABRI) itu. Kalau diperiksa, ya bisa memberikan jawaban di mana anak-anak kami itu," tuturnya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, menyatakan, tidak melihat adanya langkah maju ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk segera menjalankan fungsinya sebagai institusi penyidik yang wajib memeriksa ketiga Pati itu sebagai tersangka. Panglima ABRI juga diharapkan tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam meneruskan hasil-hasil pemeriksaan awal.

Yang lebih mendesak bagi Kontras adalah agar Pangab segera melepaskan korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. "Tindakan menculik, menghilangkan orang, dan merampas kemerdekaan orang bukan hanya masalah intern ABRI, melainkan menyangkut keselamatan dan kemerdekaan orang lain. Karena itu, Puspom ABRI harus segera memeriksa pidananya untuk dilanjutkan ke Mahmil. Kalau itu tidak dilakukan, ABRI tidak melakukan reformasi sebagaimana yang diklaimnya sendiri," tandas MM Billah dari Dewan Penasihat Kontras.

Menurut Munir, sembilan orang yang diakui Prabowo telah diculik tampaknya menunjuk pada sembilan korban penculikan yang kini telah kembali. Itu menunjukkan adanya upaya untuk tidak mengakui bahwa 12 orang lainnya adalah korban penculikan juga.

Mengecewakan

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga mengharapkan agar Puspom ABRI segera memeriksa Prabowo. Hal senada diucapkan pengajar FHUI Dr Kasterius Sinaga, I Kristiadi dari CSIS, praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan, mantan Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Asep Wahyuwijaya, anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin dan Albert Hasibuan, serta Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur dan Wakil Ketua F-KP DPR Abu Hasan Sazili. Mereka dihubungi secara terpisah, Senin.

Sinaga berpendapat, keputusan Pangab itu merupakan langkah awal untuk memuaskan tuntutan masyarakat. Namun melihat adanya indikasi yuridis seperti diungkap para korban, yang sekaligus mencerminkan adanya pelanggaran HAM, maka penyelesaian secara yuridis memang sangat diperlukan.

Tambunan menilai, sikap pimpinan ABRI belum menunjukkan adanya keinginan ABRI menuntaskan masalah. "Seharusnya, pimpinan ABRI langsung menyerahkan berkas ketiga perwira tinggi itu ke Oditurat Militer. Yang sekarang terjadi masih belum menyentuh rasa keadilan rakyat," kata Tambunan.

Pangaribuan menyatakan, harapan masyarakat dalam pemeriksaan oleh DKP bukan hanya pemecatan Prabowo. "Tapi persoalan ini lebih ke penegakan hukum. Harus ada penjelasan soal peran Prabowo dalam kasus ini. Perlu ada klarifikasi yang jelas dan tuntas soal peran ketiga perwira ABRI itu," katanya.

Samsudin yang pernah bertugas di lingkungan Kopassus malah berpendapat, keputusan mengakhiri dinas kemiliteran Prabowo justru akan menimbulkan kesulitan bagi proses hukum secara militer. "Bisakah orang sipil di-Mahmil-kan?" tanyanya.

(Tim Kompas)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No. 74 Tel: 31-35183, 390226, 391 217 Tak. 330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: KOMPAS | Tanggal: 25/8/93

Prabowo Diberhentikan

* Muchdi dan Chairawan Bebas Tugas

Jakarta, Kompas

Mayjen TNI Prabowo Subianto (46) diberhentikan dari dinas kemiliteran. Keputusan itu diumumkan Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jakarta, Senin (24/8), setelah mempelajari masukan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Ia memberhentikan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto, Jenderal Wiranto juga membebaskan mantan Danjen Kopassus (21 Maret 1998-22 Mei 1998) Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono (49) dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, dari semua tugas dan jabatan, struktural di ABRI [illegible]. Jenderal Wiranto juga tidak menutup kemungkinan bagi ketiga perwira itu untuk diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Di hadapan wartawan di [illegible] luar negeri di Markas Besar (Mabes) ABRI Jakarta, tadi malam, Wiranto mengemukakan, "Keputusan ini saya ambil tanpa tekanan dari siapa pun atau dari pihak mana pun. Jangan sampai nanti ada [illegible] bahwa saya mengambil keputusan ini karena [illegible] dari sana-sini. Tidak ada itu."

Dalam acara jumpa pers [illegible] Wiranto menolak memberikan jawaban seputar kedudukan serta kesalahan ketiga perwira Kopassus ini sehingga diberhentikan dan dinonaktifkan dari ABRI.

Saat mengumumkan tindakan administratif terhadap ketiga perwira Kopassus sehubungan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis pro-demokrasi itu, Wiranto didampingi antara lain Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, KSAU Marsdya TNI Hanafie Hasnan dan seluruh anggota DKP.

Cendana dijaga ketat

Menyusul pengumuman Panglima ABRI itu, penjagaan keamanan di sekitar Jalan Cendana, Jakarta Pusat, menjadi lebih ketat, khususnya di lokasi tempat tinggal keluarga mantan Presiden Soeharto dan Prabowo. Di ujung Jalan Tanjung - Teuku Umar tampak sebuah mobil patroli dan sejumlah aparat Kodam Jaya berjaga-jaga. Sejumlah pasukan berseragam lengkap juga tampak siaga di Jalan Suwiryo. Sedangkan sejumlah aparat bersenjata laras panjang berjalan kaki di jalan-jalan sekitar Cendana.

Aparat berpakaian batik juga berjaga-jaga di mulut Jalan Cendana yang ditutup untuk umum. Beberapa wartawan yang berniat [illegible] sekitar rumah Prabowo dicegat di mulut jalan dan dilarang melintasi jalan itu, sekalipun dengan berjalan kaki.

Menurut seorang petugas, rumah Prabowo sudah sejak pagi tidak berpenghuni. "Mungkin Bapak ada di Bandung atau di Mabes," kata petugas tersebut. Wartawan yang mulai berkumpul di ujung Jalan Cendana diminta membubarkan diri oleh petugas.

Kemungkinan Mahmil

Dalam penjelasannya, Menhankam/Pangab Wiranto mengatakan, selain mempertimbangkan saran dalam bentuk rekomendasi dari DKP, keputusan yang diambilnya ini juga didasarkan atas pertimbangan dari beberapa aspek. Yakni, kesalahan yang telah dilakukan, serta jasa-jasa dari ketiga perwira tersebut selama bertugas di ABRI.

"Kita tidak menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan ketiga perwira itu selama tugas mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Banyak jasa dan prestasi yang telah dibuat oleh perwira tersebut. Kedua hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk memutuskan," tuturnya.

Tapi yang jelas, kata Wiranto, keputusan ini diambilnya untuk kepentingan ABRI, bangsa dan negara. "Keputusan ini sesuai dengan tujuan dan jiwa dari DKP dan merupakan keputusan administratif. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan para perwira ini untuk diajukan ke Mahmil," katanya.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183,3901226,3912217 Fax.,3301140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 27/8/98

Prabowo — —

Wiranto juga mengatakan, jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap 10 anggota Kopassus yang lain, nyata-nyata bisa membuktikan bahwa ketiga perwira ini melakukan tindak pidana, maka mereka akan diajukan ke Mahmil.

Sama dengan DKP

Secara terpisah, Ketua DKP Subagyo mengatakan, keputusan administratif yang diambil Menhankam/Pangab Wiranto sama dengan yang direkomendasikan DKP. Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini, mengatakan, sejak dibentuk tanggal 3 Agustus, DKP telah melakukan sejumlah sidang pemeriksaan, meninjau TKP, mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi dan perwira lainnya serta mendengarkan masukan dari Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) ABRI. Selanjutnya, pada 21 Agustus DKP memberikan rekomendasinya kepada Menhankam/Pangab.

"DKP telah menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang kita sarankan kepada Menhankam/Pangab sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan ketiga perwira. Apakah kemudian ketiga perwira akan diajukan ke Mahkamah Militer, itu tergantung Menhankam/ Pangab," tutur Subagyo.

Hal yang sama juga diutarakan anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini, keputusan yang telah diambil Wiranto sama seperti yang direkomendasikan DKP. Agum menambahkan, masyarakat sebaiknya bersabar menunggu hasil pemeriksaan dan persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 orang anggota Kopassus lainnya.

Atas pertanyaan wartawan, Agum juga membenarkan bahwa pada persidangan DKP, Prabowo mengaku telah menculik sembilan orang. (ama/wis/gg)

KANDASNYA "SANG BINTANG"



Kompas/Ha

Nama : Prabowo Subianto
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Pangkat terakhir : Letnan Jenderal TNI

Pendidikan:
- Akademi Militer (Akabri) (1974)
- Pendidikan Perang Khusus di Amerika Serikat
- Latihan Khusus Anti-teroris di Jerman Barat

Pengalaman kerja:
- Anggota Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha)
- Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus
- Komandan Batalyon (Danyon) 328 Kidang II/Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad)
- Kepala Staf (Kasdat) Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigif Linud) 17/Kostrad
- Komandan Grup III Grup 3/Pusat Pendidikan Kopassus Bahuaiar, Bandung (Tahun 1993-Oktober 1994)
- Wakil Komandan Kopassus (Oktober 1994-November 1995)
- Komandan Kopassus (Desember 1995-24 Juni 1996)
- Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus (25 Juni 1996-19 Januari 1998)
- Pangkostrad (29 Januari 1998-22 Mei 1998)
- Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Dansesko ABRI), sejak tanggal 21 Mei 1998 hingga dinonaktifkan akhir Juli 1998
- Diperiksa DKP tanggal 3-21 Agustus 1998
- Dibebastugaskan 24 Agustus 1998

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183,3901226,391 2417 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Jakarta Post | Tanggal: 21/5/92

Observers give Wiranto decision the thumbs down

JAKARTA (JP): Military observers and rights campaigners have given the thumbs down to the Armed Forces' decision to slap administrative punishments on Lt. Gen. Prabowo Subianto and two other officers from the Army's Special Force (Kopassus), rather than bringing them before a military tribunal to answer for their involvement in the abduction and torture of political activists.

Lt. Gen. (ret) Bambang Triantoro, a former Armed Forces (ABRI) chief of sociopolitical affairs, said he was stunned when he heard that ABRI Commander Gen. Wiranto had decided to dismiss Prabowo from service and remove Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono and Col. Chairawan from "structural duties."

Wiranto said he made the decision based on the recommendations of the Officers Honor Council which interrogated the three men.

"Prabowo committed a criminal act. He should be court-martialled," Bambang told *The Jakarta Post* yesterday.

"I notice, though, that the case has been a heavy political burden to the Armed Forces Headquarters," he said.

Activists of the Independent Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) expressed suspicion that some sort of underhand deal had taken place between ABRI leaders and Prabowo prior to the announcement.

Kontras told a press conference that Wiranto had been concerned only about protecting ABRI's image rather than taking corrective internal measures.

"With that decision, ABRI demonstrated that it has no willingness to substantially or institutionally correct its repressive policies, which include the act of kidnapping," Kontras' coordinator Munir said.

"Prabowo may hold the 'trump card'. If he was court martialled he could reveal all the facts behind the abductions, including who gave him the order," M.M. Billah, a member of Kontras' advisory council, said.

"The 'disclosure' could implicate many ABRI generals, including Prabowo's superiors (at the time of the abductions) including the Army chief of staff, and ABRI's commander and supreme commander (then president Soeharto)," he said.

"It would also ruin ABRI as a whole. That's why (ABRI must have thought that) it was better to discharge Prabowo rather than bring him before a military court," added Billah.

During the height of the abductions in February, Wiranto and the current Coordinating Minister for Political Affairs and Security Feisal Tanjung were respectively the army chief of staff and ABRI commander.

Munir considered Wiranto's decision to be a setback to his efforts to improve the image of the Armed Forces and said it blatantly ignored the people's sense of justice.

"If we study all (council chairman Gen.) Sudhargo's earlier statements, it is clear that crimes have been committed (by Prabowo)," Munir said.

Kontras have recorded at least 24 disappearances of activists since April last year. Nine resurfaced after an absence of several months and spoke of being abducted, kept in detention cells and tortured.

Student activist Andi Arief, one of nine kidnapped activists who have returned home, said ABRI's decision was disappointing.

"If the three officers are guilty, they must be court-martialled," he said in Lampung yesterday as quoted by *Antara*.

The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) said that Wiranto's decision had closed the door to the possibility of revealing who masterminded the abductions and what political purpose they were intended to serve.

"The decision has confirmed the ABRI leadership's intention to 'close' this case through a process which is not transparent," PBHI's executive director Henhardi said in a statement made available to the press.

Soetandyo Wignjosoebroto, a member of the National Commission on Human Rights, said Wiranto's decision was the most that he could have done.

"It was the best outcome of the Honor Council's investigation," he said as quoted by *Antara*. "It must have been hard on Prabowo, who has dreamed of being a senior ABRI officer since he was a boy." (dan/hyg)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:

Subyek:	Sumber: Republika	Tanggal: 27-8-98

Gus Dur: Pemberhentian Prabowo untuk Lindungi ABRI

JAKARTA —Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid menilai bahwa pemberhentian mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto lebih merupakan upaya untuk melindungi organisasi ABRI. Hal itu, menurutnya, belum dapat dikatakan sebagai bagian reformasi internal ABRI.

Gus Dur -demikian panggilan akrab Abdurrahman- melihat bila kasus penculikan yang melibatkan Prabowo itu diusut tuntas, maka banyak sekali yang terlibat. "Prabowo kena, KSAD juga kena, Pangab juga kena. Setelah itu Pangti kena. Bila sudah sampai ke Pangti, maka rakyat juga ikut kena. Salah sendiri rakyat juga ikut mengangkat Pangti," paparnya kemarin di sela pembentukan Kinkonas (Komisi Independen Pencari Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional), di rumahnya Ciganjur Jakarta.

Meski demikian, Gus Dur menegaskan bahwa langkah Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam mengusut kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum ABRI tak bisa berhenti, hanya dengan memberhentikan Prabowo. "ABRI harus melakukan perubahan orientasi besar-besaran dalam menangani setiap kasus yang terjadi."

Di tempat lain, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mempertanyakan kembali dasar pengambilan keputusan Pangab terhadap Prabowo. Pangab, menurut Koordinator Kontras Munir SH dinilai belum menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Chairawan sehingga harus dikenai sanksi administratif. "Sejauh mana keterkaitan sanksi itu dengan keterlibatan mereka dengan penculikan, mestinya dijelaskan," kata Munir.

Masalah penculikan ini menjadi salah satu alasan mengapa Gus Dur membentuk Kinkonas, bersama dengan rekan-rekannya seperti pengusaha etnis Tionghoa Edward Seerjadjaja, Mustofa Zuhad Mughni (NU), Nasir Tamara (ICMI), dan Vjekoslav Koprunyak (mantan dubes Yugoslavia untuk Indonesia). Alasan lain, dan lebih utama adalah banyaknya sorotan dunia terhadap kerusuhan Mei yang mengakapkan terjadinya banyak pemerkosaan.

Menurut Gus Dur, masyarakat internasional saat ini berkampanye untuk memboikot perdagangan dengan Indonesia, karena adanya pemerkosaan itu. Kampanye itu dilakukan dengan demonstrasi. Juga dengan pameran foto tentang kekejaman dan kekerasan yang dilakukan umat Islam.

Untuk mematangkan gagasan Kinkonas, Gus Dur menunjuk Yayasan Persemaian Persaudaraan (YPP). Tujuan utama Kinkonas sendiri adalah mengungkapkan kebenaran sesungguhnya dibalik berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, tanpa diwarnai kepentingan politik atau kebencian. ■ rw

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3912247 ,Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 27/8/98

Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid:

Hentikan Polemik dan Debat mengenai Prabowo

Jakarta, Kompas

Hentikan polemik dan debat tentang keputusan Pangab, demikian harapan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid. Sementara KSAD Jenderal TNI Subagyo mengatakan, bisa saja Letjen TNI (Purn) Prabowo diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil), dan hal itu dinilai baik sekali oleh Nurcholish Madjid.

Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid menegaskan perlunya segala bentuk polemik dan debat tentang keputusan Pangab patut dihentikan dahulu. "Hentikan sampai di sini. Nanti kita lihat lebih lanjut hasil pemeriksaan terhadap 10 tersangka lainnya. Masalah Prabowo itu mengaku atau tidak, itu bukan soal," tuturnya kepada wartawan di kediamannya, Rabu.

Sementara KSAD Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, meski telah menjadi seorang sipil, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto bisa saja dibawa ke Mahmil. Menjawab pertanyaan *Kompas* dan *Media Indonesia* di sela-sela acara peluncuran buku *Gagasan dan Pemikiran Edi Sudradjat* di Jakarta, Selasa (25/8) malam, Subagyo menyatakan, langkah seperti itu bisa dilakukan mengingat perkaranya terjadi saat Prabowo sedang menjabat posisi di militer.

"Persoalannya bukan Prabowo dijamin atau tidak ke Mahmil. Ia bisa ke Mahmil. Itu bisa karena proses atau masalahnya terjadi waktu dia ada di sana (di Kopassus). Kita bisa lihat keterkaitannya bagaimana. Tergantung kasusnya, dong. Ini 'kan kasus dulu waktu dia di ABRI," kata Subagyo.

Subagyo menambahkan, yang terjadi di luar negeri pun begitu. Misalnya, pengadilan dapat dilakukan terhadap para veteran perang Vietnam. "Ini contoh kasus saja," tutur Subagyo.

Pendapat senada dikemukakan secara terpisah oleh Menkeh Muladi dan Jaksa Agung AM Ghalib sebelum mengikuti sidang Kabinet Pembangunan Reformasi bidang polkam di Bina Graha, Jakarta, Rabu. Dikatakan, meski sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran, namun tidak tertutup kemungkinan Prabowo Subianto tetap bisa dibawa ke Mahmil.

Menkeh menilai, keputusan terhadap Prabowo menunjukkan integritas dan obyektivitas Wiranto, sekaligus menghapus keraguan berbagai pihak kepadanya, mengingat Wiranto pernah menjadi ajudan mantan Presiden Soeharto.

"Tapi langkah ini belum selesai. Jadi kita tunggu. Kita lihat saja, jangan dipengaruhi, biar obyektif. Biar ABRI menyelesaikan masalahnya secara baik. Karena dalam hal ini yang dihadapi itu 'kan rakyat. Semuanya harus transparan dan obyektif," kata Muladi sambil menegaskan tidak tertutup kemungkinan Prabowo di bawa ke Mahmil. Jaksa Agung AM Ghalib mempertegas, pengajuan ke Pengadilan Militer, bisa dilakukan bila sudah ada keputusan penyerahan perkara.

Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat, keinginan mengajukan Prabowo ke Mahmil baik sekali, karena dapat mengungkapkan semua yang terjadi berkaitan dengan kasus penculikan tersebut. Namun pengadilan Mahkamah Militer juga dapat menimbulkan efek pembebasan Prabowo. "Yang penting adalah bagaimana caranya agar kasus ini dikejar terus dan apakah hanya berhenti pada Prabowo," kata Nurcholish. (ua/gg/wis/rie/osd)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
JL.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: MERDEKA | Tanggal: 27/8 98

Hendaknya Dicekal

Jakarta, Kamis, Merdeka

Prabowo Subianto yang sangat mungkin akan diadili di Mahkamah Militer dalam kasus penculikan aktivis, harus segera dicekal, demi melancarkan pemeriksaan. Demikian disampaikan Direktur PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) Hendardi.

"Apalagi Prabowo sendiri sudah mengakui, dirinya memang memerintahkan penculikan aktivis, sebagaimana diungkapkan Ketua DKP Jenderal Subagyo HS. Jadi, demi untuk lancarnya proses pemeriksaan ke Mahkamah Militer, lebih baik dicekal," tegas Hendardi kepada *Merdeka*, kemarin.

Menurut dia, kalau tidak dilakukan pencekalan, dikhawatirkan nanti Prabowo lari ke luar negeri, sehingga tidak bisa diajukan ke Mahkamah Militer. Untuk itu Hendardi mengusulkan Pangab supaya segera meminta pihak Imigrasi melakukan pencekalan terhadap Prabowo.

"Pihak Imigrasi kan tidak bisa melakukan pencekalan kecuali ada permintaan dari Pangab, Jaksa Agung, Kapolri maupun dari Menteri Keuangan. Untuk itu, Pangab harus memintanya kepada pejabat Imigrasi untuk melakukan pencekalan," tandasnya.

Hendardi menyayangkan, selama ini pencekalan dengan gampang dilakukan kepada sejumlah aktivis politik. Padahal yang terpenting adalah melakukan pencekalan terhadap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana seperti Prabowo.

"Prabowo harus dibatasi kemerdekaannya pergi ke luar negeri. Nanti kalau akhirnya dia dibawa ke Mahkamah Militer maupun Prabowo sendiri tidak berada di dalam negeri, siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara itu, menurut Kahumas Ditjen Imigrasi Muhammad A.Ghani dan Kepala Kantor Imigrasi Cengkareng Sudirman, bahwa Prabowo belum terdaftar sebagai orang yang dicekal.

"Kalau orang dicekal, kami mendapat instruksi dari Dirjen Imigrasi bahwa seseorang sudah masuk dalam daftar cekal. Mengenai Prabowo sampai saat ini (kemarin) belum ada instruksi dari Dirjen," tegas Sudirman.

Kadaluarsa 18 Tahun

Sementara itu, dosen Perguruan Tinggi Hukum Militer Brigjen (Purn) Dr ASS Tambunan mengungkapkan, kalau dalam pemeriksaan selanjutnya Prabowo diduga telah melakukan, membantu atau mengetahui penculikan terhadap sejumlah aktivis, maka dia diancam hukuman pidana kategori berat. Yakni, diancam hukuman 15 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati.

"Kalau kasus ini dibiarkan selama 18 tahun dan tidak dibawa ke Mahkamah Militer, maka akan kadaluarsa. Artinya, setelah 18 tahun itu Prabowo tidak bisa lagi diseret ke Mahmil.

Prabowo akan terbebas dari ancaman hukuman berat itu. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 KUHP," jelasnya.

Secara terpisah, bekas Kassospol ABRI Letjen (Pur) Haryoto PS mengharapkan pemerintah segera mengajukan Prabowo ke Mahkamah Militer. Dia menilai, keputusan Pangab Jenderal Wiranto "memensiunkan" Prabowo membingungkan masyarakat.

"Terus terang, keputusan kemarin itu membingungkan, karena informasi dari hasil pemeriksaan DKP terpotong-potong. Maka demi keadilan, Prabowo harus diajukan ke Mahmil," tegasnya menjawab pertanyaan *Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, kalau kasus Prabowo tidak digelar di Mahkamah Militer, timbul kesan ada pejabat yang sengaja ditutup-tutupi. Selama ini, katanya, permasalahan belum jelas. Harus diklirkan apakah Prabowo menerima perintah dari pejabat yang lebih atas atau tidak.

"Kan harus dibuktikan juga kan, aksi penculikan itu awalnya dari mana, inisiatifnya datang dari siapa? Kalau dia katakan keliru menganalisa BKO ya BKO-nya sendiri dari mana? Semua ini harus dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat t[illegible] ngung," ujarnya. Ditanya apakah dia puas terhadap keputusan Pangab tersebut, Haryoto mengatakan, "Saya tak puas kalau ceriteranya seperti ini."

Menjawab pertanyaan tentang adanya permintaan agar Prabowo diadili di pengadilan negeri, Haryoto mengatakan, "Ini yang saya jadi bingung. Kalau diajukan ke pengadilan koneksitas nanti malah tambah ruwet. Tapi, kendati keputusannya Prabowo dipercepat pensiunnya, putusan itu kan belum dilaksanakan. Jadi, sebelum jadi orang sipil ya segera di-Mmahmil-kanlah."

Ditambahkan, jika diajukan ke Mahmil, Prabowo bisa membela diri dan sebagai warganegara dia harus diberi hak untuk membela diri atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. "Jadi Mahmil-lah yang tentukan seberapa besar kesalahan yang dia dia perbuat dan seberat apa sanksi yang harus diterima," katanya:(JGM/HPS)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: 3145518, 3901236, 3912217 Fax. 3301480
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 27/8/98

HAM, korban pemerkosaan, dan korban tindak kekerasan ekses operasi keamanan yang harus diisi lengkap dalam formulir yang dikeluarkan Tim Pencari Fakta-Pemda. Tahap pertama pendataan dimulai Senin (24/8) di Lhoksukon, kawasan yang didatangi Komnas HAM, dua hari lalu. Pendataan lengkap itu tujuannya untuk mengetahui jumlah korban yang sebenarnya.

Sedang Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi, dan Ketua Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan di Jakarta mengingatkan, adanya upaya penghilangan sejumlah barang bukti, yang berkaitan dengan penerapan DOM di Aceh, tidak lain dalam rangka menutupi pola dan sistem tindak kekerasan yang dilakukan aparat. Karena itu, pihak Polri harus mencegah penghilangan barang bukti tersebut, karena sudah merupakan tindakan melawan hukum. (bb/y/oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi:
Subyek : | Sumber : Bisnis | Tanggal : 27/09/98

Muladi: Mungkin Prabowo diseret ke Mahmil

JAKARTA (Bisnis): Menkeh Muladi menegaskan tidak tertutup kemungkinan mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto diseret ke Mahkamah Militer.

Menurut Menkeh, keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk mempensiunkan Prabowo merupakan jawaban atas keraguan terhadap integritas Wiranto karena bekas ajudan mantan Presiden Soeharto, sedangkan Prabowo adalah menantu Soeharto.

"Jadi jika orang meragukan dia [Wiranto] ternyata terbukti tidak benar dan tidak objektif," katanya sebelum Sidang Kabinet Terbatas bidang Polkam di Bina Graha Jakarta, kemarin.

Muladi menegaskan langkah tadi tidak berhenti begitu saja. "Tidak tertutup kemungkinan [Prabowo diseret ke Mahkamah Militer]. Siapa pun yang terlibat penculikan, di mana penculikan merupakan kejahatan sangat besar baik dari segi HAM maupun hukum."

Di tempat terpisah, Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid [Gus Dur] menilai pemberhentian mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto hanya upaya untuk melindungi organisasi ABRI.

Menurut Gus Dur, kalau kasus tersebut diusut secara tuntas, maka semua pihak pasti terkait dan terlibat.

"Prabowo kena, Pangab juga kena, Kasad juga kena. Setelah itu Pangti juga kena. Kalau sudah sampai ke Pangti, rakyat jugn ikut kena. Salah sendiri rakyat ikut mengangkat Pangti," kata Gus Dur.

Sementara, mantan Menhankam Jenderal TNI (Purn.) Edi Sudradjat menegaskan yang terpenting adalah introspeksi dari semua jajaran ABRI mengenai kasus tersebut.

Sebelumnya, Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin menegaskan Puspom saat ini sedang menyelidiki sejauh mana keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto cs dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Penyelidikan atas dugaan keterlibatan Subianto, Muchdi PR dan Chairawan dalam penculikan aktivis itu dilakukan dengan menginterogasi secara mendalam terhadap tersangka sepuluh anggota Kopassus. (s8/ens/cp)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.391247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Jakarta Post | Tanggal: 27/8 90

Govt confirms validity of Prabowo discharge

JAKARTA (JP): The government insisted yesterday Lt. Gen. Prabowo Subianto's dismissal from the military was valid as government critics expressed their disappointment over the administration's inaction.

The critics also slammed Minister of Defense/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto for not explaining the grounds for his decision to dismiss Prabowo from the military, rather than court-martialling him for his apparent involvement in the abduction and torture of political activists.

Minister of Justice Muladi said yesterday, from the legal point of view, Prabowo's dismissal was valid even though it was decreed by Wiranto rather than President B.J. Habibie.

He said both the President, in his capacity as ABRI supreme commander, and the ABRI commander had the same authority to impose such sanctions.

The administrative sanctions imposed on Prabowo and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, both former commandants-general of the Army Special Force (Kopassus) and Col. Chairawan, former chief of Kopassus' Group IV for intelligence, have drawn mixed reactions from the public.

Wiranto announced the dismissal Monday, when he also decreed that Muchdi and Chairawan would no longer hold any positions in the Armed Forces. He said the decision was based on the recommendation from the Officers Honor Council which investigated the three men.

Military tribunal

Wiranto also acknowledged that the three could also be brought before a military tribunal if damning evidence against them was found in the forthcoming trials of 11 Kopassus soldiers who were allegedly directly involved in the abduction and torture of political activists.

"Wait and see and let ABRI make its own decision," Muladi said.

A member of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) complained yesterday that Wiranto's recent announcement was unclear and incomplete.

"Wiranto didn't disclose thoroughly what mistakes the three officers committed and what factors led the ABRI leadership to make such a decision," Sirra Prayuna said.

Wiranto failed to mention the mistakes or how far the three were involved in the abduction and torture of the activists, Sirra said.

He also pointed out that the obscurity would slow his organization's efforts to disclose the fate of the remaining 14 missing people.

"We hope ABRI would be more transparent about the Officers Honor Council's investigation into the three officers," he said.

Sirra said it would no longer do for ABRI to continue telling the public that it knew nothing about the whereabouts of the activists.

Amien Rais, the chairman of the newly established National Mandate Party, speculated Tuesday about an underhand deal made by ABRI leaders and the three officers to cover up the true story of the abductions.

"What we want is a comprehensive and transparent explanation from ABRI about the activists' abductions, the May riots and the students' shooting at Trisakti University," he said.

He pointed out how the public was disappointed with Wiranto's announcement on the sanctions against the three officers. He said a decision taken without explaining its grounds or preliminary considerations would not educate the public about the truth behind the abductions.

"The authorities should now conduct a thorough investigation to reveal who should be held responsible for the abductions and riots," he said. (emf/rms)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber M. I | Tanggal 12-8/98

Pengusutan DKP bakal Melebar

Pangab Luruskan soal BKO

JAKARTA(Media): **Pengusutan kasus penculikan yang kini ditangani Dewan Kehormatan Perwira (DKP) diperkirakan bakal mengarah ke perwira-perwira yang berpangkat lebih tinggi dari Letjen TNI Prabowo Subianto, menyusul mencuatnya masalah Bawah Kendali Operasi (BKO) dalam pemeriksaan dewan tersebut.**

Panglima/Pangab Jenderal TNI Wiranto kemarin menjelaskan prosedur BKO, yang lazim berlaku di lingkungan militer, bisa dikeluarkan oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya.

"BKO ini macam-macam, tergantung levelnya. Satuan dalam satuan BKO-kan satuan lain tergantung levelnya, siapa pun bisa memberikan BKO," kata Pangab menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan pengarahan di depan peserta Rakernispen di Mabes ABRI Cilangkap, kemarin.

Pertanyaan mengenai BKO ditujukan wartawan berkaitan dengan mencuatnya masalah itu dalam pemeriksaan DKP terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di Mabes AD, Senin (10/8). Seusai sidang tersebut, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang juga Ketua DKP menjelaskan kepada pers bahwa Prabowo memperoleh perintah memBKO-kan yang kemudian dianalisis sendiri oleh menantu mantan Presiden Soeharto itu.

Jenderal Subagyo tidak menjelaskan siapa yang memberikan perintah BKO tersebut. Namun ia memberitahukan kemungkinan perintah tersebut datang dari Pangab atau KSAD saat itu.

Kasus kasus-kasus penculikan mulai mencuat ke permukaan dengan hilangnya salah seorang aktivis PPP, Dedi Hamdun, pada kampanye Pemilu 1997, jabatan Pangab dan KSAD masing-masing dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung dan Jenderal Hartono.

DKP tengah memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan mantan Komandan Grup IV Kol Inf Chairawan. Ketiga pentolan pasukan elite TNI-AD itu diduga terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi.

Meski sebagian sudah dibebaskan, sekitar 14 korban penculikan sampai sekarang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu mengatakan, para korban disekap di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan lagi para korban di tempat penyekapan.

DKP diketuai Jenderal TNI Subagyo. Wakil ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dengan anggota Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol), Laksdya TNI Achmad Sujipto (Danjen Akalvi).

Kepada pers kemarin Jenderal TNI Wiranto menjelaskan tentang prosedur perintah BKO yang lazim berlaku di lingkungan militer. Menurut Wiranto, BKO bisa dikeluarkan oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya kepada pihak yang menerima perintah BKO tersebut.

Lepas dari Induk

Dikatakan, BKO terjadi jika ada satu komando atau kesatuan mendapat tugas tugas tertentu, terkadang kesatuan tersebut memiliki perkuatan pasukan dari satuan lain dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Kalau ada satu komando atau satu kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, ia akan menyusun suatu pengorganisasian untuk melaksanakan tugas tugas itu. Dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu, ia membutuhkan perkuatan dari pasukan yang lain. Pasukan yang lain inilah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya BKO," katanya.

Pasukan yang di-BKO-kan itu, kata Pangab, terlepas dari induk kesatuannya, komandan mereka di bawah kendali operasi dari satuan baru yang mendapat tugas itu.

"Di dalam konteks kasus Prabowo, Pak?" tanya wartawan.

"Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong. Kita tunggu hasil DKP sehingga nanti oleh Bapak nanya bisa dijelaskan," kata Wiranto. Dia mengingatkan pers agar hati-hati menulis soal BKO. "Kalau tidak jelas ya jangan ditulis. Saya menjelaskan BKO secara umum, tidak ada kaitannya dengan kasus yang sekarang sedang berkembang," ujarnya.

Setelah sehari sebelumnya memeriksa Prabowo selama sekitar tujuh jam, kemarin DKP memeriksa dua saksi dan barang bukti.

Menurut sumber *Media* di Mabes TNI AD, sidang DKP kemarin hanya berlangsung sekitar tiga jam dari pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB. Sumber tersebut tidak bersedia memberi penjelasan secara rinci mengenai dua saksi yang diperiksa itu. Sedangkan barang bukti yang diperiksa berupa kain hitam penutup muka dan sejumlah benda-benda lain yang berkaitan dengan kasus penculikan tersebut.(Edi/Wdh/D-12)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber REPUBLIKA | Tanggal 12-8-98

Pangab: DKP Bisa Memeriksa Atasan Prabowo

JAKARTA — Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa saja memeriksa atasan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto berkaitan dengan kasus penculikan yang lalu. Itu, katanya, karena siapa pun komandan satuan bisa memberikan Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada satuan lainnya.

"Jika yang bersangkutan, bisa yang lebih tinggi lagi, bisa dari komando komandan yang bersangkutan," tapi Wiranto menjawab pertanyaan apakah perwira yang lebih tinggi bisa diperiksa DKP, usai membuka Rakernis Penelaahan ABRI di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta, Kemarin.

Sebagai Danjen Kopassus saat terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis, atasan Prabowo adalah Jenderal Feisal Tanjung sebagai Pangab dan Wiranto sebagai Kepala Staf TNI-AD (KSAD). Secara administratif dia juga mempunyai atasan Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Seperti diberitakan di harian ini kemarin, Ketua DKP Jenderal Subagyo Hadisiswoyo menyatakan bahwa Prabowo tidak mendapat perintah Pangab (Jenderal Feisal Tanjung) dan KSAD (Jenderal Wiranto) untuk menculik sejumlah aktivis. Dia, katanya, hanya mendapat perintah untuk mem-BKO-kan pasukannya yang kemudian dianalisis sendiri menjadi sebuah tindakan penculikan.

Dijelaskan Wiranto, BKO dilakukan bila ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu. Satuan tersebut, katanya, kemudian akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dan itu, lanjutnya, bisa dilakukan di tingkat satuan manapun.

"Dalam melaksanakan tugas-tugas itu satuan tersebut akan membutuhkan perkuatan dari pasukan-pasukan yang lain. Nah, pasukan-pasukan lain itulah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya 'Bawah Kendali Operasi' atau BKO. Dia terlepas dari induk satuannya dan kemudian berada di bawah kendali satuan baru yang mendapat tugas itu," jelas Wiranto.

Ditanya siapa yang berhak memberi perintah BKO, Wiranto menjawab, "Lho, bukan begitu. Kamu itu *nggak* jelas tapi pura-pura tahu. Ini nanti [akan diketahui]."

Wiranto kemudian segera menambahkan, "Yang mengeluarkan BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Kalau satuan peleton ya komandan peleton. Satuan itu dalam rangka mem-BKO-kan satuan lainnya tergantung levelnya. Siapa pun bisa memberikan BKO. Siapa pun!"

Menanggapi pertanyaan tentang BKO ini, Wiranto tampak sedikit jengkel. "Saya tidak akan menjelaskan sepotong-sepotong, silakan tunggu hasil DKP ini sehingga secara utuh bisa dijelaskan. Kalau mengulas sepotong, bisa keliru. Saya ingatkan ini," katanya.

Ditanyakan apakah benar Prabowo salah menganalisis perintah BKO ini, Wiranto menjawab dengan nada tinggi, "Kamu tanya Prabowo sendiri, kok tanya saya!"

Perkembangan pemeriksaan DKP atas Prabowo juga mendapat tanggapan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator Kontras, Munir SH, menilai sangatlah janggal bila KSAD Subagyo mengatakan bahwa tindak pidana penculikan dilakukan atas dasar penafsiran dari sebuah perintah. Sepanjang yang

Kontras akan Surat Panglima T

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

informasi dan dokumentasi

Subyek	Sumber REPUBLIKA	Tanggal 12-8-98

PANGAB: ..... dari Hlm. 1

diketahuinya, lanjut Munir, sebuah perintah di ABRI sifatnya harus jelas dan tidak pernah memberikan peluang untuk ditafsirkan.

"Melihat pemeriksaan DKP, Kontras menganggap hasilnya terlihat satu arah saja. Orang luar dibiarkan begitu saja untuk menafsirkan apa isi dan hasil pemeriksaan. Dan sebagai jalan keluar terbaiknya, kami sangat mengharapkan bila Prabowo diperiksa di depan Mahkamah Militer saja," kata Munir, di kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Munir mengatakan Kontras menganggap DKP hanyalah sekadar rapat internal ABRI untuk mengambil keputusan terhadap suatu persoalan. "Dengan melihat gelagat itu, maka kami sekarang menuntut kepada DKP agar mengambil tiga tindakan. Pertama, harus bisa segera menjelaskan mengenai keberadaan nasib 14 korban penculikan. Kedua, merekomendir sebuah tindakan atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada para perwira yang kini duduk sebagai tersangka. Ketiga, DKP harus bisa segera mencari jawab mengenai ada dan tidaknya keterlibatan perwira yang lebih atas dalam kasus penculikan," tegas Munir.

DKP sendiri kemarin tidak melakukan sidang. Namun, anggota DKP selain Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono dan Letjen TNI Agum Gumelar mengadakan pertemuan tertutup di Mabesad. Tidak diperoleh keterangan apakah mereka memang melakukan sidang.

Pada saat mereka mengadakan pertemuan, perwakilan 12 keluarga korban yang masih belum jelas nasibnya mendatangi Mabesad.

Tampak hadir di Mabesad kemarin antara lain keluarga Yani Avri, keluarga Noval Alkatiri, keluarga Deddy Hamdun dan diteman dua anggota Kontras. Keinginan mereka untuk menemui anggota DKP tidak terpenuhi. Mereka hanya ditemui Komandan Detasemen Markas Kolonel CPM Supardi.

■ osa/wuba

Kontras akan Gugat Panglima TN

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Informasi dan dokumentasi:

Subjek : | Sumber : Jakarta Post | Tanggal : 11/2-90

DKP points finger at Prabowo

JAKARTA (JP): The abduction of political activists were not ordered by the Armed Forces' (ABRI) top brass, but were carried out because of then Army Special Force (Kopassus) chief Lt. Gen. Prabowo Subianto's interpretation of his superiors' instructions, the Officers Honor Council (DKP) concluded yesterday.

Council chairman Gen. Subagyo Hadisiswoyo told a media conference that Prabowo's instructions were only to "monitor" the activists' moves, especially in Jakarta.

"It was Prabowo's own interpretation which led to the decision to kidnap the activists," Subagyo said after chairing a hearing of the seven-member council with Prabowo at the Army headquarters on Jl. Merdeka Utara in Central Jakarta.

Prabowo had reportedly acted on his own initiative and had been given autonomy by his superiors to maintain stability with whatever means he deemed necessary.

Subagyo, also the Army chief of staff, however, said the council would still need to cross-check Prabowo's testimony with those of other officers and witnesses.

Subagyo denied speculation that there had been two different orders — each given by then Armed Forces commander Gen. (ret.) Feisal Tanjung and Army chief of staff Gen. Wiranto — regarding the military campaign to control the activists, a situation which led to confusion on Prabowo's part.

"That's not true," he said.

He said the questioning would continue today, but did not indicate who would appear before the council.

Riding in a dark green Land Rover, Prabowo arrived at 8:20 a.m. at the Army headquarters in full uniform for his questioning. The hearing, which was held in closed chambers, started at 9 a.m. and ended at about 3:30 p.m.

A horde of reporters, both foreign and domestic, were prevented from entering the compound and had to wait across the street.

Also testifying as witnesses yesterday were Col. Chairawan, the former chief of Kopassus' Group of Intelligence Operations, and members of the Armed Forces fact-finding team, including its chief, National Military Police Chief Maj. Gen. Syamsu Djalal.

Other team members testifying were assistant for intelligence affairs for the Armed Forces chief of general affairs Rear Adm. Beaty Ekel; chief military prosecutor Maj. Gen. Timur P. Manurung; and assistant for security affairs to the Armed Forces chief of general affairs Maj. Gen. Marwan Paris.

Prabowo, together with his successor Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono and Col. Chairawan, is now under intensive investigation by the ABRI-initiated council for his alleged role in the kidnappings and torture of political activists.

Many of the activists critical of former president Soeharto disappeared in the run-up to the general session of the People's Consultative Assembly last March. Analysts said the mission was an all-out campaign to maintain Soeharto's power.

The Assembly reelected Soeharto for a seventh consecutive term at the time.

Some of those missing have since reappeared. One by one, they have come forward to tell of their ordeals. In each case the activists were made to suffer torture often used by the military to extract confessions.

Only nine of the missing activists, however, have returned home. The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), which is conducting its own investigation into the abductions, believes that 12 others are still missing. **(inn)**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Library & Documentation
Tahun: | Sumber: Republika | Tanggal: 26-9-96

Kinerja DKP

Antara Rekomendasi dan Vonis

Dalam UU No 2/1988 tentang Prajurit ABRI tak dikenal istilah Dewan Kehormatan Militer (DKM) yang ada Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Karena itu, istilah ini hanya sekali dipakai ketika ABRI membentuknya untuk menangani kasus insiden Santa Cruz, 1991. Saat penanganan insiden Liquisa, Januari 1995 istilah DKM akan dipakai lagi. Namun, mantan Kasad Wismoyo Arismunandar menyatakan kepada Kasad waktu itu R Hartono agar dimunakan sama dengan nama yang tercantum dalam UU No. 2/1988 tersebut. Posisinya, proses awal penyiapan DKP dilakukan oleh Wismoyo sebelum kemudian menyerahkan tongkat komando Kasad ke Hartono. Akhirnya, jadilah nama itu yang kemudian dipakai hingga saat ini.

Penegasan keberadaan DKP terdapat dalam Pasal 38 UU No 2/1988 ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama disebut: *Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diberhentikan dengan tidak hormat, karena melanggar sikap dan perbuatan lain yang merupakan mengikuti disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

Ayat selanjutnya tertulis: *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.* Dalam penjelasannya, ayat ini menyebutkan DKP dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan. Menurut mantan kepala DKP kasus Liquisa, Letjen TNI Muzani Syukur, Pangab memang pihak yang paling berwenang dalam pembentukan DKP.

Namun, jauh sebelum itu keberadaan Dewan Kehormatan (DK) yang menangani berbagai kasus pelanggaran prajurit ABRI telah dilakukan. Sebelum kasus mutakhir yang terjadi pada 1991 (insiden Santa Cruz) dan 1995 (insiden Liquisa) atau pun kasus penculikan saat ini, hampir semua pembentukan DK berkait dengan masalah intern ABRI.

Tugas DKP, menurut Muzani Syukur bukanlah seperti lembaga pengadilan. DKP, katanya, dibentuk karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik perwira. "Tindakan apa yang harus diambil kepada perwira itu, maka diadakan pengecekan, pemeriksaan. Kepada yang bersangkutan juga diberi kesempatan untuk membela diri," kata lejen Depternben ini.

DKP, jelas Muzani, memeriksa mengapa seorang perwira melakukan tindakan yang dianggap melanggar tersebut. Umumnya, pada setiap kasus DKP memiliki atau dibantu oleh tim pencari fakta (TPF) yang bisa berdiri sendiri atau tergabung dalam DKP. Kasus Liquisa, TPF merupakan bagian dari DKP. Sementara, untuk kasus penculikan aktivis, TPF berasal dari Puspom ABRI, meski DKP sendiri sempat memeriksa langsung lokasi penyekapan di markas Kopassus, Cijantung.

TPF kasus Liquisa menjadi bagian dari DKP karena untuk kasus Liquisa, dewan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yang disebut pemeriksa. Terdiri dari para perwira tinggi. Kala itu selain Muzani Syukur, nama-nama seperti Mayjen TNI Arifin Tarigan, Mayjen TNI Yunus Yosfiah dan Mayjen TNI Imam Utomo menjadi anggota pemeriksa.

Kelompok kedua yang disebut pelaksana atau lebih tepatnya TPF. Mereka, terdiri dari perwira menengah bertugas menggali fakta dan data langsung dari lapangan. Hasilnya akan mereka serahkan kepada tim pemeriksa. Kelompok ketiga atau kelompok pembantu administratif yang bertugas membantu sepenuhnya tugas-tugas kedua kelompok pertama. Khusus untuk TPF kasus Liquisa agak bertuntung karena Komnas HAM juga membentuk TPF yang hasilnya juga menjadi masukan bagi DKP.

Sementara, TPF kasus penculikan lebih banyak didukung oleh TPF yang diketuai Dan Puspom Mayjen TNI Syamsu Djalal. Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengakui bila banyak data dan informasi menyangkut kasus penculikan ini berasal dari TPF Puspom ABRI. Meski demikian, Subagyo menyebut selain data-data dari Puspom, pihaknya juga memperoleh informasi dari berbagai pihak yang juga menjadi pertimbangan DKP.

Setelah mengumpulkan data dari pemeriksaan terperiksa atau pengecekan langsung, DKP kemudian membuat analisa yang diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada Pangab. "Rekomendasinya macam-macam tergantung berapa besar kode etik yang dilanggarnya," jelas Muzani Syukur.

Hal ini dibenarkan pengamat militer ZA Maulani. Di dalam DKP para perwira yang diperiksa biasanya akan berbicara apa adanya. "Ini karena menyangkut masalah *honour*." Menurutnya, hasil pemeriksaan DKP akan menjadi semacam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang akan diserahkan kepada Pangab Jenderal Wiranto.

Dalam kasus penculikan, posisi Wiranto, lanjut Maulani, disebut selagi perwira penyerah perkara (Paperat). Papera inilah yang kemudian akan menyerahkan kepada Mahkamah Militer untuk ditindaklanjuti bila terbukti tersangka melakukan tindak pidana. Biasanya, dalam catatannya Papera akan menyatakan bahwa perwira yang bersangkutan telah melanggar pasal pidana militer

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Jaringan Dokumentasi

Tanggal: Sumber: Republika Tanggal: Jum'at, 6 - 8 - 99

X ANTARA X

atau sipil sehingga harus menjalani peradilan Mahkamah Militer.

Sementara, menurut Muzani Syukur rekomendasi sanksi yang diberikan DKP kepada Pangab sesungguhnya tidak hanya bersifat administratif. Khusus untuk kasus yang ditangani saat dia memimpin DKP Liquisa membuktikan hal itu. Paling tidak ada perwira yang kemudian diajukan ke mahmil atas rekomendasi dewan. Rekomendasi yang diberikan, lanjutnya, juga tergantung kepada jenis pelanggarannya dan siapa yang melanggar. "Siapa yang pantas ke mahmil, siapa yang hanya dicopot dari jabatannya akan diperiksa oleh DKP," ujarnya.

Menurut Muzani, yang paling berwenang atas pembentukan DKP adalah Pangab. Sedang menyangkut personel-personel anggotanya, sudah ada ketentuan baku yang mengatur masalah itu. Biasanya, anggota DKP tergantung pangkat perwira yang akan diperiksa. Makin tinggi pangkat tersangka, maka makin tinggi pula pemeriksa. "Paling tidak, setingkat lebih tinggi," ujar Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Dalam pandangan Muzani, kesan bahwa DKP tidak mampu mengusut tuntas kesalahan perwira karena hal itu bukan tugas DKP harus dihilangkan. Menurutnya, tidak bisa dianggap sesederhana demikian. Persoalannya, kedua hal tersebut berbeda satu sama lain. Mahkamah Militer merupakan lembaga yang menjatuhkan vonis, sementara DKP hanya memberi rekomendasi.

Bahkan dalam pandangan Muzani, prajurit baru bisa dituntut, bila melakukan tindakan kriminal kemanusiaan. Hal itu bisa dikenakan dakwaan melakukan tindakan di luar perintah. Contohnya, ada prajurit melakukan penembakan ke rumah orang tanpa perintah.

Sidang DKP, kata Muzani, memang dilakukan secara tertutup untuk menjaga asas praduga tak bersalah karena perwira yang diajukan belum tentu bersalah. Pangab, katanya, masih memerlukan penelaahan secara detil tentang kesalahan yang dilakukan anggotanya. "Kalau belum tentu salah sudah ke pengadilan kan bagi perwira itu sudah cacat. Beda dengan DKP, kalau ternyata dia tidak bersalah tidak apa-apa tetap terhormat dia. Kesan itu hanya saya kira karena masyarakat tidak tahu perbedaan DKP dan pengadilan saja. Kalau ada pelanggaran pidana, ya tetap dibawa ke mahmil," kata Muzani.

Terhadap perwira tinggi pun, kata Muzani, bila melakukan tindakan pidana bisa dibawa ke mahmil. Hanya, dia mengakui bahwa hingga saat ini belum pernah ada perwira tinggi yang dibawa ke pengadilan setelah melalui DKP.

Mengomentari DKP yang dibentuk untuk kasus orang hilang saat ini, Muzani menilai memang ada beban moral karena yang diperiksa adalah perwira tinggi setingkat Letjen. Namun, ia yakin bahwa dewan yang dipimpin Kasad itu akan bekerja mandiri. "Seorang perwira mempunyai sumpah. Kita harus optimis. DKP ini kan mewakili perwira ABRI seluruh Indonesia, kalau terbukti dilanggar, mereka kan ikut malu," tuturnya. ■ bram/ant



■ Sintong P, Gatot Purwanto, RS Wahasay, hasil rekomendasi

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145519; 3901126; 3901227 Fax. 021 - 3901040

email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Clipping & Dokumentasi

Tahun: | Sumber: Republika | Tanggal: Senin - 10 - 8 - 98

Ketua DKP, **Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo**

'Tidak Selalu Harus Mahmil'

Ada kesan dengan dibentuknya DKP, ABRI mengulur-ulur menyelesaikan kasus penculikan ini?

Sejak awal DKP saya berpendapat adalah hal yang baik seorang perwira [yang diduga melakukan pelanggaran] diproses melalui Dewan Kehormatan Perwira. Sudah diketahui bahwa seorang perwira itu mempunyai tiga perwira yaitu *Budi Bakti* [hubungannya berbudi baik dengan atasannya yang utama. Kalau tidak utama, tapi seorang perwira tidak juga melakukan kewajibannya maka dia harus diajukan ke DKP. Demikianlah, seharusnya Anda ini harus mengetahui bahwa seleksinya bagus-bagus. ABRI mau memutuskan sesuatu melalui proses yang demikian jeli, teliti dan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan tersebut.

Lalu mengapa ada perbedaan perlakuan antara perwira tinggi dan di bawahnya yang langsung dia jukan ke mahmil?

Tidak. Tidak ada perbedaan. DKP itu ada tidak selalu untuk semua perwira. Kebetulan sekarang ini ada Pati-nya. Kalau sebelumnya kan perwira-perwira biasa. Lha yang melanggar di batalyon itu, tentu ada DKP. Tetapi tidak diumumkan, ini tertutup kalau saya. DKP itu sudah berkali-kali itu. Sebetulnya pada prinsipnya itu semua dasarnya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya untuk para perwira khususnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga keputusan yang akan diambil nanti dihasilkan melalui pertimbangan yang teliti, jeli dan tepat. Disamping dengan proses itu keputusannya harus tepat. Apakah keputusan itu diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat, apakah dimahkamahkan itu masih proses.

Kerja DKP mendapat perhatian internasional. Apakah ini jadi beban moral?

DKP berusaha semaksimal dan secobyektif mungkin untuk bisa memberikan saran nanti kepada Pangab dalam mengambil keputusan. Terbaik dinilai secara obyektif, kesalahan-kesalahan yang dilanggarnya itu disampaikan kepada Pangab.

Setelah dibentuk DKP pada kasus penculikan, banyak tuntutan untuk kembali membuka kasus lama seperti Tanjung Priok dan Lampung. Komentar Anda?

Sebaiknya Anda kan mengikuti pernyataan Pangab bahwa ABRI berniat dan bertekad serta berusaha membersihkan ABRI sehingga ABRI menjadi lebih baik. Kedua, dalam membangun bangsa ini. Misalnya saja Anda ketika menuju ke sini, Anda ribut saja soal sepatu, soal pakaian, nah ini kapan sampai ke Cipayung (tempat wawancara —Red). Jadi begitu. Dulu para pelaku kasus-kasus yang Anda sebutkan telah dihukum melalui proses dan sudah dilakukan tindakan hukuman yang setimpal menurut kesalahan yang dilakukannya waktu itu. Dan sekarang mari kita lihat ke depan. Jangan kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang kurang menguntungkan apalagi yang lalu, lalu, lalu. Mari niat baik, tekad baik dan upaya yang baik ini disambut dengan baik, dibantu kalau ada hal-hal informasi yang memperkuat dalam DKP atau hal-hal lain terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan untuk bisa digunakan aparat keamanan. Mari bersama-sama seluruh komponen bangsa ini menjaga stabilitas keamanan dan membangun ekonomi agar bisa keluar dari krisis.



Kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP tentu ada hal-hal yang tidak terhormat [telah dia lakukan].

Sejauh ini bagaimana kerja dewan yang Anda pimpin?

Prinsipnya lagi proses. Beberapa hari lalu diumumkan oleh Pangab, sehari kemudian kami sudah melakukan sidang, lalu mengecek lokasi untuk mencari keterangan-keterangan yang mendukung. Dengan demikian nanti diharapkan saran atau kepalusan dari dewan ini akan lebih teliti, lengkap sehingga bentuk saran kepada Pangab betul-betul menjadi pertimbangan yang kuat untuk bisa mengambil keputusan yang tepat.

Apa sebenarnya kerja dewan ini?

Prinsipnya untuk mengecek kepada yang bersangkutan, menghadirkan saksi-saksi, mencari keterangan-keterangan lain untuk memperkuat keterangan tersebut. Sehingga kita bisa benar-benar mengetahui kesalahan-kesalahan perwira tersebut baik kesalahan disiplin, tabiat. Lalu apakah perwira itu dipertahankan atau harus diakhiri masa dinasnya.

Berapa lama proses itu?

Secepat mungkin.

Apakah Prabowo dkk mendapat pembela?

Ada. Ada pembela, ada saksi yang ditampilkan oleh yang diperiksa. Siapa pembela mereka? Nggak tahu. Itu ranahnya karena [sidang]nya tertutup. Tapi pada prinsipnya kan ada pembelanya. Hak-haknya, kewajiban-kewajiban, hukum tata tertib DKP [ada]. Pembela ini berfungsi untuk memperkuat pertimbangan atau saran nanti sehingga keputusannya lebih tepat.

Sanksi apa yang mungkin akan dihasilkan DKP?

DKP tidak memberi sanksi. DKP hanya menyarankan ke Pangab. Apa kemungkinannya? Belum selesai kok tanya.

Tidak tertutup kemungkinan ke mahmil?

Ini masih dalam proses, dan jangan buru-buru.

Ada kesan bahwa mereka yang diajukan ke DKP sudah dinyatakan bersalah?

Kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP tentu ada hal-hal yang tidak terhormat [telah dia lakukan]. Kalau tentang salah atau tidak tindakannya itu, hakim nanti yang menentukan. DKP hanya akan melihat dan meneliti apakah perwira ini masih pantas dipertahankan atau tidak.

Untuk mengetahui kesalahannya seharusnya digelar mahmil?

Tidak selalu. Tidak selalu harus mahmil. Percayalah pada aturan ini semua. Sampai pada keputusan nanti, itu ada aturan mainnya.

Ada isu Prabowo saat itu mendapat surat perintah dari Pangab Feisal Tanjung dan KSAD Wiranto yang bila diterje-

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3901226; 3901227 Fax. 021 - 3901180

email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Koleksi Dokumentasi
Subyek: | Sumber: Republika | Tanggal: Sen: 10-11-97

- tidak

; mulsan di lapangan memang tindakan penculikan?

Akan saya jawab setelah Senin. (Prabowo disidang Senin ini).

Prabowo kan menyatakan apa yang dia lakukan untuk keselamatan negara?

Sama, saya jawab setelah Senin.

Lalu apa kesalahan mereka?

Komandan saat memberikan perintah, dia kan bertanggung jawab dalam menerintahkan dan dalam pelaksanaannya. Karena komandan itu bertanggung jawab baik yang dilakukan atau yang tidak. Andaikata anak buahnya melakukan kesalahan maka dia yang bertanggung jawab. Karena perintah datang dari dia.

Artinya kalau Prabowo selangni komandan siap bertanggung jawab, Chairawan dan Muchdi akan bebas?

Kalau ada suatu peristiwa, tanggung jawab dalam hal perintahnya maka komandan bertanggung jawab. Tapi kalau nanti dilihat bahwasanya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana, kan tidak selalu dia bisa meng-*cover*. Kalau ada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan pidana maka penyelesainnya harus disesuaikan dengan yang dilanggarnya.

Artinya tidak langsung otomatis seperti itu. Karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum yang melanggar pidana, nah itu diselesaikan secara hukum pidana.

Ada isu DKP ini tidak hanya menangani kasus penculikan tetapi berkaitan dengan rencana kup yang dilakukan Prabowo?

Waduh saya kok belum mendengar rencana kup. Tolong jangan ini nanti berkembang menjadi isu-isu yang tidak benar.

Sebagai mantan Dan Kopassus, apakah Anda mendapat beban mental memimpin DKP ini?

Tidak saya saja, tidak hanya mantan komandannya saja, kita semua prihatin terhadap kondisi ini. Lebih-lebih ini menyangkut kesatuan yang sangat dibanggakan. Saya terhadap Kopassus cinta sampai mati. Tapi kalau terjadi seperti ini, ada oknumnya, saya prihatin. Namun, bagaimanapun saya mengemban tugas. Saya berusaha menempatkan diri sesuai dengan tugas saya. ■ bsa

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3901126; 3901221 Fax. 021 - 3901449
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Koleksi Dokumentasi

Sumber: Republika | Tanggal: Sen. 20-8-96

DKP

Beranikah ABRI Berterus Terang?

Kendati mendapat kritikan DKP terus melanjutkan kerjanya. Banyak orang menganggap hasil kerja DKP akan membuktikan keseriusan ABRI memperbaiki citranya. Berhasilkah ABRI menarik kembali simpati rakyat?

Hari-hari ini, ABRI mendapat ujian berat. Bukan di ajang pertempuran konvensional, tapi di gedung Mabesad. Di tempat ini, ABRI diuji untuk mempertahankan nama baik lewat pemeriksaan para perwiranya yang dituduh melakukan tindak penculikan aktivis.

Tiga perwira, dua mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Dan Grup IV Kolonel Inf Chairawan diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto awal pekan lalu. Menurut Wiranto, kesalahan utama mereka melakukan pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Perwira pada kasus penculikan para aktivis.

DKP ini dipimpin oleh KSAD Jenderal TNI Subagyo HS dan Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi sebagai wakil. Anggotanya: Irjen Dephankam Letjen TNI M Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Danjen Akabri Laksdya TNI Sutjipto, serta Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

Uniknya, selain Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, tujuh perwira dari sepuluh orang anggota Kopassus lainnya tidak diajukan ke DKP, namun langsung ke Mahkamah Militer. Orang pun menganggap ada perbedaan penanganan karena adanya figur Prabowo.

Namun, kepada wartawan sesudah mengumumkan personil DKP, Wiranto menampik anggapan itu. Menurutnya, dalam menyelesaikan kasus orang hilang ABRI mengacu pada sistem peradilan yang berlaku di ABRI. "Tepatnya terdapat dua proses hukum yang akan dilakukan yakni DKP dan Mahmil," katanya.

DKP, jelas Wiranto, digelar untuk memeriksa para perwira berpangkat kolonel ke atas yang dianggap melanggar kode kehormatan perwira 'Budi Bakti Wira Utama'. Sementara para prajurit yang berpangkat letkol ke bawah, lanjutnya, langsung diajukan ke Mahmil. Dia menambahkan bahwa para perwira yang akan dijajukan ke DKP bisa saja diajukan ke Mahmil bila terbukti melakukan tindak pidana.

Langkah pembentukan DKP dan upaya ABRI memulihkan nama baiknya bukan tanpa tantangan. Kontroversi seputar DKP hingga kini masih berlanjut. Menurut koordinator Kontras, Munir SH, selain cacat hukum, DKP membahayakan keberadaan hukum karena melegalkan lembaga ekstra yudisial. "Dan ini jelas, bila DKP terus dipaksakan, maka rencana membentuk negara hukum dipastikan akan gagal kita wujudkan," katanya.

Karena itu, bagi Munir lebih baik ABRI langsung menahankan seluruh perwira yang diduga terlibat dalam aksi penculikan para aktivis. Kalau pun akan dilakukan pemeriksaan oleh DKP, maka itu setelah mahkamah militer berlangsung. Alasan Munir, pembentukan DKP hanya berdasarkan surat keputusan Pangab yang salah satu prasyaratnya menyebut orang yang bisa diajukan ke DKP adalah mereka yang telah dijatuhkan hukuman minimal 3 bulan ke atas. Syarat lain, telah dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan atau skorsing oleh Mahkamah Militer.

Dorongan untuk mendahulukan pengadilan militer juga disampaikan mantan Dubes Indonesia di Amerika Letjen (Purn) Hasnan Habib. Dalam forum Lokakarya Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan Universitas Trisakti, Selasa pekan lalu, Hasnan menegaskan penculikan merupakan tindak pidana. Karena itu, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus dituntut secara pidana pula.

Pengamat politik Indonesia dari AS William Liddle setuju bila para perwira yang diajukan ke DKP harus diajukan pula ke Mahkamah Militer. Syaratnya, jika mereka terbukti terlibat langsung dalam kasus penculikan dan penganiayaan.

"Kalau dalam pemeriksaan DKP mereka terbukti terlibat dalam penculikan dan penganiayaan, demi tegaknya hukum, ya harus ke pengadilan," katanya seperti dikutip *Antara*.

Sama seperti Hasnan Habib, Liddle berargumentasi penculikan dan penganiayaan adalah kejahatan, bukan kesalahan prosedur atau pelanggaran disiplin kepegawaian. Karena masalah kriminal, yang bisa memeriksa bersalah atau tidak adalah pengadilan. Tidak cukup hanya terhenti pada DKP. Pemeriksaan terhadap Prabowo dan lainnya, menurut dia, adalah demi kehormatan ABRI sendiri. "Itu semua agar ABRI tidak dicemooh di dunia internasional," katanya.

Pengamat militer Dr Salim Said justru menganggap keberadaan DKP sudah tepat. Menurutnya, pembentukan DKP telah menunjukkan keseriusan ABRI menyelesaikan persoalan. Karenanya, ia berharap masyarakat memberi kepercayaan dan kesempatan kepada DKP untuk bekerja.

Ia yakin, jika pada pemeriksaan DKP terungkap pelanggaran pidana, maka para perwira yang diperiksa akan diajukan ke pengadilan militer. "Saya percaya DKP tidak akan main-main dalam masalah ini," tegasnya sesusai acara pengkajian dwifungsi ABRI di Seskoad, Bandung, pekan lalu.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Info & Dokumentasi
Topik: | Sumber: Republika | Tanggal: Kamis, 6-8-98

D.K.P.

untuk Demokrasi (SMID) Andi Arief bisa jadi bahan diskusi. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukan DKP, tapi sebuah dewan untuk merehabilitasi nama baik ABRI.

Lebih jauh ia menyebut dewan yang harus dibentuk itu bisa mengakomodir seluruh kasus tindak kekerasan militer selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. "Seperti tindakan militer di Aceh, dalam peristiwa Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, Timtim atau Papua dan sebagainya," tambahnya.

Dalam pandangan alumnus Fisipol UGM itu, bila yang dibentuk saat ini DKP khusus kasus penculikan, maka ini akan mubazir. "Bagaimana dengan kasus tindak kekerasan militer lainnya, apakah perlu dibentuk DKP baru. Ini kan tidak efektif. Padahal kegeraman dan kemarahan rakyat terhadap kekerasan militer sekarang sudah semakin meluas."

Persoalannya, seorang masyarakat mungkin tidak lagi peduli legal tidaknya keberadaan DKP. Namun, keseriusan ABRI untuk menuntaskan persoalan kasus penculikan para aktivis ini. Pasalnya, kasus ini masih menyimpan serangkaian misteri. Pertama, nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum diketahui. Kedua, menyangkut tudingan keterlibatan instansi lain dalam kasus penculikan sehingga bila harus dituntaskan, maka seluruh instansi yang terlibat juga harus diperiksa.

Ketiga, dan ini paling tidak jadi ukuran keseriusan ABRI berkait dengan pengakuan sementara dua perwira di depan DKP. Mereka mengaku bila aktivitas penculikan merupakan bagian dari menjalankan tugas. Bila demikian, siapa yang memerintah? Prabowo? atau ada atasannya yang juga memerintahkan. Siapa?

Bila memasuki wilayah ini, aspek politis jadi tak terelakkan. Seorang pengamat menyebut kasus ini memang lebih sarat muatan politisnya ketimbang unsur kriminalnya. Ia menyebut dalam bahasa militer, sebenarnya kasus ini bukan penculikan tapi perintah negara.

Kenyataan ini yang disadari Ketua DPA AA Baramuli, SH sehingga ia beranggapan pimpinan ABRI bisa melakukan deponir atau penyimpanan perkara atas kasus penculikan. Menurutnya, deponir ini dilakukan bila menyangkut masalah-masalah yang bisa merusak dan menyakibatkan kepentingan bangsa terancam. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa semua kasus pidana itu harus masuk penjara. "Saya kira itu pikiran yang terlalu pendek."

Langkah deponir memang sangat memungkinkan. Namun, bila hal itu dilakukan, dapat dipastikan ABRI akan menghadapi kecaman yang berkepanjangan. Persoalannya, apakah para perwira dari Kopassus saja yang harus dikorbankan? Tidakkah ini makin memperburuk upaya konsolidasi ABRI yang tengah digarap Wiranto? Jawabannya mungkin akan terungkap sejalan berakhirnya tugas DKP. ■ nfv/ebs/aled

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3901222; 3901223 Fax. 021 - 3901040
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Subyek :
Sumber : Kompas
Tanggal : 16/8/98

Rekomendasi DKP

Bawa Prabowo Dkk ke Mahkamah Militer

Jakarta, Kompas

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merekomendasikan kepada Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk menjatuhkan sanksi administratif atau membawa mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Penegasan itu diberikan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo hari Jumat (14/8) di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) Jakarta.

"Bentuk rekomendasi ini sejak awal sebetulnya sudah jelas. Keputusannya nanti ada pada Pangab. DKP memberikan rekomendasi ini berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan," kata Subagyo, yang juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia menambahkan, rekomendasi itu berupa saran. Bisa diterima, bisa juga tidak.

DKP dibentuk 3 Agustus 1998 untuk melakukan pemeriksaan terhadap para perwira Kopassus sehubungan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis. Pada saat itu, Pangab Wiranto mengatakan, merupakan tekad ABRI dalam era reformasi ini, mengutamakan kejujuran. Tugas DKP adalah memeriksa tabiat atau perbuatan perwira yang nyata-nyata melanggar kode kehormatan perwira serta disiplin keprajuritan dan ABRI.

Mengenai kemungkinan apakah para perwira yang diperiksa DKP akan menghadapi Mahmil, saat itu Wiranto menegaskan bahwa semuanya tergantung proses pemeriksaan DKP. "Seandainya di dalam Mahmil ditemukan bahwa para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga memenuhi unsur pidana, maka tidak ada seorang pun yang lolos dari itu," tegas Wiranto.

Bentuk pemberian sanksi administratif di lingkungan ABRI bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi lain yang lebih ringan adalah ditugaskaryakan pada sebuah instansi, dan tidak dipecat namun tidak memiliki posisi/jabatan tertentu di lingkungan ABRI. Namun, jika ternyata dalam proses pemeriksaan terdapat indikasi bahwa perwira ABRI itu ada yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut ke Mahmil. (ama)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi

Subyek	Sumber Republika	Tanggal 13/6 '98

Perintah BKO bukan dari Pangti dan Pangab

Prabowo Mengaku Salah

JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menyatakan bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto mengaku salah dalam menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) pada kasus orang hilang. "Dan dia (Prabowo) bersedia bertanggung jawab," tutur Subagyo menjawab pertanyaan wartawan di Markas Besar TNI-AD (Mabesad), Jakarta, kemarin.

Pengakuan dan kesediaan bertanggung jawab mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, menurut Subagyo, diungkapkan di depan sidang DKP, kemarin. "Itu kan suatu sikap keperwiraan, yang memang ada salah dan ada pertanggungjawaban," ujar Subagyo.

Ketua DKP kemudian mengulang penjelasannya Senin (10/8) lalu bahwa Prabowo salah menganalis perintah BKO yang diberikan kepadanya. Perintah BKO tersebut, kata Subagyo, diterjemahkan oleh Prabowo dengan mengeluarkan perintah lagi yang ternyata membuat dia salah.

Ditanyakan siapa yang memberi perintah BKO kepada Prabowo, Subagyo menjawab, "Sudah saya katakan, yang jelas bukan dari Pangti (Panglima Tertinggi ABRI) dan bukan dari Pangab (Panglima ABRI). Yang salah itu Prabowo."

Menurut Subagyo, atasan Prabowo bisa saja diminta keterangan bila terbukti salah atau ada keterkaitan dengan kasus orang hilang. Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa Pangab dan Pangti ABRI tidak salah.

"Kesalahannya pada analisis tersebut. Kalau analisinya salah (tentu) penanganannya menjadi salah. Di situlah terjadi kesalahannya," lanjut jenderal bintang empat ini.

Ditanyakan apakah berarti mantan Kepala Staf TNI-AD (KSAD) saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus yang bersalah dan akan segera diminta keterangan oleh DKP, Subagyo menjawab, "Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Jangan gampang menyalahkan orang karena ini bukan hakim."

Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus ke-15, KSAD dijabat oleh Jenderal TNI R Hartono dan Jenderal TNI Wiranto (saat ini Pangab). Penculikan Dedy Hamdun, Yani Avri, Sony, beberapa aktivis PRD serta beberapa aktivis yang diduga terlibat peristiwa 27 Juli 1996 terjadi saat KSAD dijabat Hartono. Sementara penculikan Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, dan beberapa aktivis lainnya menjelang Sidang Umum MPR 1998 terjadi saat Wiranto menjadi KSAD.

Selain menghadirkan Prabowo, kata Subagyo, DKP kemarin kembali memeriksa kembali mantan Danjen Kopassus lainnya, Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dan Kolonel Inf Chairawan. Keduanya, katanya, masih disoksi pertanyaan seputar masalah kehormatan perwira yang berkisar kedisiplinan, prosedur, dan tabiat atau keperwiraannya untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban.

Subagyo tidak bersedia menjelaskan secara rinci hasil kerja timnya sampai kemarin. "Ini lagi proses. Kita masih cari mana yang salah, mana ketidakdisiplinan, mana analisis atau penjabaran tugas yang salah. Dan (bisa saja) berkembang menjadi jujur apa *nggak*," jelasnya.

Hari ini, DKP kembali akan menggelar sidang. Menurut Subagyo, hari ini akan diperkuat keterangan-keterangan, pengakuan terperiksa dengan hasil pengecekan di lapangan. DKP, lanjutnya, juga akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Sejauh ini, kata Subagyo, DKP telah meminta keterangan beberapa saksi. "Saksi-saksi yang kita panggil antara lain ada kapten, ada yang membuat surat, juga ada hasil TPF yang mengecek ke lokasi untuk menambah kelengkapan dari proses ini," ujarnya.

Keterangan para saksi itu, kata Subagyo, akan dijadikan masukan bagi DKP sehingga saran yang dihasilkan untuk Pangab nanti bisa lebih tepat.

"Kita lihat apa-apa yang dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan, mana yang dilakukan, dan hal mana yang meringankan atau memberatkan sehingga mempertajam saran atau rekomendasi kepada Pangab."

Subagyo tidak bersedia menjawab pertanyaan apakah hari ini adalah sidang terakhir DKP. "Kalau saya mengangap masih perlu dilakukan sidang, ya dilakukan sidang," katanya. ■ bsa

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber kOMPAS | Tanggal 13/8-91

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS:

Prabowo Akui Salah Analisis Perintah

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, dalam sidang pemeriksaan DKP, Rabu (13/8), mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui telah membuat kesalahan analisis terhadap perintah Pangab Kendali Operasi (BKO). Selanjutnya, Prabowo telah menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.

"Prabowo mengakui ada kesalahannya. Dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu 'kan suatu sikap kepriwiraan. Dan memang, ada salah ada pertanggungjawaban," kata Jenderal Subagyo menjawab wartawan di Markas Besar TNI AD (Mabes AD) Jakarta.

Dikatakan, DKP telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dua mantan Danjen Kopassus, yakni Mayjen TNI Muchdi PR dan Letjen TNI Prabowo Subianto. "Sejak awal saya sudah katakan bahwa Prabowo telah mengakui melakukan kesalahan menganalisis. Untuk itu DKP memeriksa hal-hal yang berkisar pada disiplin, prosedur, kejujuran ataupun tabiat keperwiraannya. Ini 'kan ditanya, diuji kemudian untuk dimintai pertanggungjawaban," papar Subagyo, yang juga mantan Komandan Kopassus ini.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengeluarkan perintah BKO yang kemudian salah dianalisis oleh Letjen Prabowo, Ketua DKP menegaskan, yang jelas bukan dari Panglima Tertinggi (Pangti) ataupun dari Panglima ABRI (Pangab). "Sudah saya katakan yang jelas perintahnya bukan dari Pangti ataupun Pangab," katanya.

Sedangkan menjawab pertanyaan apakah perintah BKO itu keluar dari KSAD waktu itu, Subagyo mengatakan, "Nanti kita lihat. Kita jangan menyalahkan. Kita 'kan bukan hakim," tuturnya.

"Kesalahan Prabowo adalah dalam pem-BKO-an, semestinya dikeluarkan surat perintah, hal ini yang kemudian ternyata menjadikannya salah. Dengan kata lain, telah terjadi salah analisis terhadap BKO. Kesalahannya ada dalam bentuk analisis, sehingga penuangannya juga menjadi salah, sedangkan dalam sidang DKP, yang diperiksa berkisar pada masalah disiplin, prosedur, kejujuran, tabiat dan sikap keperwiraan terperiksa. Saya mohon wartawan jangan salah dalam memberitakannya," kata Subagyo.

Diperiksa kembali

Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan kembali diperiksa DKP. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00-11.30 WIB. Prabowo sendiri datang sekitar pukul 08.25 WIB. Sedangkan anggota DKP, seperti Letjen TNI S Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kertanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, juga memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabes AD.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, pemeriksaan kembali Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR (kedua nya mantan Danjen Kopassus) merupakan hal biasa. "DKP ingin melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Pangab berupa saran atau rekomendasi," katanya.

Menurut Subagyo, hari ini (13/8) DKP akan melanjutkan pemeriksaan mengenai apa saja yang dilakukan, pelanggaran hal-hal apa yang dilakukan para terperiksa serta hal-hal apa saja yang akan memberatkan dan meringankan. Ditambahkan, sidang pat hari ini bukan akhir pemeriksaan DKP. "Kalau masih perlukan, sidang akan dilanjutkan. Saya tidak katakan akhir. Hasilnya tergantung pat," katanya.

Sementara itu, secara terpis Kepala Pusat Penerangan (

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber Kompas | Tanggal 13/8 98

Prabowo — —

puspen) Hankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif mengatakan, BKO adalah suatu status di mana suatu satuan di bawah kendali satuan lain yang bukan satuan organiknya. "Hubungan antara yang di BKO-kan dengan yang menerima BKO untuk melaksanakan operasi tetap tidak keluar dari tugas pokok," katanya.

Dikatakan juga, berkaitan dengan kasus orang hilang, munculnya istilah BKO merupakan rangkaian yang saling terkait dengan keseluruhan fakta-fakta lainnya. "DKP masih terus melakukan pemeriksaan. Banyak hal yang perlu diungkap misalnya sejauh mana kesalahan prosedur pemberian status BKO, bagaimana koordinasi antara unit yang di BKO-kan dengan satuan yang menerima BKO, dan berbagai masalah lainnya," paparnya.

Tanggung jawab atasan

Sementara itu, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris, dalam percakapan dengan *Kompas*, Rabu, mengatakan, apa pun nama perintah yang diberikan, apakah itu BKO (Bawah Komando Operasi) atau lainnya, yang pasti kesalahan suatu operasi adalah tanggung jawab atasan.

"BKO atau apa pun namanya itu, bagi saya nama-nama seperti itu tidak saya mengerti. Untuk saya sederhana saja. Suatu gerakan itu direncanakan, lalu dibicarakan, dan kemudian diputuskan. Kalau ada yang kurang jelas, ya harus ditanyakan oleh penanggung jawab operasi," ujarnya.

Menurut Kemal, sebuah rencana akan dilaksanakan oleh pasukan-pasukan sesuai fungsi masing-masing. Bila salah seorang komandan pasukan tidak mengerti perintah yang harus dilakukan, maka ia harus bertanya kepada atasannya. "Ia tidak boleh menganalisis sendiri. Karena kalau analisis dia tidak sesuai dengan yang dimiliki komandannya, maka siapa yang salah? Ya salah bawahan," katanya.

Lebih jauh Kemal menambahkan, bisa saja bawahan melakukan analisis sendiri dalam sebuah operasi, namun analisis tersebut harus dikonsultasikan kepada atasannya. Bila atasan menyetujuinya, maka hal itu bukan tanggung jawab bawahan lagi.

Mengenai kasus orang hilang, Kemal juga menyesalkan reaksi ABRI yang dinilainya lambat. "Kalau tidak ada reaksi dari rakyat yang begitu kuat, mereka (ABRI) akan diam. Karena ada reaksi, baru ada (penyelidikan). Tapi itu pun baru bisa terjadi setelah Soeharto turun," katanya.

Dengan demikian, kata Kemal, pihaknya merasa berbagai macam peristiwa yang mempermalukan ABRI di zaman Orde Baru itu ada kaitannya dengan mantan Presiden Soeharto, karena kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi.

Sedangkan Direktur LBH Surabaya Indro Sugianto, secara terpisah menilai, ABRI harus menjelaskan siapa yang memberikan perintah BKO kepada Letjen TNI Prabowo Subianto ketika menjadi Danjen Kopassus. Hal itu menunjukkan bahwa ABRI punya niat baik menyelesaikan kasus penculikan itu secara tuntas sesuai harapan rakyat. (ama/myr/vik/jl/ano)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Sibyek | Sumber Bisnis | Tanggal 13/8/98

Prabowo mengakui kesalahan

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui kesalahan dalam melakukan analisis dalam menjalankan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) sehingga melakukan penculikan aktivis.

"Yang salah itu *kan* Prabowo. Kesalahannya itu BKO. Dia mengeluarkan surat perintah. Itu yang bisa menjadikan dia salah," tegasnya seusai memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan pertemuan dengan Pangdam seluruh Indonesia, di sini, kemarin..

Pemeriksaan Prabowo dan Muchdi PR yang berlangsung mulai pk. 09.00 hingga 12.00 WIB di Mabes Angkatan Darat Jl. Veteran Jakarta Pusat, itu dihadiri seluruh anggota DKP.

Menurut Subagyo, Prabowo mengakui kesalahannya, namun dia juga siap mempertanggungjawabkan kesalahan itu. "Itu *kan* suatu sikap keperwiraan. Memang ada salah, tapi ada pertanggungjawaban."

Prabowo, kata Kasad, bersalah dalam menganalisis perintah BKO. "Ini kesalahan ada pada analisis perintah."

Ketika ditanya siapa yang memberikan tugas BKO kepada Prabowo, Subagyo tidak memberikan jawaban.

Menurut dia, Panglima ABRI saat itu Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Panglima Tertinggi saat itu Jenderal Besar (Purn.) Soeharto tidak pernah mengeluarkan perintah penculikan aktivis.

Ditanya apakah perintah BKO itu datang dari mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) R. Hartono, Subagyo menyatakan, "Kalau salah atau ada keterkaitan bisa saja perwira yang lebih tinggi diperiksa. Dan sudah saya katakan Pangab [Feisal Tanjung] tidak salah, tidak mengeluarkan perintah."

Kalau soal Hartono, menurut dia, akan segera dilihat dan dicari buktinya. "Kita lihat dulu, dan jangan mudah menyalahkan karena kita bukan hakim." (s8)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber JAKARTA POST | Tanggal 13/8/98

DKP zeros in on who gave Prabowo instructions

JAKARTA (JP): The Officers Honor Council (DKP) has narrowed the list of who ordered then Army Special Forces (Kopassus) chief Lt. Gen. Prabowo Subianto to use preemptive security measures to safeguard last March's presidential election, which led to abductions and torture of political activists.

Council chairman Gen. Subagyo Hadisiswoyo confirmed yesterday the instruction did not come from either the then Armed Forces (ABRI) supreme commander Soeharto or the ABRI chief. He did not identify the latter.

Subagyo, who is also the Army chief of staff, briefed the media after a monthly meeting of regional military commanders and senior Army officers at the Army's headquarters.

When asked whether it was possible the instruction had been issued by an Army chief of staff, Subagyo asked for the public to wait until after the council completes its investigation, slated for today.

The abductions occurred between May 1997 and May of this year. Gen. (ret) Feisal Tanjung was ABRI chief from 1993 to 1998. Over the period when the abductions of more than 20 political activists took place, the post of Army chief of staff was held successively by Gen. R. Hartono (to June 1997) and Gen. Wiranto.

On Tuesday, Armed Forces chief Gen. Wiranto indicated the instruction could have come from any of three ABRI officers who ranked higher than Prabowo.

Prabowo's superiors over that period were Soeharto, Feisal, R. Hartono and Wiranto.

Subagyo supported Wiranto's earlier statement that the council could eventually question the military officer who gave the order to Prabowo.

"If the evidence shows that the higher ranked officer was wrong or was connected with the kidnapping, he can be questioned," he said.

He also revealed yesterday that Prabowo had admitted that he "misunderstood the orders from his superior.

"Prabowo has admitted there was a mistake and said he would take responsibility for his misinterpretation of the superior's order," he said.

Subagyo said he had checked with other witnesses, including an officer with the rank of a captain who had written down the order, and officials of the ABRI's fact-finding team, who had visited the presumed sites where the activists had been kept and tortured.

Subagyo said the council yesterday requestioned Prabowo and Muchdi simultaneously. The session started at 9 a.m. and ended just a few minutes before 12 p.m.

Subagyo said Monday the abductions of political activists were not ordered by ABRI's top brass, but were carried out because of Prabowo's misinterpretation of his superior's instructions.

He also mentioned the instruction was given under what is known in the military term as "under operational control" (BKO), in which a military unit, in this case Kopassus, was seconded unit for particular operations.

Under this scheme, the first unit was controlled by the commander of the second unit.

He also said Prabowo's instructions were only to transfer troops to another military unit and monitor the moves of political activists, especially in Jakarta.

Prabowo was replaced by Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono a few days after the 11-day General Session of the People's Consultative Assembly (MPR), which reelected Soeharto for a seventh consecutive term. He was promoted to lead the Army's Strategic Reserves Command (Kostrad). (imn)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber Jakarta Post | Tanggal 13/8 98

Rights body calls for policy review

JAKARTA (JP): The National Commission on Human Rights urged the government yesterday to find a fundamental solution leading closure to numerous unsolved rights cases that cannot be tackled on a case-by-case basis.

In a statement on various human rights cases and mass unrest, the rights body said a proper solution including a review of government policies, national security doctrine and territorial tactics for insuring peace in the field may be needed.

It pointed out that repeated rights violations in Irian Jaya, the Special Aceh and the unresolved Tanjung Priok and Lampung cases demonstrate that the violations were systematic in nature and typical of the authoritarian New Order government.

"A solution on a case-by-case basis cannot prevent (the ongoing) rights violations like in the two regions (Irian Jaya, East Timor, Aceh) which were the worst in the last 20 years," commission secretary-general Baharuddin Lopa said in reading the statement.

"There has never been a review or comprehensive solution on these systematic human rights violations."

People have been shocked by recent revelations of a multitude of rights violations, allegedly committed by the military during the 32-year rule of former president Soeharto.

Amid strong public pressure, the Armed Forces undertook an investigation into the case of missing activists and found that members of the Army's Special Force were involved in the abductions.

Rights groups have also reported atrocities including torture, abductions, rape and extrajudicial killings allegedly perpetrated by the military in Aceh during the early 1990s.

The military presence was beefed up at the time to quell the armed rebellion for an independent Aceh.

Minister of Defense and Security Affairs/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto pledged last week to withdraw troops dispatched from outside the westernmost province and apologized for the military's conduct which exceeded "acceptable norms" during the military operations.

The government also withdrew troops from East Timor last month and ABRI also pledged to change its approach in Irian Jaya in a bid to win the hearts of people there.

The rights body welcomed yesterday the recent developments but noted that a comprehensive solution to these issues would still require fair legal and political actions, adding that "the truth must be uncovered".

In its statement, the rights body also renewed calls for the government to reopen the investigation into the July 27, 1996, bloody takeover of the Indonesian Democratic Party (PDI) headquarters in Central Jakarta, which erupted into a riot.

The rights body said that all people who were either directly or indirectly involved in the incident should be brought before the law.

While the statement said the government should cease meddling in the internal matters of political and mass organizations, deputy chairman Marzuki Darusman was more direct in his explanation to reporters.

"Our hope is for the government to rescind its support for Soerjadi's camp in the PDI so that the conflicting parties can find it easier to seek a solution," Marzuki said.

Soerjadi ousted Megawati Soekarnoputri as party chief in a government-backed congress in 1996.

Commenting on the controversial bill No. 2/1998 on freedom of expression, the rights body said it saw no "critical condition" necessitating a new ruling regulating such freedoms.

It asserted that the bill must immediately be withdrawn.

The bill, which includes a requirement for a permit for a public rally involving more than 50 people, was recently forwarded by the government to the House of Representatives. (byg)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber KOMPAS | Tanggal 12-8-98

Wiranto Tolak Ungkap yang Perintah Prabowo

Jakarta, Kompas

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal TNI Wiranto berharap semua pihak menunggu hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang siapa yang memberi perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto sehubungan dengan Kasus Orang Hilang (KOH).

"Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaan DKP," kata Wiranto menjawab wartawan, hari Selasa (11/8), usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan ABRI 1998 di Markas Besar (Mabes) ABRI, Cilangkap.

Sehari sebelumnya, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, pimpinan ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah kepada Kopassus untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan Prabowo sehubungan dengan kasus orang hilang merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO).

Siapa pun bisa

Menurut Wiranto, yang dimaksud BKO adalah jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, satuan itu akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. "Dalam tugas yang akan dilaksanakan itu, satuan ini membutuhkan penguatan dari satuan-satuan tugas yang lain. Pasukan-pasukan yang lain inilah kalau masuk dalam kesatuan tadi — namanya BKO. Jadi dia terlepas dari induk satuannya, kemudian berada di bawah kendali operasi satuan baru tempatnya bergabung," paparnya.

Ditanya siapa yang berhak memberikan perintah BKO kepada Prabowo, Wiranto mengatakan, yang mengeluarkan perintah BKO tergantung tingkatannya. "Itu tergantung tingkatannya. Siapa pun bisa memberikan BKO," katanya.

Ditanya lagi siapa yang bisa memberikan perintah BKO kepada Kopassus, Wiranto mengatakan, "Nanti kita tunggu hasil hasil pemeriksaan selengkapnya dari DKP. Kalau kamu hanya mengelola sepotong bisa keliru. Jangan bicara BKO terputus dari keseluruhan masalah." Menjawab pertanyaan apakah itu berarti ada perwira yang lebih tinggi lagi yang memberikan perintah BKO sehingga perwira itu akan diperiksa DKP, Wiranto mengatakan, "Bisa perwira yang bersangkutan, bisa perwira yang lebih tinggi lagi, bisa juga dari komandan-komandan yang bersangkutan. Nanti tunggu hasil DKP," katanya.

Ilustrasi Mokodongan

Mengenai BKO ini, Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Mayjen TNI Abdul Wahab Mokodongan, secara terpisah, Selasa, memberikan ilustrasi. Dalam struktur ABRI, katanya, memang ada prosedur bantuan yang diberikan untuk kesatuan

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber KOMPAS | Tanggal 12-8-98

Wiranto — —

tas yang disebut BKO itu.

"Misalnya, ada pimpinan, sebut saja D, memberikan perintah pada satuan A agar sebagian dari pasukan yang ada pada satuannya di-BKO-kan atau ditugaskan bergabung ke satuan B." Ini berarti, semua pengendalian operasi dikendalikan satuan B.

"Sebagian orang dari satuan A itu sekarang menjadi tanggung jawab si B. Mau diapakan saja terserah si B. Jika nanti ada orang-orang satuan A di bawah kendali B berbuat sesuatu, maka hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab B yang diberi kendali BKO oleh pimpinan D," katanya.

Menurut Mokodongan, ada beberapa kemungkinan proses keluarnya perintah BKO itu. Pertama, karena satuan B tidak mampu mengatasi masalah, sementara masalah yang harus diselesaikan itu sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Kedua, karena satuan B tidak dapat melakukan tugasnya berhubung jumlah anggotanya tidak cukup atau secara profesional tidak mampu melaksanakan tugas.

Ia menambahkan, selain atas perintah pimpinan D, proses BKO bisa saja tidak diketahui pimpinan D itu. "Misalnya, karena mendesak, maka atas nama D, staf-staf di lingkungan D memerintahkan BKO. Coba A, keluarkan satu regu untuk B," katanya.

Menurut prosedur, kata Mokodongan, staf yang memerintahkan BKO itu seharusnya segera melapor pada pimpinan D, sehingga pimpinan mengetahui proses BKO tersebut. "Tapi ada juga yang bertindak di luar sistem, staf memerintahkan BKO tanpa sepengetahuan pimpinannya. Itu bisa saja terjadi," ujarnya.

Korban penculikan

Sementara itu, korban penculikan dan keluarga korban penculikan, Selasa, mendatangi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) di Jakarta. Namun mereka tidak berhasil bertemu dengan Ketua atau anggota DKP. Meski demikian, para korban dan keluarga korban akan tetap menuntut untuk bisa bertemu DKP.

Kepada wartawan, korban penculikan Raharjo Waluyo Jati dan adik kandung Noval Alkatiri, Ny Eri, menjelaskan, mereka sejauh ini melihat DKP lebih memprioritaskan pekerjaannya pada mengungkap siapa yang bersalah dan kesalahan apa yang telah dilakukan sejumlah perwira tinggi ABRI, sedangkan kejelasan nasib 12 korban penculikan lainnya terkesan diabaikan.

Kedatangan rombongan korban dan keluarga korban yang seluruhnya berjumlah 11 orang ke Mabes AD, akhirnya diterima Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD, Mayjen TNI M Noor Aman. Namun Aspam KSAD tidak bisa menjawab pertanyaan korban maupun keluarga korban mengenai bagaimana agenda kerja DKP, ataupun mungkinkah bagi korban dan keluarga korban bertemu DKP. Menurut Jati, Aspam KSAD itu menyatakan akan menyampaikan pertanyaan itu pada Ketua DKP. (ama/uu/eki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31-155183,3901226,391 247 .Fak.,3301-80
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 21/6 '98

Prabowo diberhentikan

JAKARTA (Bisnis): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari ABRI, sementara Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairuwan dibebastugaskan dari jabatan struktural di ABRI karena terlibat dalam aksi penculikan aktivis prodemokrasi.

"Keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun. Yang jelas diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa dan negara," kata Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI kemarin.

Wiranto menjelaskan dua pertimbangan yang dijadikan dasar pemberian sanksi administratif tersebut.

Pertama, kesalahan yang diperbuat ketiga perwira.

Kedua, ada aspek yang meringankan seperti jasa dan prestasi.

"ABRI tidak menutup mata terhadap apa yang mereka lakukan selama tugasnya mengabdi pada nusa dan bangsa. Banyak prestasi yang telah mereka perbuat," kata Wiranto.

Wiranto menambahkan tidak tertutup kemungkinan melanjutkan proses pemeriksaan, bila proses persidangan terhadap sepuluh anggota Kopassus yang diajukan ke Mahmil membuktikan adanya tindak pidana.

Di tempat yang sama, Ketua DKP/Kasad Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan surat keputusan Pangab tentang sanksi itu belum dikeluarkan. Belum dapat dipastikan kapan sanksi mulai berlaku, ujarnya.

Subagyo menjelaskan dalam pemeriksaan DKP, Prabowo mengakui menculik sembilan aktivis, namun Kasad tidak menjelaskan lebih rinci.

Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar yang juga anggota DKP menegaskan keputusan Pangab bukan untuk memuaskan keinginan masyarakat yang umumnya menuntut mereka dinjukan ke Mahmil.

"Itulah keputusan Pangab dan ini bukan masalah puas atau tidak puas," tandas Agum Gumelar.

Menurut Agum, DKP hanya memeriksa ketiga perwira Kopassus itu menyangkut sikap, tabiat dan kode etik perwira. Tidak menyinggung persoalan tindak pidana, ujarnya.

Menanggapi pernyataan Pangab, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Munir mengatakan pihaknya tetap mendesak Pangab menjelaskan nasib 14 korban yang masih hilang.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Bambang W. Suchanto meminta Pangab menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kesalahan yang dilakukan ketiga perwira sehingga mereka dijatuhi sanksi seperti itu.

Pengamat politik Kastorius Sinaga mengatakan putusan DKP merupakan langkah konsolidasi ABRI menjadi solid. "Faktor instabilitas dalam tubuh ABRI sudah dihilangkan, tidak tertutup kemungkinan ABRI akan membongkar kasus Prink, Lampung, Aceh dan Dili." **(s8/04/et/ep)**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel: 31-355183, 3901336, 3913317 Fax.: 330110
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kapi Berita | Tanggal: 27/2/96

Letjen Prabowo Dipensiun

JAKARTA — Karier militer Letjen TNI Prabowo Subianto berakhir setelah Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memutuskan mantan Danjen Kopassus itu diakhiri masa dinasnya di ABRI dalam kaitannya dengan lima pencalikan sejumlah perwira beberapa waktu lalu.

"Letnan Jenderal Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," ujar Wiranto di depan sekitar seratus wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar ABRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Wiranto juga mengumumkan sanksi terhadap dua perwira lain, yaitu Brigjen TNI Muchdi Purwopranjono dan Kolonel Inf Chairuwan dalam masa yang sama. Kedua perwira itu, antara, dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Wiranto, sanksi terhadap lima perwira Kopassus itu merupakan sanksi administratif dan bukan tindakan hukum sesuai UU Pidana Militer. Ketika ditanyakan mengapa perwira tidak langsung diajukan ke pengadilan militer, Pangab menjelaskan, "Kita mengacu asas praduga tak bersalah, semua itu nanti tergantung Mahmil. Di Mahmil, yang langsung menjalankan misi itu satu per satu akan menjelaskan, dia disuruh siapa."

"Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan akan dilanjutkan ke mahkamah militer jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap sepuluh anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan ke arah itu," lanjut Wiranto menyebut 10 perwira dari bintara Kopassus yang langsung akan diajukan ke Mahmil.

Seusai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim Dewan Kehormatan Perwira (dipimpin langsung oleh KSAD) bergegas meninggalkan tempat, namun wartawan terus memburu hingga Pangab dan tim DKP menuju gedung tempat ruang kerja Menhankam/Pangab.

"Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan pada Wiranto. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," jawab Wiranto.

Hal yang sama disampaikan Ketua DKP Jenderal Subagyo yang menyatakan bahwa Prabowo akan mendapat hak-haknya sebagai pensiunan.

Sedangkan Muchdi dan Chairawan, kata Wiranto, masih berdinas dalam lingkungan ABRI tetapi tidak akan diberi jabatan. Ditanyakan sampai kapan, Wiranto menjawab, "Sampai nanti pensiun."

Wiranto menambahkan keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari mana pun sehingga diterapkan tidak berkembang spekulasi tentangnya. Yang jelas, lanjutnya, keputusan diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa, dan negara.

Sebelumnya, ketiga perwira tersebut telah diperiksa DKP selama hampir tiga pekan. DKP kemudian menyerahkan saran kepada Pangab tentang sanksi yang akan diberikan kepada mereka, Jumat pekan lalu.

Sanksi terhadap mereka, menurut Wiranto, diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Selain aspek kesalahan yang telah dibuat oleh para perwira terperiksa, katanya, juga dipertimbangkan jasa mereka selama

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Informasi dan dokumentasi:

Subyek :

Sumber : Kpl 6 Okt | Tanggal : 25/8/94

menjalankan tugas.

"Yang meringankan adalah kita tidak menutup mata atas apa yang telah dilakukan para perwira tersebut selama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak jasa dan prestasi yang mereka buat."

Subagyo menjelaskan bahwa keputusan Pangab tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan DKP. "Kalau pemeriksaan 10 anggota Kontras itu menyangkut yang tiga (Prabowo, Muchdi, dan Chairawan) maka akan dibawa ke Mahmil." Meski telah dipensiunkan, menurut Subagyo, bila diperkarakan Prabowo tetap diproses di Mahmil. Karena, katanya, tindakan penculikan diambil saat Prabowo masih menjabat di lingkungan ABRI.

Menanggapi sanksi terhadap tiga perwira tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan tidak puas. Kontras melihat sanksi administratif itu menunjukkan bahwa tiga perwira itu hanya melanggar kode etik perwira, antara lain, berupa berbohong, bertindak tidak satria, tidak patuh pada pimpinan, atau bertindak di luar batas kepatutan.

"Tapi sanksi itu belum termasuk hukuman untuk tindak pidananya, seperti penculikan dan penghilangan kebebasan orang," kata MM Billah, anggota dewan penasihat Kontras, di Jakarta, kemarin. "Makanya, kami tetap mendesak Puspom ABRI untuk menyidik tiga perwira sebagai tersangka, karena mereka sampai saat ini belum diperiksa," tambah Munir — koordinator Badan Pekerja Kontras — yang bersama Ketua Penasihat Kontras Mulyana W Kusumo — mendampingi Billah dalam temu pers kemarin.

Billah memang melihat adanya satu kesulitan besar bagi ABRI untuk mengadilikan Letjen TNI Prabowo sebagai tersangka kasus ini.

Ia menduga Prabowo punya kartu mati berupa pengungkapan informasi yang bisa menyulitkan ABRI, khususnya TNI AD, di masa depan. "Kemungkinan kekuatan tawar Prabowo adalah pengungkapan secara *gamblang* operasi penculikan yang dilakukannya. Bila itu dilakukan, maka akan banyak sekali jenderal yang kena," jelas Billah.

Atas kemungkinan itu, Billah melihat pernyataan Pangab belum lama ini bahwa ABRI di masa depan hanya di belakang saja, menunjukkan bahwa ABRI lebih ingin membangun citra di masa depan dan mengeliminasi peristiwa yang sudah-sudah, termasuk dengan tidak memahmilkan Prabowo.

Kendati mempunyai tesis demikian, Kontras menilai itu bukan berarti tak memahmilkan Prabowo menjadi langkah terbaik. Menurut Kontras, justru dengan mengungkap tuntas kasus ini, akan meningkatkan citra ABRI dan bangsa ini di mata internasional.

Mulyana menambahkan bahwa sanksi administratif dan rekomendasi DKP tak memenuhi tiga aspek yang mendasar. Pertama, tak ada aspek penjeraan terhadap pelaku. Kedua, tak ada aspek pencegahan bagi terulangnya kejadian serupa. Ketiga, tak ada landasan yang jelas bagi pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang ada.

Pada kesempatan itu, Kontras juga mendesak agar Pangab segera melepaskan 14 korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. Pasalnya, berdasarkan keterangan korban penculikan yang sudah dilepas, ke-14 orang ini disekap bersama mereka.

Dalam keterangan pers kemarin, Ketua DKP Jendral TNI Subagyo mengaku belum tahu nasib ke-14 orang itu. "Saya tidak tahu karena mereka (tiga perwira terperiksa) memang tidak mengakui. Mereka [dalam pemeriksaan] hanya mengaku menculik sembilan orang," kata Subagyo.

Ketidakpuasan atas keputusan Pangab juga dikemukakan oleh kalangan DPR. Para wakil rakyat berpendapat karena kasus penculikan itu tergolong tindak pidana, maka aparat kepolisian militer harus lebih proaktif untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri.

Ketua FPP DPR Zarkasih Nur, Wakil Ketua FKP Kohid Polkam Abu Hasan Sazili, dan anggota FKP Eki Sjachruddin mengemukakan hal itu kepada wartawan di DPR, kemarin. "Keputusannya tidak tuntas sehingga tidak memuaskan rakyat.

Supaya tuntas, Prabowo harus dibawa ke Mahmil. Kalau hanya dipecat, rakyat tetap bertanya-tanya," tegas Zarkasih.

Menurut Zarkasih, Prabowo bukan satu-satunya yang harus dibawa ke Mahmil. Tapi, juga atasan dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret ke Mahmil. "Saya lihat ada rekayasa di balik keputusan ini sehingga membuat rakyat ragu," katanya. "Jika pimpinan ABRI tidak memahmilkan Prabowo, aparat hukum bisa membawa kasus itu ke pengadilan negeri. Ini bukan delik aduan, sehingga polisi dapat membawa kasus itu ke pengadilan."

Abu Hasan Sazili mengatakan masyarakat masih bertanya-tanya atas keputusan Pangab tersebut. Namun begitu, dia mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan itu tanpa menutup kemungkinan terus melakukan pengungkapan terhadap seluruh kasus orang hilang.

Ia mengatakan kalau pihak kepolisian mendapat bukti adanya tindak kriminal dalam kasus tersebut, Prabowo harus mendapat perlakuan yang sama sebagaimana warga sipil lainnya. Dalam pengertian membawa atau melimpahkan kasus itu ke pengadilan negeri.

■ bsa/tbw/bur/poy

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl. Diponegoro No. 74 Tel. 3145183, 3901226, 3912347 Fax. 3301440
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Jakarta Post | Tanggal: 25-4-97

Prabowo discharged from ABRI

JAKARTA (JP): The Armed Forces (ABRI) honorably discharged Lt. Gen. Prabowo Subianto yesterday and removed two senior Army Special Force (Kopassus) officers from active duty as punishment for their role in the abductions and torture of political activists.

The Armed Forces also announced Prabowo, a son-in-law of former president Soeharto, was entitled to his pension, but said he could face a military tribunal in the future if more damning evidence of his involvement in the kidnappings is found.

The decision, issued on the recommendation of the Officers Honor Council probing the abductions, was announced by Minister of Defense and Security/ABRI Commander Gen. Wiranto before dozens of local and foreign journalists at the Armed Forces' Merdeka Barat headquarters in Central Jakarta.

"My decision regarding Lt. Gen. Prabowo is to end his active service with the Armed Forces," Wiranto said.

"Prabowo is not included in any ABRI structures anymore. He is a civilian now."

Prabowo, a 1974 graduate of the Armed Forces Academy, was considered one of the military's rising stars. He was the first among his classmates to obtain the rank of a three-star general just 24 years into his career.

Many charged his ascent could not be divorced from his links to Soeharto. Prabowo, 47, is married to Soeharto's second daughter, Siti Hediati.

Wiranto said ABRI had also decided to release the other two officers investigated along with Prabowo — former Kopassus commandant-general Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono and former Kopassus chief of intelligence operations Col. Chairawan — from "all structural duties".

"Both Muchdi and Chairawan will remain in the Armed Forces, but will not get any rank promotions nor be given any positions until they reach their mandatory age of retirement."

Wiranto did not discount the possibility of bringing the three before a military tribunal.

"If the prosecution for the other 10 Kopassus officers later finds out that Prabowo, Muchdi and Chairawan were clearly involved in the abductions and torture of the activists, they could also be charged with crimes before the court-martial," he said.

"We have to respect the principle of presumption of innocence. Everything will be uncovered in court, including the officers who gave orders to the 10 Kopassus officers."

He did not mention when the tribunal for the 10 officers would start, but indicated that the dossiers were being completed by the military's fact-finding team. It is led by the National Military Police Corps Chief Maj. Gen. Syamsu Djalal.

Wiranto dismissed speculation the Armed Forces headquarters was under pressure to make the decision.

"One thing for sure is that the decision was made in the interest of ABRI, and the nation and the country that we all love very much."

Wiranto said the three officers' meritorious service in the past was also part of the Armed Forces' consideration.

Chief of the seven-member Honor Council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, supported Wiranto's decision and said it was in accordance with the council's recommendation.

"Should you have any evidence (disproving the decision), you could tell the ABRI's fact-finding team about it," he told reporters.

But the statement contradicted his Aug. 14 remarks that the council would recommend Prabowo be court-martialled. There was no official explanation on the inconsistency.

Subagyo, who is also the Army's chief of staff, dismissed speculation that ABRI had no evidence to court-martial Prabowo.

"Let's just wait for the opening of the court-martial (of the officers)," he said.

A member of the Honor Council, Lt. Gen. Agum Gumelar, said the council did not recommend criminal sanctions against the three officers because they would have to include considerations based on technical aspects of the abductions.

"We did not talk about technical aspects of the abductions as they were completely the Armed Forces' internal affairs," Agum told reporters after the media conference.

Discussing the 12 activists reportedly still missing, Agum said their whereabouts remained unknown.

"Prabowo only admitted to the kidnappings of the nine activists, who had returned home."

He denied reports Prabowo could not be tried before a military tribunal under his new civilian status.

"No, Prabowo could still be court-martialled," he said (ima)

Observers — Page 2
Editorial — Page 4
Downfall — Page 5

****

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No. 74 Tel: 31-155183, 3901226, 391 [illegible] Fak. 330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Republika | Tanggal: 29/8 98

Prabowo Siap Terima Keputusan

"Pengadilan" terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto dan kawan-kawan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) rampung sudah. Dewan yang dikatuai KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo itu juga telah menyerahkan rekomendasi atas perwira yang diperiksanya kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Sejak diumumkan Wiranto dua pekan silam untuk memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan —yang diduga menjadi pelaku penculikan, DKP secara maraton terus bekerja. Seharian setelah diumumkan, mereka bahkan langsung memanggil Chairawan.

Tim yang beranggotakan tujuh jenderal ini juga melakukan peninjauan langsung ke Markas Kopassus Cijantung, lokasi yang diduga dipakai sebagai tempat penyekapan. Selain itu, beberapa saksi juga dimintai keterangan.

Dari pemeriksaan kepada Prabowo, Subagyo menjelaskan bahwa Prabowo telah salah menterjemahkan perintah bawah kendali operasi (BKO).

Tidak dijelaskan Subagyo, dari mana perintah BKO itu dan kepada siapa pasukannya diperbantukan. Yang jelas, bukan dari Pangti atau Pangab. Dan kini, nasib pemberi perintah itu tak diungkit-ungkit.

Hari ini, menurut rencana, Wiranto akan mengumumkan sanksi kepada ketiga perwira itu. Menurut Subagyo, ada dua kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada mereka yaitu mahkamah militer (mahmil) atau sanksi administratif.

Para perwira Kopassus itu bisa dijatuhi hukuman mahmil bila DKP dalam rekomendasinya menyebutkan adanya indikasi tindakan pidana yang dilakukan mereka. Sedangkan bila tidak ditemukan unsur pidana, sanksi administratif bisa berupa pemberhentian masa dinasnya di ABRI dengan hormat, dengan tidak hormat, atau tidak diberikan jabatan.

Sanksi yang akan diberikan kepada tiga perwira baret merah itu —dan terutama niat menuntaskan kasus penculikan— akan menjadi taruhan bagi ABRI. Bila pimpinan ABRI melakukannya setengah hati, maka kepercayaan masyarakat terhadap mereka semakin tipis. Begitu pula sebaliknya.

Bagaimanapun, penuntasan kasus ini memang sarat dengan nuansa politis. Hubungan ABRI pemerintah di masa lalu, mungkin membuat niat pimpinan ABRI menuntaskan masalah ini dilakukan dengan penuh perhitungan.

Sumber *Republika* menyebutkan, penculikan — adalah sebuah bentuk operasi intelijen yang berkaitan dengan kekuatan politis tertentu. Di negara mana pun, termasuk Amerika, operasi intelijen itu sah adanya.

Namanya sebuah operasi intelijen, kata jenderal bintang dua itu, pasti melibatkan tiga unsur yaitu dalang, sponsor dan komandan. Keuntungan politis operasi tersebut, katanya, pasti diperoleh oleh sang dalang.

"Pada penculikan, dalangnya pasti penguasa lama yang tidak ingin kekuasaannya diungkit-ungkit menjelang Sidang Umum," ujar sumber tersebut. Pertanyaannya, dalam operasi tersebut Prabowo, Muchdi, dan Chairawan bertindak sebagai apa?

Pertanyaan selanjutnya yang masih membutuhkan jawaban adalah apakah benar hanya mereka yang terlibat. Dari kesaksian beberapa korban penculikan, beberapa institusi ABRI di luar Kopassus terlibat pada operasi itu. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Prabowo hanya mengaku menculik Andi Arief, Pius Lustrilanang, dan Mugiyanto.

Sebagian pertanyaan itu mungkin sudah terjawab di sidang DKP yang dilakukan secara tertutup. Kini saatnya, masyarakat harus diberikan haknya untuk mendapatkan kejelasan tentang itu.

Dengan pengusutan yang maksimal pula, akan bisa diketahui nasib 14 orang yang hingga kini masih hilang. Memang, ABRI mungkin betul-betul tidak tahu di mana dan bagaimana keadaan mereka. Tapi, bukankah ABRI dibentuk untuk mengamankan warga negaranya dari berbagai ancaman?

Mahmil tampaknya adalah jalan terbaik menuntaskan persoalan ini. Di sana bisa kita lihat apakah Prabowo betul-betul bersalah. Di situ pula bisa kita lihat apakah dia bertindak sebagai dalang, sponsor, atau hanya komandan lapangan. Tapi, untuk ke mahmil, tentu dibutuhkan keberanian Jenderal Wiranto.

Prabowo sendiri, menurut seorang jenderal kepercayaannya, tampak tenang menghadapi keputusan Wiranto. "Dia sudah siap menanggung sanksi apa pun," kata sumber tersebut kepada *Adil*, ia bahkan sudah menyiapkan rencana, jika kelak tidak di ABRI lagi. "Saya akan menulis buku," kata menantu Pak Harto itu lagi.

bisa

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Subyek : | Sumber : M. / | Tanggal : 24/8 98

Sanksi untuk Prabowo Sangat Ringan

Muladi: Bisa Disidangkan di Pengadilan Negeri

Pemberhentian Prabowo ... angkatan ABRI dinilai sejumlah ringan.

... Sahal Sulun, salah seorang ... menilai terlalu ringan. Alasannya ... Dewan Kehormatan Perwira ... tersangkut kode etik perwira ... tidak pidana penculikan.

... tersebut tidaklah ringan. Apa ... seorang perwira. Dengan de... yang dijatuhkan kepada Prabowo ... terlalu ringan," kata Sulun ...

... MPR/DPR itu menilai Le... aneh dan membingungkan. ... sanksi administratif, tapi 10 ... dihimbilkan. Terkesan ada ... lain."

... Habib berpendapat sena... sudah mengakui terlibat tindak... menurut Hasnan seharusnya Pra... harus dijukan ke mahkamah mi... pelanggaran pidana itu dilakukan oleh ... militer berkualifikasi khusus."

... seorang komandan yang me... bahwa melakukan tindakan pe... dan didiamkan saja, itu meru... besar."

... demikian, mantan Dubes Indonesia ... menilai tindakan penundaan peng... merupakan salah satu hak pre... Panglima Pangab.

... Muladi setuju, kasus pen... Prabowo harus disele... Tapi dia berpendapat lain. ... sudah dipensiun maka yang ... adalah peradilan umum ... negeri), tapi kalau statusnya masih militer maka yang berhak mengadilinya Mahkamah Militer (Mahmil)," kata Muladi kepada wartawan di Jakarta malam tadi.

Menkeh menjelaskan jika seseorang pensiunan militer, maka statusnya adalah orang sipil. Jika yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan umum.

"Saya setuju tindakan Pangab Jenderal TNI Wiranto memberhentikan Letjen TNI Prabowo. Saya mengimbau agar Prabowo juga diadili dengan seadil-adilnya," tegas Muladi seraya mengingatkan bahwa yang dilakukan Wiranto itu baru tindakan administratif, tapi soal dugaan adanya penculikan seimalah aktivis belum menyentuh peradilannya.

Denny Kailimang tidak setuju Prabowo diadili di peradilan umum. Menurut dia Pangab Wiranto seharusnya merekomendasi kepada mahkamah militer untuk segera mengadili Prabowo tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan 10 anggota Kopassus yang kini masih diperiksa Puspom ABRI dalam kaitan penculikan sejumlah aktivis.

Feisal lepas tangan

Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Sahala Radjaguguk menilai mantan Pangab Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung lepas dari tanggung jawab dalam kasus penculikan para aktivis hingga menyebabkan Letjen TNI Prabowo diberhentikan dalam tugas ABRI.

"Saya salut terhadap Pangab Jenderal TNI Wiranto yang sudah memikul tanggung jawab dalam kasus Prabowo dengan secara terbuka meminta maaf kepada rakyat. Padahal sewaktu peristiwa tanggung jawab berada di Pangab sebelumnya, ujar mantan Pangkostrad ini kepada *Media* ... Jakarta, kemarin.

Menurut Sahala, dari satu segi sebagai keputusan intern di ABRI sudah tepat, tetapi dari segi hukumnya kasus penculikan tersebut harus segera dapat disidangkan di mahmil. Oleh sebab itu dia menilai putusan Pangab terhadap Prabowo masih berbau politis sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap kasus tersebut.

Ketua Umum Partai Amanah Bangsa Amien Rais menilai keputusan Pangab sangat tidak mendidik dan mengecewakan. "Karena sekarang ini kita tidak tahu keseluruhan dari cerita yang terjadi. Kita hanya tahu sepenggal-sepenggal cerita saja. Sebab itu Amien masih menuntut nantinya Prabowo akan menceritakan seluruh cerita. "Jangan sampai ada sepotong infirmasi yang disembunyikan."

Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai tindakan Pangab Wiranto sudah tepat. "Kita harus mengapresiasinya. Itu langkah yang tepat. Selain memenuhi aspirasi masyarakat juga sebagai bukti Pangab berani melakukan pembersihan dan konsolidasi di dalam tubuh ABRI," katanya.

Sementara itu Prof Dr Sri Sumantri saat ditanya wartawan apakah korban penculikan atau ke... laarganya bisa menuntut, dia... nya tidak melihat kemungkin... an itu. "Paling-paling hany... bisa menggugat secara perda... dengan meminta ganti rug... Sebab aspek pidananya sudah ditangani pemerintah."

(Sub/Was/Wdh/Edi/Awi/Ni... Hry/Edi/N-

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Subyek : | Sumber : M.I | Tanggal : 23/8 90

Barter pun tak Bisa

Senin besok, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto akan mengumumkan hasil sidang DKP. Tapi, nasib ke-14 aktivis jauh lebih penting ketimbang sanksi administrasi atas Mahmil.

Jika tidak ada aral melintang, Senin besok Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto akan mengumumkan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Adapun hukuman yang akan diberikan kepada para perwira terperiksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan, bisa sanksi administrasi atau dikembalikannya militer-nya ke kesatuan. Tapi pengumuman ini tidak begitu penting bagi keluarga 14 korban aktivis yang sampai kini masih tak jelas rimbanya. Bahkan, salah seorang wakil korban penculikan, Andi Arief, sangat meminta barter. "Dan harapan teman-teman yang diculik ini belum kembali juga dilepaskan. Kami dan keluarganya tidak akan menuntut apakah Prabowo CS tidak diadili Mahmil. Ini tidak apa-apa, asal teman-teman dibebaskan. Barter ini merupakan alternatif terendah untuk membebaskan para korban," kata Andi Arief yang mewakili keluarga korban penculikan, Andi Arief sangat meminta barter. "Dan harapan teman-teman yang diculik ini belum kembali juga dilepaskan. Kami dan keluarganya tidak akan menuntut apakah Prabowo CS tidak diadili Mahmil. Ini tidak apa-apa, asal teman-teman dibebaskan. Barter ini merupakan alternatif terendah untuk membebaskan para korban," kata Andi Arief yang mewakili keluarga korban penculikan, menerimanya dengan lega hati. Tapi kalau tidak pernah diberitahukan, ini hanya akan menimbulkan dendam mendalam," ungkap Andi.

Menurut Kadispenad Brigjen TNI I Putu Rai, selama ini ABRI telah bersungguh-sungguh dalam mengusut kasus penculikan ini. Termasuk berusaha mencari tahu di mana ke-14 aktivis yang masih hilang.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI agar segera memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan beberapa perwira militer sebagai tersangka dalam kasus penculikan.

Dalam suratnya kepada Kepala Puspom ABRI Mayjen TNI Sjamsu Djalaluddin, Rabu (19/8), KontraS menyatakan, saat ini pihak Puspom ABRI selaku penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan lanjutan terhadap mereka yang diduga melakukan tindakan penculikan.

Yang hilang adalah Herman Hendrawan, Feisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezar Patria, Mugianto, Aan Rusdianto, Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa, Haryanto Taslam, dan Suyat.

Penculikan terus berlanjut, ketika Subagyo HS sebagai KSAD dan Jenderal TNI Wiranto sebagai Pangab, mereka yang hilang adalah Andi Arief, Bimo Petrus, Yadin Muhidin, Hendra Hambalie, dan Ucok Munandar.

Sayang, ketika bergulirnya persidangan DKP, tak banyak dikorek keterangan dari Jenderal TNI Subagyo HS selaku ketua DKP. Misalnya, pengakuan Prabowo bahwa dirinya salah menganalisis perintah BKO (Bawah Kendali Operasi). Subagyo tak menjelaskan siapa pemberi perintah BKO.

Untuk menyeret Prabowo ke Mahmil, kelihatannya bukan perkara gampang. Sebab, Prabowo tentu saja tidak ingin hanya dirinya yang menjadi korban. Jenderal yang mendapat julukan *The Golden Boy* alias si anak ajaib itu bisa jadi akan "bernyanyi". Prabowo akan membuka nama-nama atasnya yang terlibat atau setidaknya mengetahui operasi penculikan ini.

Tapi, bila kita simak pernyataan Jenderal TNI Wiranto dalam Rapat Pimpinan ABRI di Mabes ABRI di Cilangkap, Jum'at lalu, Lemhannas), dan Laksamana Madya Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), itu bisa menyoal keberadaan 14 aktivis. Tak ada secuil informasi pun tentang hal ini.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Syamsudin, perintah BKO dikeluarkan Pangab berdasarkan perintah Kodam-Kodam.

Sewaktu anggota Komnas HAM ini menjadi Kepala Staf Kodam Trikora, Kodam Trikora pernah meminta BKO dengan alasan untuk menghadapi aksi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. "Ketika itu saya menerima BKO pasukan dari mana-mana," kata Syamsudin kepada *Media* beberapa waktu lalu. Pasukan itu, lanjutnya, ada yang dari Brimob, Kodam Brawijaya, dan Kopassus.

Pasukan yang di-BKO-kan selanjutnya, kata mantan anggota Kopassus ini, dikendalikan di Irian Jaya, bukan lagi oleh komando asalnya.

Namun, Syamsudin berkeyakinan bahwa operasi penculikan ini hanyalah insiatif Prabowo, bukan perintah Jenderal TNI Feisal Tanjung selaku Pangab. "Itu hanyalah obsesi Prabowo," ujar Syamsudin.

Syamsudin mengaku tak habis pikir mengapa Kopassus sampai melakukan penculikan terhadap para aktivis.

Dalam pandangan pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, Jenderal TNI Wiranto dalam posisi sulit dan dilematis. Misalnya, soal diseret atau tidaknya Prabowo ke Mahmil. Prabowo kemung-



Kolonel Inf. Chairawan, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR "Serba dilematis..."

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Obyek : | Sumber : M I | Tanggal : 25/6 '98

...tang ke Mabes

...luarga korban ingin ... Ketua DKP yang ... Jenderal TNI Su... ...ni hanya diterima ...pam (Aspam) ... TNI Nur Aman ...mal Brigjen TNI I ... pekan lalu.

...rang tak ada ...alan barter. Sebab, ... sudah lelah me... ...nya yang belum ... pihak para ... mengaku telah mem... ...alisis seperti yang ... Dispopsom ABRI ... Syamsu Djalaluddin ... keluarga korban ...

...nan kemanusiaan, ini... ...barter yang harus di... ...kepada pihak ABRI. ...kondisi para kor... ...kejelasan dari pi... ...dibutuhkan para ... yang kini menunggu ...kepastian.

...dalam kondisi ... pihak keluarga akan

"Terutama terjadi sejak langkah pembentukan DKP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa perwira tinggi ABRI.

"Saya melihat belum ada kemajuan dari Puspom dalam menyelidiki kasus penculikan. Sampai saat ini, pihak Puspom belum juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perwira tinggi ABRI, antar lain Prabowo, Muchdi, Feisal Tanjung, dan sebagainya yang diduga kuat sebagai pelaku dan penanggung jawab operasi penculikan," kata Munir, Koordinator Badan Pekerja KontraS.

Tampaknya, memang, bukan hanya Prabowo, Muchdi, dan Chairawan yang harus diperiksa, tapi juga beberapa mantan perwira tinggi ABRI. Berdasarkan catatan KontraS, sewaktu R Hartono sebagai KSAD dan Jenderal TNI Feisal Tanjung sebagai Pangab, mereka yang hilang adalah Yani Avri, Soni, Noval, M Yusuf, Ismail, dan Deddy Hamdun.

Pada saat Wiranto sebagai KSAD dan Jenderal TNI Feisal Tanjung sebagai Pangab, yang terlihat tegas komitmennya untuk menuntaskan kasus penculikan, masalah Trisakti, dan kerusuhan 13-14 Mei 1998. Di samping itu, juga akan menjernihkan operasi militer di Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh.

Artinya, jika memang ABRI konsisten, maka dengan segala konsekuensinya siapa pun yang terlibat penculikan tanpa pandang bulu harus di seret ke pengadilan.

Menurut Ketua Komisi I Aisyah Amini, jika dalam pemeriksaan DKP diketahui ada tindak pidana, maka harus diajukan ke Mahkamah Militer. "Jika tersangkut perkara pidana, tidak cukup dengan DKP, harus diajukan ke Mahmil," ujar Aisyah kepada *Media*.

Ketertutupan Subagyo, bukan hanya soal siapa pemberi perintah BKO, tapi juga soal apakah DKP yang beranggotakan Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur kinan akan memberikan siapa saja yang terlibat.

"Kalau dia (Wiranto) menindak sampai ke Mahmil, memang ada implikasi-implikasi seperti itu. Dimahmilkan lalu menjadi terbuka, rahasia-rahasia operasi intelijen, baik yang legal ataupun illegal akan terkuak, bahkan mungkin bisa menerembet ke mana-mana, bisa juga kepada pimpinan-pimpinan ABRI," kata Kristiadi kepada *Media*.

Wiranto juga, menurut Kristiadi, mengalami tekanan yang berat akibat publik opini dalam soal penculikan ini. Umpamanya saja, orang akan berpikiran masak penculikan sekejam itu tidak diberikan hukuman yang setimpal.

Akhirnya, kata Kristiadi, Wiranto bukan saja harus menyeret para pelaksana penculikan di lapangan, tapi juga harus sampai ke aktor intelektualnya. "Dorakan saja Pak Wiranto diberikan kekuatan untuk memecahkan masalah ini demi bangsa dan negara, juga tentunya demi kredibilitas ABRI," kata Kristiadi.

● *Ade Alawi/I-1*

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber Bisnis | Tanggal 23/8 96

Prabowo bisa di-Mahmil-kan & kena sanksi administratif

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS menegaskan Letjen TNI Prabowo Subianto bisa diajukan ke Mahkamah Militer selain kena sanksi administratif dalam kasus penculikan aktivis.

"Terserah-terserah. Serba mungkin, kalian tunggu saja, sampai Senin," ujarnya di sini kemarin, ketika ditanya apakah tiga perwira terperiksa akan dinjukan ke Mahmil atau kena sanksi administratif.

Menurut Subagyo, hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira terperiksa dalam kasus penculikan sejumlah aktivis kemarin telah disampaikan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Jenderal TNI Subagyo menegaskan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan final, namun keputusan apapun yang akan diambil mengenai nasib Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Djaja Suparman tetap tergantung Menhankam/Pangab.

"Saya sudah serahkan kepada Pangab tadi pagi. Besok Senin [24 Agustus] baru diumumkan. Kalian tunggu saja sampai Senin," katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu tidak bersedia memberikan keterangan mengenai bentuk saran yang akan diberikan kepada Menhankam/Pangab. "Pokoknya kalian tunggu saja sampai Senin," katanya, usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI yang dihadiri seluruh Kepala Staf, Panglima Kodam, Pangkostrad, Danjen Kopassus dan Kapolda se-Indonesia, di sini, kemarin.

Menurut Subagyo, DKP telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap ketiga perwira terperiksa. "Saya berharap keputusannya sudah final. Sekarang semuanya sudah berada di tangan Menhankam/Pangab. Tunggu saja sampai besok," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago. Menurut dia, hasil pemeriksaan memang telah disampaikan kepada Menhankam/Pangab, namun belum dapat diumumkan.

Dia menegaskan hasil yang telah disampaikan itu merupakan fakta berdasarkan pengakuan dan temuan yang didapat selama pemeriksaan. "Kita berharap keputusan ini dapat menyelesaikan masalah. Semuanya sudah final dan tergantung Menhankam/Pangab," ujar Pangkostrad itu.

Ditanya siapa yang memberikan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, dia mengatakan, "Saya belum bisa menjelaskan. Tanya saja kepada Pak Bagyo."

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fahrul Razi mengatakan berkas yang disampaikan kepada Menhankam/Pangab berupa rekomendasi dan saran yang harus diambil untuk menyelesaikan kasus penculikan itu.

"Hanya berupa rekomendasi, sedangkan yang berhak menentukan keputusan terhadap setiap pelanggaran adalah Pangab," katanya.

Ditangani Puspom

Sekjen Dephankam Letjen TNI Soejono menegaskan jika "Pangab memutuskan untuk mengajukan Prabowo dkk ke Mahmil, maka penyidikan akan dilakukan oleh Puspom ABRI sebagai penyidik militer.

"Di ABRI itu yang penting fungsi dan bukan pangkatnya. Tidak lihat pangkatnya, jadi Puspom sebagai penyidik tetap bertindak sebagai penyidik meskipun yang diperiksa lebih tinggi pangkatnya, tidak ada masalah," tegasnya.

Jika Prabowo dkk dipecat dari dinas kemiliteran, lanjut Soejono, maka mereka tidak dapat diadili di Mahmil tetapi di peradilan biasa. "Seluruhnya kita tunggu saja Senin." (mR/erp)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber M.I | Tanggal 22/2 98

Agar tidak Terulang Lagi

Penyimpangan Prosedur

ABRI Tata Etika Keprajuritan

JAKARTA (Media): Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan tekadnya untuk menata kembali etika keprajuritan dan kepemimpinan ABRI agar tidak terulang lagi berbagai peristiwa penyimpangan prosedur, seperti kasus penculikan, Trisakti, dan kerusuhan 13-14 Mei 1998.

"ABRI menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut sehingga jatuh korban jiwa maupun korban harta akibat pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). ABRI menyadari dalam peristiwa tersebut terlibat perajurit ABRI, karena itu etika di ABRI akan ditata kembali," ujar Wiranto kepada puluhan wartawan dalam dan luar negeri seusai Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI di Mabes ABRI Cilangkap, kemarin petang.

Dalam memberikan penjelasan tersebut Wiranto didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo HS, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Widodo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Hanafi Asnan, Kapolri Letjen Pol Roesmanhadi, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Sekjen Dephankam Letjen TNI Soeyono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Djadja Suparman, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Nugroho Djajoesman dan pejabat teras ABRI lainnya.

Menurut Wiranto, Rapim ABRI ini secara khusus bertujuan menyamakan visi, persepsi, dan interpretasi tentang perkembangan situasi nasional dewasa ini, sehingga diperoleh kesamaan tindak dan keterpaduan langkah.

Di samping itu, juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan ABRI baik untuk menghadapi bentuk-bentuk ancaman dan gangguan terhadap keselamatan negara maupun untuk mengamankan langkah-langkah mengatasi krisis dan pelaksanaan agenda reformasi.

"Rapim ini juga untuk menjaga kehormatan, memperkukuh kekompakan dan kinerja ABRI melalui upaya memantapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi internal," kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu Wiranto mengungkapkan bahwa keberadaan dan aktivitas ABRI pada masa lalu tidak lepas dari pengaruh format politik Orde Baru. Oleh karena itu dalam kiprah perannya bersama institusi lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ABRI tidak lepas dari paradigma lama.

Mengenai kegiatan operasi militer di Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh, Wiranto menjelaskan ABRI melaksanakan tugas untuk menjaga dan memulihkan keamanan di tiga daerah tersebut bukan atas kehendak ABRI sendiri, namun dalam rangka tugas negara melindungi rakyat dari gangguan dan ancaman GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) bersenjata.

Menurut Wiranto, dari berbagai opini yang muncul mengenai kegiatan operasi militer yang dilakukan oleh ABRI telah merebak dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM).

"Padahal penyataan suatu daerah sebagai daerah operasi militer bukanlah merupakan wewenang ABRI semata-mata, tetapi merupakan keputusan politik pemerintah yang memerlukan kejelasan kewenangan dan dukungan peraturan perundang-undangan," kata Wiranto.

Dikemukakan, ABRI sadar selama melakukan tugasnya mungkin telah terjadi ekses-ekses yang sukar dielakkan dan beberapa pelanggaran hukum oleh prajurit yang pada saat itu telah diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Soal Prabowo

Seusai jumpa pers, Wiranto ketika ditanya mengenai putusan terhadap nasib mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi mengatakan, hari Senin akan diumumkan secara resmi.

Pagi kemarin sekitar pukul 08.00 WIB Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo [illegible] DKP mengenai ketiga petinggi Kopassus ini. Seusai Rapim ABRI, Subagyo yang juga KSAD [illegible] tentang reaksi Pangab atas rekomendasi DKP, menolak menjawabnya. "Senin nanti semua akan jelas," katanya.

Sementara itu dari Surabaya dilaporkan, sedikitnya 156 perkara pelanggaran hukum oleh oknum ABRI belum dituntaskan Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) III hingga Agustus 1998.

"Banyaknya perkara yang belum ditanskan itu karena hampir 60% tersangkanya menghilang," kata Kolonel CHK Imron Anwari, Kepala Mahmilti III Surabaya di Surabaya kemarin.

Di samping itu, lanjut Imron, juga disebabkan minimnya jumlah hakim yang ada di Mahmilti III. Padahal, idealnya di setiap Mahmilti minimum terdapat lima hakim, sehingga setiap perkara yang masuk bisa segera ditangani. Sebab, secara kuantitas dan kualitas, pelanggaran oknum ABRI di Jatim cenderung meningkat akhir-akhir ini. (Wdh/RMD-12)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942747 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:

Subyek:	Sumber:	Tanggal:

Council's probe result to be announced soon

JAKARTA (JP): Minister of Defense and Security/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto confirmed yesterday he would announce the result of the Officers Honor Council investigation into the abductions of political activists next week.

"I have not received the council's recommendations of its investigation into the abductions of activists. The council members are still summarizing the result now," he told reporters after a monthly limited cabinet meeting on political and security affairs.

"You'll just have to wait for it. I'll announce the result of the investigation next week," he said.

Secretary to the coordinating minister for political affairs and security, R. Karyono, told reporters separately that the announcement would be made by Wiranto at the Armed Forces headquarters in Cilangkap, East Jakarta, on Monday.

The seven-member council, which met yesterday to formulate its recommendation, would provide the ABRI commander with suggested lines of action that could be taken against three Kopassus officers allegedly involved in the abductions.

The three are Lt. Gen. Prabowo Subianto (Kopassus commandant-general from 1998 to 1998), Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, who succeeded Prabowo in March but was abruptly replaced in May, and Col. Chairawan, the former Kopassus chief for intelligence operations.

Council chairman Gen. Subagyo Hadisiswoyo said earlier this month the council would recommend that Prabowo be court-martialled, rather than just face an administrative punishment.

Prabowo is the son-in-law of president Soeharto. The latter was forced to resign the presidency in May after months of strong public pressure.

Apart from the council's investigation, the military has already announced its plan to court martial 10 lower-ranking Kopassus personnel for their alleged roles in the abductions.

The kidnappings are believed to have been part of Kopassus operations to safeguard the People's Consultative Assembly meeting in March, which saw the reelection of Soeharto for a seventh presidential term. (imn)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber M.1 | Tanggal 19/8/98

Berakhir, Pemeriksaan DKP terhadap Prabowo

JAKARTA (Media): Setelah dua minggu bekerja keras, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, kemarin selesai memeriksa tiga pentolan Kopassus. Ketiganya, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan, diduga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Kendati Prabowo dkk sudah tidak akan lagi diperiksa, namun belum diketahui secara pasti rekomendasi apa yang akan disampaikan DKP kepada Pangab. Ketua DKP Subagyo Jumat lalu mengisyaratkan DKP akan menyarankan agar ketiga pentolan Kopassus itu di-Mahmil-kan.

"Kita hanya bisa menyarankan kepada Pangab agar ketiga perwira terperiksa diberi sanksi administrasi, dibawa ke mahkamah militer atau kedua-duanya," ujar Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago seusai sidang DKP kemarin sore di Mabes TNI-AD, Jakarta.

Menurut mantan Pangdam Siliwangi itu, Prabowo, Muchdi, dan Chairawan diperiksa bersama-sama. Pemeriksaan itu yang terakhir kalinya.

Yang akan dikerjakan oleh DKP pada hari-hari ini, menurut Djamari, DKP akan menggelar sidang-sidang intern untuk melakukan pendalaman dan penyimpulan. "Sehingga bisa dihasilkan suatu rekomendasi terbaik kepada Pangab," ujarnya.

Ketika ditanya dari kedua kemungkinan itu mana yang paling mungkin, Djamari enggan memberikan jawaban. "Sekali lagi saya katakan rekomendasi itu belum diputuskan, karena sidangnya baru saja selesai."

Sementara itu Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai menyatakan dalam pekan ini keputusan itu sudah dapat diumumkan. "Mungkin sebelum Jumat pekan ini, kalian (wartawan) akan kita undang untuk mendengarkan keputusan dari DKP yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo," tegasnya.

Pemeriksaan terakhir terhadap tiga pentolan Kopassus itu dimulai sekitar pukul 09.00 dan baru berakhir sekitar pukul 13.00. Sedangkan sidangnya sendiri baru bubar sekitar pukul 16.00. Prabowo, Muchdi, dan Chairawan tiba di Mabesad sekitar pukul 08.30.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, seperti biasa, datang lebih awal, sekitar pukul 07.30. Sementara itu, anggota DKP lainnya seperti Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), tiba secara hampir bersamaan.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk DKP untuk memeriksa tiga pentolan Kopassus itu dalam kaitan kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Pembentukan DKP itu diumumkan 3 Agustus, sidang pertama digelar 8 Agustus dengan memeriksa Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan.

Penyusupan

Di tempat terpisah, Irwan Effendi, 25, dilaporkan hilang kepada Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setelah menyusup ke Istana Negara pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus lalu.

Koordinator Kontras Munir menuturkan hal itu kepada *Media* kemarin setelah menerima laporan dari istri Irwan. Menurut pelapor pada 17 Agustus pagi suaminya ingin akan menemui Presiden Habibie untuk menyampaikan pokok pikiran mengenai demokrasi.

"Saya ingin bertemu Habibie untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai demokrasi. Jika saya tidak kembali tolong saya dicari, karena mungkin saya ditahan," ujar Munir menirukan pesan Irwan, warga Pondok Aren, Jakarta Selatan, kepada istrinya.

Munir juga memastikan bahwa 12 orang yang hilang diculik masih hidup, tidak seperti yang diberitakan sebuah koran sore ibu kota, kemarin. (Edi/Wdh/Was/D-12)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber: Kompas | Tanggal: 19/8/93

Selesai, Pemeriksaan oleh DKP

Jakarta, Kompas

Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, hari Selasa (18/8), dinyatakan selesai. Hasil pemeriksaan kasus penculikan dan penyekapan para aktivis itu dalam beberapa hari mendatang akan dirumuskan bersama untuk diserahkan kepada Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto.

"Hari ini, DKP telah selesai melakukan sidang pemeriksaan ketiga perwira. Dalam beberapa hari ini akan ada rapat internal DKP untuk merumuskan rekomendasi yang akan diajukan kepada Panglima ABRI," kata Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisisweyo menjawab *Kompas*, Selasa (18/8), di Jakarta.

Sejak dibentuk 3 Agustus 1998, katanya, DKP telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan secara maraton, sehingga pemeriksaan dapat tuntas secepat mungkin. Serangkaian pemeriksaan itu, antara lain, meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta, mendengarkan hasil Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG), pemeriksaan terhadap tiga orang perwira, dan mendengarkan keterangan dari perwira/tamtama dan bintara yang terkait dengan kasus tersebut.

"DKP melihat semua rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan ini dirasakan sudah cukup untuk mengumpulkan bukti dan fakta. Lalu, DKP akan melaksanakan rapat-rapat internal untuk melakukan pendalaman dan penyimpulan, yang nantinya akan berupa rekomendasi untuk Panglima," tutur Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD).

Subagyo belum mengungkapkan bentuk rekomendasi yang akan diajukan kepada Pangab. "Bentuk rekomendasi yang akan disampaikan belum bisa ditentukan, karena masih harus dilakukan sidang pendalaman. Kemungkinan rekomendasi berupa sanksi administratif atau sidang di Mahkamah Militer, atau keduaduanya," katanya.

"Hasil DKP selama persidangan dan rekomendasinya akan diutarakan dalam beberapa hari mendatang. Semuanya akan kita sampaikan dalam bentuk keterangan pers," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago kepada wartawan mengatakan, soal bentuk rekomendasi yang paling mungkinkan untuk disampaikan pada Pangab tergantung hasil yang akan diambil DKP. Panglima Kostrad ini belum bisa mengatakan secara jelas kapan waktu ketua DKP menyerahkan rekomendasi itu kepada Pangab. "Yang pasti, dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai juga mengemukakan hal yang sama. Ia menambahkan, "Semua keterangan akan diundangkan dalam jumpa pers yang akan diselenggarakan minggu ini." (nm)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber JAKARTA P. | Tanggal 15/10/93

DKP to recommend Prabowo's trial, says Gen. Subagyo

JAKARTA (JP): The chief of the Officers Honor Council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, confirmed yesterday the seven-member body would recommend that former commander of the Army's Special Force (Kopassus) Lt. Gen. Prabowo Subianto be court-martialled for his alleged involvement in the abductions and torture of political activists.

"We'll recommend (to Armed Forces Commander Gen. Wiranto) that Prabowo be court-martialled, rather than just be given administrative punishment," Subagyo said after saying Friday prayers at the mosque in the Army's headquarters.

The ultimate decision, however, will be taken by Wiranto himself, Subagyo pointed out.

"You cannot ask me whether Prabowo will eventually be court-martialled since it is the ABRI chief's authority to decide," he said.

"We can only give a recommendation to the Armed Forces commander. It can either be accepted or rejected," he added.

Prabowo, his successor Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono and the former commander of Kopassus' Group IV for Intelligence Operations, Col. Chairawan, are currently being investigated by the council for the abductions. Ten lower-ranking Kopassus soldiers will be court-martialled for allegedly carrying out the abductions.

Prabowo has admitted that the abductions took place because he misinterpreted an instruction from a superior.

It is also known that he was ordered to lend Kopassus personnel to another unit and that those troops were placed under the unit's commander through what is known in military terminology as "under operational control" (BKO).

The council was established on Aug. 3 and started work the next day. It will proceed with its questioning next Tuesday.

Meanwhile, Chairawan expressed his hope yesterday the whole affair would soon be over.

Speaking to reporters in a rare public appearance since the start of the probe, he said it was now enough for him to talk before the council and that he did not need to talk anywhere else.

"I hope that the case can be completed soon," he said after saying Friday prayers with Subagyo.

Chairawan, who appeared to have lost weight, declined to comment on the investigation, and treated reporters' questions warily.

"Please ask *Pak* Bagyo," he said, referring to Subagyo.

"I just did what my superior ordered me to do," he said, before joining Subagyo who was returning to the main building in the Army Headquarters.

Chairawan, who was removed from his post at Kopassus a few days before the council's hearings started last week, said he no longer dealt with intelligence activities.

"I now do some administrative duties at the Army's General Staff Department," he said.

Separately, military observer Rudini confirmed that any instruction to detach Kopassus troops to another military unit could not have come from an officer other than the Armed Forces commander.

"Kopassus is operationally under the Armed Forces commander's supervision. The decision to transfer the troops must have come from him," he said.

Rudini did not mention any names, but he was likely referring to Gen. (ret.) Feisal Tanjung, who led the Armed Forces from 1993 until March this year. The abductions took place between May 1997 and May 1998.

The Army chief, on the other hand, could not have made the instruction since he only supervises Kopassus' administrative needs, said Rudini, who is himself a former Army chief.

He said, however, that he was sure there could not have been any instruction from the Armed Forces to kidnap and torture activists. (inn)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Arsip & Dokumentasi

Sumber: M.I | Tanggal: Kpa. 9-6-98

Lagi, Orang Bicara Hilang

■ Mereka Sempat Dibawa ke Kantor Kodim

...IA (Media): Tiga o-...ilang kemarin kemba-...ngungkapkan kasusnya ...umum. Mereka me-...sempat dibawa ke ... Jakarta Timur.

...Nezar Patria, Aan Rus-...an Mugianto — mereka ...Solidaritas Mahasiswa un-...ndonesia (SMID) — yang ...ungkapkan kesaksiannya ...dihilangkan" di Yayasan ...Bantuan Hukum Indo-...(LBH), Jakarta kemarin. ...kesaksiannya — mereka ...pengurus Komite O-...ngan Tindak Kekerasan ...— ketiga anak muda ini ...oleh benasi, sebab menye-...ekplisit nama instansi ...kendati masih menyem-...informasi lain.

...'nurtan" orang hilang yang sudah le-...mengungkapkan pengalamannya ...Piut Lustrilanang (aktivis Aliansi ...Rakyat); Direktur Lembaga Ban-...Nusantara (LBHN) Desmond ...Mahesa; Andi Arief (juga aktivis ...dan terakhir Raharjo Waluyo Jati (ma-...Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta).

...mereka belum mendapatkan jami-...rasan, Pius lalu pergi ke Belanda, ...pun setelah mengungkapkan penga-...selama raib tanggal 27 April lalu. ...yang lain hingga kini tetap berada ...Aan.

...pengalaman para pendahulunya, ...Patria (mahasiswa Fakultas Filsafat ...), Aan Rusdianto (mahasiswa Fakultas ...Indonesia Undip), dan Mugianto (Fa-...Sastra Inggris UGM) — yang baru dile-...dari tahanan Mabes Polri 7 Juni lalu, me-...diculik oleh empat orang bertelpeng di ...mereka rumah susun Klender, ...Timur, "Prosesnya cepat sekali. Kira-...saya mau keluar dari rumah susun, kami sudah ...naik mobil para penculik," kata Nezar.



■ **KORBAN PENCULIKAN**: Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugianto (dari kiri) menceritakan sebagian pengalamannya di LBH Jakarta, kemarin.

Kepala Pusat Penerangan Kodam Jaya Letkol Nachrowi pada 16 Maret lalu menjelaskan ketiga mahasiswa itu terlibat dalam perakitan bom. Tetapi belakangan ketika ketiganya diserahkan para penculik ke Polda Metro Jaya, pihak Polda menyatakan, ketiga mahasiswa yang mendapat status penangguhan penahanan itu, terlibat tindak pidana subversi, karena ikut dalam organisasi terlarang.

"Kami sempat dibawa ke suatu tempat yang setelah sekian lama baru kami ketahui bahwa itu Kodim Jakarta Timur," kata Nezar Patria. Setelah itu dia mengaku dibawa ke suatu tempat (dia merahasiakan tempatnya).

Di tempat ini ia disekap selama dua hari; persisnya tanggal 13 dan 14 Maret. "Kami tidak mau menceritakan lebih rinci, karena konclisi psikologis yang sangat mencekam selama dua hari diculik," kata Nezar.

"Kami juga belum siap, walaupun Danpuspom ABRI Mayjen Sjamsu menjamin kenamanan kami bila mengungkapkan kejadian ini secara gamblang. Tapi saya tidak tahu kalau di luar ada kejadian lain," tegasnya.

"Kalau memang ada niat baik dari pemerintah untuk menjaga keamanan kami, maka kami akan menceritakan secara gamblang apa dan siapa yang menculik kami," tutur anggota SMID lain Mugianto.

Walaupun keberatan mengungkapkan secara rinci pengalaman selama diculik, para aktivis SMID tersebut mengakui mereka sempat disiksa di tempat yang mereka rahasiakan. "Di tempat itu saya merasa di ujung situasi antara hidup dan mati. Saya pasrah total," ujar Mugianto.

Mugianto menjelaskan dia dan kedua rekannya dijemput petugas kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan mata tertutup. Sedangkan pertanyaan pertama yang diajukan saat diinterogasi adalah: "Anda ditahan karena apa."

"Kami jadi bingung, sebab kami tidak melakukan kegiatan politik. Kami pun merasa tidak melanggar UU politik, sehingga saya hanya bisa mengatakan saya ditangkap di Klender," tambahnya.

Mugianto menjelaskan dia dan kedua rekannya hanya melakukan diskusi menyangkut berita-berita di koran. Karena itu dia mengaku sangat bingung jika kemudian Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penahanan "bahwa kami ditudub melanggar UU Subversi."

Di tahanan Polda Metro Jaya, ketiga aktivis tersebut pada 17 Mei 1998 juga diperiksa tim kecil ABRI yang terdiri dari 13 perwira dari Danpom ABRI. Nama Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugianto tidak pernah disebut Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa, dan Waluyo Jati dalam testimoni yang mereka berikan kepada wartawan. Sedangkan Kontras menyatakan sampai sekarang masih 10 lagi aktivis yang belum diketahui keberadaannya.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu menegaskan hingga saat ini pihaknya sudah menerima 12 laporan tentang orang hilang. Laporan-laporan tersebut, menurut dia, sedang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, termasuk memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. (Was/DES/D-1)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Subyek : | Sumber : S Karya | Tanggal : 3/4 96



KORBAN PENCULIKAN – *Ny Suyatmi melapor kepada YLBHI soal hilangnya suaminya, Koptu Hadi Suyitno, yang diculik oleh sekelompok orang tiga tahun lalu. Istri anggota ABRI yang tinggal di Jalan Raya Kotif Depok, Kabupaten Bogor ini menyatakan mengenali kelompok penculik tersebut. Ny Suyatmi didampingi Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan YLBHI, Munir, saat memberikan keterangan kepada wartawan di YLBHI Jakarta, Rabu (29/7). (Suara Karya/Parsunu)*

Feisal: Saya Tahu Setelah Menko

JAKARTA (Suara Karya): Menko Polkam menyatakan tidak tahu menahu masalah penculikan ketika ia masih menjabat sebagai Pangab. "Saya tidak tahu, kalaupun dilaksanakan operasi itu, pasti ada laporannya," kata Feisal Tanjung menjawab pertanyaan wartawan di Bina Graha, Rabu.

Feisal Tanjung mengatakan ia tidak memerintahkan penculikan itu, laporan pun tidak ada. "Saya tahu mengenai adanya penculikan itu setelah saya Menko Polkam, pasukannya itu sangat khusus," katanya.

Ia menambahkan, penculikan itu tidak sah. Jika orang ada kesalahan ditangkap, diperiksa. Jika tidak salah dilepas.

Belum Dilepaskan

Sementara itu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menuntut Puspom ABRI dan TPF ABRI agar memeriksa pihak-pihak yang patut diduga terlibat kasus penculikan para aktivis. Kontras juga menuntut pihak Oditurat Militer 208 Jakarta dan Mahkamah Militer menolak pelimpahan berkas perkara kasus penculikan dari Penyidik di Puspom ABRI sepanjang belum adanya kejelasan nasib para korban penculikan.

"Kami menuntut ABRI secara konsisten dan terbuka membebaskan para korban penculikan yang sampai saat ini belum jelas nasibnya, atau paling tidak menyatakan secara terbuka tentang keberadaan dan kondisi korban," kata Koordinator Kontras Munir SH di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Munir merasa yakin bahwa para korban penculikan masih berada di tangan para penculik. Ini diyakini karena belum ada keluarga korban yang merasa telah menerima kembali para korban yang hilang. Pernyataan Kapuspom ABRI Mayjen Syamsu Djalal di media massa, akhir Juli lalu bahwa para korban penculikan telah dilepaskan bulan Maret, kata Munir, dapat menimbulkan spekulasi yang kurang menguntungkan bagi keluarga korban. Pelepasan korban pada bulan Maret mengandung kejanggalan, karena di antara para korban ada yang diculik setelah bulan Maret.

"Kenyataannya sampai saat ini para korban tidak jelas keberadaannya. Keluarga korban jadi bertanya-tanya. Ketika dilaporkan telah ditemukan dua mayat di Cirebon, keluarga korban ada yang langsung mengeceknya," kata Munir. "Ini, kan bisa menjadi teror bagi keluarga korban?" tambahnya.

Menurut Munir, apabila ke-14 sisa korban penculikan sudah dilepaskan, maka sudah seharusnya pihak ABRI menjelaskan kondisi korban saat pelepasan. Kemudian, korban diserahkan kepada siapa dan di mana para korban tersebut, kini berada. "Kami mengkhawatirkan pernyataan tentang pelepasan yang tidak jelas tersebut justru merupakan kerangka untuk menghindari pertanggungjawaban hukum akibat tindak penculikan dan tindakan lain yang mengikutinya," kata Munir. (P-4/A-6)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Jakarta & Jabotabek

Minggu | Sumber: Merdeka | Tanggal: 23-7-95

Rudini: Prabowo Bisa Diseret ke Mahmil

Teridentifisir Perintah Tak Karuan

KASUS penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi bulan Pebruari 1998 telah membawa aib bagi bangsa Indonesia. Apalagi dalang pelanggaran hak asasi tersebut diduga melibatkan anggota Kopassus. Terlepas bagaimana putusan Mahkamah Militer (Mahmil) nanti terhadap para penculik, kini muncul pernyataan jika ternyata ada perwira tinggi yang terlibat dalam kasus yang menghebohkan ini, apakah lebih dahulu dibentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) atau langsung diajukan ke Mahmil?



Mayjen Sintong Panjaitan(kiri) bersama Brigjen Rudolf S Warrouw ya pernah ditangani DKM.

Bekas Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal (purn) Rudini memberikan jawaban pertanyaan itu. Menurut bekas Mendagri ini, seorang anggota militer aktif yang berpangkat jenderal bisa saja diadili di Mahmil meskipun belum ada keputusan DKM. Tetapi syaratnya, harus ditemukan bukti-bukti yang kuat.

"Itu saja bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo diseret ke Mahmil kalau memang terbukti terlibat dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi," tegas Rudini yang Ketua Umum Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).

Dengan aturan militer, Rudini yakin perkara penculikan para aktivis yang menghebohkan itu akan digelar Mahmil, sidangnya pun berlangsung seru dan bisa menyeret pihak tertentu.

Menurut penilaian Rudini, pernyataan siap bertanggungjawab yang diucapkan bekas Komandan Komando Pasukan Khusus (Dan Kopassus) Letjen Prabowo yang kini menjadi Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI, bukanlah pernyataan sembarangan.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab bila hasil pemeriksaan membuktikan oknum Kopassus bersalah dalam kasus penculikan sejumlah aktivis." Kalau terbukti ada kesalahan dari anak buah saya, saya siap bertanggung jawab," kata bekas Danjen Kopassus itu seusai penutupan kursus reguler XXV Sesko ABRI di Bandung, 17 Juli lalu.

"Prabowo saya kira seorang yang cerdas," kata Rudini. Jadi, pernyataan kesiapannya bukan sembarangan. Dia pasti punya bahan-bahan untuk dipertanggungjawabkan. Entah itu bukti tertulis atau punya saksi-saksi. Kalau Prabowo memang punya bahan maka atasan-atasannya waktu itu secara otomatis akan kena periksa. Itu repotnya. Berikut petikan wawancara wartawan *Merdeka* Baihaki dengan Rudini:

Bagaimana Anda menilai rencana pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk kasus penculikan yang melibatkan oknum Kopassus?

Saat ini orang sudah mencurigai bahwa kalau sudah dibentuk DKM, persoalannya selesai, tidak diperkarakan. Itu tidak benar. Menurut saya, DKM hanya menilai kehormatan seorang perwira. Kalau sampai mencemarkan nama korps dia bisa dibawa ke DKM. Tetapi perkaranya itu tetap bisa diajukan ke Mahmil.

Bagaimana cara kerja DKM?

DKM tidak milih orang yang jadi dewan. Itu sudah ada peraturannya. Itu *eks officio* pejabat-pejabat tertentu siapa pun yang menjabat. Di Mabesad misalnya, ada Irjen, Aspam (Asisten Pengamanan), Aspers (Asisten Personil). Kalau di TNI-AD, ya ketuanya Kasad dan Wakil Kasad jadi anggota DKM.

Dengan aturan demikian, tidak bisa memilih konconya sendiri.

> *Dia pasti punya bahan-bahan untuk dipertanggungjawabkan. Entah itu bukti tertulis atau punya saksi-saksi. Kalau Prabowo memang punya bahan maka atasan-atasannya waktu itu secara otomatis akan kena periksa. Itu repotnya.*

Setelah DKM terbentuk maka perwira yang berbuat salah, dipanggil dan dipersilakan membela diri. Jika pembelaannya tidak diterima maka diputuskan dipecat dari jabatannya. Tapi perkaranya tetap bisa diajukan ke pengadilan. Itu urusannya Oditur Militer dan Mahmil. Ini yang perlu dipahami.

Mungkin masyarakat menjadi salah mengerti karena per seorang jenderal dibawa ke D tapi tidak diajukan ke Mahm

Oh, yang Anda maksud m nya kasus dicopotnya bo Pangdam IX/Udayana Le (purn) Sintong Panjaitan yang menjabat Sesdalopbang di neg. Sintong tidak diajukan Mahmil karena faktanya men tidak memenuhi syarat untuk jukan ke pengadilan. Dia men bertanggung jawab tetapi t langsung. Anak buahnya di pangan yang bisa dibawa ke ngadilan ka berbuat langs Tapi kalau bukti, misal Sintong saat mengeluarkan rintah maka bisa dituntut k ngadilan.

Apakah ang militer aktif y berpangkat jenderal sep Prabowo apabila nanti did terlibat dalam kasus penculi bisa diadili di Mahmil sebe ada keputusan DKM?

Bisa saja. Contohnya, wa meletusnya peristiwa G-30-S/ kan ada jenderal diadili di M mil. Caranya, sebelum dia DKM mengusulkan agar jend yang bersangkutan dipecat d

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183, 3901276, 3913217 , Tel:..330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 27/8/96

HAM, korban pemerkosaan, dan korban tindak kekerasan ekses operasi keamanan yang harus diisi lengkap dalam formulir yang dikeluarkan Tim Pencari Fakta-Pemda. Tahap pertama pendataan dimulai Senin (24/8) di Lhoksukon, kawasan yang didatangi Komnas HAM, dua hari lalu. Pendataan lengkap itu tujuannya untuk mengetahui jumlah korban yang sebenarnya.

Sedang Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi, dan Ketua Serikat Pengarang Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan di Jakarta mengingatkan, adanya upaya penghilangan sejumlah barang bukti, yang berkaitan dengan penerapan DOM di Aceh, tidak lain dalam rangka menutupi pola dan sistem tindak kekerasan yang dilakukan aparat. Karena itu, pihak Polri harus mencegah penghilangan barang bukti tersebut, karena sudah merupakan tindakan melawan hukum. (bb/y/oki)

Kontras akan Gugat Panglima TNI

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Dokumentasi & Dokumentasi

Sumber: Pijar Rakyat | Tanggal: 23-7-96

GRUP IV KOPASSUS ...

dibuat sebuah keputusan strategis: menciptakan dampak psikologis yang lebih besar atau melakukan operasi khusus lainnya.

Perbedaan lain, anggota Grup IV ini adalah pola perilaku dan penampilannya yang terkesan tidak mirip tentara. Misalnya, cara bicara yang teratur, rambut yang tidak harus dipotong pendek, bahkan dalam hal menghormat atasan atau yang pangkatnya lebih tinggi tidak perlu mengenal hierarki.

Menurut informasi, mereka juga tidak wajib masuk kantor setiap hari. Dalam hal seragam, mereka tidak wajib mengenakan setiap saat. Jika mereka melakukan penyamaran, bisa dilakukan dengan berbaur dengan masyarakat biasa, atau ikut perkumpulan penggemar mobil, perkumpulan motor tertentu, dan lain-lain.

Grup IV ini sangat profesional dalam penyamarannya. Sebagian perwiranya sudah mendapatkan pendidikan perang kota dari Green Beret US Army. Di Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya, mereka menyusup sampai ke kampung-kampung dan membentuk basis perlawanan terhadap GPK dari masyarakat lokal sendiri. Oleh karenanya, kemampuan menggalang massa sangat terlatih.

Pada awal pemekaran Kopassus, Kolonel Inf Chairawan dipercaya memimpin Grup IV. Dia adalah alumni Akabri tahun 1978. Sejak lulus Akabri, dia langsung bertugas di Kopassus. Kariernya tergolong cemerlang. Dia adalah orang pertama yang meraih pangkat kolonel di angkatanya.

Nama Chairawan mulai diperhitungkan saat pasukan Kopassus berhasil membebaskan sembilan peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Lorentz 1995 yang disandera oleh GPK Organisasi Papua Merdeka di pegunungan Irian Jaya. Dialah yang bertindak sebagai komando operasi di lapangan, dan berada di bawah komando Prabowo.

Seperti umumnya perwira Grup IV, dia adalah seorang yang simpatik. Pada setiap acara di Kopassus, dia sangat ramah kepada siapa saja. Penampilannya juga sangat jauh dari kesan tentara, yaitu dengan potongan rambut yang tidak cepak. ■ bsa

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, Telp. 021 - 3145672; [illegible] Fax. 021 - [illegible]
email: ylbhi@[illegible].net.id

akan

Politis

...Bedi, bisa berlaku ... Ini bisa di... oleh Habibie juga ba... dari kesalahan yang dila... Soeharto," jelas Hamid.

...berpikir seper... ...jelas pemerintahan ... memiliki keberа... ...untuk berlaku te... ...Soeharto. Dalam ... Soeharto bukan la... ...legal, tetapi politik.

...dalam penyelesaian ... politik, tergantung ... sebabnya ke... ...Habibie dalam kasus ...menggunakan metode ...regular waktu—... Habibie berharap, ... alami pada ak... ...sakit, bahkan ... karena usia atau pe... ...Dengan demikian tanpa ... pun, Habibie lepas ... konstitusional ...psikologis untuk me... ...garunya itu.

...menurut Hamid ... Habibie bisa meng... ...atau sekalian sa... ...penyelesaian se... ...dengan cara mem... ...pengampunan) se... ...Presiden Gerald ... memberi pardon kepada ... Presiden Nixon ... Watergate.

...tambah Hamid, Ha... ...memberi ketegasan ... Soeharto, apakah ia ... atau diadili. Biar ... hart, de... ...mencatat bahwa ... bersih atau me... ...salah. Jangan lagi ...waktu generasi ...berlebut sejarah ... Soeharto. Lagi pula ke... ...akan membuat ... dalam kehidup... ...Habibie tidak boleh ... Soeharto seba... ...buy the time ...kelanggsung... ...nya. (ler/as/dth)

...memberantas money ...yang cukup beragam. Mi... ...faktor kerahasia... ...ketat dalam me... ...seseorang. Di... ...anonymous and ...account. Faktor lain... ...adalah etika bisnis... ...terutama pada anomy of ...mata-mata dalam ...seperti yang ketat.

Kontras akan Gugat Panglima dalam Kasus Penculikan

Jakarta, Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melakukan gugatan, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara, kepada Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, atas ketidakjelasan tindak lanjut pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa Prabowo, Muchdi dan Chaerawan dalam rekomendasinya menyampaikan dua hal, yaitu tindakan administratif terhadap ketiganya dan tindakan hukum. Namun, tindakan hukum terhadap ketiganya tidak pernah dilaksanakan, begitu pula pengadilan terhadap Tim Mawar tidak jelas hasilnya.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir akhir pekan lalu, di Jakarta.

"Kami sudah melakukan pengecekan di pengadilan tinggi. Tim Mawar melakukan banding, *kok* sampai hari ini belum ada keputusan banding. Kami mempertanyakan ini, karena enam bulan dalam tingkat banding di kasus pidana ini belum pernah ada sejarahnya. Biasanya setidaknya dalam tiga atau empat bulan sudah selesai," ungkap Munir.

Menurut dia, perkembangan yang tidak jelas dalam kasus penculikan ini sama skenarionya dengan pengadilan pada kasus Marsinah. "Saya pernah mengalami hal yang sama dalam kasus Marsinah. Saya pernah mengajukan banding atas putusan gugatan kami terhadap Kodam atas pembunuhan Marsinah. Dan itu telah berlangsung enam tahun dari sejak kami mengajukan banding sampai hari ini. Itu pun putusan bandingnya belum ada," jelasnya.

Pimpinan Kontras itu menjelaskan, gugatan terhadap Panglima TNI akan disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi, karena mereka merasa ditipu oleh pernyataan-pernyataan TNI dalam kasus penculikan. Di masa lalu, Panglima TNI selalu menyatakan, ketiga perwira tinggi TNI, yaitu Prabowo, Muchdi dan Chaerawan yang sudah dijatuhi hukuman administratif masih ...kinan dibawa... Akan tetapi, sa... tiganya tidak ... hukum lebih la...

Gugatan Ko... didasarkan pa... Kepala Badan ...kum TNI May... nurung, terhad... taan Kontras ... Dalam suratny... Pembinaan Hu... kum) TNI me... secara yuridis ... dak berkewaji... salinan keputu... lam surat itu ... keputusan DK... fat final, kare... pakan rekome... kepada Pejabi... Angkatan Ber... tidak dapat di... gai keputusan ... katan Bersenja... tu, secara yu... DKP tidak mu... kan sengketa.

"Kalau me... DKP itu tidak... Wiranto men... lanjut dari DK... kap Munir. (ok...



Untuk Anak Korban Tindak Kekerasan
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Koleksi & Dokumentasi
Bakyaki
Nomor: Republika
Tanggal: 23-7-9

Jadi, waktu diadili statusnya bukan jenderal lagi. Pengadilan militer tidak pandang pangkat. Jangan dikira Mahmil itu cuma ngadili kopral saja. Jenderal pun bisa diajukan ke Mahmil. Di negara mana pun begitu.

Jadi tidak benar, untuk mengajukan seorang jenderal ke Mahmil harus menunggu keputusan DKM dulu?

Tidak benar. Pengadilan militer bisa memutuskan pemecatan dan pencabutan tanda kehormatan. Jenderal yang semula berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan bisa tidak jadi makamkan di situ asal ada putusan pengadilan. Juga bisa dipenjara. Bahkan kalau Mahmil menjatuhkan dihukum mati pun boleh. Sedang DKM, di luar pengadilan juga bisa mengajukan usul kepada presiden untuk memecat seorang jenderal.

Apakah sudah saatnya pembentukan DKM untuk kasus penculikan para aktivis pro demokrasi itu?

Oh, itu terserah pada pertimbangan Pangab dan Kasad. Kalau mereka punya data-data untuk melakukan tuduhan kepada yang bersangkutan, itu bisa dia membela diri di DKM. Tapi tidak mempengaruhi Mahmil. Dibuktikan siapa yang memerintahkan penculikan itu. Kalau terbukti ada perintah atasan, maka pengadilan lah yang akan memprosesnya.

Bagaimana dengan tuntutan masyarakat agar langsung saja ke Mahmil?

Memang, ada pendapat yang seolah-olah DKM itu mau menutupi kasus itu. Itu tidak benar.

Apakah ketika Prabowo diberhentikan dari jabatan Pangkostrad merupakan penerapan tindakan disiplin?

Kemungkinan. Itu merupakan suatu tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kesalahan perintah lebih lanjut. Dengan begitu, Prabowo sudah tidak pegang komando.

Waktu itu belum terbukti. Yang teridentifikasi *kok* perintah Prabowo tidak karu-karuan. Itu hak Pangab dan Kasad untuk mencopot jabatan anak buahnya dan menyuruh minggir.(*)

[illegible] Jakarta 10320. Telp. 021-[illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

5 CATCH THE MILLENNIUM COUNTDOWN AT HOTEL MULIA SENAYAN
MONTHS TO GO
Call: 575 3299
HOTEL MULIA
Senayan
A premier of excellence

Soal Kemungkinan KPU Bubar

PP No 33/1999 Biang Sengketa?

SEORANG anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengecam kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No 33/1999 sebagai "anak haram" karena ia lahir akibat "hubungan gelap" pemerintah dengan anggota KPU wakil pemerintah. PP yang mengatur Pelaksanaan Undang-Undang No 33/1999 tentang Pemilihan Umum inilah yang memicu perseteruan panjang yang nyaris tanpa akhir antara anggota KPU wakil partai politik peserta pemilu dan anggota KPU wakil pemerintah.

Sebagian besar anggota KPU yang masuk *gang* partai "desimal"—partai yang hanya meraih nol koma nol sekian persen suara Pemilu 1999, yang juga populer dengan nama partai *gurem*—menganggap PP itu mengebiri kedaulatan KPU dan memberi keistimewaan yang "luar biasa" besar kepada Panitia Pengawas Pemilu Pusat (Panwaspus). Dengan PP itu, Panwaspus dianggap dapat mengesahkan hasil pemilu, meskipun dua pertiga anggota KPU yang 53 orang itu (48 wakil parpol

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

KOMPAS HARI INI

Kompas Online: http://www.kompas.com E-mail: kompas@kompas.com



Munir

Panglima TNI Digugat

PENGUSUTAN kasus penculikan sejumlah aktivis dinilai tidak jelas. Sebab itu, Koordinator Kontras Munir menegaskan, pihaknya akan melakukan gugatan, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara, kepada Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto. **8**

• Teropong **23,24,26**

IKLAN - 454487

05

AQUA lita

Air Diproses hingga Terjamin Higienis



Walau air dari mata airnya sudah bermutu, AQUA tetap memprosesnya sesuai standar kesehatan WHO dan IBWA (International Bottled Water Association)

Saringan awal untuk menghilangkan butiran pasir. Selanjutnya air melewati *granulated activated carbon* (GAC) untuk menyerap bau dan rasa. Terakhir, penyaringan halus dengan semacam membran, menghilangkan butiran beruku

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Nomor: Kompas Lampiran 23 - 4 - 98

Soal Korban Penculikan

Syamsu: Tak Ada Lagi di Tempat Penyekapan

Dalam pertemuan tersebut hadir keluarga dari aktivis Petrus Bima Anugerah, Sayat, Yani Afri, Deddy Hamdun, Noval Alkatiri, Ucok Munandar Sudjan. Kepada Mayjen Syamsu, keluarga korban menyampaikan pernyataan bersama yang intinya mendesak agar pimpinan ABRI benar-benar mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan memberikan kepastian di mana sebenarnya anak/keluarga mereka berada, serta mendesak korban penculikan yang belum dikembalikan untuk segera dibebaskan.

"Tolong di mana anak saya ini berada dan kawan-kawannya, dan dalam keadaan bagaimana? Kedua, minta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke-12 orang ini dikembalikan kepada keluarganya yang sudah meriudukan keberadaan mereka ini," ungkap Said Alkatiri, ayah Noval.

Mohon pengertian

Kepada keluaga korban penculikan, Syamsu menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui di mana keberadaan korban penculikan yang belum kembali ke keluarganya. Oleh karena itu, Syamsu memohon pengertian keluarga korban.

"Kita baru saja memeriksa, sekarang ini sudah 11 tersangka. Kita akan mengadakan pemeriksaan, pengusutan. Saya minta, tolonglah berikan masukan kepada kita. Sekarang yang baru terbongkar adalah kasus Andi Arief dan rumah susun Klender. Saya juga maunya secepat mungkin karena ini tugas mulya bagi saya, apalagi Pangab menginginkan usut tuntas. Sampai sekarang saya belum bisa menunjukkan keberadaannya. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memaklumi juga," jelasnya. Syamsu menjelaskan, Rabu kemarin Puspom sudah memeriksa seorang kolonel dalam kasus penculikan.

Meskipun demikian, Syamsu menambahkan, sudah ada titik terang untuk bisa mengungkapkan keberadaan mereka yang belum kembali. Pihaknya baru bisa menjelaskan mengenai ke-12 korban yang lain dengan berdasarkan fakta dan bukti. "Tidak semudah itu. Insya Allah, titik terang itu nantinya akan memperjelas permasalahan ini. Saya juga sedih. Keterangan sedang kita kumpulkan semuanya. Kalau sudah ketemu saya jawab, mungkin dua patah kata, ada atau tidak ada," tuturnya.

Dia menambahkan, dari 11 tersangka yang sudah ditahan Puspom baru bisa diungkap kasus Andi Arief dan rumah susun klender yang melibatkan Nezar Patria, Aan dan Mugiyanto. "Apakah masih ini pelaku-pelakunya, nanti ini sedang kita teliti," jelas Syamsu.

Pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka, menurut Komandan Puspom, adalah merampas kemerdekaan orang (324 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), turut serta dalam suatu tindak pidana (55 KUHP), melampaui batas kewenangannya (26 KUHPM), tidak menaati perintah dinas (130 KUHPM).

Syamsu juga menyesalkan keterangan Pius Lustrilanang yang menduga lima korban penculikan yang belum kembali kemungkinan sudah tewas. Penjelasan seperti itu malah menyusahkan para keluarga korban padahal persoalannya belum jelas benar.

Menanggapi pernyataan Andi Arief yang menolak memberikan keterangan kepada Puspom sebelum ke-12 korban penculikan lain dibebaskan, Syamsu mengatakan, "Dia menolak itu hak dia, tetapi saya juga punya hak. Kalau pemanggilan pertama dan kedua tidak datang, ya dengan upaya paksa karena ini bukan untuk kepentingan saya tetapi untuk kepentingan hukum."

Instansi lain

Syamsu yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI itu mengakui, dalam proses penculikan itu memang ada oknum-

email: ylbhi@indo.net.id

I'm ready to take the blame: Prabowo

JAKARTA (JP): Lt. Gen. Prabowo Subianto said yesterday he is ready to take responsibility for the kidnappings of political activists allegedly perpetrated by the Army's special force (Kopassus) early this year.

Prabowo, who was the commander-general of the Army's crack force when the abductions occurred, broke his silence on the issue three days after the Armed Forces (ABRI) disclosed that Kopassus members were involved in the abductions.

"I refer to the statement by the ABRI commander, who said that the matter was now being handled by the ABRI headquarters," Prabowo told reporters in Bandung, West Java, *Antara* said.

"I'm ready to take responsibility. But we have to wait for further developments. That is the only statement from me," he said after attending the closing ceremony of a regular course at the ABRI Staff and Command College which he now oversees.

Prabowo stressed, however, that all the tasks carried out by him and his subordinates when he commanded Kopassus were dedicated to the prosperity and safety of the nation.

He declined to comment on allegations that his men who were accused of the kidnappings have wrongly interpreted his orders. "That's what you say," he retorted to the persistent reporters.

Military Police chief Maj. Gen. Syamsu Djalal disclosed Tuesday that five Kopassus members have been detained and two others were under intensive investigation concerning allegations about their role in the kidnappings.

Antara has reported that the seven were a general, two colonels, a major, a captain, and two privates.

ABRI chief spokesman Maj. Gen. Syamsul Ma'arif has said that there appeared to be a "procedural error" when Kopassus members carried out orders from their superiors to look into the activities of radical groups in Indonesia.

Syamsu said that the soldiers exceeded their orders by kidnapping the activists.

The term "procedural error" in military tribunals in the past effectively absolved senior military commanders of any guilt committed by their soldiers.

Given the strong discipline that Kopassus is known for, Syamsu's claim raised many eyebrows, even from the corps itself.

Unprofessional

"I think it would be rare for anyone to miscarry or misinterpret his orders. In ABRI, any order must be carried out to the letter," said Lt. Gen. Agum Gumelar, a former Kopassus commandant who is now governor of the National Resilience Institute.

"If that was what really happened, that was very unprofessional of them," Agum told reporters in Jakarta.

Human rights organizations have demanded that the ABRI investigation disclose who gave the orders, and what the specific orders were, to shed more light on the kidnappings.

Most of the abductions occurred in the run-up to and during the People's Consultative Assembly General Session in March.

The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), an independent organization which has been looking into the matter, said 12 activists of the 24 reported missing are still not accounted for.

Those who have returned told of harrowing tortures known to be used by the military to extract incriminating statements against themselves or their colleagues.

Prabowo was virtually "forced" to speak to reporters who attended the ceremony for the rare opportunity to get close to the former commandant-general. The reporters pushed and shoved their way past his bodyguards before they could fire their questions at him, *Antara* said.

Prabowo, the son-in-law of former president Soeharto, was promoted in March from Kopassus to head the Army's Strategic Reserves Command (Kostrad).

But he was reassigned to his present post to head the ABRI college in Bandung by ABRI Commander Gen. Wiranto on May 22, a day after Soeharto resigned from the presidency. **(emb)**

Keluarga Orang Hilang Gelar Aksi Damai

Jakarta, Kompas

Sekitar seratus sanak saudara korban orang hilang menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu. Aksi yang didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut digelar untuk memperingati Hari Orang Hilang Internasional yang jatuh pada 30 Agustus.

Pengunjuk rasa yang terdiri dari keluarga korban Tragedi Lampung, keluarga 14 aktivis prodemokrasi, keluarga Ketua International Forum for Aceh (IFA) Ja'far Siddiq Hamzah, serta kawan-kawan penyair Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), Wiji Thukul, menuju Bundaran HI dengan berjalan kaki dari kantor Kontras.

Dalam aksinya pengunjuk rasa mengusung foto anggota keluarga mereka yang hingga kini belum kembali dan tak diketahui rimbanya, spanduk, dan sejumlah poster yang mengutuk tindakan penghilangan orang, seperti "Stop Penghilangan Paksa" dan "Penculikan Perbuatan Biadab".

Sepanjang perjalanan menuju Bundaran HI, pengunjuk rasa terus meneriakkan yel-yel kembalikan keluarga kami dan "stop penculikan".

Saat melintas di depan rumah dinas Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, pengunjuk rasa berhenti sejenak untuk membacakan tuntutan, mendesak negara bertanggung jawab mengembalikan anggota keluarga mereka.

Koordinator Kontras Munarman yang turut dalam aksi tersebut menyatakan, penghilangan orang merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berat.

Catatan Kontras menyebutkan, sejak tahun 1965 telah terjadi 629 kasus orang hilang di Indonesia, di luar kasus pembunuhan dan penghilangan orang yang tidak dilaporkan keluarga atau kerabat korban.

Ny Utomo, orang tua korban Petrus Bimo yang hilang Mei 1998, datang dari Malang untuk mengikuti unjuk rasa. Melalui unjuk rasa tersebut ia mengharapkan agar pelaku yang menghilangkan anaknya mau bertanggung jawab.

Harus tuntas

Sementara, aktivis Forum Persaudaraan Antar Umat (Format), Zulhamsyah, pihak kepolisian maupun Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) diminta untuk mengusut tuntas semua kasus penculikan para aktivis. Hal ini dirasakan perlu demi tegaknya hukum dan demokrasi.

Menurut Zulhamsyah, penculikan yang perlu diusut itu bukan hanya yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan, tetapi juga berbagai kasus penculikan aktivis yang dilakukan oleh warga sipil, seperti yang terjadi pada dirinya.

Zulhamsyah menilai, jika kasus penculikan oleh warga sipil ini tidak segera diusut, berbagai kasus penculikan lain akan muncul dan jika itu terjadi akan semakin memperburuk kehidupan demokrasi.

"Sekarang ini kan banyak bermunculan satgas liar atau preman-preman," katanya.

(Antara/p10/p28)

H-9

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Suara Pb | War Kot | Pos Kota | Sr Karya | Ry Mer | Bisnis In | Jkt Post | Pkr Ry

Keluarga Orang Hilang Gelar Aksi Damai

JAKARTA — Sekitar seratus sanak saudara korban orang hilang menggelar aksi damai di bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (30/8). Aksi yang didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut digelar untuk memperingati Hari Orang Hilang Internasional yang jatuh pada 30 Agustus.

Pengunjuk rasa yang terdiri dari keluarga korban Tragedi Lampung, keluarga 14 aktivis prodemokrasi, keluarga ketua International Forum for Aceh (IFA) Ja'far Siddiq Hamzah, serta kawan-kawan penyair Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), Wiji Thukul, menuju bundaran HI dengan berjalan kaki dari kantor Kontras.

Dalam aksinya pengunjuk rasa mengusung foto anggota keluarga mereka yang hingga kini belum kembali dan tak diketahui nasibnya, spanduk, dan sejumlah poster yang mengutuk tindakan penghilangan orang, seperti 'Stop Penghilangan Paksa' dan 'Penculikan Perbuatan Biadab'.

Catatan Kontras menyebutkan, sejak 1965 telah terjadi 629 kasus orang hilang di Indonesia, di luar kasus pembunuhan dan penghilangan orang yang tidak dilaporkan keluarga atau kerabat korban. ■ ant

08/02 H-21

Merdeka 16 SEP 1998

Sumbang Celengan untuk Korban Penculikan

Jakarta, Rabu, Merdeka

Pada hari kedua, "Kemah Keprihatinan" yang digelar Forum Keluarga Korban Orang Hilang di halaman Kantor YLBHI Jakarta makin marak. Kali ini hadir tokoh-tokoh reformis seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua PAN AM Fatwa, bekas Hakim Agung Adi Andojo serta puluhan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Nasional.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan sumbangan dari para simpatisan kepada keluarga korban. Rencananya sumbangan tersebut akan dipergunakan untuk biaya mengikuti Kongres Hak Asasi Manusia (HAM) di Jenewa akhir September hingga minggu pertama Oktober 1998.

Uniknya, ketika seorang ibu asal Cileduk, Nyonya Waskito menyerahkan celengan tanah dari liat kepada keluarga korban yang diwakili oleh orangtua Yani Afri.

Menurut Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, sampai saat ini sumbangan tersebut sudah terkumpul dari para simpatisan yang jumlahnya sekitar 60 orang.

"Sumbangan diserahkan dalam bentuk uang tunai, cek dan juga celengan. Ada sekitar enam orang yang menyumbangkan celengan mereka. Selain itu ada sumbangan yang diserahkan secara kelompok. Untuk jumlah nominalnya Kontras tidak tahu karena dikelola langsung oleh keluarga korban, tetapi rencananya di acara penutupan akan diumumkan," tegas Munir.

Acara semakin hangat saat Ketua Umum PAN Amien Rais tiba sekitar pukul 13.30 WIB yang langsung didaulat untuk menyampaikan orasinya di panggung. Pada kesempatan ini Amien juga melakukan dialog dengan keluarga korban penculikan, mereka yang jadi korban penculikan dan perwakilan mahasiswa.

Dalam orasinya Amien mengecam tindakan rezim Orde Baru yang melakukan tindakan kekerasan yang jelas-jelas melanggar HAM terhadap anak-anak bangsa generasi penerus. Dan, dia juga akan berpikir keras untuk semaksimal mungkin menolong keluarga korban penculikan yang belum ditemukan agar segera diketahui nasib mereka sejelas-jelasnya.

"Saya berharap Pangab segera memahmiikan Prabowo, karena dia sudah mengaku menculik sembilan aktivis. Dan, para korban penculikan dengan jelas mengatakan, mereka pernah bertemu dengan ke 14 korban penculikan lainnya," katanya.

Dia juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan segala macam jalan yang mungkin dilakukan. Dan, PAN sendiri akan mengirimkan surat kepada Presiden, Menhankam/Pangab, Kejaksaan Agung, Menteri Kehakiman dan Kapolri.

"Isi surat itu antara lain desakan agar ke 14 korban penculikan yang belum ditemukan segera dijelaskan keberadaannya. Ini memang suatu perjuangan panjang. Kepemimpinan Soeharto ternyata penuh darah. Dan, kalau kasus penculikan ini tidak pernah diselesaikan suatu ketika pemerintah akan melakukan hal-hal yang lebih biadab," tegasnya.

"Ketidakjelasan sikap pemerintah akan nasib ke 14 korban penculikan merupakan bukti bahwa pemerintah masih menggunakan cara-cara Soeharto," tegasnya.

Pada kesempatan ini pihak keluarga korban juga mengundang Amien untuk bergabung dengan mereka yang akan melakukan aksi di Markas Puspom ABRI, hari ini. Namun Amien mendelegasikan hal tersebut kepada AM Fatwa untuk bergabung dengan keluarga korban, lantaran dia harus ke luar Kota berkaitan dengan tugas partai. (WR/BY)

14 SEP 1998

...mah Keprihatinan Korban Penculikan di YLBHI

...pun korban dan ke-...an penculikan untuk ...kan Kemah Ke-... 14-16 September ...di Senin (14/9) ...tenda besar segera ...halaman gedung Ya-...ga Bantuan Hukum ... (YLBHI) di Jalan Diponegoro 74, Jakarta, tempat Kemah Keprihatinan diselenggarakan.

Demikian dikatakan Ketua Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, kepada pers Jumat (11/9), di Jakarta. Sejumlah pihak, antara lain kalangan artis dan seniman, tokoh masyarakat antara lain Amien Rais, serta sejumlah korban penculikan pun akan meramaikan kegiatan yang diselenggarakan sekaligus untuk pengumpulan dana tersebut. Kegiatan selama tiga hari itu akan diisi dengan pergelaran teater, pertunjukan kesenian, dialog, dan sebagainya. (oki)

rdeka

15 SEP 1998

▲ Kemah Keprihatinan Akan Dihadiri Amien Rais

"Mustahil Soeharto Tak Tahu Penculikan Itu"



Kemah Keprihatinan keluarga korban penculikan di YLBHI.

Jakarta, Selasa, Merdeka

Lantaran tuntutan ke-14 keluarga korban penculikan agar pemerintah segera mengungkapkan keberadaan anggota keluarga mereka tak pernah digubris, merekapun melancarkan aksi protes secara unik.

Caranya, dengan menggelar *Kemah Keprihatinan* di halaman kantor YLBHI, kemarin. Kemah ini rencananya dilangsungkan hingga 16 September mendatang.

Selain itu, Kemah Keprihatinan tersebut juga bertujuan untuk menggalang dana yang dipergunakan keluarga korban untuk menghadiri kesaksian penculikan di Jenewa, Swiss, Oktober mendatang.

Keluarga korban selama ini sudah mendatangi beberapa pejabat institusi militer yang berkaitan langsung dengan kasus penculikan tersebut. Misalnya Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Danpaspom Mayjen Syamsu Djalaluddin dan Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal Subagyo HS. Tapi tak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Acara tersebut selain dihadiri ke-14 keluarga korban yang belum jelas nasibnya, juga korban penculikan lain seperti Andi Arief, Feisol Reza, Desmon J Mahesa dan Aan Rusdianto.

Tampak juga hadir sejumlah tokoh seperti Sabam Sirait, Marsilam Simanjuntak, HJ Princen, Bambang Widjojanto dan Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir. Menurut rencana, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga akan hadir Senin ini.

Dalam acara tersebut banyak sekali ungkapan rasa simpati berbagai pihak yang disampaikan melalui dihadapan ke-14 keluarga korban penculikan itu. Ungkapan keprihatinan itu membuat keluarga korban tak kuasa menahan haru, seperti yang dialami ibu Yani Afri Ny Tuti, ibu Petrus Bimo dan ibu Yadin Muhidin.

Tuti tampak tak kuasa menahan haru ketika tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait menyampaikan orasinya di panggung bernuansa hitam yang didirikan di sudut halaman.

Tuti yang duduk di pinggir panggung bersama keluarga korban penculikan lain langsung menutupi wajah mereka dengan kedua tangannya, ketika Sabam mengungkapkan rasa keprihatinannya yang mendalam karena belum jelasnya nasib ke-14 korban penculikan itu.

Menurut Sabam, semula dia masih percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi setelah mendengar penuturan dari keluarga korban penculikan, dia berubah pikiran dan tak percaya lagi bah-

Merdeka

Ingin Dipertemukan Anggota Kopassus Tersangka Penculik

▲ Para Korban Tolak Tanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan

Jakarta Sabtu, Merdeka

Tiga dari sembilan korban penculikan yang telah pulang, akhirnya memenuhi panggilan Puspom ABRI. Mereka adalah Andi Arief, Aan Rusdianto dan Feisol Reza. Ditemani Koordinator Kontras Munir dan sejumlah keluarga korban, mereka menemui Danpuspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin di Mapuspom, kemarin.

Namun mereka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahap pertama, sebelum mereka dan keluarga korban dipertemukan dengan 11 oknum Kopassus yang menjadi tersangka dalam kasus penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi ini.

"Kami akan menandatangani BAP, asal kami bersama keluarga korban dipertemukan dulu dengan tersangka 11 oknum Kopassus. Dengan cara ini, siapa tahu bisa memaafkan hati para penculik itu. Sehingga mereka mau berbicara dengan sejujurnya, di mana sebenarnya 14 teman kami berada yang belum kembali sampai saat ini," tutur Andi Arief yang mewakili keluarga dan korban penculikan lainnya kepada Danpuspom di hadapan para wartawan.

Bahkan menurut Andi, keluarga dan para korban yang telah kembali rela para pelaku penculikan itu tidak diadili. Asalkan mereka dapat memperoleh kejelasan langsung dari para tersangka, di mana dan bagaimana keadaan anggota keluarga mereka itu.

"Jika keinginan kami dikabulkan, BAP akan langsung kami tandatangani. Hal ini kami lakukan untuk membantu Puspom ABRI, kami juga rela mereka tidak diadili, asal ada kejelasan mengenai nasib 14 korban yang belum kembali," tegas Andi.

Menanggapi hal itu, Danpuspom Syamsu Djalaluddin menyambut baik tawaran yang diberikan para keluarga dan korban penculikan. Apalagi hal ini akan sangat membantu penyidikan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI.

"Kami akan menampung keinginan itu, tapi izinkan kami agar menghubungi dan membicarakan hal ini dengan pengacara mereka dulu. Bukan kami menunggu instruksi dalam hal ini, hanya ingin berbicara dengan pengacara mereka saja," ujar Syamsu yang juga ketua TPF ABRI ini.



Mayjen Syamsu bertemu keluarga korban penculikan, kemarin.

Mengenai pemberian maaf para korban yang rela para tersangka tidak diadili, menurut Syamsu sifatnya hanya akan meringankan hukuman mereka saja. Tapi para pelaku kasus ini harus tetap ditindaklanjuti, karena mereka telah melakukan tindak pidana.

"Bisa saja para korban mengatakan mereka tidak usah diadili, tapi maaf yang diberikan sifatnya hanya meringankan hukuman saja. Mereka harus tetap diadili karena telah melakukan tindak pidana, biar pengadilan militer yang memutuskannya nanti," tegas Syamsu yang didampingi dua anggota TPF ABRI, yaitu Letkol Sudirman Panigoro dan Letkol Mungkono.

Sebelumnya, Syamsu sempat kecewa karena para korban penculikan pernah menyatakan menolak undangan Puspom ABRI

Merdeka 14 SEP 1998

Jadi Saksi Pemeriksaan 11 Oknum Kopassus

Desmon, Taslam, Andi Tolak Panggilan Puspom



Andi Arief

Jakarta, Senin, Merdeka

Tiga dari 11 korban penculikan yang telah dilepaskan, Desmon J Mahesa, Andi Arief dan Haryanto Taslam menolak memenuhi panggilan Puspom ABRI, hari Jumat mendatang. Alasan mereka, karena merasa sudah pernah memberi keterangan yang diperlukan untuk penyelidikan kasus penculikan aktivis tersebut. Selain itu, tujuan dari pemanggilan tersebut dinilai kurang jelas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Puspom ABRI memanggil sebanyak 11 korban penculikan yang telah dilepas, guna memberikan keterangan sebagai saksi bagi pemeriksaan terhadap 11 tersangka oknum Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi. Surat panggilan bernomor PGL/399/IX/Idik/1998 sudah dikirim ke alamat mereka masing-masing (*Merdeka*, 12/9).

Desmon mengakui, sampai saat ini dia belum menerima surat pemanggilan tersebut. "Sampai sekarang saya belum terima surat itu datang ke alamat saya. Dan yang jelas saya tidak akan datang Jumat mendatang ke markas Puspom ABRI untuk memberi keterangan," katanya kepada *Merdeka*, tadi malam.

Karena, menurutnya, pemanggilan oleh Puspom ABRI tidak jelas tujuannya. Kalau hanya untuk menjadi saksi dari 11 tersangka oknum Kopassus yang diyakini terlibat kasus penculikan, dinilai Desmon pemanggilan tersebut menjadi mubazir.

"Saya dan korban penculikan lain sebelumnya sudah memberikan keterangan kepada Puspom ABRI dan menyampaikan kesaksian di hadapan publik. Saya rasa semua itu sudah cukup," tegasnya.

Jadi, Ketua LBH Nusantara ini tetap menolak kalau tujuan pemanggilan tersebut bukan untuk menyeret para tersangka termasuk para perwira tinggi ABRI ke Mahkamah Militer.

"Buat apa saya datang lagi ke Puspom ABRI dan buat apa membantu ABRI kalau ABRI sendiri tidak memberi penjelasan berkaitan dengan kasus tersebut secara gamblang. Juga tentang keberadaan ke-14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya," katanya.

Menurut Desmon, pada saat dia menyampaikan keterangan di hadapan Tim Penyidik Puspom ABRI di kantor YLBHI pada bulan Juni lalu, dia sempat membuat surat pernyataan tidak akan memberi keterangan selama pihak ABRI tidak memberi kejelasan tentang nasib 14 korban penculikan lainnya. "Itu komitmen saya dan saya selalu pegang itu," tegasnya.

Menurut Desmon, seharusnya dari keterangan yang pernah disampaikan oleh para korban penculikan sudah dapat menunjukkan keberadaan dan nasib ke-14 korban penculikan lainnya.

"Ya paling tidak harus ada kejelasan tentang Yani Afri, Sonny dan Herman Hendrawan yang bertemu saya di sel bawah tanah. Dari situ kan sudah jelas kalau penculikan mereka dan saya satu paket," katanya.

Harus Satu Paket

Pernyataan senada juga dikemukakan

Merdeka 17 SEP 1997

▲ Aktivis Pro Demokrasi Menolak Panggilan Puspom ABRI, Kenapa?

"Itu Sama Saja Bohong"



Andi Arief, Desmon J Mahesa dan Haryanto Taslam. *Menolak*

Puspom ABRI kehilangan wibawa? Entahlah. Yang jelas, lembaga hukum bagi kalangan militer itu telah mendapatkan penolakan untuk menghadirkan saksi suatu kasus. Para aktivis pro demokrasi yang telah menjadi korban penculikan tegas-tegas menyatakan emoh memenuhi panggilan sebagai saksi. Sebabnya, pemeriksaan itu dianggap tidak jelas tujuannya, tidak ada pengungkapan nasib para aktivis lain yang masih hilang, serta Pupom ABRI dinilai lamban.

SEBAGAI warga sipil yang dijadikan saksi, mereka berhak menolak. Karena sebelumnya mereka telah memberikan kesaksian, dan tidak adanya kejelasan ten-tang pengusutan rekan-rekan mereka yang sampai sekarang masih hilang. Untuk itu, Puspom ABRI dianggap tidak berhak melakukan pemaksaan dalam pemanggilan aktivis pro demokarasi yang telah menjadi korban penculikan.

Begitulah paparan tiga aktivis pro demokrasi yang menolak pemanggilan Puspom ABRI, Desmon J Mahesa, Haryanto Taslam dan Andi Arief saat diwawancarai *Merdeka*, kemarin.

Menurut Desmon, Puspom ABRI tidak memberikan keterangan secara jelas tentang dimana hilangnya aktivis-aktivis lainnya. "Mereka sama sekali tidak memberikan kejelasan. Apakah aktivis lainnya sudah mati. Kalau sudah mati dimana kuburannya? Oleh apa matinya? Kami sebagai saksi, memiliki rasa keprihatinan, maka selayaknya kami membantu teman-teman lain yang hilang sampai sekarang. Tapi apa mau dikata, kesaksian dan keterangan kami itu, sama sekali tidak ada hasilnya. Sekarang, jika kami melakukan penolakan itu wajar-wajar saja," ungkapnya.

Dilanjutkan Desmon lagi, bahwa dirinya sudah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik Kolonel Joko. Dia juga telah menandatangani Berita Acara Perkara (BAP)-nya. "Tetapi tetap

★ ★ ★

. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

NARASUMBER

LOKAKARYA KASUS ORANG HILANG
pada
POLRI DALAM RANGKA PENANGANAN
KASUS ORANG HILANG

. LOKAKARYA YANG BERBAHAGIA,

.AIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH,
TERA BAGI KITA SEKALIAN,

N

'A MEMULAI DISKUSI KASUS ORANG HILANG YANG
I OLEH MENTERI NEGARA URUSAN HAM RI, TERLEBIH
KITA BERSAMA - SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR
H S.W.T. YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN
EHINGGA KITA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA DALAM
WALAFIAT.

KASUS - KASUS ORANG HILANG YANG TERJADI DI
H MENJADI PERHATIAN YANG CUKUP SERIUS SERTA
TAN" MASYARAKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL,
ANGAN / PENCULIKAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA
RUPAKAN SUATU PELANGGARAN HAM (HAK AZASI

KEPENTINGAN POLITIK, JUGA DIINDIKASIKAN DILAKUKAN KELOMPOK - KELOMPOK LAIN YANG BERTUJUAN DALAM BISNIS GELAP.

KARENA ITU, POLRI SELAKU APARAT PENEGAK HUKUM, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT DITUNTUT UNTUK MELAKUKAN UPAYA - UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS TERSEBUT SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG

PERMASALAHAN.

UPAYA - UPAYA APAKAH YANG TELAH DILAKUKAN POLRI DALAM MENGULANGI KASUS - KASUS ORANG HILANG / PENCULIKAN SELAMA INI ADAKAH KENDALA - KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA INI DALAM MELAKUKAN PENANGANAN KASUS - KASUS ORANG HILANG / CULIKAN.

PEMBAHASAN / ANALISA

1. BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP YANG MENGATUR TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA PENEGAK HUKUM, PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT.

2. TUGAS - TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI TERSEBUT MERUPAKAN SATU KESATUAN, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPISAHKAN KARENA TUJUAN PENEGAKAN HUKUM SELALU BERDAMPAK

TINDAKAN KONKRIT DARI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAPAT DILAKSANAKAN BAIK DALAM BENTUK **PREVENTIF** DAN **REPRESIF**. TINDAKAN REPRESIF SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHAP SEBAGAI LANDASAN HUKUM FORMAL YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP TERJADI SUATU PERISTIWA, MAKA DIAWALI DENGAN UPAYA PENYELIDIKAN (PASAL 6 BUTIR 5 KUHAP) UNTUK MENENTUKAN APAKAH PERISTIWA TERSEBUT MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA ATAU BUKAN TINDAK PIDANA. APABILA PERISTIWA TERSEBUT MERUPAKAN TINDAK PIDANA, MAKA UPAYA POLRI SELANJUTNYA ADALAH MELAKUKAN **PENYIDIKAN** (PASAL 5 BUTIR 2 KUHAP).

TERHADAP TERJADINYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN/PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA, POLRI TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENYELIDIKAN NAMUN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KE PROSES PENYIDIKAN KARENA TIDAK DIDUKUNG OLEH **ALAT BUKTI** YANG KUAT OLEH KARENA MINIMNYA KETERANGAN SAKSI, PETUNJUK DAN LAIN-LAIN. DISAMPING KURANGNYA ALAT BUKTI TERSEBUT TERDAPAT PULA KENDALA LAIN YANG SANGAT MENDASAR YAITU DOMINANNYA SISTEM POLITIK TERHADAP SISTEM PENEGAKAN HUKUM YANG MENGAKIBATKAN SUPREMASI HUKUM TERABAIKAN.

DARI SEJUMLAH KASUS ORANG HILANG/PENCULIKAN TERDAPAT SATU KASUS YANG SAAT INI SEDANG DALAM TAHAP PENYELIDIKAN YAITU KASUS **ANDI ARIEF** YANG DITANGANI OLEH TIM MABES POLRI, DIMANA LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN :

a. MENGINTEROGASI 9 (SEMBILAN) ORANG ANGGOTA POLRI YANG MENERIMA PENYERAHAN **ANDI ARIEF**.

EJABAT TERAS POLRI.

MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP BERKAS PERKARA TIM MAWAR (TIM KHUSUS KOPASSUS TNI-AD).

d. RENCANA TINDAK LANJUT TIM MABES POLRI YAITU MELAKUKAN PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN ANDI ARIEF DAN KAWAN-KAWAN DAN PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI DARI **BIA**.

IPULAN.

DALAM MENGHADAPI TERJADINYA BERBAGAI KASUS ORANG NG/PENCULIKAN, POLRI **TIDAK PASIF** TETAPI TELAH MELAKUKAN AGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM SESUAI KETENTUAN NDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, NAMUN UPAYA-UPAYA EBUT MENGHADAPI BERBAGAI KENDALA **PADA MASA LALU** ANA SISTIM POLTIK **MENDOMINASI** SISTEM PENEGAKAN HUKUM.

DARI BERBAGAI KASUS YANG TERJADI, POLRI TELAH UPAYA MELAKUKAN UPAYA PENYELIDIKAN DENGAN MEMBENTUK MABES POLRI YANG SAAT INI SEDANG MELAKUKAN UPAYA YIDIKAN ATAS KASUS PENCULIKAN ANDI ARIEF.

IKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT DISAMPAIKAN, SEMOGA JADIKAN MASUKAN DALAM DISKUSI KALI INI.

IAN DAN TERIMA KASIH
SSALAMU' ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

JAKARTA, 14 APRIL 2000
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. RUSDIHARDJO
LETNAN JENDERAL POLISI

AYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
ata 10320
formasi & Dokumentasi:
Obyek: | Sumber: | Tanggal:

Andi Arief Bersedia Tukar Pengakuan

JAKARTA (Media): Sampai sekarang ABRI belum menemukan pelaku penculikan 12 aktivis. Yang tertangkap baru penculik Andi Arief dan Nezar Patria."

Hal itu ditegaskan oleh Asisten Penyantunan (Aspam) KSAD Mayor Jenderal TNI Nur Aman selika menerima 13 orang keluarga korban penculikan termasuk Andi Arief dan Faisol Reza. Mereka datang untuk kembali mendesak Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menanyakan nasib 12 korban penculikan.

Di antara 13 orang tersebut berasal dari keluarga Yadin Muhidin, Ucok Munandar, Noval Ali, dan Yani Avril. Kedatangan mereka ke Mabes AD hanya didampingi oleh anggota tim dari Komite Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Faisol Reza.

"Sampai sekarang ABRI belum menemukan pelaku penculikan 12 aktivis yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya," ujar Nur Aman.

Dalam dialog antara Aspam KSAD dengan para keluarga korban penculikan itu, salah satu korban penculikan Andi Arief sempat melontarkan ide untuk mengeluarkan pengakuannya mengenai peristiwa penculikan dan siapa orang di balik penculikan dengan penjelasan tambahan.

"Saya tidak mau tahu sanksi administratif atau hukuman yang dikenakan pada pelaku, tetapi jika Aspam ingin mendengar penjelasan tambahan dari saya, maka tukar dulu dong dengan 12 kawan kami yang masih belum jelas di mana sekarang," ujar Andi Arief di depan forum.

Sebelumnya, 11 keluarga orang hilang pernah mendatangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) untuk mendesak DKP agar menanyakan nasib ke-14 orang yang masih tidak menentu nasibnya ke para tersangka penculikan. Mereka sempat mengajukan permohonan agar bertemu dengan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang sekaligus Ketua DKP.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu sempat ditanyakan kembali permintaan Kontras kepada KSAD agar menyampaikan pertanyaan nasib 12 orang hilang tersebut kepada DKP. Namun, Mayjen Nur Aman menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada jawaban dari KSAD.

Aspam KSAD itu juga menyatakan sampai sekarang masih ada pelaku yang diperiksa tapi berbelong, sehingga menambah sulit pekerjaan ABRI.

Pertemuan itu berakhir setelah Aspam KSAD berjanji akan menemukan keluarga korban dengan KSAD, Selasa pekan depan.

Sementara itu mengenai Irwan Effendi, orang yang menyelundup ke istana negara saat upacara 17 Agustus 1998, sudah dinyatakan pulang oleh istri korban, kemarin.

"Dia sudah kembali di rumah setelah ditahan sementara," ujar istri Irwan Effendi tanpa menjelaskan siapa yang menahan suaminya. (Was/C-2)

Sumber: Kompas Tanggal 24/7 98

BILITAS" KORBAN PENCULIKAN DI TEMPAT "X"

	Di tempat "X" yang kemudian di identifikasi Puspom ABRI adalah sel di Markas Kopassus Cijantung disekap Lucas de Costa.
1997:	Yani Afri (Rian) dan Sonny diculik masuk ke tempat yang sama.
1997:	Deddy Hamdun, Noval dan Ismail diculik dan masuk ke tempat yang sama. Lucas di lepaskan dengan dipulangkan ke rumah orangtuanya, sekarang masih hidup.
gustus 1997:	Deddy Hamdun, Noval dan Ismail dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dan tidak dipulangkan ke rumah orangtuanya. Hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.
bruari 1998:	Pius dan Desmond diculik dari dua tempat yang berbeda dan masuk ke sel di tempat yang sama.
aret 1998:	Haryanto Taslam diculik dan masuk ke sel di tempat yang sama.
Maret 1998:	Herman Hendrawan, Rahadjo Waluyo Jati dan Feisol Reza di culik. Herman dimasukkan ke sel di tempat yang sama dengan Pius dan Desmond. Sementara Reza dan Jati, diinterogasi dan latihat dikursi tempat dia diinterogasi.
Maret 1998:	Nazar Paris, Aan Rusdianto, Mugiyanto diculik, diinterogasi di suatu tempat yang sama dengan Jati dan Reza, tempat "X" yang kemudian diidentifikasi sebagai Markas Kopassus Cijantung, dan tidak pernah dimasukkan ke sel di mana Pius dik berada
13 Maret 1998:	Pada tengah malam Herman dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali lagi ke sel, tidak dikembalikan ke rumah orangtuanya. Sampai sekarang keberadaannya tak diketahui.
14 Maret 1998:	Dini hari sekitar pukul 02.00 WIB Reza dimasukkan ke sel tempat sebelumnya Herman bearda.
15 Maret 1998:	Nazar, Aan dan Mugiyanto dibawa dari tempat mereka diinterogasi, dipindah ke Polda Metro Jaya.
15 Maret 1998:	Sonny dan Yani Afri dikeluarkan dari sel tengah malam, tidak pernah kembali ke sel, tidak dikembalikan ke rumah orangtuanya. Keberadaannya sampai sekarang tak diketahui.
16 Maret 1998:	Jati dimasukkan ke sel tempat Sonny sebelumnya disekap
28 Maret 1998:	Andi Arief diculik dari Lampung, di interogasi di tempat interogasi yang sama dengan Jati dik.
2 April 1998:	Pius dikeluarkan dari sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya.
3 April 1998:	Desmond dikeluarkan dari sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya
6 April 1998:	Andi Arief dimasukkan ke sel tempat di mana Reza Jati, dan Taslam masih disekap.
15 April 1998:	Taslam dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya
16 April 1998:	Andi Arief dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dipindah ke Mabes Polri
25 April 1998:	Jati dan Reza dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dipulangkan ke rumah orangtuanya.

Sumber: *Kesaksian-kesaksian Korban di Kontras dan PBHI*

Korban yang berdasarkan keterangan korban lain tidak pernah diketahui berada di lokasi "X" adalah Suyat, Petrus Bima Anugerah, dan korban yang hilang pada tanggal 14 Mei (Hendra Hambalie, Yadin Muhidin, M Yusuf, Ucok Munandar S). Keterangan bahwa Suyat diculik dari Solo diperoleh Jati dari orang yang menginterogasinya. Keterangan mengenai Petrus Bima disampaikan Pius bahwa Jati beberapa kali diminta interogatornya untuk mengidentifikasi Petrus Bima dan di mana keberadaannya (ekt)

SAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Sumber: MERDEKA | Tanggal: Selasa 9-6-98

eberkan Kisah Penculikan di YLBHI

a Aktivis SMID Minta Jaminan Keamanan



Kesaksian Mugianto, Aan Rusdianto dan Nezar Patria di YLBHI, kemarin.

lerdeka
ritas Maha-
nal (SMID)
diantodan
aminan ke-
reka mem-
kan testimo-
an Lembaga
donesia (YL-
rta.
nya ketika
tuan Klen-
3 Maret lalu,
secara kro-
Nezar yang
a mengata-
lan dengan
penahanan
Metro Jaya,
masih dalam
enculik. Ker-
gis itu, kami
menceritakan
i," katanya.
rasa belum
pemerintah.
han penaha-
tiba-tiba se-
an mereka.
hlun ketiga
akukan pada
tempat yang
eda waktu.
Aan diambil
ngkan Mu-
kul 21.00,
rita Nezar,
lisafat Uni-
ada (UGM)
dan Aan se-
inuman di
orang yang
Setelah Aan
di hadapan
rang bertu-
utunya me-
nahitam dan
hijau.
g menceng-
ar dan Aan.
idak sempat
reka berlin-
Kedua tangan
ibawa turun

tangga dan kemudian dimasukkan ke sebuah jeep. Prosesnya berjalan cukup cepat dari lantai dua Rusun Klender sampai ke mobil Jeep yang berjarak 8 meter berlangsung 1 menit.

Selanjutnya, mata kami ditutup dengan kain hitam dan ditutup lagi dengan topi wool berwarna hitam juga. Kemudian dibawa ke sebuah tempat yang tidak bisa diidentifikasikan. Tetapi yang jelas jalan menuju ke sana mulus.

Dalam penculikan tersebut kami sempat singgah di dua institusi formal sampai akhirnya terdampar di Polda Metro Jaya, 15 Maret 1998. Institusi tersebut dinamakan tempat X. Di sanalah mereka mendapat perlakukan kekerasan secara fisik.

Kami berada di tempat X dua hari dua malam dan disiksa secara fisik, tetapi kami tidak bisa menceritakannya secara detil. Sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya kami sempat transit di Kodim Jakarta Timur. Pada saat itu mata kami masih tetap ditutup.

Pertanyaan pertama yang diajukan pelaku, mengapa mereka ditahan? Saat itu kami merasa bingung karena sama sekali tidak merasa melakukan kegiatan politik ketika ditangkap.

Kami juga tidak merasa melanggar UU sehingga pada saat itu kami hanya bisa menyatakan, kami ini tinggal di Rusun Klender dan yang kami lakukan hanya dishusi berita-berita di koran.

Menusuk

Perasaan kami di tempat X tersebut menusuk alam bawah sadar. Itulah sebabnya kami tidak bisa mengungkapkan hal tersebut secara detil. Perasaan saya di tempat X antara hidup dan mati. Kami hanya bisa pasrah total.

Sedang Mugianto, mahasiswa Fakultas Sastra Indonesia UGM angkatan tahun 1992 meminta maaf karena belum bisa menceritakannya secara detil tentang kasus penculikan. Tetus terang saat ini kami belum berani, belum sanggup mengungkapkan secara detil. Saya takut jika hal itu diungkapkan akan mengancam diri saya karena ada institusi formal yang terlibat.

Mugianto berjanji, setelah secara psikologis mereka siap dan ada jaminan dari pemerintah mereka akan menceritakan seluruhnya kepada pers dan juga ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus penculikan tersebut.

Ketua Kontras (Komite Untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan), Munir menilai, status penangguhan penahanan tiga aktivis tersebut bagian dari lemahnya proses penegakan dan tuduhan kepada mereka. "Selain itu, tidak adanya saksi yang bisa menyaksikan mereka melakukan tindakan pidana," tegas Munir.

Jumlah orang-orang yang hilang yang didata Kontras bertambah lagi menjadi 10 orang setelah Opi, adik kandung Muhammad Yusuf dan keluarga Syalomo DC Turaga (Rico) mengadukannya, kemarin. M Yususf hilang sejak 7 Mei 1997 setelah sebelumnya kakaknya kedatangan tamu yang tidak dikenal dengan ciri-ciri bertato.

Rico walaupun seorang pelajar SMIP di kawasan Jakarta Timur namun dia diketahui ikut aktif dengan mahasiswa untuk memperjuangkan reformasi. Rico menghilang sejak tanggal 11 Mei.

Rico sempat menghubungi keluarga tanggal 24 Mei dan mengabarkan kondisinya sehat dan diberi makan yang layak. Tetapi belum bisa pulang sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Orangtua Rico semula menyangka dia merupakan bagian dari kasus kerusuhan 13-14 Mei lalu.

Untuk 56 orang hilang yang pernah di data Kontars memang harus dikonfirmasi ulang karena ada yang melapor sudah pulang atau korban kerusuhan dan kasus di Trisakti, 4 orang dinyatakan hilang. (WR)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Blok: | Sumber: Merdeka | Tanggal: 3/7/98

Andi Arief Merasa Aneh, ABRI Maksa Warga Sipil



Andi Arief

Jakarta, Kamis, Merdeka

Andi Arief, aktivis PRD (Partai Rakyat Demokrat) yang juga salah seorang korban penculikan, tetap menolak memenuhi panggilan Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI yang diketuai Danpuspom Mayjen Syamsu Djalaludin untuk memberikan keterangan.

Andi mengaku baru satu kali menerima surat panggilan Puspom ABRI yakni pada tanggal 15 Juli 1998. Surat tersebut dilayangkan kepadanya melalui Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Hal itu dikemukakan Andi Arief ketika dihubungi *Merdeka* di rumah orangtuanya di Lampung, kemarin.

Lantas, apa langkahnya? Dia akan tetap konsisten dengan pernyataannya, bahwa keterangannya di Polda Metro Jaya sebanyak tiga kali kepada TPF ABRI sudah lebih dari cukup. Karena dalam keterangannya itu dia telah mengungkapkan semua fakta dan data yang dibutuhkan untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis tersebut.

"Walaupun ada beberapa nama yang berkaitan dengan kasus penculikan tersebut masih saya simpan. Dan saya akan mengungkapkan itu secara terbuka setelah 14 orang korban penculikan yang sampai sekarang belum jelas nasibnya dibebaskan dalam keadaan hidup atau sudah meninggal," papar Andi.

Andi mengatakan, sikapnya menolak panggilan TPF sebelum nasib 14 korban penculikan lainnya jelas, baginya menjadi prinsip karena menyangkut nyawa manusia.

"Saya bisa merasakan bagaimana perasaan keluarganya tentang nasib mereka. Dengan perasaan tidak menentu keluarganya menunggu kabar apakah mereka dalam kondisi hidup atau sudah meninggal," kata aktivis yang dituduh terlibat kasus peledakan bom di Tanah Tinggi ini.

Andi menilai pernyataan ABRI tentang ketidaktahuan mereka tentang nasib ke-14 korban penculikan tersebut adalah suatu hal yang sangat menggelikan.

"Lucu sekali kalau pihak Puspom ABRI, Pangab atau Kopassus menyatakan tidak tahu keberadaan mereka. Ini malah menunjukkan kalau ABRI sangat rapuh, padahal mereka dibiayai dengan APBN dalam latihannya. Kalau rapuh bagaimana mereka bisa menjaga

ASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
ssi dan dokumentasi:
: | Sumber: Merdeka | Tanggal: 2/7 97

...an warga nega-
...ya sangat malu
...a," paparAndi

...sebaiknya pihak
...h Militer untuk
...assus yang men-
...culikan tersebut,
...kan lainnya dite-

...antara merekater-
...rbeda lagi kasus-
...rutnya bukan lagi
...merupakan tindak

...n kasus penculikan
...pilah-pilah, karena
...lainseperti Haryan-
..., Jati, Reza dan lain-
...poket. Kita disekap
..., dan bentuk-bentuk
..." tuturnya lagi.
...ana dengan jaminan
...alau Puspom sendiri
...memaksa dia walau-
...n, Andi menyatakan
...n hal ini.
...memang hak mereka.

Tetapi saya merasa ini hal yang aneh. ABRI memaksa warga sipil. Tetapi bagaimanapun saya akan tetap menolak. Namun saya tetap menghargai ABRI mau menyebut Kopassus terlibat dalam kasus ini," katanya lagi.

Syamsu: Masih Kurang

Danpuspom ABRI Mayjen Syamsu menanggapi langsung sikap Andi Arief itu. Dia mengaku sudah membaca kesaksian Andi sebelumnya kepada Polda Metro Jaya, namun laporan tersebut dinilainya masih kurang dan harus terus didalami.

"Boleh saja dia (Andi -Red) menganggap keterangan yang diberikan ke Polda dan Komnas HAM sudah lebih dari cukup, namun pihak kami menilai ada yang perlu kita dalami lagi," tegas Syamsu ketika dihubungi *Merdeka* di ruangan kerjanya, kemarin.

Jenderal berbintang dua ini juga menyatakan telah memeriksa kesaksian Andi Arief di Polda, makanya setelah membaca laporan tersebut TPF menilai ada yang mesti dipertanyakan lagi dan minta penjelasan dari Andi. Sayangnya Syamsu tidak menjelaskan bagian mana dari kesaksian Andi yang masih perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Seperti diketahui, Andi Arief menafikan panggilan ketua TPF untuk memberikan keterangan pada Puspom karena menganggap keterangannya yang diberikan kepada Polda sudah cukup untuk Puspom guna melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Selain itu Andi juga mengatakan sebelum dirinya diperiksa Puspom, dia terlebih dahulu meminta kepastian nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum diketahui rimbanya (*Merdeka*, 29/7).

Mengenai tuntutan Andi itu, Puspom ABRI berjanji akan mengungkapkannya dalam waktu dekat. "Salah satu poin penting untuk menguak misteri ini adalah keterangan dari aktivis PRD ini," ujar Syamsu. Dalam kesempatan itu Syamsu juga menjelaskan bahwa hingga kini dia belum memberikan surat panggilan kepada Pius Lustrilanang (bukan seperti diberitan *Merdeka* edisi kemarin -Red). Surat panggilan itu baru diberikan kepada Andi Arief, dan ini yang kedua kalinya. Syamsu juga menegaskan bahwa baik Pius maupun Andi tidak akan dipaksa bersaksi. "Maksud saya itu merupakan upaya hukum, seseorang wajib memberikan kesaksian pada suatu kasus kriminal bila diminta," katanya.

Dikatakan pula, andaikata di Puspom nanti Andi tidak mau memberikan keterangan, itu tidak menjadi masalah. Pihaknya hanya ingin menuntaskan kasus penculikan ini dengan cepat dan tuntas sebagaimana diminta masyarakat. "Keterangan saksi-saksi tentu saja amat membantu kami dalam mengungkap kasus ini," jelasnya.(WR/YUG)

AYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
arta 10320
formasi & Dokumentasi:
Obyek: | Sumber: Merdeka | Tanggal: 2/11 90

"Memahmilkan Prabowo Tak Seperti Makan Cabe"

Jakarta, Senin, Merdeka

Kasad Jenderal Subagyo Hadisiswoyo menduntah tuduhan bahwa ABRI tidak segera memahmilkan Prabowo Subianto karena khawatir proses Mahmil bagi menantu Soeharto ini akan menyeret para petinggi ABRI lain dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi. Subagyo meminta semua pihak untuk menghilangkan pikiran-pikiran seperti ini dan mengikuti proses yang berlaku.

"Marilah kita tidak saling curiga mencurigai dan mendukung proses yang ada. Kalau pikirannya sudah curiga-mencurigai, hasilnya akan lain. Sebaliknya, masalah ini sebaiknya disikapi secara bersahaja, jujur apa adanya, dan berpikir positif. Proses ini *kan* tidak seperti makan cabe," jelas Subagyo di sela-sela penutupan *Asian Armies Rifle Meet VIII* di Cilodong, Bogor, kemarin.

Seperti diketahui, hingga saat ini kasus penculikan para aktivis pro demokrasi belum kunjung tuntas. Memang, berbagai upaya telah dilakukan. Pihak Mabes ABRI sudah membentuk tim pencari fakta yang hingga kini terus bekerja. Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto pun pernah memberikan sinyal untuk memahmilkan para tersangka termasuk Prahowo Subianto. Namun, sinyal tersebut hingga kini belum menunjukkan titik terang. Prabowo belum juga diseret ke Mahkamah Militer.

Tuntutan agar kasus yang pernah menggegerkan ini diusut tuntas selain datang dari masyarakat juga datang dari para keluarga korban penculikan. Hal itu cukup beralasan karena hingga kini nasib 14 aktivis masih belum jelas nasibnya.

Kerap kali, orang tua korban mendatangi Kantor YLBHI dan Kantor Puspom ABRI untuk minta kejelasan tentang nasib anak-anak mereka. Malah, mereka pernah mengancam untuk berkemah di Puspom ABRI selama nasib korban penculikan itu tidak dituntaskan.

Jenderal Subagyo bukan tidak menyadari hal seperti ini. Bekas Pangdam Diponegoro ini mengatakan sikap saling mengkomati, menghargai, dan saling percaya ini sangat penting dalam rangka memberikan kontribusi terhadap bangsa agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Di sisi lain, sikap saling mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Dalam kesempatan tersebut KSAD juga memberikan komentar soal kursi ABRI di DPR yang akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan.

ABRI Akan Demokratis

Pria yang pernah menjabat Dan Kopassus ini mengatakan masalah ABRI di DPR telah ada aturannya. Dan soal tersebut juga akan dibahas di MPR dan di DPR. Dia mengajak semuanya untuk menyepakati peraturan yang akan diputuskan.

Apakah itu berati ABRI ingin mempertahankan kursinya di DPR? "Itu bukan persoalan mempertahankan atau tidak. Keterlibatan ABRI tersebut adalah sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pembangunan. Wujud tanggungjawab besar terhadap negara dan bangsa," papar Subagyo.

Maka, sebaiknya proses yang ada di lembaga perwakilan diikuti. Kalau memang ada usul-usul, dibicarakan secara bersama-sama. ABRI akan demokratis. Contohnya, dulu jumlah kursi ABRI di DPR adalah 100. Lalu dikurangi lagi menjadi 75. Kini rencananya dikurangi sehingga tinggal 55 kursi.

"Mari diatur bersama-sama demi kebaikan bersama. Kita ikuti saja proses ketatanegaraan yang berlaku. Yang jelas pembahasan soal itu harus berjalan demokratis dan konstitusional," tandas Subagyo.

Alumni Akabri 70 ini mengatakan meski jumlah kursi ABRI berubah, jati diri ABRI tidak akan berubah.(BY)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Sumber: Kompas | Tanggal: Selasa 7-6-98

Soal Penculikan

Ada Keterlibatan Institusi Formal

...mahasiswa yang ...ang tak dikenal, ...ra (27), Ann ...Mugianto (24) ...stitusi formal ...an penculikan ...ar itu, mereka ...erta lebih jauh ...karena masih ...selamatan. Me... ...a masih meng... ...elegir. ...nal. Saya be... ...galkan secara ... suatu situasi ...kup menekan. ... untuk meng... ...detilnya, mes... ...a dimintai ke... ...spom ABRI ... Polda Metro ...ahkan proses ...l ini," ungkap ...n jumpa pers ...LBH Indone... ...anto dan Aan ...8/6). Mereka ...dari Kontras ...rang Hilang ...k Kekerasan). ...ahkan, se... ...ebaskan wa... ...atus penang... ...mereka ma... ...ondisi psiko... ...ain itu, kare... ...ditangkap ti... ...r dan Aan,

apa yang saya alami kalau saya ungkapkan mungkin akan sangat mengancam diri saya, karena di situ ada salah satu institusi formal yang terlibat. Terus terang kami belum berani dan sanggup mengungkapkan secara detil," jelasnya.

Institusi formal

Nezar yang lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) menceritakan, dia dan Aan ditangkap orang tak dikenal, di rumah susun Klender, 13 Maret 1998. Dari tempat mereka berada di lantai dua, mereka dipaksa menuju mobil dengan berjalan sangat cepat, dan kedua tangan diapit para penculik.

"Kami kemudian dibawa ke satu tempat yang kami tidak bisa identifikasi karena mata kami ditutup, dan juga selama dalam proses itu kami sempat singgah di beberapa institusi formal, sampai kemudian terdampar di Polda Metro Jaya," jelasnya sambil menambahkan Mugianto kemudian ditangkap tak lama setelah mereka ditangkap, di tempat yang sama.

Di tempat tak dikenal itu, Nezar menambahkan, mereka bertiga berada dua hari dua malam, dan kemudian dibawa ke Markas Kodim Jakarta Timur, sampai kemudian dijemput beberapa petugas polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Sejak 15 Maret mereka bertiga berada di dalam ruang tahanan terisolasi Polda Metro, tanpa mendapatkan siksaan. Ketiganya baru "bebas" dengan status penangguhan penahanan, Jumat (5/6) sore yang lalu.

Aan menguraikan, meski sampai saat ini belum ada bentuk ancaman yang disampaikan secara langsung kepada mereka, namun peristiwa di tempat "X" tersebut telah mengendapkan pemikiran di kepala mereka bahwa harus membuat perhitungan lebih cermat, sebelum memutuskan untuk mengemukakan pengalaman mereka secara detail kepada umum.

"Saya merasa berada dalam keadaan hidup dan mati ketika berada di tempat itu. Ya pertama saya bingung karena saya tidak tahu siapa yang sedang merampas kemerdekaan saya sedemikian rupa. Yang tersisa di sana adalah pasrah total," ungkap Nezar.

Mugianto yang juga mahasiswa UGM menjanjikan, setelah secara psikologis merasa siap dan tampak jelas ada keinginan baik dari pemerintah untuk menjamin keselamatan, serta ada keinginan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus penculikan, mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara detil tanpa menutup-nutupi kelompok yang menculik mereka.

Tindak subversi

Munir menjelaskan, ketiganya dikenakan UU Subversi dengan pasal tentang keterlibatan dalam organisasi terlarang yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tuduhan subversi diberikan karena dari alat bukti yang ada, tidak ada bukti bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana.

"Saya kira penangguhan penahanan bagi mereka merupakan bagian dari lemahnya proses penangkapan maupun tuduhan, karena juga tidak ada saksi yang bisa menyakinkan tindak pidana apa yang mereka lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Kontras pada hari Senin, juga mendapat laporan dua nama baru orang hilang yang dilaporkan pihak keluarga, yaitu Muhammad Yusuf dan Syalomo Tabuga alias Rico. Yusuf hilang sejak 7 Mei 1997 saat kampanye PPP sedang Rico hilang sejak 11 Mei 1998, namun pada tanggal 24 Mei Rico, sempat menghubungi keluarga lewat telepon dan menyatakan, berada di tempat aman dan diberi makan enak. Rico adalah pelajar SMA yang sering terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa. (oki)

..., Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3901226; 3901227 Fax. 021 - 3901810
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Komisi & Dokumentasi:
Sanyek: | Sumber: MERDEKA | Tanggal: 20-10-'98

▲ Demo Warnai Pergantian Danpuspom ABRI

rban Penculikan Jadi Kenangan Syamsu



Keluarga korban penculikan demo di Mapuspom, kemarin.

takan, para keluarga korban yang datang dengan mengendarai taksi ini tidak dapat bertemu dengan Mayjen Syamsu maupun Djasri. Namun keluarga korban tetap bersikeras untuk menunggu Danpuspom sampai acara tersebut selesai. Bahkan Ny Tutty, ibu Yani Afri, mengecam aparat yang berjaga-jaga di sekitar Mapuspom.

Karena kondisi tidak memungkinkan untuk menerima tamu "tidak diundang" ini, akhirnya Sespri menganjurkan mereka untuk kembali besok (hari ini -Red). Akhirnya, keluarga korban mengalah dan meninggalkan Mapuspom, sekitar pukul 11.15 WIB. Sebelum meninggalkan Mapuspom, mereka menyerahkan sebuah poster korban penculikan sebagai kenang-kenangan untuk Mayjen Syamsu.

Sementara itu, seusai acara serahterima tersebut, Kasad Jenderal Subagyo HS menegaskan, para tersangka penculik sejumlah aktivis tetap akan diajukan ke Mahkamah Militer, dan bukan tidak mungkin pula menghadirkan bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto.

"Masyarakat tidak perlu khawatir dengan proses hukum yang akan diterapkan terhadap para tersangka pelaku kasus penculikan yang telah menjalani pemeriksaan di Puspom ABRI," tandas Kasad.

Ditambahkan, justru dengan adanya pergantian pejabat baru diharapkan akan muncul semangat baru untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Puspom.

"Proses itu tetap berjalan. Yang ganti kan komandannya, sedang permasalahan tersebut diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan proses itu semua diharapkan jangan ada yang gampang menvonis. Soal lambat atau cepat, itu relatif. Prinsipnya semua kasus akan diselesaikan secepatnya," tuturnya.

Pergantian Danpuspom ABRI ini tetap mengundang kecurigaan Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Karena menurut koordinator Kontras, Munir, pemindahan jabatan itu terjadi pada titik kritis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap upaya pembongkaran kasus penculikan aktivis pro-demokrasi.

"Pelimbahan jabatan tersebut terjadi ketika kasus ini mulai tidak jelas dan kemudian juga tiba-tiba diumumkan akan dilakukan pelimpahan berkas perkara yang sama sekali tidak sempurna," kata Munir di ruang kerjanya, kemarin.(BY/EKA/WR

****

N LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140

k Dokumentasi:
Sumber: MERDEKA | Tanggal: 27/10 98

arga Korban Penculikan r Lesehan di Mapuspom

erdeka
nculikan mengancam
mah keprihatinan di
BRI, kemarin. Karena
ang mengenai kasus
lami anggota keluarga

yang terdiri dari ibu
a Noval Alkatiri, Yadin
nandar dan Dedy Ham-
ipom sekitar pukul 9.30
ya diterima Wadan Pus-
n Iding Alidin, karena
jen Djasri Marin sedang
ikan di Lemnahas.
a, akhirnya keluarga kor-
ngi Munir dan tim Komi-
ilang dan Korban Keke-
) memutuskan untuk
uspom sampai datang.
rang korban penculikan,
Nezar Patria yang ikut
arga korban.
uli. Pokoknya kami ingin
anpuspom sampai beliau
a, kami akan menggelar
arkas Puspom ini," ujar Ny Tuty, ibu kandung Yani Afri yang datang bersama salah seorang cucunya.

Karena keluarga korban bersikeras, akhirnya pihak Puspom mempersilahkan mereka menunggu di ruang tamu gedung baru Mapuspom ABRI. Para keluarga yang telah mempersiapkan beberapa helai tikar itu akhirnya *lesehan* di ruang tamu Mapuspom hingga sore hari.

Mereka juga memajang poster dan foto 10 korban penculikan yang belum kembali. Lalu ada spanduk besar berwarna hijau yang bertuliskan "ABRI Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kasus Penculikan".

Setelah lebih dari tujuh jam menunggu kedatangan Danpuspom, akhirnya keluarga korban meninggalkan Mapuspom sekitar pukul 16.30 WIB. Itu setelah mereka mendapat janji dari pihak Puspom bahwa Danpuspom Mayjen Djasri Marin bersedia menerima mereka hari ini (Selasa, 27/10), sekitar pukul 19.00 WIB.

"Tapi kami akan mempersiapkan tenda. Kalau jawaban Puspom masih begitu-begitu saja, kami akan berkemah di sini," ancam Ny Tuty lagi.

Menurut Koordinator Kontras Munir, kedatangan keluarga korban ke Mapuspom ABRI untuk mempertanyakan kembali nasib 13 korban yang masih hilang. Karena sampai saat ini, Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI tidak pernah memberi penjelasan mengenai nasib ke-10 orang tersebut. Padahal oknum Kopassus yang menjadi tersangka sudah ditangkap sejak beberapa bulan lalu.

Selain itu, mereka juga ingin mempertanyakan pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang masih simpang siur. Sebab pihak Puspom pernah mengatakan bersedia mempertemukan keluarga korban dengan tersangka setelah bertemu pengacara tersangka.

"Tapi setelah itu mengatakan akan mengajukan BAP ke pengadilan tanpa ditandatangani para korban, bahkan terdengar kabar BAP akan diserahkan ke oditur 20 Oktober lalu," ujarnya.

Padahal sebelum BAP diserahkan kepada oditur, keluarga ingin bertemu dulu dengan tersangka. Maksudnya, untuk memperoleh kejelasan mengenai nasib anggota keluarga mereka yang belum jelas hingga saat ini.(EKA)

SAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
gono No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 .Fak.330140
020
si & Dokumentasi:
:: | Sumber: Tht Post | Tanggal: 15/6 90

dnappers still ng free: Kontras

bductors of still on the dunir of the mission for i Victims of

ne activists after being o a number n the streets ed reporters

identify the

abductors in nesian Legal H) office, on ne other pub- ened.

it was impos- to confirm le were the 11 s of the Army's epassus) who rained at the

y Police head- nvolvement in

now who those we also do not those in deten- kidnappers or hat those spot- ight be accom- al kidnappers. the National o be transpar- he identities of members.

ave reappeared ights groups. London-based ational have nt body should o the detained s to carry out tigation.

olice said they he suspects in nartial.

Munir also protested the military's plan to submit the dossiers of the detained Kopassus members to the court-martial next Tuesday since it has yet to locate 14 missing activists.

"It is likely they will be prosecuted only for their involvement in the abductions of the nine activists who have resurfaced," Munir said.

He has argued that no military tribunal should be held until all of the missing activists reappear because it would not be legally feasible to bring the officers before another trial for the same case should evidence be found later on.

Kontras estimates that at least 24 activists went missing beginning in April last year. One was found dead last May. The nine who resurfaced related harrowing tales of physical and mental torture.

The Armed Forces (ABRI) announced the alleged involvement of Kopassus members in the abductions of political activists in July.

Minister of Defense and Security/ABRI Commander Gen. Wiranto then discharged former Kopassus chief Lt. Gen. Prabowo Subianto — a son-in-law of former president Soeharto — and removed two senior Kopassus officers from active duty in August for their involvement in the abductions of political activists.

National Military Police chief Maj. Gen. Syamsu Djalal said on Saturday the investigators were still looking for more evidence to prosecute Prabowo.

Wiranto said in August the military did not know the whereabouts of .... activists and promised to keep searching for them.

Munir has said that ABRI, which has been battered by revelations of alleged human rights abuses, could not afford the disclosure of more past wrongdoing.

He said recently that ABRI was caught in "political difficulties" over those who are still missing.

"ABRI is still calculating the implications if it announces that there are a number of people among these 14 activists who are already dead," economist Soemitro Djojohadikusumo, on Friday in its search for more information on the abductions.

Soemitro was still in the United States on Wednesday, Munir quoted the economist's secretary as saying. (byg)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
lam 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subjek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 26/10 98

Hari Ini, Kontras Temui Komandan Puspom

akarta, Kompas

Kontras untuk Orang Hilang an Korban Tindak Kekerasan ontras) dan Ikatan Keluarga rang Hilang (Ikohi) hari Senin (26/10) ini direncanakan akan ertemu dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, layen CPM Djasri Marin.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir Said Thalib, Jumat (23/10), di Jakarta. Kontras menilai, tidak adanya penyelesaian kasus penculikan menunjukkan ABRI mengulur-ulur waktu untuk mendiskreditkan isu dan mengaburkan masalah, sehingga ABRI tidak perlu lagi bertanggung jawab atas nasib hilangnya 13 korban penculikan.

Munir menjelaskan, Kontras merasa pengusutan kasus penculikan para aktivis tampaknya sengaja dilarutkan proses kemandekan yang tidak wajar. Hal ini diperkuat dengan menyempitkan itikad baik untuk menyingkap dan mempertanggungjawabkan tindakan institusional dalam kasus penculikan. Pascaproses Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tidak terdapat satu pun tindakan yang mengarah ke kemajuan pengusutan. Dalam beberapa bulan terakhir yang terlihat justru respons negatif terhadap upaya pengusutan dan pertanggungjawaban pelaku, sementara secara politis Panglima ABRI membangun opini publik bahwa ABRI bersiat membongkar kasus penculikan secara jujur.

"Kami semakin meyakini ABRI sedang memainkan peran untuk melokalisir pertanggungjawaban dan bahkan menutup kasus dengan melupakan pertanggungjawaban beberapa orang yang belum jelas nasibnya," ujar Munir.

Pimpinan Kontras itu menguraikan, pola politik tarik ulur dilakukan dengan berulang kali mengumumkan rencana pelimpahan berkas perkara, yang semula dikatakan Juli, kemudian Agustus, kemudian Oktober. "Pengumuman yang berbeda-beda tentang pelimpahan perkara itu tampaknya justru diarahkan pada upaya membangun pendapat publik bahwa ABRI serius menyelesaikan kasus ini, serta menempatkan adanya pihak-pihak di luar ABRI yang menghambat proses pemeriksaan dan pengungkapan kasus penculikan," tandasnya.

Saksi korban

Sementara itu, dua saksi korban penculikan, Nezar Patria dan Raharjo Waluyo Jati, menekankan bahwa yang penting untuk mereka adalah pelepasan ke-13 orang yang masih hilang. Keduanya akan menolak untuk dijadikan sebagai saksi korban, sebelum ke-13 orang hilang yang diyakini masih disekap unit tertentu di bawah ABRI itu, dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Proses pengadilan bukan ukuran dan jaminan, bisa jadi malahan tidak mengungkapkan apa-apa. Hanya untuk propaganda politik ABRI. Kami belajar betul dari kasus Marsinah, Udin, dan kasus Trisakti," tandas Raharjo. (oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber JAKARTA POST | Tanggal 12-8-98

Kontras doubts ABRI resolve in probe

JAKARTA (JP): The coordinator of a leading non-governmental organization investigating the torture and abductions of political activists doubts the Armed Forces (ABRI) will truly lift the shroud covering the disappearances.

The coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Munir, yesterday questioned whether ABRI would be willing to reveal the extent of its units' involvement since it could deleteriously impact its sociopolitical role.

"This abduction case will probably remain unsettled. They will be localized," Munir told *The Jakarta Post* here yesterday.

He cited what he described as ABRI's attempt to "localize" and limit the problem in that it was not expanding the circle of people currently being investigated.

So far ABRI has laid blame on members belonging to the Army's elite Special Force (Kopassus).

Ten soldiers will be court-martialled and the recently established Officers Honor Council has identified former Kopassus chiefs Lt. Gen. Prabowo Subianto and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono as parties that had either given the instructions for the abductions



MUNIR

or were aware of their issuance.

Munir said he "would be very surprised" if military investigators later summoned former Jakarta Military Command chief Maj. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin, former Jakarta Police chief Maj. Gen. Hamami Nata and former National Police chief Gen. Dibyo Widodo. He believed they should also be held responsible since many of the abductions and detentions were in Jakarta.

"There is an attempt ... to limit the number of officers who must be punished," Munir suggested.

Sjafrie, Hamami Nata and Dibyo, all former adjutants of former president Soeharto, were recently moved from their posts in what ABRI claimed was a routine tour of duty.

Kontras said at least 21 people had been abducted in the run-up to the presidential election last March. Nine people have reappeared, but 12 others are still missing and Armed Forces Commander Gen. Wiranto has denied any knowledge of their whereabouts.

Munir insisted no military tribunal should be held until all of the missing activists reappeared, as it would not be legally feasible to bring the officers to another trial for the same case should further evidence be found later on.

The chief of the honor council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, said Monday the abductions took place because of Prabowo's own interpretation of an order to "monitor" the activists' moves.

Wiranto, however, said yesterday Prabowo had been given an instruction by a superior to take security measures to safeguard the presidential election in March.

There already is speculation that Prabowo, former president Soeharto's son-in-law, will likely be made the most senior officer blamed.

Kontras led the way in the

Diponegoro No.74 Tel:3145183,3904226,3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: M. I | Tanggal: 20-10-98

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
pendekatan militer harus dihilangkan

Kontras Dinilai Menghambat Penyidikan Kasus Penculikan

BAP Hari ini Diserahkan ke Mahmil

JAKARTA (Media): Mantan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu menilai Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir telah menghambat jalannya penyidikan kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

"Jika ingin membantu, seharusnya Munir segera membawa saksi korban yang lain untuk dapat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Syamsu kepada wartawan seusai menyerahkan jabatannya kepada Mayjen TNI Djasri di Markas Puspom Jakarta, kemarin. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Subagyo HS.

"Munir sebagai petugas jasa hukum harus tahu. Kalau dia mau membantu kita, dia harus segera membawa saksi korban," kata Syamsu yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pada kesempatan itu Syamsu menegaskan sembilan saksi korban penculikan telah menandatangani BAP untuk diserahkan ke Oditur Militer yang menurut rencana akan dilakukan hari Selasa ini.

Syamsu membuat pernyataan itu untuk menyangkal pernyataan Munir bahwa hanya Pius Lustrilanang yang menandatangani BAP yang akan diajukan ke Mahkamah Militer.

Ditanya kapan para saksi korban menandatangani BAP, ia menyatakan penandatanganan tidak harus secara khusus menghadirkan bersangkutan ke Puspom ABRI, tapi dapat diperoleh pada kesempatan lain.

"Seperti Andi Arif. Sewaktu dimintai keterangan di Polda, dia sudah sekalian menandatangani kesediaannya menjadi saksi," kata Syamsu sambil menambahkan ke-11 tersangka tersebut telah berada di bawah pengamanan Puspom ABRI.

Sementara itu, tentang hasil *visum et repertum* dari para korban, yang menurut Munir seharusnya melengkapi BAP, kata Syamsu D, terpaksa tidak dilampirkan.

"Visum tidak dilampirkan lagi karena tidak ada lagi bekas-bekasnya, jadi bagaimana kita akan membuat visumnya lagi," tutur Syamsu.

Sementara itu Danpuspom ABRI yang baru Mayjen TNI Djasri mengatakan ia akan mempelajari dulu BAP mengenai kasus penculikan para aktivis sebelum diserahkan ke Oditur Militer. "Akan saya pelajari dulu seluruhnya," katanya.

Mengenai nasib 14 korban penculikan yang belum ditemukan, mantan Wakil Danpuspom itu mengatakan belum bisa menastikan apakah mereka dalam keadaan selamat atau tidak.

"Mengenai nasib 14 orang, saya tidak mau gegabah melihat itu. Kita lihat dulu, apakah selamat atau tidak belum bisa dipastikan," katanya. Sedangkan mengenai beberapa pelaku yang dikaborkan masih berkeliaran di luar, perwira yang pernah menjabat sebagai Danpomdam Jaya itu mengatakan, ada kewenangan penangguhan penahanan yang memungkinkan mereka tidak ditahan.

Pada saat yang sama, beberapa keluarga korban penculikan yang belum ditemukan melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Puspom dengan membawa poster-poster bergambar 12 orang korban yang belum ditemukan.

"Kami tidak bermaksud menemui Danpuspom, tetapi kalau beliau bersedia, ya, kami temui," kata Said Alkatiri, orang tua Noval Alkatiri, salah satu orang yang masih dinyatakan hilang. Seperti diketahui, sampai sekarang masih terdapat sejumlah korban penculikan yang belum kembali. (Wdh/D-12)

****

...orhadap berbagai bentuk tin- ruang yang aman bagi mereka untuk lepas an preman. (rm)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

BISNIS — MINGGU — 16-8-98

Pendekatan militer harus dihilangkan'

...untuk orang hilang dan korban ...Indonesia (Kontras) menggam... ...pelanggaran Hak Azasi Manusia ...kekerasan di Aceh paling kom... ...aksi serupa di daerah lain. ...itu diwujudkan dalam ben... ...penganiayaan, perkosaan, ...perampasan barang, dan pembunuh...

...Munir, koordinator Kontras, ke... ...berlangsung sepanjang 1989-, ...merupakan gambaran yang tidak ...dalam kehidupan masyarakat ...paling utara di Indonesia itu. ...pencabutan status Daerah ...(DOM) di Aceh merupakan ...untuk memperbaiki kondi... ...di wilayah itu meski tidak ...memberikan suasana aman.

...terjadi perubahan fundamental ...pendekatan yang lebih riil terha... ...rakyat yang terdepresi oleh ...kekerasan aparat militer selama ...tahun."

...prakteknya, lanjutnya, status ...semata-mata berfungsi seba... ...keamanan menghadapi Gerak... ...Merdeka atau yang disebut GPK. ...menjadi institusi yang membe... ...praktek ketimpangan ekonomi di

...nya, menurut dia, DOM memulus... ...menjamin keamanan dalam me... ...eksploitasi besar-besaran terha... ...daya alam setempat tanpa ...kesempatan bagi rakyat un... ...nati kekayaan alamnya.

...DOM juga digunakan untuk mem... ...perusahaan-perusahaan, peram... ...milik rakyat, dan penjarahan

...menindaklanjuti pencabutan ...Munir, Aceh harus memperoleh ...baru yang lebih mengedepan... ...langkah persuasif dan kesejah... ...membangun kembali kondisi ma... ...Aceh dari lautan represi dan ke...

...represi atas rakyat Aceh telah me... ...penting menghancurkan ...budaya resistensi masyarakat ...nilai-nilai hubungan kekeluarga... ...suan, anak-anak, dst.

...tahun operasi DOM telah me... ...ktur kekeluargaan, hubungan ...dan anak, kemudian posisi pe...

...lanjut dia, pihaknya meno... ...perlunya pembentukan Kodam ...sebutan DOM. "Pembentukan ...tetap menempatkan Aceh de... ...katan militeristik. Segala ben... ...tuan jenis ini harus ditiadakan."

...rlangsung

...an di lapangan dan pengadu... ...kat dicatat pada Januari-Juni ...penculikan masih berlang...

...beberapa hari di sana, Kontras ...tidak kurang 60 orang dila... ...di tiga kabupaten. Semen... ...kerasan terhadap perempuan ...osaan, penyiksaan masih ber...

...Munir, sehubungan dengan te... ...ut, Kontras menyatakan, perta... ...tah dan ABRI harus bertang... ...terhadap berbagai bentuk tin...



Munir

dakan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang penempatan Aceh sebagai DOM.

Kedua, pencabutan DOM harus diikuti dengan penarikan pasukan serta tidak lagi digunakan pendekatan militeristik untuk memecahkan problem Aceh, termasuk juga menutup institusi Korem di Lhokseumawe.

"Jadi kalau orang punya usul harus ada Kodam, kalau kita untuk memecahkan masalah Aceh, Korem-nya pun harus dihilangkan, khususnya Lhokseumawe dan menggantikannya dengan membentuk lembaga-lembaga rehabilitasi para korban kekerasan selama ini."

Menurut Munir, pendekatannya harus berubah dari militeristik ke pendekatan yang lebih kesejahteraan.

Saat ini, jelasnya, penting untuk membuat lembaga yang menjamin proses rehabilitasi kondisi masyarakat, baik anak-anak yang lahir selama proses 9 tahun [selama DOM], baik hasil pemerkosaan maupun perkawinan di bawah tangan yang cukup banyak. Pemerintah juga harus merehabilitasi korban kekerasan, khususnya pemerkosaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, pemerintah dalam hal ini ABRI harus segera melepaskan para korban penculikan yang masih hidup karena dari 60 orang yang diculik pada Januari - Juni tahun ini masih diyakini dalam keadaan hidup. Pemerintah juga perlu mengumumkan nama-nama dan kendaan korban akibat tindakan kekerasan militer.

Munir menilai dengan hasil temuan tersebut, Kontras akan melakukan pertemuan dengan Tim Pencari Fakta ABRI, untuk merekomendasikan beberapa hal tersebut, termasuk usulan untuk segera menutup Korem di Lhokseumawe. "Korem di Aceh tidak perlu dua, cukup satu, bahkan kalau perlu *nggak* ada".

Sangat ketakutan

Pendekatan kesejahteraan itu harus dikedepankan dan hal ini menjadi konsep jajaran Kontras bahwa suasana Aceh harus dipulihkan karena beberapa hari di provinsi tersebut, Kontras menyaksikan masyarakat dalam kondisi yang sangat ketakutan.

Pencabutan DOM, lanjut dia, belum diyakini oleh masyarakat bisa menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi.

Bulan Maret, beberapa janda Aceh datang ke Kontras namun dalam ketakutan. "Situasi tetap tidak berubah. Mereka tetap orang yang ketakutan menyampaikan informasi."

Menurut Munir, masyarakat merasa ancaman itu belum benar-benar hilang karena posisi DOM tidak saja represi anggota Kopassus yang resmi didatangkan namun sudah merembet ke Koramil. "Masing-masing memiliki [oknum yang] berperilaku bajingan dan institusi itu masih ada semua".

Bila pasukan ditarik dan membiarkan institusi [Koramil] itu tetap berada di Aceh, ungkap dia, masih butuh waktu untuk meyakinkan masyarakat bahwa militer tidak melakukan hal itu lagi. Jadi tidak ada situasi yang berubah secara total. "Yang penting dicatat masyarakat, angka tingkat tekanan di Aceh justru berkurang sejak Soeharto jatuh."

Mulai 20 Mei, menurut pengakuan warga, mereka tidak lagi didatangi tiap hari meski masih ada orang yang hilang. Namun, ada kemungkinan orang hilang itu karena takut atau diculik.

Masalahnya, laporan masyarakat menyebutkan banyak anak muda terutama anak kecil lari dari wilayah genting tersebut antara 1989-1992. Mereka terputus hubungan dengan keluarga karena ketakutan melihat represi terhadap keluarganya. Diduga anak-anak tersebut menjadi anak jalanan di Medan. Akibatnya, sambung dia, akan muncul anak-anak bermasalah dalam proses rehabilitasi kondisi terhadap masyarakat Aceh.

Munir menilai permintaan maaf Panglima ABRI itu tidak jelas. "Permintaan maaf karena tindakan apa? Dan belum juga ditindaklanjuti bentuk-bentuk korban dan pelepasannya karena ini bagian yang tidak terpisah."

Dia menuturkan institusi pemerintah harus menciptakan suasana aman dengan berbagai bentuk pendekatan yang lebih pada pendekatan antropologis dan konsultasi. Lembaga-lembaga kesehatan sampai di tingkat Puskesmas seharusnya juga menjadi tempat melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat. Dia mencontohkan para korban bisa melaporkan masalahnya ke poliklinik, tidak perlu kepada polisi.

Munir juga menilai institusi keagamaan belum mengambil peran signifikan di Aceh untuk membangun suasana aman dalam masyarakat.

"Saya kira ini menjadi penting sehingga ke depan, yang harus melakukan rehabilitasi bukan insitusi militer."

Munir mengakui penarikan militer dari Aceh memang suatu langkah penting tapi harus diikuti langkah lain yang bukan dilakukan institusi yang bersifat militeristik.

Setelah melihat pola kekerasan di Aceh hingga pertengahan tahun ini, dia menyimpulkan polanya sama dengan penculikan para aktivits di Jakarta. Namun, jelasnya, di Aceh sudah berlangsung bertahun-tahun.

Dengan pola operasi yang sama, Kontras menilai Aceh merupakan tempat berlatih mereka untuk melakukan penculikan di Jakarta. Pola penculikan dalam beberapa akhir tahun, penculik tidak lagi dalam pakaian seragam, namun pakaian preman. (rn)

SAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
gung No.74 Tel:31455183,3904226,3942247 ,Fak.330140
0320
si & Dokumentasi:
k: | Sumber: JAKARTA POST | Tanggal: 26 - 10 - 93

Djasri: Abductors' dossiers to be sent to tribunal

JAKARTA (JP): Dossiers of 11 members of the Army Special Forces (Kopassus) suspected of abducting prodemocracy activists will immediately be submitted to the tribunal, says Maj. Gen. Djasri Marin, the new chief of the Armed Forces Military Police.

"*Insya Allah* (God willing), this week the dossiers will be submitted to the tribunal," Djasri told reporters after he was sworn in as chief of the Military Police, replacing Maj. Gen. Syamsu Djalal here on Monday.

He promised to continue handling cases left by his predecessor, including the abduction of prodemocracy activists.

Marzuki Darusman, deputy chairman of the National Commission on Human Rights, said earlier that the trial of 11 Kopassus members suspected of kidnapping the activists would open on Nov. 3.

Also on Monday, Syamsu denied the allegation of the independent Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), that the 11 were still on the loose. Syamsu said they were all in the custody of the Military Police.

"If he said the abductors were still at large, then Munir (the coordinator of Kontras) might be one of the abductors. How could the commission know if the suspects were still at large since the (activists) and their abductors don't know each other," he said.

Maj. Gen. Syahrir MS, the chief of Kopassus, confirmed the suspects had been handed over to the Military Police.

"My task is to hand them over and I have done it. Please, ask the new Military Police chief whether the suspects are or are not in custody," he said.

Kontras said recently that some of the activists have seen their abductors on the streets and in other public places.

However, Djasri himself was quoted by *Antara* as admitting there was an "arrest cancellation authority" that enabled the suspects to evade detention.

Meanwhile, Army chief Gen. Subagyo Hadisiswoyo, who presided over the swearing in ceremony on Monday, confirmed the possibility that Lt. Gen. (ret) Prabowo Subianto, former Kopassus chief, could be brought to the High Military Court for his involvement in the abduction case.

"I'm of the same opinion as the Armed Forces chief that there is the possibility of Prabowo facing military court. But, I have asked the Military Police not to sue him hastily before collecting accurate and adequate evidence so that the trial will not be disappointing," he said.

The Military Honor Council investigating the case said Prabowo had admitted to ordering the suspects to abduct nine activists.

Syahrir also said Monday that the military would continue its search for 14 other activists still missing.

Nine activists who have resurfaced and been reunited with their families are Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa, Rahardjo Waluyo Djati, Faisol Riza, Nezar Patria, Mugianto, Aan Rusdianto, Andi Arief and Haryanto Taslam.

Some of the missing persons currently being sought by Kontras are Deddy Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Yani Afri, Sonny, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hamball, M. Yusuf, Y. Muhidin, Triyono and Wiji Thukul. Leonardus Gilang Nugroho Iskandar, or Moses, was already found dead in Magetan, East Java.

Meanwhile, *Antara* reported Syamsu as saying that all the nine resurfaced activists have signed the dossiers on their suspected abductors. With this statement, he refuted Munir's remark that only Pius Lustrilanang had signed the documents.

When pressed for details, Syamsu only said the activists did not come to the military police to sign the documents. Instead, the signing could have been done on other occasions, he said.

"For instance, Andi Arief (one of the kidnapped activists), also signed his readiness to be a witness when he was asked to give his testimony to the Jakarta Police," he said.

Regarding the victims' visum, which according to Munir should complete the dossiers, Syamsu said they were not attached to the dossiers.

"We could not attach these as there is no more trace (of torture on the victims which could serve as evidence)," he said.

Meanwhile, in his address at the ceremony, Subagyo asked the Military Police to be wise in handling the mounting pressure on crimes involving servicemen.

"I warn all Military Police personnel again to not easily be influenced by the numerous unproportional demands that could encourage them to be emotional in handling cases," he said.

As the ceremony proceeded on Monday, the families of the missing people staged a rally outside the Military Police headquarters, waving pictures of the victims.

"We don't intend to meet the (military police) chief, but if he is ready, we will meet him," said Said Alkatiri, father of Noval Alkatiri. (rms)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi

Subyek	Sumber JAKARTA POST	Tanggal 12-8-98

search for the missing activists long before the government even acknowledged that the abductions occurred.

Their work drew public attention and pressure to unveil the abductions which eventually led to the formation of a military team to investigate the cases after the resignation of former president Soeharto in May.

Yesterday, Munir pointed out that it would be difficult for the Officers Honor Council to reveal more than the possible involvement of Kopassus officers since its primary purpose was to question the involvement of Prabowo, Muchdi and former chief of Kopassus intelligence operations Col. Chairawan.

To truly investigate the involvement of other officers in other units, the council would have to make a recommendation to Armed Forces Chief Gen. Wiranto to set up another council. **(prb)**

Abductions — Page 2
Editorial — Page 4

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Topik: | Sumber: Bisnis Indonesia | Tanggal: 19-11-98

Kontras: Militer terlibat provokasi

JAKARTA (Bisnis): Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan bukti keterlibatan militer memprovokasi gerakan mahasiswa dan menyeret gerakan tersebut ke arah penggunaan kekerasan.

"Keterlibatan itu diakui oleh anggota ABRI yang mengatakan telah melakukan satu misi khusus berkaitan dengan aksi mahasiswa," kata Munir, koordinator Kontras, kemarin seraya menambahkan bahwa aksi penembakan merupakan operasi militer sehingga kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada oknum.

Dia menjelaskan pelaku pelempar bom molotov di depan kampus Atmajaya bukan mahasiswa, tapi—seperti diakui anggota ABRI yang terlibat—dari kalangan militer.

Provokator, katanya, juga direkrut dari kalangan mahasiswa dan pengangguran. Orang-orang ini, lanjutnya, dilengkapi dengan atribut seperti jaket dan kartu mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Dari kalangan kampus, kata Munir, direkrut pula mahasiswa dari masing-masing universitas untuk mengawasi seluruh kegiatan temannya.

Menurut dia, keterlibatan para penyusup dimaksudkan untuk mendorong agar aksi damai mengarah pada penggunaan kekerasan seperti pelemparan batu, pelemparan bom molotov ke arah pasukan ABRI, serta teriakan provokatif agar aparat keamanan maupun mahasiswa menggunakan kekerasan.

"Seluruh skenario penyusupan itu dapat diduga dimaksudkan untuk memancing gerakan mahasiswa agar terjebak dalam konflik fisik dengan aparat. Ini dijadikan dasar pembenar dilakukannya tindakan represif oleh militer," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Asmara Nababan usai menerima pengaduan Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) mengingatkan agar masyarakat jangan terkecoh terhadap upaya pengalihan perhatian dari Tragedi Semanggi ke tuduhan makar terhadap beberapa tokoh.

"Harus ada pernyataan yang cepat dan tegas dari pemerintah mengenai penanggungjawab kerusuhan tersebut," kata Nababan.

Dalam kesempatan itu Munir yang didampingi Mulyana W. Kusumah dan M.M. Billah menunjukkan bukti yang menguatkan dugaan penggunaan peluru tajam oleh aparat. Selongsong peluru kosong, karet, dan tajam tersebut ditemukan di sekitar kampus Unika Atmajaya dan Univ. Dr. Mustopo Beragama.

Ditemukan pula tabung gas air mata yang tidak sempat meledak dan peluru yang ditembakkan dari pistol tipe Colt 38 yang biasa dipakai polisi.

"Penggunaan peluru tajam oleh militer dikuatkan pula oleh Tim Forensik RSCM yang mengotopsi tubuh korban tewas dalam Tragedi Semanggi," tambahnya. (rah)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: Kompas | Tanggal: 10-11-95

Selebaran Korban Penculikan Aktivis Beredar di Bengkulu

...ktivis
...yang berisi 16 foto
...culikan yang belum
...ahnya bertuliskan
...Mereka" banyak
...kawasan pusat per-
...an perkantoran di

...rita Antara mela-
...tinggu (15/11), sele-
...ng dimaksudkan untuk
...perlunya hak
...(HAM) ditegak-
...pada malam
...beberapa orang yang
...ebih di tiang-tiang
...pertukan sejak tiga

...selebaran tersebut ti-
...adanya bekas parut
...yang menandakan

sudah ada izin penempelan. Saya rasa penempelan selebaran itu bersifat liar," kata Sumitro, pemilik toko di kawasan Suprapto, Minggu.

Adanya selebaran itu cukup menyita perhatian beberapa orang yang lewat dengan mengamati setiap foto yang tertempel dan membaca beberapa kata pada selebaran tersebut. Beberapa selebaran bahkan terlihat dirobek. Ada yang robek sebagian, tetapi ada juga yang tinggal lem serta sisa-sisa kertasnya.

Sementara itu, Kepala Direktorat Sospol Tingkat I Bengkulu, Suwardiyanto, ketika dihubungi, Minggu, mengaku tidak tahu siapa orang yang memasangnya. Ia mengatakan, setiap bentuk informasi yang bermuatan politis untuk penempelannya harus mendapatkan izin dari instansi terkait. "Kalau masalah perizinannya bukan lagi ke Kepala Direktorat Sospol Tingkat I," katanya.

Suwardiyanto juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan banyaknya selebaran yang beredar, apalagi yang bertujuan untuk mengadu domba. Ia mengatakan, dalam era komunikasi yang semakin canggih ini, sulit dicegah masuknya berbagai informasi yang belum tentu sepenuhnya benar. "Kalau mendapat selebaran jangan ditelan mentah-mentah isinya, carilah informasi ke sumber yang berkompeten," katanya.

Di Jakarta, selebaran bahkan poster soal foto-foto korban penculikan juga tertempel di beberapa tempat, salah satunya di YLBHI. Mereka yang tergambar dalam poster itu adalah para aktivis korban penculikan yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Sementara proses hukum terhadap tersangka penculikan juga belum diketahui kelanjutannya. Komandan Pusat Polisi Militer (kala itu) Mayjen Sjamsu Djalaludin mengatakan akan melimpahkan berkas acara pemeriksaan kasus penculikan ke Oditurat Militer tanggal 21 Oktober, namun hingga kini belum juga direalisir. (belm)

YASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
nasi dan dokumentasi:
Sumber: Bisnis
Tanggal: 3/3 92

Pangab tak tahu korban penculikan

JAKARTA (Bisnis): Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan tidak mengetahui keberadaan dan kondisi 14 korban penculikan dan masih menunggu hasil persidangan terhadap tersangka.

Hal tersebut diungkapkan Munir, ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setelah diterima Menhankam/Pangab sekitar 90 menit di kantor Jl. Medan Merdeka Barat kemarin sore.

Menurut Munir, pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Badan Intelejen ABRI Mayjen Zakky Makarim, Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Ma'arif, Staf Ahli Menhankam Mayjen Farid Zainudin, anggota Kontras, korban penculikan Waluyo Djati dan Faisal Riza, serta keluarga korban Dedi Hamdun dan Yani Afri yang belum kembali.

Dalam kesempatan itu Kontras menuntut Pangab untuk meminta maaf kepada masyarakat karena terbukti ada institusi ABRI yang terlibat dalam kasus penculikan. Kontras juga menuntut adanya ganti rugi untuk korban, ujarnya.

Wiranto, kata Munir, mengatakan akan menunggu proses peradilan dan akan menindaklanjutinya setelah itu. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan asas praduga tak bersalah, katanya.

Anggota Kontras M. Billah menilai kesulitan Mabes ABRI untuk mendeteksi keberadaan korban disebabkan tingginya kekuatan tawar para penculik. "Ada tarik menarik di tubuh ABRI sehingga prosesnya berjalan lamban," kata Billah.

Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Pangab lebih banyak mengemukakan hal-hal yang bersifat normatif seperti keberadaan ABRI bukan untuk menekan masyarakat tapi melindungi.

Tanpa kekerasan

Pangab juga menegaskan bahwa ABRI punya komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Mengenai kemungkinan mengadili tersangka melalui Mahkamah Militer Luar Biasa Pangab mengatakan bahwa pengadilan seperti itu baru bisa digelar bila terjadi tindakan yang melanggar ideologi negara.

Pangab, menurut Billah, tidak menjelaskan apakah menculik aktivis yang prodemokrasi oleh anggota ABRI bukan merupakan salah satu bentuk pelanggaran ideologi.

Menanggapi pertemuan dengan Pangab tersebut, Ny. Tuti, ibunda Yani Afri mengatakan jawaban Pangab mengenai keberadaan korban sungguh tidak masuk akal. (04/s8/ep/et)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Pusat Dokumentasi
| Sumber: Republika | Tanggal: 25-4-97 |

Grup IV Kopassus: Mereka tak Mirip Tentara

Kopassus atau dikenal dengan Korps Baret Merah merupakan satuan elite di lingkungan TNI-AD. Untuk menjadi anggota korps ini, seorang prajurit harus menjalani ujian yang cukup ketat oleh tim kesehatan dari Kesehatan TNI-AD, Dinas Psikologi TNI-AD, dan Dinas Jasmani dan Olahraga TNI- AD. Mereka juga harus memiliki keahlian khusus seperti penerjun payung militer, penyelam, penembak jitu, atau pun sandi.

Meski dalam pembinaannya di bawah Kasad, Kopassus secara komando dikendalikan langsung oleh Panglima ABRI. Garis komando langsung dari Pangab kepada Kopassus ini mendapat penekanan kembali saat Jenderal TNI Sudi[illegible]yo Hadisiswoyo memimpin upacara [illegible]ah terima Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Muchdi PR kepada Mayjen Syahrir MS, akhir Mei lalu.

Kopassus semula terdiri atas tiga grup. Dua grup merupakan pasukan parakomando, yaitu Grup I yang bermarkas di Serang, Jabar, dan Grup II bermarkas di Surakarta. Satu grup lainnya adalah pendidikan yang bermarkas di Batujajar, Bandung. Di bawah grup-grup ini terdapat Detasemen 81 dengan jumlah pasukan lebih kecil.

Brigjen Prabowo — yang saat itu menjadi Dan Kopassus — kemudian mengajukan usulan pemekaran Kopassus menjadi lima grup. Pada 25 Juni 1996 KSAD Jenderal TNI R Hartono meresmikan pemekaran ini. Prabowo tetap memimpin dengan jabatan Komandan Jenderal (Danjen) dengan pangkat Mayjen.

Dua grup tambahan adalah Grup IV Sandhi Yudha dan Grup V Anti-Teror. Keduanya bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Letkol Inf Chairawan dan Kolonel Inf Zamroni diperanya menjadi Komandan Grup IV dan V tersebut. Sedangkan Komandan Grup I, II, dan II berturut-turut dijabat Kol Inf Syaiful Rizal, Kolonel Slamet Sidabutar, dan Kol Inf Harry Pisand.

Grup Sandhi Yudha membawahi tiga batalyon terdiri atas prajurit pilihan dari tiga grup pertama yang dilatih kembali menjadi prajurit berkualifikasi intelejen tempur. Tugas pokok grup ini adalah melaksanakan apa yang disebut operasi penciptaan kondisi. Berdasarkan hasil operasi grup ini, akan

[illegible] Jakarta 10320, Telp. 021-[illegible]; [illegible]
email: ylbhi@[illegible].id

PIMPINAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

| Sumber: Republika | Tanggal: 23-7-96 |

Jadi, waktu diadili statusnya bukan jenderal lagi. Pengadilan militer tidak pandang pangkat. Jangan dikira Mahmil itu cuma ngadili kopral saja. Jenderal pun bisa diajukan ke Mahmil. Di negara mana pun begitu.

Jadi tidak benar, untuk mengajukan seorang jenderal ke Mahmil harus menunggu keputusan DKM dulu?

Tidak benar. Pengadilan militer bisa memutuskan pemecatan dan pencabutan tanda kehormatan. Jenderal yang semula berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan bisa tidak jadi makamkan di situ asal ada putusan pengadilan. Juga bisa dipenjara. Bahkan kalau Mahmil menjatuhkan dihukum mati pun boleh. Sedang DKM, di luar pengadilan juga bisa mengajukan usul kepada presiden untuk memecat seorang jenderal.

Apakah sudah saatnya pembentukan DKM untuk kasus penculikan para aktivis pro demokrasi itu?

Oh, itu terserah pada pertimbangan Pangab dan Kasad. Kalau mereka punya data-data untuk melakukan tuduhan kepada yang bersangkutan, itu bisa dia membela diri di DKM. Tapi tidak mempengaruhi Mahmil. Dibuktikan siapa yang memerintahkan penculikan itu. Kalau terbukti ada perintah atasan, maka pengadilan lah yang akan memprosesnya.

Bagaimana dengan tuntutan masyarakat agar langsung saja ke Mahmil?

Memang, ada pendapat yang seolah-olah DKM itu mau menutupi kasus itu.Itu tidak benar.

Apakah ketika Prabowo diberhentikan dari jabatan Pangkostrad merupakan penerapan tindakan disiplin?

Kemungkinan. Itu merupakan suatu tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kesalahan perintah lebih lanjut. Dengan begitu, Prabowo sudah tidak pegang komando.

Waktu itu belum terbukti. Yang teridentifikasi *kok* perintah Prabowo tidak karu-karuan. Itu hak Pangab dan Kasad untuk mencopot jabatan anak buahnya dan menyuruh minggir.(*)

Jakarta 10320. Telp. 021 - 31[illegible]; [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
nformasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber MINGGU PAGI | Tanggal 13/8/98

KP zeros in on who gave Prabowo instructions

(JP): The Officers ncil (DKP) has the list of who hen Army Special passus) chief Lt. owo Subianto to ative security mea- guard last March's l election, which uctions and torture activists.

chairman Gen. Hadisiswoyo con- sterday the instruc- ot come from either rmed Forces (ABRI) ommander Soeharto BRI chief. He did not he latter.

n, who is also the f of staff, briefed the er a monthly meeting al military comman- enior Army officers at s headquarters.

sked whether it was the instruction had d by an Army chief of agyo asked for the wait until after the council completes its investigation, slated for today.

The abductions occurred between May 1997 and May of this year. Gen. (ret) Feisal Tanjung was ABRI chief from 1993 to 1998. Over the period when the abductions of more than 20 political activists took place, the post of Army chief of staff was held successively by Gen. R. Hartono (to June 1997) and Gen. Wiranto.

On Tuesday, Armed Forces chief Gen. Wiranto indicated the instruction could have come from any of three ABRI officers who ranked higher than Prabowo.

Prabowo's superiors over that period were Soeharto, Feisal, R. Hartono and Wiranto.

Subagyo supported Wiranto's earlier statement that the council could eventually question the military officer who gave the order to Prabowo.

"If the evidence shows that the higher ranked officer was wrong or was connected with the kidnapping, he can be questioned," he said.

He also revealed yesterday that Prabowo had admitted that he – misunderstood the orders from his superior.

"Prabowo has admitted there was a mistake and said he would take responsibility for his misinterpretation of the superior's order," he said.

Subagyo said he had checked with other witnesses, including an officer with the rank of a captain who had written down the order, and officials of the ABRI's fact-finding team, who had visited the presumed sites where the activists had been kept and tortured.

Subagyo said the council yesterday requestioned Prabowo and Muchdi simultaneously. The session started at 9 a.m. and ended just a few minutes before 12 p.m.

Subagyo said Monday the abductions of political activists were not ordered by ABRI's top brass, but were carried out because of Prabowo's misinterpretation of his superior's instructions.

He also mentioned the instruction was given under what is known in the military term as "under operational control" (BKO), in which a military unit, in this case Kopassus, was seconded unit for particular operations.

Under this scheme, the first unit was controlled by the commander of the second unit.

He also said Prabowo's instructions were only to transfer troops to another military unit and monitor the moves of political activists, especially in Jakarta.

Prabowo was replaced by Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono a few days after the 11-day General Session of the People's Consultative Assembly (MPR), which reelected Soeharto for a seventh consecutive term. He was promoted to lead the Army's Strategic Reserve Command (Kostrad). (imn)

T SUG
L. RSYC CSKVNG
KBH JL. BELITUNG D-41
CILINCING
JAKUT
TIPER CSKVNG KO
RT 005 RW 08
CSKVNG BARAT
JAKUT

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Jl.Diponegoro No.74 Tel:3145183,3901226,391 1247 .Fak.330140
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: JAKARTA POST | Tanggal: 28-8-97

Prabowo discharged from ABRI

JAKARTA (JP): The Armed Forces (ABRI) honorably discharged Lt. Gen. Prabowo Subianto yesterday and removed two senior Army Special Force (Kopassus) officers from active duty as punishment for their role in the abductions and torture of political activists.

The Armed Forces also announced Prabowo, a son-in-law of former president Soeharto, was entitled to his pension, but said he could face a military tribunal in the future if more damning evidence of his involvement in the kidnappings is found.

The decision, issued on the recommendation of the Officers Honor Council probing the abductions, was announced by Minister of Defense and Security/ABRI Commander Gen. Wiranto before dozens of local and foreign journalists at the Armed Forces' Merdeka Barat headquarters in Central Jakarta.

"My decision regarding Lt. Gen. Prabowo is to end his active service with the Armed Forces," Wiranto said.

"Prabowo is not included in any ABRI structures anymore. He is a civilian now."

Prabowo, a 1974 graduate of the Armed Forces Academy, was considered one of the military's rising stars. He was the first among his classmates to obtain the rank of a three-star general just 24 years into his career.

Many charged his ascent could not be divorced from his links to Soeharto. Prabowo, 47, is married to Soeharto's second daughter, Siti Hediati.

Wiranto said ABRI had also decided to release the other two officers investigated along with Prabowo — former Kopassus commandant-general Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono and former Kopassus chief of intelligence operations Col. Chairawan — from "all structural duties".

"Both Muchdi and Chairawan will remain in the Armed Forces, but will not get any rank promotions nor be given any positions until they reach their mandatory age of retirement."

Wiranto did not discount the possibility of bringing the three before a military tribunal.

"If the prosecution for the other 10 Kopassus officers later finds out that Prabowo, Muchdi and Chairawan were clearly involved in the abductions and torture of the activists, they could also be charged with crimes before the court-martial," he said.

"We have to respect the principle of presumption of innocence. Everything will be uncovered in court, including the officers who gave orders to the 10 Kopassus officers."

He did not mention when the tribunal for the 10 officers would start, but indicated that the dossiers were being completed by the military's fact-finding team. It is led by the National Military Police Corps Chief Maj. Gen. Syamsu Djalal.

Wiranto dismissed speculation the Armed Forces headquarters was under pressure to make the decision.

"One thing for sure is that the decision was made in the interest of ABRI; and the nation and the country that we all love very much."

Wiranto said the three officers' meritorious service in the past was also part of the Armed Forces' consideration.

Chief of the seven-member Honor Council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, supported Wiranto's decision and said it was in accordance with the council's recommendation.

"Should you have any evidence (disproving the decision), you could tell the ABRI's fact-finding team about it," he told reporters.

But the statement contradicted his Aug. 14 remarks that the council would recommend Prabowo be court-martialled. There was no official explanation on the inconsistency.

Subagyo, who is also the Army's chief of staff, dismissed speculation that ABRI had no evidence to court-martial Prabowo.

"Let's just wait for the opening of the court-martial (of the officers)," he said.

A member of the Honor Council, Lt. Gen. Agum Gumelar, said the council did not recommend criminal sanctions against the three officers because they would have to include considerations based on technical aspects of the abductions.

"We did not talk about technical aspects of the abductions as they were completely the Armed Forces' internal affairs," Agum told reporters after the media conference.

Discussing the 12 activists reportedly still missing, Agum said their whereabouts remained unknown.

"Prabowo only admitted to the kidnappings of the nine activists, who had returned home."

He denied reports Prabowo could not be tried before a military tribunal under his new civilian status.

"No, Prabowo could still be court-martialled," he said. (imn)

Observers — Page 2
Editorial — Page 4
Downfall — Page 5

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Info & Dokumentasi
No: | Sumber: JAKARTA POST | Tanggal: Sabtu 8-8-98

Prabowo, Muchdi 'responsible for kidnappings'

JAKARTA (JP): The chief of the Officers Honor Council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, revealed yesterday that Lt. Gen. Prabowo Subianto and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono either gave the instructions for abductions of political activists in the past year or were aware of their issuance.

Subagyo, who is also Army Chief of Staff, said testimony from other officers before the council showed the two former chiefs of the Army's Special Force (Kopassus) were responsible for the abductions.

"The testimony of the other officers showed Prabowo gave the instructions. He, therefore, must be held responsible," he said.

When pressed by reporters whether higher ranked Armed Forces (ABRI) officers had also been aware of the kidnappings, Subagyo said: "Just wait until Prabowo testifies Monday."

He explained several categories of mistakes an official might have committed in the abductions. "(The kidnappings) could be a procedural mistake, a mistake on the part of the leader (of an unit) or (they could have been committed because of) the character of the highest military official who gave the instruction.

"In this case, Chairawan and the other officers, who are lower in rank, were only carrying out the instructions of their commanders."

Col. Chairawan was a former chief of Kopassus' intelligence operations. He is the third highest ranked Kopassus officer, after Prabowo and Muchdi, under the investigation of the ABRI-initiated honor council. Ten other Kopassus soldiers will soon be court-martialled for the abductions.

On Muchdi's role in the kidnappings, Subagyo said the officer must have fully understood his authority and duties as a Kopassus commandant-general.

"He was the Kopassus commander. Surely he knew what he must or must not do."

The council started the investigation into the kidnappings Tuesday, a day after its establishment was announced by Armed Forces chief Gen. Wiranto. Chairawan and Muchdi had both been questioned, while Prabowo has so far appeared before the council as a witness.

Subagyo said, for the sake of obtaining accurate information about the kidnappings, the council would also hear from the Armed Forces fact-finding team and other teams established by various rights groups.

The council inspected on Wednesday several locations, believed to be the sites where the abductees were once held, at the Kopassus headquarters in Cijantung, East Jakarta.

Guilty

Subagyo made clear yesterday the council was not responsible for determining the officers' guilt, which was the authority of a military tribunal.

The council will submit the results of its investigation, along with recommendation for further action, to the Armed Forces commander.

He also called on the public to trust that the council would be independent in its investigation of the abductions.

"*Insya Allah* (God willing), the council will be objective in handling the case and issuing its recommendations," he said.

He promised that although the investigation was conducted in closed chambers, the council would not withhold information to the public when its findings were completed.

"The council is doing its best to provide the Armed Forces chief with accurate recommendations, so that he will make correct decision over the case," he said.

He also said the council followed the "rules of the game" while conducting the investigation, including meeting the officers' rights to present their own witnesses and to be assisted by an associate in the questioning.

He dismissed speculation the council also investigated a rumored coup attempt waged by the Kopassus troops the night after president Soeharto announced his resignation on May 21.

"No, it (the reported coup attempt) was not true. And the council does not focus its investigation on rumors. We are only probing the case of missing activists," he said.

Speaking as a former Kopassus chief, Subagyo said he regretted that the case had ruined the image of the Army's elite force.

"I love Kopassus but I am really concerned that several Kopassus officers had to be put under the honor council's investigation and others tried by the military tribunal," he said. (imn)

7-L, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145518; 3901226; 3901227 Fax. 021 - 3901719
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Sumber: JAKARTA POST | Tanggal: Sen-10-8-98

Do you think ABRI is still respected?

Over the entire history of the New Order government, ABRI has never been regarded as disgraced as it is at present. The Indonesian people mostly regard military personnel as criminals or armed hoodlums, but they do not dare express such feelings openly.

If ABRI leaders, including former commander Feisal Tanjung, said that the kidnappings were carried out by members of the Army's Special Force (Kopassus) beyond the top brass' knowledge, would that indicate that ABRI's coordination is very poor?

It does not necessarily mean that, because we have not seen ABRI's officers getting involved in open physical conflicts. They have denied human rights accusations just because they are cowards and want to save themselves. If they were true fighters, they would admit what they have done.

Do you expect ABRI to firmly discipline officers found to be involved in the violations?

I'm sure it won't. Not all officers allegedly involved in such violence will be legally processed and officers who are proven guilty will not receive heavy punishment as expected by the people. ABRI's leaders will be afraid that strict disciplinary measures may cause unrest in its ranks, especially because others have also been involved in other violent acts.

However, the people will be easily satisfied if ABRI brings violators to court.

What measures should ABRI take to improve its image?

First, ABRI must revise its political role in the management of the country under its dual-function policy. Second, ABRI should realize that it will no longer enjoy unlimited power.

ABRI's reform concept actually includes revisions of its dual-function policy. Such plans are supported by its younger officers, like ABRI's chief for sociopolitical affairs, Susilo Bambang Yudhoyono.

We can also look to ABRI Commander Gen. Wiranto to create a better military. He is actually a reformist. Yet he is also a bit young to be ABRI commander, so he is moving too carefully so as not to make a political mistake. This has led to slow and half-hearted reform. Many other proreform officers have yet to reach top positions that would give them the authority to bring about change. (riz)

Related story on Page 2

no 74, Jakarta 10320, Telp. 021 - 3145518; [illegible] Fax. 021 - 3901 [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

| Nomor: M.1 | Tanggal 23/9 '98

Para Aktivis Disekap di Cijantung

■ Dan Puspom ABRI: 12 Korban Penculikan tidak Ditemukan

JAKARTA (Media): Dan Puspom Mayjen TNI Syamsu memastikan para aktivis yang diculik disekap di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Namun dia menegaskan ke-12 korban penculikan yang sampai kini belum kembali, sudah tidak ada di sana. Dia juga tidak bisa memastikan di mana mereka berada.

Pengakuan Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu itu dikemukakan kemarin di Jakarta ketika menerima pengaduan anggota keluarga 12 orang yang sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Keluarga korban penculikan tersebut datang didampingi koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Munir.

Kedatangan mereka mendesak ABRI agar mengungkapkan nasib anggota keluarganya yang masih tidak diketahui hingga kini. Mereka adalah, Keluarga Petrus Bimo Anugerah, Deddy Oemar Hamdun, Herman Hendrawan, Suyat, Yidin Mubidin, Ucok M Siahaan, Noval Said, M Yusuf, Yani Avri, Ismail, Sonny, dan Hendra Hambali.

"Dari hasil penyelidikan terungkap lokasi penyekapan para aktivis tersebut berada di Markas Komando Kopassus Cijantung," ujar Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu kepada keluarga korban penculikan.

Sebelumnya, seorang aktivis yang diculik, Raharjo Waluyo Djati, juga mengungkapkan bahwa lokasi penyekapan berada di Kopassus, tetapi aktivis lainnya, Andi Arief, menyembunyikan lokasi tersebut sebagai usaha bernegosiasi dengan Puspom ABRI agar kawan-kawannya dilepas.

"Saya belum bisa memastikan di mana kini ke-12 orang lagi itu berada, karena untuk penyidikan militer," kata Dan Puspom ABRI ketika didesak wartawan dan anggota keluarga yang ingin tahu keberadaan anggota keluarganya yang sudah cukup lama belum juga kembali.

"Kami ingin kepastian apakah mereka sudah mati atau masih hidup, karena menurut penuturan Pius mereka sudah mati," tegas adik Deddy Hamdun dengan nada emosional.

Sebelumnya, dalam penuturannya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng setibanya dari Amsterdam (19/07) Pius memperkirakan Noval Alkatiri, Dedi Hamdun, Ismail, Sonny, dan Yani Avri telah meninggal. Alasannya, berdasarkan informasi yang didapatnya, kelima orang ini sudah dilepas pada 9-12 Maret 1998, tetapi ternyata tidak pernah mengontak keluarganya.

Data tambahan

Sementara itu, Kol CPM Sudirman Panigoro, salah seorang anggota Komisi Penyidik Militer (KPM) menyatakan orang ke-11 yang diidentifikasi ikut terlibat dalam kasus penculikan Andi Arief, berpangkat antara kolonel atau mayor. Namun dia tetap bungkam ketika didesak mengenai nama dan kesatuan perwira tersebut.

Syamsu menambahkan, Puspom ABRI sangat memerlukan data tambahan mengenai keterlibatan sejumlah instansi dan orang-orangnya dalam kasus penculikan Andi Arief. Karena itulah Andi diminta memberikan keterangan kepada Puspom.

"Tentu Andi punya hak menolak permintaan kami untuk diperiksa, tetapi kami juga punya kewenangan untuk memaksa dia memberi penjelasan setelah tiga kali kami panggil ternyata dia tidak mau datang," tandas Syamsu lagi.

Syamsu juga minta Pius memberikan keterangan tambahan pada Puspom ABRI mengenai penculikannya.

Dan Puspom ABRI itu juga membenarkan sejumlah oknum ABRI dari Polisi Militer (PM), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Badan Intelijen ABRI (BIA) terlibat penculikan itu. Tetapi dia tidak bisa menahan mereka karena belum bisa memunjukkan pasal mana yang membawa mereka ke pengadilan militer.

Syamsu sore kemarin juga membantah isu yang beredar bahwa mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin telah diperiksa. "Belum ada pemeriksaan terhadap Mayjen Sjafrie. Isu tersebut tidak benar," ujar Syamsu yang mengaku belakangan ini stress karena setiap hari dikejar-kejar pers.

Sementara itu Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar menyatakan dalam minggu ini Dewan Kehormatan Militer (DKM) akan dibentuk. Dewan ini dibentuk untuk mengusut lebih lanjut keterlibatan perwira tinggi ABRI dalam kasus orang hilang. "Yang namanya perwira terikat pada kode etik kehormatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada DKM," ujar Agum.

Namun demikian Agum belum bisa memastikan apakah ia nanti akan menjadi anggota DKM tersebut. "Nanti Pangab yang akan mengumumkan."

Semestara itu Wakil Ketua Penyidik Puspom ABRI Kol (CPM) Sudirman di Jakarta, kemarin mengatakan berkas kasus penculikan sejumlah aktivis, akan selesai diproses Sabtu (25/7) untuk segera diserahkan ke Oditur Militer.(Tim Media)

...ngan 74, Jakarta 10320, Telp. 021-...
email: ylbhi@indo...

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
dokumentasi dan informasi
Subjek : | Sumber : Ki | Tanggal : 31/3 94

tidak Tahu di Mana Mereka Berada

■ Pangab Terima Keluarga Orang Hilang

dah tewas," ujar Munir.

Menurut Munir, meski berkali-kali dinyakan para keluarga korban, Pangab tetap menyatakan tidak tahu. "Kami tidak tahu lagi soal mereka," ujar Munir menirukan Pangab.

Para keluarga korban menanyakan itu karena adanya pernyataan salah seorang korban yang sudah dilepas. Pius Lustrilanang yang memperkirakan paling tidak lima di antara para korban yang masih belum dilepas itu sudah tewas. Sedangkan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu menjelaskan bahwa para korban penculikan itu kini tidak berada lagi di tempat penyekapan di Cijantung. Tapi dia juga tidak tahu di mana para korban tersebut berada.

"Sejauh ini Puspom tidak memberitahukan di mana korban berada. Seharusnya ABRI menjelaskan kepada keluarga korban di mana mereka berada dan mengembalikan mereka kepada keluarga," ujar Munir.

Dalam pertemuan dengan Pangab Jenderal TNI Wiranto selama satu jam itu, Kontras mengulang lagi tuntutan mereka agar ABRI segera menjelaskan nasib para korban penculikan serta bagaimana kondisi mereka saat ini.

"Juga tidak diungkapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan para aktivis tersebut," katanya lagi.

Sementara MM Billah, salah seorang anggota Kontras yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, Pangab telah mengakui bahwa oknum Kopassus yang terlibat dalam kasus penculikan akan segera disidangkan.

Menanggapi persidangan itu, Munir mengatakan ABRI tidak harus segera menyidangkan kasus itu jika kesalahannya belum jelas. "Tidak perlu buru-buru sidang kalau rumusan kesalahannya tidak segera diketahui. Kalau ke-14 orang hilang ini belum diketemukan, belum ada tuduhan maksimal terhadap mereka," ujarnya.

Soal DK

Pada kesempatan terpisah K sum ABRI Letjen TNI Fachr Rozi mengatakan sampai saat i Menhankam/Pangab Jenderal T Wiranto belum memutuskan ko posisi dan keanggotaan Dew Kehormatan Militer (DKM).

Kepada pers seusai mengik Rakersus bidang Polkam di Jak ta, kemarin, jenderal bintang ti ini mengaku berkaitan deng pembentukan dan penyusun personel DKM itu telah dua sebuah rapat kecil. Menurut dari rapat kecil itu telah diusul sejumlah nama sebagai angg DKM.

Namun, Fachrul tidak berse menyebutkan nama mau struktur serta jumlah keanggot DKM itu. "Itu nanti pada saat akan diumumkan. Jadi tunggu ja, dan saya kira tidak lama l nama-nama itu akan keluar," u nya.

Seperti diberitakan, pimpi ABRI berencana membent DKM untuk mengusut kasus p culikan sejumlah aktivis pr mokrasi dan LSM yang diduga oleh oknum Kopassus.

(Was/Edi/D



■ **TEMUI PANGAB:** Koordinator Kontras Munir dikerubungi wartawan setelah menemui Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jl Medan Merdeka Barat, kemarin.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Sumber: Kompas | Tanggal: 23 - 4 - 98

Soal Korban Penculikan

Syamsu: Tak Ada Lagi Tempat Penyekapan

Kompas

Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, Mayjen Syamsu Djalaluddin mengungkapkan saat ini, pihaknya belum mengetahui di mana keberadaan korban penculikan yang hingga kini belum kembali. Puspom ABRI sudah melakukan penyekapan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung tidak menemukan merekan. Hasil keterangan para tersangka penculikan itu sudah dilimpahkan tapi masih menyelidiki keberadaan mereka setelah diculik.

Hal itu diungkapkan Syamsu ketika menjawab berbagai pertanyaan utusan keluarga korban yang belum kembali, dalam pertemuan antara keluarga korban penculikan dengan Puspom ABRI, di Markas Besar ABRI Jakarta, Rabu (22/4). Pada kesempatan itu, Syamsu membenarkan, ikut serta oknum institusi lain oknum Kopassus, dalam penculikan sejumlah aktivis. Selain oknum BIA (Badan Intelijen ABRI) maupun oknum Polisi Militer Jaya. Namun terlibatnya lembaga-lembaga tersebut masih harus dipastikan dengan fakta dan bukti.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah keluarga dari aktivis Petrus Bima Anugerah, Suyat, Yani Afri, Dedy Hamdun, Noval Alkatiri, Ucok Munandar Siahaan. Kepada Mayjen Syamsu, keluarga korban menyampaikan pernyataan bersama yang intinya mendesak agar pimpinan ABRI benar-benar mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan memberikan kepastian di mana sebenarnya anak/keluarga mereka berada, serta mendesak korban penculikan yang belum dikembalikan untuk segera dibebaskan.

"Tolong di mana anak saya ini berada dan kawan-kawannya, dan dalam keadaan bagaimana? Kedua, minta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke-12 orang ini dikembalikan kepada keluarganya yang sudah merindukan keberadaan mereka ini," ungkap Said Alkatiri, ayah Noval.

Mohon pengertian

Kepada keluarga korban penculikan, Syamsu menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui di mana keberadaan korban penculikan yang belum kembali ke keluarganya. Oleh karena itu, Syamsu memohon pengertian keluarga korban.

"Kita baru saja memeriksa, sekarang ini sudah 11 tersangka. Kita akan mengadakan pemeriksaan, pengusutan. Saya minta, tolonglah berikan masukan kepada kita. Sekarang yang baru terbongkar adalah kasus Andi Arief dan rumah susun Klender. Saya juga maunya secepat mungkin karena ini tugas mulya bagi saya, apalagi Pangab mengatakan usut tuntas. Sampai sekarang saya belum bisa menunjukkan keberadaannya. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memahami juga," jelasnya. Syamsu menjelaskan, Rabu kemarin Puspom sudah memeriksa seorang kolonel dalam kasus penculikan.

Meskipun demikian, Syamsu menambahkan, sudah ada titik terang untuk bisa mengungkapkan keberadaan mereka yang belum kembali. Pihaknya baru bisa menjelaskan mengenai ke-12 korban yang lain dengan berdasarkan fakta dan bukti. "Tidak semudah itu. Insya Allah, titik terang itu nantinya akan memperjelas permasalahan ini. Saya juga sedih. Keterangan sedang kita kumpulkan semuanya. Kalau sudah ketemu saya jawab, mungkin dua patah kata, ada atau tidak ada," tuturnya.

Dia menambahkan, dari 11 tersangka yang sudah ditahan Puspom baru bisa diungkap kasus Andi Arief dan rumah susun klender yang melibatkan Nezar Patria, Ann dan Mugiyanto. "Apakah masih ini pelaku-pelakunya, nanti ini sedang kita teliti," jelas Syamsu.

Pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka, menurut Komandan Puspom, adalah merampas kemerdekaan orang (324 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), turut serta dalam suatu tindak pidana (55 KUHP), melampaui batas kewenangannya (26 KUHPM), tidak menaati perintah dinas (130 KUHPM).

Syamsu juga menyesalkan keterangan Pius Lustrilanang yang menduga lima korban penculikan yang belum kembali kemungkinan sudah tewas. Penjelasan seperti itu malah menyusahkan para keluarga korban padahal persoalannya belum jelas benar.

Menanggapi pernyataan Andi Arief yang menolak memberikan keterangan kepada Puspom sebelum ke-12 korban penculikan lain dibebaskan, Syamsu mengatakan, "Dia menolak itu hak dia, tetapi saya juga punya hak. Kalau pemanggilan pertama dan kedua tidak datang, ya dengan upaya paksa karena ini bukan untuk kepentingan saya tetapi untuk kepentingan hukum."

Instansi lain

Syamsu yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI itu mengakui, dalam proses penculikan itu memang ada oknum-

[illegible] 74, Jakarta 10320, Telp. 021 - 3145518; [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Arsip & Dokumentasi

Nomor: Kompas | Tanggal: 23-7-98

Syamsu: ——

oknum dari sejumlah instansi ABRI yang ikut serta atau ada saat proses penculikan itu. "Memang benar ada beberapa institusi ikut serta. Ada Babinsa (Bintara Pembina Desa)-nya, Koramil (Komando Rayon Militer)-nya, Kodamnya, ada BIA-nya, ada Polrinya. Tapi berdasarkan fakta dan bukti, baru kita bisa menyatakan ini terlibat, ini tidak terlibat, juga ini bisa dituntut, pasal mana yang bisa dipakai untuk menuntutnya. Jadi kita tidak main tuduh-tuduh saja. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," tegasnya.

Syamsu menegaskan pernyataan Panglima ABRI yang tidak akan menutup-nutupi pengungkapan kasus penculikan ini. Siapapun tanpa terkecuali, termasuk jenderal atau presiden, tidak luput dari pemeriksaan jika memang diduga ada keterlibatannya. "Saya tidak bisa mengatakan hanya berdasarkan laporan, si Kopassus salah, si Kodam salah, si BIA salah. Harus berdasarkan fakta, keterangan saksi-saksi. Kalau hanya samar-samar saja, dosa juga saya," tegasnya.

Dengan pengakuan bahwa BIA terlibat, menurut Munir dari Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), maka tidak mungkin lagi menyatakan bahwa penculikan adalah pekerjaan oknum, namun pekerjaan interaksi antarinstitusi.

Seusai pertemuan, Wakil Ketua Penyidik Militer Kol CPM Sudirman Panigoro menjelaskan, penyidikan sementara ini memang baru diarahkan pada pengungkapan kasus Andi Arief dan rusun Klender. Penyidik belum sampai menanyai apakah mereka mengetahui keberadaan korban penculikan lain yang masih tidak jelas keberadaannya. "Kita sidik itu dulu karena akan segera kita ajukan ke pengadilan militer," jelasnya.

Siap terima

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, di akhir pertemuan menegaskan kepada Ketua TPF ABRI bahwa penyelamatan ke-12 korban yang belum kembali harus menjadi prioritas. "Kami khawatir, tanpa kejelasan nasib mereka, maka proses pengusutan ini justru berakibat berbahaya bagi mereka bila mereka memang masih berada di tangan penculiknya. Kalaupun di antara mereka ada yang luka, atau bahkan meninggal, kami siap menerima itu dengan diterangkan sejelas-jelasnya keadaan terakhir mereka. Itu jauh lebih kami bisa terima dibanding kalau proses ini tetap mengambang," ujarnya.

Munir juga mengatakan, tidak bisa kasus Andi Arief, Nezar, Aan dan Mugiyanto dipilah-pilah dari kasus penculikan lainnya, karena para korban penculikan itu saling bertemu satu sama lain di tempat yang sama. "Tidak bisa kasus Andi Arief diletakkan sebagai kasus sendiri. Kasus Sonny dan Yani Afri pun tidak bisa menjadi kasus tersendiri, karena pelakunya sama, begitu juga yang lainnya" jelasnya.

Pemulihan ekonomi

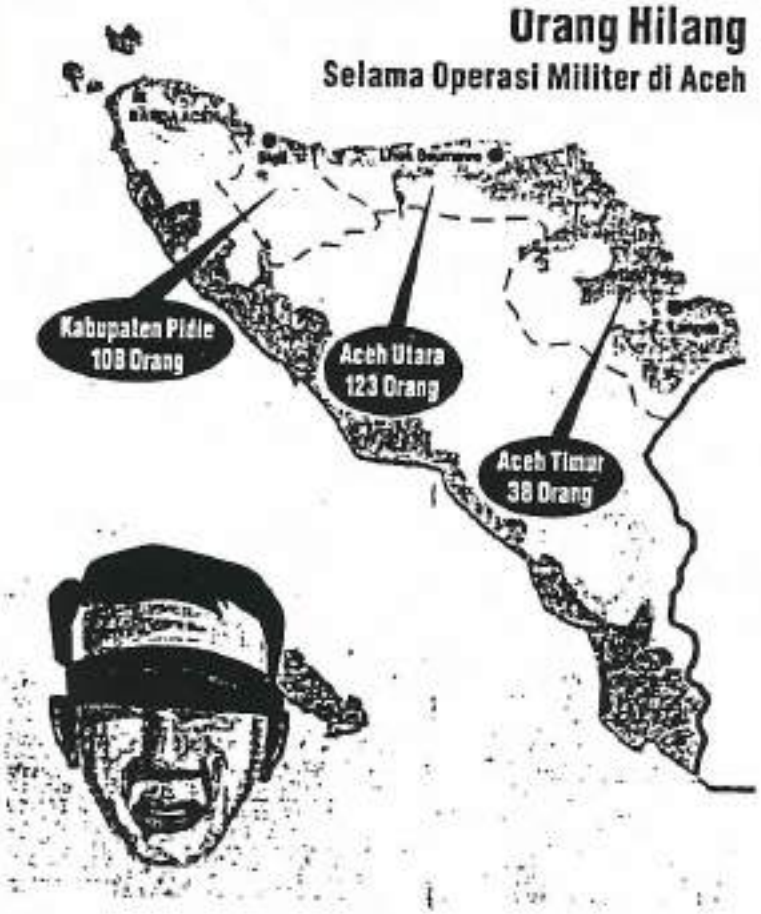
Dua anggota Komnas HAM, BN Marbun dan Clemention dos Reis Ansaral mengatakan, pimpinan ABRI harus serius dalam menuntaskan kasus penculikan. Siapapun yang terlibat dalam kasus itu, walau perwira tinggi, tidak boleh ditutup-tutupi. Penanganan kasus penculikan itu harus terbuka dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena akan turut menentukan pemulihan perekonomian nasional.

Marbun mengingatkan, dewasa ini masyarakat internasional tengah memperhatikan penanganan kasus penculikan oleh pimpinan ABRI. Karena penuntasan perkara itu akan menjadi semacam "jawaban" untuk investor asing tentang kepastian hukum di Indonesia. Artinya, jika penuntasan perkara penculikan itu tidak memuaskan, bisa dipastikan investor tak akan datang ke Indonesia.

"Sekarang ini 'kan sudah ada gambaran tentang pelaku penculikan itu. Apabila pimpinan ABRI tidak bisa menuntaskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, ya investor asing pun enggan masuk ke Indonesia sebab tidak ada jaminan bagi mereka tidak menjadi korban penculikan. Bantuan luar negeri pun bisa seret, karena Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak memiliki kepastian hukum. Ini berarti perekonomian kita bisa semakin parah," kata Marbun. (tm/oki)

Diponegoro 74, Jakarta 10320. Telp. 021 - 3145618; [illegible] 021 [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi:
Subjek : | Sumber : M / | Tanggal : 31/3 98



AN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
dan dokumentasi:
Sumber: Jakarta Post | Tanggal: 20/4 95

Kontras upholds demand to find missing activists

JAKARTA (JP): The independent Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) kept up pressure on the Armed Forces (ABRI) yesterday to find the 14 political activists who are still missing.

"We believe the activists are still held by units under the command of ABRI which might not have been exposed or have been identified but have yet to be revealed," Kontras' coordinator Munir told a media briefing at the Legal Aid Institute office in Central Jakarta.

Munir said that ABRI should therefore immediately release the activists or at least announce whether they were still alive or not.

Munir called on the military prosecutors not to accept the dossiers on 11 members of the Army's special force (Kopassus) suspected of involvement in the abductions of political activists until ABRI could explain the whereabouts of the 14 activists who are still missing.

The military police investigators, led by Military Police Corps Commander Maj. Gen. Syamsu Djalal, have yet to complete the dossiers.

Under pressure from the relatives of the missing activists, Syamsu last week disclaimed any knowledge of the whereabouts of the missing activists.

Also last week, Syamsu revealed that members of the Jakarta Military Command, the Armed Forces Intelligence Agency, the National Police and the National Military Police might have also been involved in the "process" of abductions.

Munir said the dossiers should not be submitted to the military prosecutors before all suspects were questioned by the fact-finding team.

Munir also said the team must immediately question former Kopassus chiefs Lt. Gen. Prabowo Subianto and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, former Jakarta military commander Sjafrie Sjamsoeddin, former ABRI commander Gen. (ret) Feisal Tanjung, former police detective unit commander Maj. Gen. Nurfaizi and former president Soeharto to verify their innocence in the abductions.

Separately yesterday, Feisal reasserted his innocence in the kidnappings, which occurred when he was ABRI commander.

"If there was an operation, there must be a report. An operation must be reported and there was no report (of the abductions)," Feisal, who is currently coordinating minister for political affairs and security, told reporters before attending the cabinet meeting on political affairs and security at the Bina Graha presidential office.

When asked whether Soeharto was involved since he was ABRI's supreme commander at the time, Feisal said: "The highest commander is not involved in operations, all of the operations are under the command of the ABRI commander, but I do not know if there were special cases." (byg/prb)

Informasi dan dokumentasi:
Sumber : Jakarta Post | Tanggal: 31/5/96

Whereabouts of missing activists still unknown

JAKARTA (JP): Minister of Defense and Security/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto claimed yesterday he did not know the whereabouts of the 12 missing activists but pledged to keep searching for them.

"I still know nothing of their whereabouts and whether they are still alive or not," Wiranto was quoted as saying by a delegation from the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), led by Munir.

Munir told a media conference after meeting Wiranto at the defense ministry in Central Jakarta that he and his eight-member delegation was not satisfied with the military chief's response.

"In principle, many of our questions were not clearly answered," Munir said.

National Military Police Commander Maj. Gen. Syamsu Djalal, who is also head of ABRI's fact-finding team investigating the disappearances, said last week that the team had visited the Army's special force's (Kopassus) headquarters in Cijantung, East Jakarta — which was allegedly been used as a detention site for activists — to search for the missing activists, but did not find anyone.

Munir said Wednesday he believed the activists were still being held by units under the command of ABRI which might not have been exposed or have been identified but yet to be revealed.

He said yesterday that when he told Wiranto about his belief, the latter said: "It is impossible because the perpetrators (of the abductions) have already been detained."

Syamsu said last week 11 members of Kopassus had been questioned for their alleged involvement in the abductions of political activists.

Syamsu also revealed that members of his own unit, of the Jakarta Military Command, the Armed Forces Intelligence Agency (BIA), and the National Police might have also been involved in the "process" of the abductions.

Wiranto said yesterday that the investigation into the abductions was almost complete and that the suspects' trials could begin in two weeks.

Munir therefore urged Wiranto to have the military investigators immediately question all who might possibly have been involved, including former Kopassus chiefs Lt. Gen. Prabowo Subianto and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, former Jakarta military commander Sjafrie Sjamsoeddin, former ABRI commander Gen. (ret) Feisal Tanjung, former police detective unit commander Maj. Gen. Nurfaizi and ousted president Soeharto.

Prabowo said two weeks ago that he was ready to take responsibility while Feisal has repeatedly denied his involvement in the abductions of political activists.

Munir said that during the 90-minute closed-door meeting Wiranto was accompanied by, among others, ABRI spokesman Maj. Gen. Syamsul Ma'arif and BIA chief Maj. Gen. Zacky Anwar.

"When I said to Wiranto that Zacky should also be questioned, Zacky just smiled," Munir said.

Munir said that Rahardjo Waluyo Djati and Faisol Reza, two of the nine activists who have reappeared after being abducted, and relatives of Deddy Hamdun and Yani Avri, two of the 12 activists who are still missing, were among his delegation yesterday.

Riots

Rights activist Marzuki Darusman, who heads the government-sponsored fact-finding team into the May riots, said yesterday the team was committed to unveiling the truth behind the riots which were allegedly orchestrated.

"Our mission is to unveil all the facts which include the motives, mastermind and impacts of the May riots and the result (of the investigation) will be conveyed through a recommendation to the government," Marzuki told a media briefing at the Ministry of Justice in South Jakarta.

Marzuki said the team has been given three months to complete its report.

He said the 24-member team has also been authorized to access all related individuals and institutions, including the military, to gather information on the riots.

"Certainly there should be no restriction in our effort to collect information from various sources," said Marzuki, who is also deputy chairman of the National Commission on Human Rights. (byg)

Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

Andi Arief Bersedia Tukar Pengakuan

JAKARTA (Media): Sampai sekarang ABRI belum menemukan pelaku penculikan 12 aktivis. Yang tertangkap baru penculik Andi Arief dan Nezar Patria."

Hal itu ditegaskan oleh Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD Mayor Jenderal TNI Nur Aman ketika menerima 13 orang keluarga korban penculikan termasuk Andi Arief dan Faisol Reza. Mereka datang untuk kembali mendesak Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menanyakan nasib 12 korban penculikan.

Di antara 13 orang tersebut berasal dari keluarga Yasin Muhidin, Ucok Munandar, Noval Ali, dan Yani Avri. Kedatangan mereka ke Mabes AD hanya didampingi oleh anggota tim dari Komite Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Faisol Reza.

"Sampai sekarang ABRI belum menemukan pelaku penculikan 12 aktivis yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya," ujar Nur Aman.

Dalam dialog antara Aspam KSAD dengan para keluarga korban penculikan itu, salah satu korban penculikan Andi Arief sempat melontarkan ide untuk menukarkan pengakuannya mengenai peristiwa penculikan dan siapa orang di balik penculikan dengan penjelasan tambahan.

"Saya tidak mau tahu sanksi administratif atau hukuman yang dikenakan pada pelaku, tetapi jika Puspom ingin mendengar penjelasan tambahan dari saya, maka tukar dulu *dong* dengan 12 kawan kami yang masih belum jelas di mana sekarang," ujar Andi Arief di depan forum.

Sebelumnya, 11 keluarga orang hilang pernah mendatangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) untuk mendesak DKP agar menanyakan nasib ke-14 orang yang masih tidak menentu nasibnya ke para tersangka penculikan. Mereka sempat mengajukan permohonan agar bertemu dengan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang sekaligus Ketua DKP.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu sempat ditanyakan kembali permintaan Kontras kepada KSAD agar menyesuaikan pertanyaan nasib 12 orang hilang tersebut kepada DKP. Namun, Mayjen Nur Aman menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada jawaban dari KSAD.

Aspam KSAD itu juga menyatakan sampai sekarang masih ada pelaku yang diperiksa tapi berbelong, sehingga menambah sulit pekerjaan ABRI.

Pertemuan itu berakhir setelah Aspam KSAD berjanji akan menemukan keluarga korban dengan KSAD, Selasa pekan depan.

Sementara itu mengenai Irwan Effendi, orang yang menyelundup ke istana negara saat upacara 17 Agustus 1998, sudah dinyatakan pulang oleh istri korban, kemarin.

"Dia sudah kembali di rumah setelah ditahan sementara," ujar istri Irwan Effendi tanpa menjelaskan siapa yang menahan suaminya. (Was/C-2)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber Kompas | Tanggal 9-8-96

Kontras Yakin Korban Penculikan Masih Hidup

Jakarta, Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sampai saat ini merasa yakin, korban penculikan yang belum kembali masih hidup seluruhnya. Diperkirakan, korban penculikan masih disekap penculiknya atau telah "dibuang" ke suatu tempat yang membuat mereka belum bisa berkomunikasi dengan pihak lain, termasuk keluarganya. Untuk itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) perlu menjelaskan keberadaan korban penculikan yang masih belum kembali.

Keyakinan itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Selasa (18/8), di Jakarta. "Kita meminta agar DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo secepatnya mengumumkan keberadaan ke-12 korban penculikan itu, dan mengakhiri polemik di masyarakat sekitar nasib mereka itu," tegasnya.

Munir mengaskan, pihaknya tidak akan pernah menganggap para korban penculikan itu telah meninggal, sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah atau ABRI. Kalaupun suatu saat ada pernyataan para korban telah tiada, perlu dibuktikan pula di mana jenazah dan kuburan para korban itu, karena hal itu juga merupakan tuntutan para keluarga korban.

"Oleh karena itu tidak mungkin saya menyatakan para korban itu sudah meninggal. Saya juga tidak akan memberi batas waktu kepada pemerintah atau ABRI untuk terus mencari para korban penculikan itu. Tapi kalau ABRI sudah mengetahuinya maka tidak ada untungnya terus menerus menyimpan informasi itu, karena selama itu pula masyarakat akan menagih dan menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan ABRI," ujar Munir. (oki)

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:31455183.3904226.3942147 .Fak.330140
karta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

KSAD belum Tahu Keberadaan 14 Orang Hilang

Andi Arief Ajukan Barter dengan ABRI

JAKARTA — Lantaran sampai kini 14 orang hilang belum jelas nasibnya, maka korban penculikan Andi Arief bersama keluarga korban yang masih raib menawarkan barter dengan ABRI.

"Saya bersama korban penculikan sampai pada tuntutan terendah, kalau perlu kita 'barter', 14 orang itu dikeluarkan dan mereka [pelaku penculikan] tidak diajukan ke Mahmil," kata Andi Arief di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), kemarin.

Kedatangan Andi bersama keluarga korban penculikan ke Mabesad bermaksud menemui Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS. Namun, karena yang ditemui tak di-lokasi, maka mereka diterima Asisten Penghanan (Aspam) KSAD Mayjen TNI Nur Aman dan Kadispen AD Brigjen TNI ID Putu Rai.

"Tawaran 'barter' itu dipilih karena bagi keluarga korban penculikan, kata Andi, kepastian 14 orang itu terculik — hidup atau mati — lebih penting ketimbang Mahmil atau lainnya. Sebab, kalau ABRI bisa menjelaskan nasib ke-14 orang hilang itu, mereka bersedia memaafkan pelakunya.

"Seperti tukar-tukaran tawanan perang, teman-teman saya dikeluarkan dan mereka kita maafkan, karena ini masalah kemanusiaan," ujar Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang datang bersama korban penculikan lainnya Faisol Reza, Aan Rusdianto, dan Ny Tuty (orangtua aktivis Yani Afri). Karena keinginan bertemu KSAD gagal, mereka berencana datang lagi Selasa depan.

Bagaimana kalau ternyata ke-14 orang itu sudah meninggal?" Pihak keluarga akan puas jika itu diumumkan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang mendalam. Jangan sampai timbul kebencian mendalam rakyat dan keluarga korban kepada ABRI," tambahnya.

Andi menduga sulitnya memperoleh keterangan tentang nasib ke-14 orang hilang itu, karena adanya upaya untuk melindungi beberapa pihak yang terlibat. Sebab, kalau sampai ada yang cacat atau meninggal, anggota ABRI itu akan bisa dikenai hukuman berat.

Pada kesempatan terpisah, Ketua DKP Subagyo HS menyatakan belum bisa memberi titik terang atas nasib ke-14 aktivis yang hingga kini masih hilang. "Saya sudah sampaikan (hasilnya) tidak sedetail itu," ujar Subagyo kepada wartawan, seusai menerima anggota Paskibraka di Mabesad Jakarta kemarin.

Menurut Subagyo, tugas DKP yang dipimpinnya hanyalah memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan berkaitan dengan kasus orang hilang. Hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira Kopassus tersebut, katanya, berupa saran yang akan disampaikan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto terhadap kelanjutan karier mereka.

Subagyo menjelaskan bahwa tugas DKP sudah selesai. Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago tengah menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekaman-rekaman pengakuan terperiksa. Hasilnya, kata Subagyo, akan diserahkan kepada Pangab Jumat ini.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Diponegoro No.74 Tel:3145518 3901226 391[illegible]17 Fak.3301410
Jakarta 10320
Informasi & Dokumentasi:
Subyek: | Sumber: | Tanggal:

ANDI ARIEF.....

Kemudian, pengumuman sanksi terhadap dua Pati dan satu Pamen ini akan dilakukan langsung oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin pekan depan.

Dikonfirmasi bahwa pemeriksaan tiga perwira tersebut hanya berkaitan dengan kasus penculikan Ketua SMID Andi Arief, Subagyo menjawab, "Tidak. Nanti hari Senin silakan tanya. Setelah Menhankam/Pangab mengumumkan keputusannya apa, saya dan seluruh anggota ada di sana. Silakan nanti tanya di sana."

Di mata korban penculikan, keberadaan DKP tidaklah terlalu istimewa. Sebab, lingkupnya terlalu kecil. Menurut Andi, yang diperlukan lebih dari itu, yakni pembentukan dewan pemulihan nama baik ABRI yang fungsinya mempertanggungjawabkan semua keterkaitan politik dan skandal politik selama Orde Baru berkuasa.

Senada dengan Andi, Direktur *Human Rights Watch*, Sydney Jones, melihat kesan pembentukan DKP sekadar melokalisasi penanganan kasus penculikan aktivis dengan hanya menyidik keterlibatan Kopassus. "Itu sama sekali tidak benar. Seolah-olah dengan dihukumnya orang-orang Kopassus, semua sudah selesai dan ABRI bersih," ujar Jones kepada *Republika* di Jakarta, kemarin.

Aktivis HAM yang pertama kali mengkampanyekan kasus Aceh pada 1990 itu sependapat dengan Koordinator Kontras, Munir, bahwa kasus penculikan aktivis mahasiswa itu terkait dengan sejumlah lembaga di ABRI, tidak hanya Kopassus. "Jadi, harus ada penyelidikan menyeluruh," ujarnya. ■ [illegible]

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
& Dokumentasi
Sumber: Media Indo | Tanggal 23 - 7 - 98 P.1

'Pulangkan Anak Kami Apa pun Bentuknya'

■ Keluarga tidak Butuh Mahmil

JAKARTA (Media): "Tolong, di mana anak kami dan teman-temannya berada. Bagaimana kondisinya sekarang. Pulangkan kepada kami dan jelaskan nasibnya. Jangan buat kami tertekan setiap hari."

Itulah kata-kata yang meluncur dari keluarga 12 korban penculikan yang kemarin siang datang ke Markas Puspom ABRI di Jl Merdeka Timur, Jakarta Pusat, menemui Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu.

Keluarga korban penculikan itu datang ke Puspom membawa foto anggota keluarganya yang sampai sekarang belum kembali. Mereka adalah Petrus Bimo Anugerah, Deddy Oemar Hamdun, Herman Hendrawan, Suyat, Yadin Muhidin, Noval Said, M Yusuf, Ismail, Yani Afri, Sonny, Ucok M Siahaan, dan Hendra Hambali.

Setelah menunggu tiga jam, keluarga korban orang hilang itu bertemu Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu yang baru datang dari Cilangkap (Mabes ABRI) karena dipanggil Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi.

Kegelisahan keluarga orang hilang tersebut tentu menjadi-jadi. Betapa tidak. Deddy Hamdun misalnya, sudah lebih setahun menghilang. Dan menurut penuturan Pius, salah seorang korban penculikan yang sudah dilepas, suami artis Eva Arnaz itu sudah dilepas Maret lalu. Namun, anehnya sampai sekarang belum juga mengontak keluarganya. Karena itulah Pius memperkirakan paling kurang ada lima orang telah meninggal. Untuk memperoleh kepastian itulah untuk kesekian kalinya mereka mendatangi Puspom ABRI.

Orang tua Noval Said (aktivis yang hilang) mengaku semakin tertekan karena setiap hari media massa menyebutkan ada lima orang korban penculikan yang dikira telah meninggal dunia.

Pernyataan senada diungkapkan adik kandung Deddy Oemar Hamdun, Lutfi Abdullah, yang mengatakan bahwa kedua orang tuanya sering mengalami kejang memikirkan keberadaan Hamdun. "Kami tidak butuh Mahmil atau DKM. Kami butuh keluarga kami pulang, apa pun bentuknya. Kami dengar ada yang meninggal," kata Lutfi.

Sudah ke mana-mana

Sementara itu Eva Arnaz menyatakan ia sudah ke mana-mana mencari suaminya yang hilang sejak kampanye pemilu tahun lalu. Bahkan ia telah meminta bantuan sejumlah instansi dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Mabes TNI AD, Mabes ABRI, Komnas HAM, LBH, Kontras sampai paranormal, tetapi saja suaminya raib tanpa jejak.

"Tetapi setelah kasus penculikan ini terbongkar dan ada saksi mata korban penculikan yang bertemu suami saya, maka jelas suami saya juga menjadi korban penculikan. Karena itu saya minta suami saya kembali," kata mantan artis film yang pernah dijuluki bintang panas itu.

Kepada para keluarga korban penculikan Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu mengatakan, sangat memahami perasaan keluarga para korban, dan pihaknya terus berusaha keras mengungkap kasus orang hilang itu hingga tuntas, sebagaimana diinstruksikan Menhankam/Pangab.

"Tetapi kami harus memeriksa semua bukti dan saksi-saksi terlebih dahulu. ," kata Syamsu.

Ketika dikesak keluarga korban tentang pernyataan Pius, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) yang juga korban penculikan, bahwa adanya korban penculikan yang meninggal dunia, Mayjen Syamsu menyatakan belum bisa memberi jawaban. (Tim Media)

74, Jakarta 10320, Telp. 021 - 3145518; [illegible]
email: ylbhi@indo.net.id

/ASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
masi dan dokumentasi:
k : | Sumber: MEGA | Tanggal: 30/7 91

ok

kil koordinator Kontras Dadang Trisasongko, SH

Kebenaran itu inggi nilainya

K kasus penculikan aktipro demokrasi merebak di h air, dan sejumlah orang n hilang. Komite untuk ilang dan Korban Tindak n (KONTRAS) pun berk kalah vokalnya. Tri Sa-SH yang kini duduk selaku Koordinator KONTRAS, an salah satu pendiri orga-i.

ai aktivis ia pun tak beda rekan-rekannya. Pernah dikirimi surat kaleng, diteolik, bahkan dipenjara. "Itu g sudah risiko. Karena me-n HAM di tanah air sering man dengan pemerintah," jujur seraya tersenyum.

i kelahiran Tulungagung, mur, 20 Desember 1963 i-membela 'kaum yang le-n tertindas' sejak kuliah di sitas Airlangga (Unair) Su-. Bahkan, sebelum kuliah-esai, ia sudah bergabung de-Lembaga Bantuan Hukum cabang Surabaya, tepatnya 987lalu.

ma masa itu saya penuh ri-caman fisik," akunya. Bungapa, pasalnya saat itu ia embela sejumlah masyarag mengadukan nasibnya BH. Di Gresik, Jatim, misalpun ikut bersuara lantang, a para keluarga menuntut ng rumahnya dilewati arus egangan tinggi. Pada tahun alah ia terjerat kasus subdan penghasutan. "Jadi, kak di Gresik itulah membumasuk penjara selama semkenangnya saat ditemui aeruddin dari Megapos di erjanya, Jalan Diponegoro ta, 28 Juli lalu.

tiga-empat tahun pertama menjadi aktivis terbentur penangkapan maupun an oleh petugas menjadi n di keluarga, belakangan nya itu menjadi hal yang adi, pada awal-awal terjun aktivis kalau sehari tidak sering dicemaskan, jamatidak demikian. Malah semua ikut mendukung," adang serius.

ang kini menjabat Sekre-wan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini mengaku, menikah tahun 1991 dan kini dikaruniai seorang anak. Ia hijrah ke Jakarta sejak tahun 1993 lalu. Istrinya, Ir. Endang Sri Rahayu tercatat sebagai pengajar Universitas Jayabaya.

Istrinya pun, kata Dadang, tahu betul apa yang dilakukannya. "Dia enggak pernah merasa was-was. Biasa saja. Apalagi kita berjalan di jalan yang benar. Karena itu, keluarga sangat mendukung segala usaha saya," dalihnya.

Ditanya motivasi paling besar berupa dorongan apa sehingga ia berani berkiprah di bidang itu, Dadang menjawab, agamalah yang mendorong untuk berbuat itu. "Sesuai agama saya, Islam, mengatakan bahwa kebenaran itu tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Untuk itu kita wajib mengajak semua pada kebenaran," ucapnya yakin.

Karena teramat mencintai pekerjaanya, pria berkumis agak lebat ini sering bekerja sampai 12 jam. Tak pelak, ia pun jarang bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Itu sebabnya, hari Sabtu dan Minggu ia upayakan untuk selalu bisa kumpul di tengah-tengah keluarga.

"Makanya saya *enggak* punya hobi lain, kecuali *ngobrol* sama keluarga sambil nonton tivi. Selain itu, olahraga jalan pagi dengan anak dan isteri," ujar lelaki bertubuh tinggi dan langsing ini ketika ditanya kegiatan *refreshing*nya.

"Saya juga orang yang ceroboh dalam hal kesehatan," ucap Dadang sewaktu disinggung kiatnya dalam menjaga kesehatan, "makanya saya kena lever, juga maag. Ya kiat khusus saya dalam menjaga kesehatan paling saya minum jamu-jamuan tradisional. Itu saja."

Disinggung tentang obsesinya dulu ketika sebelum menerjuni bidang yang ditekuni sekarang, ia menjawab, semasa SMA cita-citanya ingin menjadi Duta Besar. "Kayaknya enak ya bisa pergi-pergi keluar negeri. Tapi sekarang sudah tidak *kepingin* lagi menjadi Duta Besar. Saya cukup bahagia di sini," kilahnya sambil tertawa.

■ Dede Haeruddin

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Informasi dan dokumentasi
Subyek | Sumber M.I | Tanggal 18/8/98

DKP Bisa Jelaskan soal 14 Korban Penculikan

BANDUNG (Media): Mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (Pur) Edi Sudradjat mengatakan jika Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menemukan ada indikasi tindak pidana dalam kasus penculikan dan penyekapan para aktivis prodemokrasi, maka pelakunya harus diajukan ke Mahkamah Militer.

Usai menghadiri deklarasi "Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa" di Bandung, Minggu, Edi mengatakan DKP tidak akan menuntaskan persoalan karena mereka hanya mengurusi masalah organisasi. Jadi, kalau menyangkut pidana, persoalannya akan diselesaikan lewat pengadilan.

"Yang mengetahui kadar besar kecilnya kesalahan ketiga perwira itu adalah para pengusut dalam DKP. Dari sana diukur. Saya kira ini menyangkut masalah yang serius dan sungguh-sungguh. Mestinya ada pidananya. Kita dorong ke sana," jelasnya.

Seperti diberitakan, DKP sedang memeriksa tiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus yakni mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi, dan mantan Komandan Grup IV Kol Inf Chairawan. Mereka diperiksa berkaitan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis prodemokrasi. Prabowo telah mengaku salah dan siap mempertanggungjawabkannya.

Menurut Edi Sudradjat, substansi masalah tersebut adalah penculikan para aktivis dan hilangnya 14 orang di antara para aktivis itu. Saat ini masalah itu menjadi terfokus pada militernya, sedang keberadaan orang-orang yang hilang itu tidak diusik lagi.

Edi yang juga pernah menjadi salah satu komandan Grup di Kopassus itu mengatakan, masalah orang hilang bisa dijelaskan oleh DKP.



■ Edi Sudradjat

Sedang Letjen TNI Arie Sudewo, mantan Kepala BIA, menyatakan DKP hanya melihat apakah ada pelanggaran kode etik kehormatan perwira. Kalau pelanggaran itu bersifat tindak pidana, hal itu dapat diajukan ke Mahmil. Dalam sidang Mahmil semua pertanyaan yang berkaitan dengan kasus penculikan itu akan terjawab.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto sendiri mengatakan sampai sekarang belum ada usulan dari DKP. Namun Pangab yakin DKP akan mampu menyelesaikan masalah yang ditanganinya secara obyektif.

"Para perwira yang duduk dalam DKP pasti mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik secara jujur, obyektif, transparan ke dalam dengan dilasari rasa tanggung jawab," tegasnya seusai peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-53 RI di Istana Merdeka, kemarin.

(Edi/Ant/Rid/Awi/Sg/D-12)

aS | Pelayanan Klipping Divisi Informasi Dan Dokumentasi (INDOK)

Perburuhan	Konsumen	Pertanahan	Demiliterisasi
Eko-Global	Perempuan	Lingkungan	Mafia Perad.
DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Mid'in Kota	

ng Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
for Dissappearances and Victims of Violence

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
R	APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES		2000		2001		2002		2003		2004
	Republika		Suara Pb		Wa: Kot		Pos Kota		Sr Karya		Ry Mer		Bisnis In		Jkt Post		Pkr Ry									

Orang Hilang yang ak Kunjung Ditemukan

PENGANTAR REDAKSI

Jumlah orang hilang di Indonesia sampai 2001 yang terdata oleh Kontras mencapai 1.000 orang lebih. Namun, lembaga ini meyakini jumlahnya beberapa kali lipat lagi. Memperingati Hari Orang Hilang Sedunia yang jatuh pada 30 Agustus, mereka meminta DPR memanggil Komisi untuk Orang Hilang PBB, untuk memantau penanganan kasus-kasus penghilangan paksa itu.

Sedangkan sampai saat ini, masih banyak keluarga korban yang berharap bisa mengetahui sanak saudaranya yang hilang. Tak banyak yang mereka tuntut. Mereka hanya ingin kepastian saja, jika anggota keluarganya itu meninggal, di mana kuburnya.

lamat seolah menjadi tabir pembuka, betapa banyaknya kasus penculikan di Indonesia. Hal itu juga membuktikan, betapa penghilangan orang adalah satu praktek yang terencana, sistematis, dan meluas, di negeri ini.

Ketua Dewan Pengurus Kontras Munir mencatat tiga pola penghilangan orang. Pertama, penghilangan korban yang didasarkan pada kepentingan politik penguasa. Korbannya biasanya para oposan, mahasiswa, partai politik, atau kelompok-kelompok sosial lainnya. Dalam kategori ini, korban penghilangan mampu diidentifikasi. Pada 1965, para korban adalah orang-orang berhaluan politik kiri, di rentang tahun 1970-1980 orang-orang dari kelompok sosialis, pada masa 1980-1990 orang-orang dari pergerakan Islam, dan pada 1990-an orang-orang kelompok nasionalis.

Pola kedua, penghilangan korban untuk menghilangkan para saksi. Ini, kata Munir, untuk menghindari pertanggungjawaban negara atau kekuasaan, atas suatu peristiwa kekerasan politik. Hilangnya sekitar 16 orang dalam peristiwa Tanjung Priok, ratusan orang dalam peristiwa Lampung, 16 orang dalam peristiwa 27 Juli 1996, serta 5 orang dalam kerusuhan Mei, adalah contohnya.

Pola ketiga, penghilangan korban secara acak. "Ini tidak secara langsung berkaitan dengan negara, tetapi dilakukan oleh elite-elite negara," kata Munir. Kasus hilangnya petani pada 1984 di Jawa Timur, serta penculikan wartawan tabloid *Merdeka* adalah contoh dari pola ini.

Masih maraknya dan belum tuntasnya kasus penculikan itu memunculkan banyak keprihatinan, baik dari dalam maupun luar diri, yang dialamatkan pada Indonesia. Dari dalam negeri, tak terhitung unjuk rasa yang dilakukan oleh keluarga para korban serta masyarakat lainnya. Mereka menuntut kejelasan keberadaan para korban. Terakhir, dalam menyambut Hari Orang Hilang se-dunia yang jatuh pada 30 Agustus, perwakilan keluarga korban penculikan mendatangi DPR. Mereka mendesak DPR membentuk Komisi Penyelidik untuk Orang Hilang.

Dari luar negeri, pada awal pemerintahan mantan Presiden Abdurrahman Wahid saja, pemerintah telah mengarsip tak kurang dari 4.209 surat, yang dengan keras menanyakan nasib orang-orang hilang itu. Di samping berasal dari pribadi-pribadi, surat-surat itu juga datang dari beberapa lembaga internasional. Birkbeck University of London Inggris, Institut fur Gewasserokologie und Bennenfischerei (Berlin), Amnesty Internasional (AI) Australia, AI Denmark, AI Thailand, AI Belgia, AI Jerman, AI AS, AI New Zealand, AI Italia, McCally Honor Truth Duty; MCAY Actions des Cretiens Perancis, adalah sebagian dari lembaga-lembaga itu.

Ribuan surat itu umumnya menuntut pemerintah menggelar *full and independent inquire*, serta menjelaskan kepada publik keberadaan para korban. Tuntutan itu bisa dibagi dalam tiga kelompok.

Pertama, 3.493 surat mempertanyakan dan menuntut penanganan 13 demonstran dan aktivis politik di Jakarta dan sekitarnya yang hilang pada 1997 dan 1998, menjelang jatuhnya penguasa Orde Baru Soeharto. Mereka adalah Noval Alkatiri, Yani Afri, Dedy Hamdun, Mochammad Yusuf, Ismail, Sony, Petrus Bima Anugrah, Hendra Hambali, Herman Hendrawan, Yadi Mulidin, Abdun Nasir, Ucok Siahaan, dan Suyat.

Kedua, dengan tuntutan serupa, 109 pucuk surat menanyakan keberadaan 6 orang hilang selama berlangsungnya kekerasan di Aceh Utara. Mereka adalah Abubakar Ahmad, Alhamdi Mahmudin, Hamdani, Safriadi Hamid, Iskandar, dan Musnidar.

Ketiga, tuntutan lewat 607 surat yang menanyakan keberadaan lima orang hilang di Timtim. Mereka adalah Antonio dos Santos, Fransisco Lobato dos Pemeides, Joao Quintas, Dioniso de Jesus, dan Leonio Guteres.

Kendati mendapat tekanan yang begitu gencar, namun pemerintah dan para wakil rakyat terlihat tak begitu serius menangani permasalahan ini. **Munarman menilai, perubahan-perubahan pimpinan politik saat ini baru memenuhi kepentingan elite politik saja. "Akan tetapi, tidak terlihat usaha yang serius dari pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang telah terjadi,"** ujarnya.

Itu diperparah dengan belum maksimalnya fungsi yang dijalankan oleh Komnas HAM. Padahal, komisi ini memiliki otoritas dalam penegakan HAM. Tapi selama ini tidak mampu menggunakan otoritasnya untuk merespons kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pada kasus penghilangan paksa.

Ketua Komnas HAM Djoko Sugianto tak menerima pandangan itu. "Kita akan ungkap kembali masalah-masalah di masa lalu, termasuk kasus orang hilang," katanya. Hanya saja, Djoko tak berani menjanjikan pihaknya secara cepat menyelesaikan kasus itu. Apalagi, banyak kasus pelanggaran HAM yang harus ditangani.

Sedangkan para wakil rakyat seperti kebingunan untuk membantu mengungkap kasus-kasus penculikan itu. Seperti diungkapkan Taslam, banyak koleganya yang ingin membantu, tapi tak tahu caranya. "Mereka bertanya, bagaimana caranya? Harus mulai dari mana? Ini yang jadi masalah. Tapi saya tahu teman-teman itu cukup mendukung," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Memang cukup mengherankan pertanyaan itu. Sebab, banyak wakil rakyat yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, pakar hukum pidana, dan aktivis LSM. Setelah menerima kunjungan keluarga korban penculikan pun, para wakil rakyat yang menerima mereka menolak menolak didesak agar mendukung pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus penghilangan orang secara paksa. "Secara pribadi, saya mempunyai perhatian pada persoalan penghilangan orang secara paksa. Tetapi, pernyataan dari Komisi II harus dibicarakan lebih dahulu dalam rapat intern," kata Wakil Komisi II DPR Hamdan Zoelva.

Sedangkan terhadap pemerintahan sekarang, banyak keluarga korban yang menaruh harapan cukup tinggi. Sebab, mereka menilai Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi besar namanya, antara lain, juga karena adanya pelanggaran HAM yakni dalam kasus 27 Juli 1996. Apalagi, dalam kasus itu 16 orang yang hilang. "Semestinya secara pribadi Megawati mempunyai kedekatan psikologis dengan peristiwa tersebut. Dia kan perempuan...," ujar Ny. Sipon, istri korban penculikan, penyair Wiji Thukul.

● thonthowi/sadrah/patra suru

KORBAN PENGHILANGAN PAKSA DI INDONESIA PERIODE 1965-2001

WAKTU HILANG	JUMLAH	LOKASI PERISTIWA	ALASAN PENGHILANGAN
1965 - 1966	109	Pemalang, Jawa Tengah	Diduga anggota PKI
1965	10	Desa Sukorejo, Sidoarjo, Jatim	Permasalahan tanah
1966	11	Desa Pandaran, Blitar, Jatim	Permasalahan tanah
19 Juni 1983	1	Desa Sepawon, Kediri, Jatim	Permasalahan tanah
14 Juli 1984	6	Desa Harjokuncaran, Malang, Jatim	Permasalahan tanah
12 September 1984	15	Tanjung Priok, Jakarta	Aktivitas keagamaan
7 Februari 1989	218	Talangsari, Lampung	Aktivitas keagamaan
1989-1998	350	Aceh	Daerah Operasi Militer
27 Juli 1996	16	DKI Jakarta	Aktivitas politik
1997 - 1998	14	DKI Jakarta	Aktivitas politik
Mei 1998	5	DKI Jakarta	Kerusuhan Mei 1998
Mei 1999 - Feb. 2001	284	Aceh	Daerah Operasi Militer
Total	**1.039**		

SUMBER: KONTRAS


SIDANG
SIDANG
FORMASI TOTAL
KEMBALIKAN MEREKA
FAMRED

3AN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
i dan dokumentasi
Sumber MERDEKA | Tanggal 12-8-98

▲ Dua Saksi Diperiksa

Kedatangan "Tamu Istimewa"

rdeka
an Perwira (DKP) ke-
kan sidang singkat sela-
a jam, dari pukul 09.00
12.00 WIB. Sidang yang
Ketua DKP Kasad Jen-
u berlangsung non-stop
sa dua orang saksi per-
ssus.
menurut sumber *Merde-*
gan kelengkapan infor-
a yang sebelumnya sudah
a oleh Letjen Prabowo
Muchdi dan Kolonel
igus memberikan ketera-
memperkuat keterangan
sumber tersebut.
Rabu ini (12/8), DKP
iksa kembali dua orang
rapa orang saksi. Namun
edia menyebutkan siapa
"Kita lihat saja nanti."

a Besar Angkatan Darat
pat sidang DKP — itu
amu istimewa". Mereka adalah keluarga korban penculikan yang sampai saat ini belum jelas nasibnya. Empat keluarga dari 14 korban yang hilang itu datang untuk berdialog dengan DKP. Sayangnya, anggota DKP sudah selesai bersidang.

Mereka adalah keluarga dari Noval Alkatiri, Yani Afri, Ucok Munandar Siahaan dan Yadin Muhidin. Mereka didampingi bekas korban penculikan Raharjo Waluyo Jati, Feisol Reza, Aan Rusdianto dan anggota Kontras (Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Sirapraynna dan Victor Dacosta.

Rombongan yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan taksi itu tiba pukul 12.30. Mereka tidak bisa bertemu langsung dengan anggota DKP yang setengah jam sebelumnya telah selesai menjalankan sidang di Gedung Utama Mabesad. Seluruh anggota DKP sudah meninggalkan Mabesad, kecuali sekretaris DKP, Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad).

Keluarga korban itu datang sambil membawa 12 foto korban penculikan dan hanya berdiri di pintu gerbang depan. Namun oleh pihak keamanan mereka diminta masuk ke markas melalui pintu belakang. Kehadiran mereka cukup mendapat perhatian warga setempat dan kendaraan yang lalu lalang di Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Veteran.

Di ruang lapor tamu mereka ditemui oleh Komandan Detasemen Markas AD Kolonel Supardi yang menyatakan bahwa Kasad Jenderal Soebagyo HS tak bisa menemui, karena jadwalnya yang padat termasuk harus menemui tamu dari luar negeri.

Menurut Supardi apa-apa yang hendak disampaikan oleh pihak keluarga korban berkaitan tentang kasus penculikan lebih tepat jika disampaikan ke Puspom ABRI, karena semua data-data yang disampaikan ke Puspom akan sampai juga ke DKP dan di proses.

"Kami akan menyediakan kendaraan untuk mengantarkan saudara-saudara ke sana," kata Supardi.

"Kedatangan kami hanya minta kejelasan DKP bagaimana nasib anggota keluarga kami. Kami ingin dialog. Selama ini keluarga hanya disuruh menunggu, itu yang bikin *stres*," ujar B Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan (WR/PN)

...eluarga Korban Penculikan Gugat Panglima TNI

...mpas

...ang yang mewakili para korban pencu-...erjadi pada kurun waktu 1997-1998, dan ...ni belum diketahui keberadaannya, ...an gugatan perdata atas Panglima TNI ABRI) Jenderal Wiranto di Pengadilan ...) Jakarta Timur. Para penggugat itu ada-...u kandung Yani Afri), Nurhasanah (ibu ...din Muhidin), Riwan Nefo S (kakak kan-...an Hendrawan), dan Said Alkatiri (ayah ...oval Alkatiri).

...ngkapkan Koordi-...egal Komisi untuk ... dan Korban Tin-...an (Kontras) Ori ...da *Kompas* di Ja-...13/8) lalu. Pendaf-...erima dan didaftar ...r PN Jaktim ber-...HLG/1999/PN Jkt-...I 13 Agustus 1999. ...eluarga yang me-...ktivis yang masih ...mi keberadaannya ...dari dua tahun itu ... kuasa kepada ...uk bertindak atas ...a di depan peng-...ugat Pemerintah ...TNI. Mereka yang ...ani gugatan itu ...dalah Koordinator ...a Kontras Munir, ...idjojanto, Irianto ...l Rahman, Daniel ...mad Yani, Firman ...Erizal Chanlago.

...a diberitakan se-belumnya, paruh pertama 1997 telah terjadi penculikan terhadap 22 aktivis prodemokrasi. Mereka adalah Yani Afri, Sonny, M Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Desmond Junaidi Mahesa, Pius Lustrilanang, Suyat, Haryanto Taslam, Aan Rusdianto, Faisol Reza, Herman Hendrawan, Mugianto, Nezar Patria, Rahardjo Walujo Djati, Bimo Petrus Anugerah, Andi Arief, Abdun Nasir, Hendra Hambalie, Ucok M Siahaan dan Yadin Muhidin.

Dari ke-22 aktivis yang diculik, sembilan di antaranya telah kembali, dan sisanya sampai saat ini masih tidak diketahui keberadaannya. Mereka yang telah kembali itu adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Kasus penculikan aktivis yang membawa nama pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pertama kali terungkap ketika korban penculikan, Pius Lustrilanang, memberikan kesaksian terbuka di hadapan anggota Komnas HAM Albert Hasibuan dan Sumsuddin serta puluhan wartawan. Kesaksian Pius itu kemudian memancing korban-korban penculikan lainnya untuk memberikan kesaksian dengan cara mereka sendiri-sendiri.

VONIS TERHADAP PELAKU PENCULIKAN

Terdakwa	Vonis
1. Mayor (Inf) Bambang Kristiono	22 bulan/dipecat
2. Kapten (Inf) FS Multhazar	20 bulan/dipecat
3. Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo	20 bulan/dipecat
4. Kapten (Inf) Yulius Selvanus	20 bulan/dipecat
5. Kapten (Inf) Untung Budi	20 bulan/dipecat
6. Kapten (Inf) Dadang Hendra	16 bulan
7. Kapten (Inf) Djaka Budi Utama	16 bulan
8. Kapten (Inf) Fauka Noor Farid	12 bulan
9. Serka Sunarto	12 bulan
10. Serka Sigit Sugianto	12 bulan
11. Sertu Sukadi	12 bulan

Sumber: Pusat Informasi Kompas

Laksanakan putusan DKP

Dalam gugatannya, keluarga korban penculikan meminta pengadilan agar memerintahkan Panglima TNI memberikan penjelasan soal korban-korban penculikan yang masih belum kembali. Penjelasan ini harus dibuka oleh Panglima TNI kepada keluarga korban penculikan, media massa dan masyarakat luas pada umumnya.

Selain itu, keluarga korban penculikan juga meminta kepada majelis hakim agar menyatakan Panglima TNI sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. "Keluarga korban penculikan juga meminta agar Panglima TNI meminta maaf dan diwajibkan membayar ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp 2 milyar," papar Ori.

Dalam gugatan itu, keluarga korban penculikan meminta pengadilan mengeluarkan perintah kepada Panglima TNI untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Isi keputusan DKP juga tidak diketahui publik. Selain itu, keluarga korban penculikan juga ke pengadilan agar merekomendasikan peradilan militer bagi ketiga perwira menengah dan tinggi yang telah terbukti terlibat dalam aksi penculikan itu.

Peradilan nurani

Peradilan terhadap para pelaku penculikan sebenarnya telah dilangsungkan di Mahkamah Militer Jakarta. Namun, proses persidangan itu, sama sekali tak mengungkap adanya penyiksaan, penyekapan terhadap korban penculikan, apalagi mengungkap keberadaan korban yang belum diketahui keberadaannya.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto hanya menerima saja pengakuan Komandan Tim Mawar Mayor (Inf) Bambang Kristiono bahwa penculikan dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Penculikan itu juga dianggapnya sebagai panggilan nurani setelah melihat adanya aktivis radikal. Persidangan pun tidak berupaya mencari tahu keterangan lebih lanjut dari atasan-atasan terdakwa yang sempat terungkap di persidangan.

Kendati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) meminta agar persidangan itu ditangguhkan—karena tidak menyertakan tersangka yang sebenarnya—persidangan tetap dilangsungkan. Dan vonis pun dijatuhkan. Mayor Bambang Kristiono dihukum 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI. Mereka menyatakan banding atas putusan tersebut. **(bw/bdm)**

Cara Menemukan Orang Hilang

TAK mudah untuk mengungkap kasus penculikan. Ketakutan masih banyak menyelimuti keluarga korban. Soal ketakutan ini, Ketua Dewan Pengurus Kontras Munir pernah didatangi seorang ibu yang melaporkan anaknya yang hilang. Munir sempat bertanya mengapa hal itu tak dilaporkan ke polisi. "Kalau saya lapor ke polisi, saya takut ikut hilang juga," katanya menirukan ucapan ibu tersebut.

Tidak heran jika kemudian Kontras banyak melakukan pendampingan terhadap keluarga korban penculikan, ketika mereka berjuang memperoleh kepastian keberadaan keluarganya. Tak terkecuali saat memperingati Hari Orang Hilang Sedunia, 30 Agustus silam. Kontras mendampingi sejumlah keluarga korban penculikan mendatangi gedung DPR/MPR.

Mereka mendesak DPR segera membentuk Komisi Penyelidik untuk Orang Hilang. Kontras juga meminta DPR untuk mengundang Komisi Orang Hilang PBB, agar memantau penanganan masalah ini. Terhadap desakan itu, Wakil Ketua Komisi II Hamdan Zoelva tak berani memastikan hal itu bias dibentuk dalam waktu cepat. "Apakah nanti akan dibentuk Komisi Nasional Khusus, mendesak pemerintah membentuk tim *ad hoc*, atau DPR mengeluarkan pernyataan resmi soal itu, tergantung pada rapar intern kami," katanya.

Tanggapan itu wajar saja. Sebab, banyak anggota parlemen yang mengaku tak tahu cara menangani kasus penculikan itu. "Mereka bertanya, bagaimana caranya? Harus mulai dari mana?" kata mantan korban penculikan Haryanto Taslam.

Sebenarnya, cara itu bisa diinisiasi dari kesaksian para korban penculikan yang selamat. Dari merekalah akan ditelusur siapa pelaku dan otak dari penghilangan orang itu.

Menurut Munir, paling tidak ada dua cara untuk mengatasi masalah orang hilang ini. Itu yakni melalui pengadilan atau dengan cara rekonsiliasi. Tetapi, wakil ketua YLBHI ini melihat ada kelemahan jika cara pengadilan yang dipilih. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak bisa menjangkaunya. "KUHP kita tidak mengenal istilah orang hilang," ujarnya.

Apalagi, kata Munir, kasus penghilangan orang itu terjadi secara sistematik, terencana, dan meluas, sepanjang Orde Baru dengan jumlah korban yang sangat banyak. Penyelesaian lewat jalur pengadilan dinilainya tak realistis.

Yang lebih realistis adalah rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komisi ini akan mengupayakan rekonsiliasi antara para pelaku dan korban. Tapi, komisi ini harus melihat dulu, apakah para pelaku mau mengakui kesalahan, serta menjelaskan ihwal tindakan yang dilakukannya.

Di sisi lain, banyak yang yang memandang pengadilan dapat

menciptakan masyarakat yang toleran dan adil. Pertama, pengadilan menegakkan hukum yang menjadi syarat bagi pembentukan masyarakat yang pluralis, toleran, dan demokratis.

Kedua, pengadilan dapat menghentikan balas dendam dari para korban pada para pelaku. Pasalnya, pengadilan lebih menekankan tanggung jawab individu ketimbang kelompok dalam pelanggaran HAM.

Ketiga, pengadilan membuka [illegible] untuk

menceritakan pengalaman mereka langsung di depan para pelaku. Ini bisa menjadi upaya awal proses penyembuhan trauma.

Keempat, pengadilan akan dapat mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Dari situ masyarakat bisa belajar dan memahami bagaimana tatanan masyarakat sipil hancur. Masyarakat selanjutnya akan berupaya mencegah peristiwa itu tidak terulang kembali. ***